

**BUNGA RAMPAI
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN**

**LPMP PROVINSI NTB
DALAM BERITA
2020**



**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat**



**BUNGA RAMPAI
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN**

**LPMP PROVINSI NTB
DALAM BERITA
2020**



**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)
Provinsi Nusa Tenggara Barat**



SAMBUTAN

Kepala LPMP Provinsi NTB

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita diberi kesempatan untuk terus berkarya dan berkreasi untuk kemajuan pendidikan di Republik Indonesia yang kita cintai ini khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Buku "**Bunga Rampai Penjaminan Mutu Pendidikan**" dapat tampil baik dan bermakna sehingga dapat menjadi salah satu media informasi dan komunikasi yang akan menyampaikan Kegiatan Penjaminan Mutu Pendidikan yang telah dilaksanakan. Disamping itu Buku ini sebagai media yang merekam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh LPMP Provinsi NTB.

Semoga Buku "**Bunga Rampai Penjaminan Mutu Pendidikan**" dapat hadir dan memenuhi kebutuhan informasi pembaca, khususnya informasi dalam bidang pendidikan serta dapat mensosialisasikan Penjaminan Mutu Pendidikan yang telah dilaksanakan oleh LPMP Provinsi NTB.

Kami berharap kehadiran Buku "**Bunga Rampai Penjaminan Mutu Pendidikan**" dapat menjadi Rahmatan Lil Alamin bagi pembacanya.

Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Mataram, Januari 2021

Kepala LPMP Provinsi NTB

Mohamad Mustari, Ph.D.

NIP 196404111986031003

KATA PENGANTAR

Pertama tama kami panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa karena atas karuniaNya, buku "**Bunga Rampai Penjaminan Mutu Pendidikan**" LPMP Provinsi NTB tahun 2020 dapat diselesaikan tepat waktu. Buku "**Bunga Rampai Penjaminan Mutu Pendidikan**" ini merupakan kumpulan Berita-Berita Kegiatan Penjaminan Mutu Pendidikan yang dilaksanakan LPMP Provinsi NTB tahun 2020. Buku "**Bunga Rampai Penjaminan Mutu**" ini dibuat sebagai salah satu media untuk mensosialisasikan Penjaminan Mutu Pendidikan yang telah dilaksanakan oleh LPMP Provinsi NTB dalam kerangka Pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK), sehingga *Stakeholder* tahu akan Penjaminan Mutu Pendidikan.

Buku "**Bunga Rampai Penjaminan Mutu Pendidikan**" ini terdiri dari 71 (tujuh puluh satu) judul dari beberapa aktifitas yang dilakukan selama tahun 2020. Berita berita yang ditulis merupakan Implementasi dari Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, mengamanatkan seluruh satuan pendidikan wajib melaksanakan Penjaminan Mutu Pendidikan. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Ekternal (SPME). SPMI dilaksanakan oleh satuan Pendidikan dan SPME dilaksanakan diluar satuan pendidikan misalnya BNSP, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, dan BAN S/M. Berita berita yang dirangkum dalam sebuah buku ini akan merupakan sebagai bahan kajian lebih lanjut terkait kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Tidak Ada gading yang tidak retak, begitu juga dengan Buku yang berjudul "**Bunga Rampai Penjaminan Mutu Pendidikan**" ini masih kurang sempurna, untuk itu saran dari Para Pembaca sangat diharapkan sehingga buku ini akan lebih bermakna. Semoga tulisan ini bermanfaat dalam rangka Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mataram, Januari 2021

Penulis

**Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd.
NIP 196408241993031001**



TIM PEMBUATAN BUKU

“BUNGA RAMPAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN”

- Penanggung Jawab
Mohamad Mustari, Ph.D.
- Penulis
Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd.
- Penyunting/Editor
Billy Febiar, S.Kom.
- Desain Grafis
Kundiarto, S.Si.
Andan Januar Jaya, ST.
- Sekretariat/Distributor
St. Agung Budiwidodo, A.Md.
Sarijan, S.Pd.

DAFTAR ISI

- **SAMBUTAN** Kepala LPMP Provinsi NTB
- **KATA PENGANTAR**
- **TIM PEMBUATAN BUKU “BUNGA RAMPAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN”**

DAFTAR ISI		Halaman
1	Kemitraan LPMP Provinsi NTB dengan Dinas Dikbud Provinsi NTB	1
2	Internalisasi ZI-WBK Ikatan Keluarga Hindu (IKH) LPMP Provinsi NTB	2
3	LPMP Provinsi NTB Selangkah Lebih Maju dalam Mensukseskan Gerakan Zero Waste	4
4	Pengawasan ZI-WBK LPMP Provinsi NTB Tahun 2020	6
5	Pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI-WBK pada LPMP Provinsi NTB	8
6	LPMP Provinsi NTB Optimis Meraih ZI-WBK Tahun 2020	10
7	Kemitraan Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa dengan LPMP Provinsi NTB	12
8	SPIP Penentu Wajah ZI-WBK LPMP Provinsi NTB	14
9	Sosialisasi Manajemen Resiko dalam Pembangunan ZI-WBK	16
10	Bersama ULT, LPMP Provinsi NTB Menuju WBK	18
11	Evaluasi Program 2019 dan Penyusunan Program Pembangunan ZI-WBK 2020	20
12	Jumat Bersih Percepat Derap Langkah LPMP Provinsi NTB Menuju WBK	22
13	Melalui MCU Tingkatkan Pelayanan Publik Bermutu	24
14	Perencanaan Bermutu Percepat Menuju WBK	26
15	LPMP Provinsi NTB Mengawal 4746 Sekolah dalam Supervisi	28
16	Melayani Sepenuh Hati dalam WBK Suatu Keharusan	30
17	Peran Satgas Pengendalian Gratifikasi dalam Membangun ZI-WBK	32
18	Melalui ULT Keliling LPMP Provinsi NTB Laksanakan Kampanye Anti Korupsi	34
19	LPMP Provinsi NTB Akhirnya Memiliki Buku Saku Aturan Perilaku Pegawai	35
20	LPMP Provinsi NTB Laksanakan Pencanangan Pembangunan ZI-WBK	37
21	Menuju WBK LPMP Provinsi NTB Selenggarakan IHT	39
22	Peran Manajemen Media dalam ZI-WBK	41
23	Kampanye Anti Korupsi Percepat Perubahan <i>Mind Set</i>	43
24	Penutupan <i>In House Training (IHT)</i> LPMP Provinsi NTB Berlangsung Meriah	46
25	LPMP Provinsi NTB Lakukan Pendampingan Pada 200 Sekolah Model	48
26	Internalisasi “Maklumat Keterbukaan Informasi Publik”	51
27	“Indahnya Berbagi Untuk Sesama”	54
28	LPMP Provinsi NTB Gelar Rapat Koordinasi Penerimaan Peserta Didik Baru	56

DAFTAR ISI		Halaman
29	LPMP Provinsi NTB Selangkah Lebih Maju Dalam PPDB 2020	59
30	Koordinasi dan Konsolidasi Suatu Keharusan dalam PMP	61
31	Kunjungan LPMP Kalimantan Utara di LPMP Provinsi NTB	63
32	Merdeka Belajar dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik	65
33	Pengaruh Bekerja Dari Rumah terhadap Kinerja	68
34	Kesiapsiagaan Hadapi Covid-19	71
35	LPMP Provinsi NTB Selenggarakan Koordinasi dan Konsolidasi PMP DIKDASMEN	73
36	LPMP Provinsi NTB Lakukan Mitigasi Bencana Covid - 19	75
37	LPMP Provinsi NTB Laksanakan Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Pusat di Daerah	78
38	Pentingnya Pelaporan Gratifikasi	80
39	Nyepi, <i>Social Distancing</i> , dan Covid-19	84
40	Pengaruh Covid-19 Terhadap Pembangunan Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi	86
41	LPMP Provinsi NTB Peduli #Lawan Covid-19	88
42	Mengejar ZI-WBK Dengan Inovasi	91
43	Tunas Integritas Sebagai Katalisator Pembangunan ZI-WBK	93
44	Belajar dari Covid-19	96
45	LPMP Provinsi NTB Semarakkan Hardiknas Melalui Peningkatan Layanan	99
46	LPMP Provinsi NTB Selenggarakan Evaluasi Persiapan Pmprb Tahun 2020 Ditengah Pandemi Covid-19	102
47	LPMP Provinsi NTB Bersama Menjamin Mutu Mewujudkan NTB Gemilang	104
48	Sinergitas LPMP Provinsi NTB Dengan Dewan Pendidikan Propinsi NTB	107
49	Bincang Pendidikan Solusi Tepat Atasi Pendidikan Di Kabupaten Bima Pada Masa Pandemi Covid-19	109
50	Pengelolaan Pembelajaran Pada Masa BDR, SMK Bisa-Hebat!	113
51	ULT LPMP Provinsi NTB Menduduki Peringkat Pertama Dalam Kualitas Pelayanan Publik	115
52	Halal Bihalal Kemenangan Idul Fitri Ditengah Covid-19	118
53	LPMP Provinsi NTB Selenggarakan Penjaminan Mutu Pendidikan Melalui Daring	120
54	Pancasila, Pendidikan Karakter, dan Tri Kaya Parisudha	122
55	Itjen Kemdikbud Melaksanakan Audit Tujuan Tertentu dalam Jaringan	125
56	Kemendikbud Mengusulkan LPMP Provinsi NTB Sebagai Unit Kerja Berpredikat ZI-WBK	127
57	Genderang Mulai Ditabuh Dengan Kegiatan Penyusunan Program Pada Masa Pandemi Covid-19	129
58	Sosialisasi Dan Internalisasi Pembangunan ZI-WBK dengan Pihak Ekternal Secara Virtual	131

DAFTAR ISI		Halaman
59	SINOBEL Mendekatkan LPMP Provinsi NTB dengan Masyarakat	133
60	Sistem Manajemen Kinerja LPMP Provinsi NTB Andal	136
61	Peningkatan Kualitas Pelayanan Melalui Si “KoBo”	138
62	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan ZI WBK LPMP Provinsi NTB	140
63	Akuntabilitas Kinerja LPMP Provinsi NTB Sangat Baik dan Memiliki Sistem Manajemen Kinerja Yang Andal	142
64	Peran Petugas Supervisi dalam Penjaminan Mutu Diklat Cawas	144
65	Sosialisasi Hasil Capaian Kinerja Pembangunan ZI WBK	146
66	Desk Evaluasi Zona Integritas LPMP Provinsi NTB	149
67	Melalui Inovasi Tingkatkan Kualitas Pelayanan	152
68	Internalisasi Penataan Tatalaksana Dalam Pembangunan ZI-WBK	154
69	Internalisasi Reformasi Birokrasi Nilai Sakip LPMP Provinsi NTB Dari B Naik Jadi A	156
70	Tutup 2020 LPMP Provinsi NTB Menerima Penghargaan ZI WBK	158
71	LPMP Provinsi NTB Menuju Unit Kerja Pelayanan Berpredikat WBBM	161
72	BEKERJA ADALAH IBADAH (Refleksi Spiritual dan Semangat Meraih WBBM)	163
73	Testimoni-Testimoni	166

KEMITRAAN LPMP NTB DENGAN DINAS DIKBUD PROVINSI NTB



Salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di daerah adalah Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) yang semakin eksis membangun Pendidikan di Propinsi Nusa Tenggara Barat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2017 tentang Organisasi dan tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, Tugas LPMP adalah melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dipropinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam melaksanakan tugasnya LPMP menyelenggarakan fungsi:

1. Pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah
2. Pengembangan dan pengelolaan system informasi mutu pendidikan dasar dan menengah
3. Supervisi satuan pendidikan dasar dan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan
4. Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan
5. Pelaksanaan kerjasama dibidang penjaminan mutu pendidikan
6. Pelaksanaan urusan administrasi LPMP

Dengan dikeluarkannya Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24907/B.B13/HK/2018 tentang Petunjuk Teknis Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pengawas Sekolah dan Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kompetensi Pengawas Sekolah, Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial pada satuan pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah menyebutkan Kompetensi Pengawas Sekolah adalah seperangkat pengetahuan, sikap dan keterampilan yang melekat pada dimensi kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan, dan kompetensi sosial.

INTERNALISASI ZI-WBK IKATAN KELUARGA HINDU (IKH) LPMP NTB



Setiap bulan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) menggelar kegiatan Kerohanian/Imtaq dalam rangka Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Hal ini juga sejalan dengan Program LPMP NTB dalam menginternalisasikan Pembangunan **Zone Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK)**. Warga LPMP NTB yang beragama Hindu yang telah membentuk Ikatan Keluarga Hindu (IKH) LPMP NTB juga menggelar kegiatan kerohanian/imtaq. Kegiatan yang diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 mengambil Tema “ Dengan Makna Hari Raya Siwalatri Kita Tingkatkan Kualitas Hidup Umat Hindu”. Tema ini diambil dalam rangka menyongsong Hari Raya Siwalatri yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2020. Dengan Hari Raya Siwalatri kita tingkatkan Kualitas Umat Hindu dalam kerangka Implementasi Program Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK)

Dharma Wacana Siraman Rohani/Imtaq Ikatan Keluarga Hindu (IKH) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat disampaikan oleh Narasumber Drs. Ketut Lestra. Sesuai dengan Tema yang disampaikan yaitu “Dengan Makna Hari Raya Siwalatri Kita Tingkatkan Kualitas Hidup Umat Hindu”.

Intisari dari siraman kerohanian ini adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas hidup umat Hindu melalui perubahan diri sendiri sebelum mengubah orang lain . Mengubah orang lain sangatlah mudah, tetapi mengubah diri sendiri sangat sulit. Sebenarnya kita semua adalah Agen perubahan (**Agent of Change**). Mulai kapan kita mengubah diri kita? Tentu mulai dari sekarang, tidak harus menunggu hari esok, ataupun lusa. Makin cepat semakin bagus. Dan perubahan itu mulai dari hal hal yang kecil. Perubahan yang besar merupakan akumulasi dari perubahan perubahan yang kecil.

Siwaratri artinya malam Siwa. Jika diuraikan terdiri dari 2 kata, yaitu Siwa dan Ratri. Siwa dalam bahasa Sansekerta berarti baik hati, suka memaafkan, memberi harapan dan membahagiakan dan juga Siwa dapat diartikan sebagai sebuah gelar atau nama kehormatan untuk salah satu manifestasi Tuhan yang diberi nama atau gelar kehormatan Dewa Siwa, dalam fungsi beliau sebagai pemerelina untuk mencapai kesucian atau kesadaran diri yang memberikan harapan untuk kebahagiaan.

Sedangkan Ratri artinya malam, yang dapat diartikan juga sebagai kegelapan. Jadi Siwaratri dapat diartikan sebagai malam pemerilina atau pelebur kegelapan dalam diri dan hati untuk menuju jalan yang lebih terang.

Dalam memaknai Hari Raya Siwaratri tidak sedikit yang beranggapan bahwa Siwaratri bertujuan untuk melebur dosa. Benarkah demikian? Lantas bagaimana dengan adanya Hukum Karma Phala? Jika dosa bisa dilebur hanya dalam satu malam (Siwaratri). Menurut pengamat agama Gusti Ketut Widana mengatakan, secara tatwa sesungguhnya Siwaratri merupakan malam perenungan dosa, (bukan peleburan dosa), dengan tujuan tercapainya kesadaran diri. "Secara tatwa, sesungguhnya Siwaratri itu simbolisasi dan aktualisasi diri dalam melakukan pendakian spiritual guna tercapainya 'penyatuan' Siwa, yaitu bersatunya atman dengan paramaatman atau Tuhan penguasa jagat raya itu sendiri.

Sebagai malam perenungan, kita mestinya melakukan evaluasi atau introspeksi diri atas perbuatan-perbuatan selama ini. Pada malam pemujaan Siwa ini kita memohon diberi tuntunan agar dapat keluar dari perbuatan dosa. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan Siwalatri adalah : **Monabrata** atau berdiam diri dan tak berbicara. Pelaksanaannya dilangsungkan di pagi hari dan dilakukan selama 12 jam tepatnya dari jam 06.00 – 18.00.

Mejagra atau tidak tidur selama semalaman. Pelaksanaannya berlangsung dari pagi sampai pagi hari di keesokan harinya yang dilakukan selama 36 jam dari jam 06.00 – 18.00 di keesokan harinya.

Upawasa atau tidak makan dan tidak minum. Puasa ini dilakukan selama 24 jam dari jam 06.00 – 06.00. Apabila sudah 12 jam maka diperbolehkan untuk makan dan minum dengan syarat bahwa nasi yang dimakan ialah nasi putih dengan garam dan minum air putih (air tawar tanpa gula).

Dalam Agama Hindu selalu ada tingkatan Nista, Madya dan Utama yang bisa dipilih sesuai kemampuan, begitu pula dalam melaksanakan Siwaratri.

Tingkat Utama, melaksanakan : **Monabrata ,Mejagra, Upawasa**

Tingkat Madya (sedang), melaksanakan : **Mejagra, Upawasa**

Tingkat Nista (rendah), melaksanakan : **Mejagra**

Dalam menjalankan kegiatan Siwaratri diakhiri dengan melakukan persembahyangan dan memohon kepada Sang Hyang Siwa/Tuhan Yang Maha Esa supaya diberikan berkah dan ampunan, dan juga dikembalikan menjadi manusia yang suci dan paripurna serta memohon ditunjukkan jalan terang agar terhindar dari perbuatan dosa.

Jadi dapat disimpulkan bawah Hari Raya Siwaratri bukanlah hari penebusan dosa melainkan perenungan dosa yang selama ini telah kita perbuat. Hukum Karmaphala tetap akan berlaku, akan tetapi diyakini dengan menjalankan Brata Siwaratri niscaya kedepannya kita akan mampu mengendalikan diri sehingga dapat terhindar dari perbuatan dosa.

Pada kesempatan itu Ketua Ikatan Keluarga Hindu (IKH) LPMP NTB juga sebagai Kepala Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd. mengucapkan : Selamat Hari Raya Siwalatri “ semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa memberikan keselamatan dan kesuksesan buat kita semua. Dengan Hari Raya Siwalatri Ikatan Keluarga Hindu (IKH) LPMP NTB menginternalisasikan Program Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) didalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengetahui kekurangan-kekurangan yang dimiliki kita akan bisa memperbaiki diri sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dari hari kehari akan semakin paripurna. Introspeksi diri/perenungan dosa sangat penting dilakukan seiring dengan pelaksanaan Pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Oleh : IMMA 2020

LPMP NTB SELANGKAH LEBIH MAJU DALAM MENSUKSESKAN GERAKAN ZERO WASTE



Dalam rangka pelaksanaan komitmen Pemerintah Indonesia untuk memerangi sampah plastik, dengan ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Edaran untuk mensukseskan dan memerangi sampah. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2019 tertanggal 26 November 2019 Tentang Larangan Penggunaan Kemasan Air Minum berbahan plastik sekali pakai dan/ kantong plastik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan Gerakan Zero Waste dapat menghasilkan insan yang peduli lingkungan. Lingkungan bebas sampah plastic merupakan dambaan seluruh masyarakat dunia tanpa terkecuali masyarakat Indonesia. Memerangi sampah plastik adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Indonesia masuk sebagai negara dengan pembuangan sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Demikian rilis Kepala Pusat Penelitian Kimia LIPI, Agus Haryono beberapa waktu lalu.

Dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut ada beberapa hal yang disampaikan antara lain :

1. Tidak menggunakan bahan-bahan yang dapat menimbulkan sampah, seperti: piring, gelas, kemasan air minum berbahan plastik sekali pakai, dan/ atau kantong plastik di lingkungan kerja masing-masing,
2. Di dalam pelaksanaan rapat, sosialisasi, pelatihan, dan kegiatan sejenis di kantor tidak menggunakan pembungkus makanan / kemasan makanan plastik.
3. Menyediakan dispenser dan/ atau teko air minum dan gelas minum di setiap ruang kerja/ruang pertemuany ruang rapat/aula.
4. Meningkatkan penggunaan peralatan makan dan minum yang terbuat dari kaca, melamin, keramik, dan rotan antara lain dengan membiasakan penggunaan botol minum/ *tumbler* sebagai alat minum dan membawa alat makan pribadi.
5. Meningkatkan penggunaan kantong yang dapat digunakan kembali (*reusable bag*) dalam aktivitas jual beli di area kantin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

6. Mengurangi penggunaan spanduk, *backdrop*, baliho, dan media iklan lainnya yang berbahan plastik pada kegiatan rapat, sosialisasi, pelatihan, dan kegiatan sejenis lainnya.

7. Pimpinan unit kerja melakukan sosialisasi terhadap larangan penggunaan kemasan air minum berbahan plastik sekali pakai dan/atau kantong plastik di unit kerja masing-masing.

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 tahun 2019, menurut Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd. Kepala Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi mengatakan bahwa LPMP NTB selangkah lebih maju. Hal ini dapat dilihat, saat apel pagi pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 Pihak Manajemen telah secara simbolis membagikan Botol tempat air minum dan Lepekan/piring untuk tempat snack kepada karyawan dan karyawan. Hal ini dilakukan dalam kerangka mengurangi penggunaan plastik di masyarakat secara umum ataupun di instansi pemerintah secara khusus. Sehingga gerakan Zero Waste secara bertahap akan menunjukkan hasil yang signifikan. Kita semua diharapkan peduli dengan lingkungan.

Oleh : IMMA 2020



Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, harus mensukseskan Program Pemerintah terkait dengan pelaksanaan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK). **Zona Integritas (ZI)** adalah Predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada intinya program ini bertujuan untuk memberantas KKN yang dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Begitu pula terkait dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang tidak diberikan dengan pelayanan prima, sehingga masyarakat selalu mengeluh atas pelayanan yang diberikan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk itulah LPMP NTB perlu melakukan pengawalan Program ZI-WBK sehingga masyarakat merasa dilayani dengan baik.

Pengawalan yang dilakukan LPMP NTB tahun 2020 dalam program ZI-WBK perlu dicarikan Strategi-Strategi, sehingga pelaksanaan program Reformasi Birokrasi cepat membuahkan hasil. Strategi-strategi yang dilakukan dalam pencapaian ZI-WBK ada 8 (delapan) Strategi yaitu :

1. Perencanaan Kinerja
 - Renstra yang sinkron
 - Tersedianya Peta Bisnis Proses
 - Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan yang Sinkron
 - Pemantauan kinerja yang berkelanjutan
2. Penampilan Fisik Kantor dan Kebersihan Optimal :
 - Halaman Kantor/Parkir
 - Looby
 - Ruang Penerimaan tamu
 - Ruang Kerja Pimpinan
 - Ruang Kerja Staff
 - ULT
 - Ruang Rapat
 - Ruang Ibadah
 - Ruang Kantin
 - Ruang Kamar Kecil
 - Ruang Lainnya

3. Penampilan Fisik Pegawai
 - Pakaian dan pemakaian atribut lainnya (Name tag, PIN Zi-WBK)
 - Kegiatan Senam Pagi/Olah Raga
 - Kegiatan Kerohanian
 - Pemeriksaan Kesehatan Rutin
4. Keramah-tamahan Pegawai
 - Komunikasi yang Efektif
 - Kecepatan Pelayanan
 - Transparansi/keterbukaan
 - Tidak Diskriminatif
5. Presentasi yang Meyakinkan
 - Persiapan
 - Sistematika
 - Penyampaian
6. Keterampilan Personal dan Etika
 - Gesture
 - Keterandalan
 - Kepedulian
 - Kesantunan
 - Berakarakter Mulia
7. Penyajian Informasi
 - Dokumen Inti : Profil Lembaga, Struktur Organisasi, Uraian Tugas, TUSI LPMP, Resntra, LAKIP, Laporan Kegiatan, Data SDM, Data Sarpras, Proker Tahunan Lembaga, Visi-Misi, LAKIP, Daya Serap, Peta Bisnis Proses
 - Dokumen Pendukung : 6 (enam) jenis Pengungkit, Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, Peningkatan Mutu Pelayanan Publik.
8. Kampanye Anti Korupsi
 - Banner
 - Spanduk
 - Poster
 - Infografis
 - Bulletin
 - Majalah
 - Web/Media Elektronik
 - Brosur
 - Stiker

Menurut Ketua Tim Zi-WBK Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd. keberhasilan dalam pencapaian Zi-WBK pada LPMP NTB sangat diperlukan Strategi-Strategi sehingga Pencapaian Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi akan cepat terwujud. Perlu juga adanya dukungan dari seluruh komponen yang ada pada lembaga, terutama Komitmen Pimpinan, Partisipasi Aktif seluruh pegawai, Lingkungan yang Kondusif, serta Dukungan Sumber Daya Lainnya, Kita tidak boleh Alergi terhadap kritikan, karena kritikan itu akan membangun budaya mutu dan pada akhirnya akan berimbas pada Pelayanan Publik yang diberikan sesuai dengan harapan masyarakat yaitu "Pelayanan Prima". Untuk itulah maka perbaikan harus dilakukan secara terus menerus, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang dan mulai dari hal-hal yang kecil. Sesuai dengan Motto kita : " Bersama Kita Bisa, Melayani Sepenuh Hati ", tutup Made.

Oleh : IMMA 2020

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZI-WBK PADA LPMP NTB



Sebagai tindak lanjut dari Pencanangan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai Zone Integritas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 09 Agustus 2017 di Savana Hotel Convention, Malang Jawa Timur, dipandang perlu membentuk Tim Pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Hal ini senada dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) Nomor : 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zone Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK), mengamanatkan bahwa seluruh Institusi harus melaksanakan Reformasi Birokrasi sehingga Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) tidak terjadi lagi di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. KKN harus diberantas sehingga pada akhirnya pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan secara optimal. Untuk mendukung pelaksanaan Pembangunan ZI-WBK perlu dibentuk suatu Tim Pembangunan ZI-WBK pada LPMP NTB.

Pembentukan Tim Pembangunan ZI-WBK dilingkungan LPMP NTB dilakukan melalui suatu mekanisme, sehingga Tim yang terbentuk akan bekerja secara Profesional, Mandiri dan Santun. Anggota Tim yang dipilih harus memenuhi beberapa kriteria antara lain sebagai berikut :

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan LPMP NTB
2. Masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun
3. Kualifikasi Pendidikan minimal S1
4. Sehat Jasmani dan Rohani
5. Memiliki Kompetensi Sesuai dengan Bidang Tugas dalam Tim

Mekanisme Penunjukan Tim Pembangunan ZI-WBK dilingkungan LPMP NTB

1. Kasubbag Umum membuat kriteria Tim ZI-WBK
2. Kasubbag Umum mengidentifikasi jumlah dan Kualifikasi Kebutuhan TIM Pembangunan ZI-WBK
3. Kasubbag umum mengusulkan Tim sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan kepada Kepala LPMP NTB
4. Kepala LPMP NTB memeriksa dan mendisposisikan Usulan TIM kepada Kasubbag Umum untuk membuat Draf SK Pembentukan Tim Pembangunan ZI-WBK sesuai dengan usulan yang

telah disetujui. Apabila tidak disetujui Kasubbag Umum akan membuat usulan baru kepada Kepala LPMP NTB

5. Kasubbag Umum membuat Draf SK Tim Kerja untuk mendapat persetujuan dan tanda tangan Kepala LPMP NTB
6. Kepala LPMP NTB menetapkan dan menandatangani dalam bentuk Surat Keputusan serta menyerahkan kepada Kasubbag Umum untuk diteruskan kepada Anggota Tim Kerja yang telah ditetapkan
7. Kasubbag Umum menyerahkan SK Tim Pembangunan ZI-WBK kepada Pengadministrasi Umum untuk disimpan sebagai arsip.

Tugas Tim Pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan Program Kerja ZI-WBK
2. Merancang jadwal pelaksanaan kerja Tim ZI-WBK
3. Membangun Koordinasi, Evaluasi, dan Pengawasan yang efektif pada masing-masing magian untuk mempercepat Pembangunan ZI-WBK dilingkungan LPMP NTB
4. Memberikan dukungan pada setiap bagian dilingkungan LPMP NTB untuk menuju WBK
5. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap keseluruhan aktifitas
6. Memngadministrasikan Hasil Kerja TIM
7. Melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepda Kepala LPMP NTB

Tim Kerja Pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) dilingkungan LPMP NTB tahun 2020 berjumlah 34 (tiga puluh empat) orang, masing-masing anggota Tim terdiri dari Penanggung Jawab (Kepala LPMP NTB), Ketua (Kasi PMS), Koordinator Manajemen Perubahan (Kasubbag Umum), Koordinator Penataan Tatalaksana, Koordinator Penataan Sistem Manajemen SDM, Koordinator Penguatan Akuntabilitas, Koordinator Penguatan Pengawasan (Kasi FPMP), Koordinator Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Kasi SI), dan Koordinator Kesekretariatan dan masing-masing dilengkapi dengan anggota-anggota.

Pada saat penyerahan SK Tim Kerja Pembangunan ZI-WBK Kepala LPMP NTB Mohamad Mustari, Ph.D. menyampaikan ucapan terima kasih atas terbentuknya Tim ini dan selamat melaksanakan tugas semoga Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi pada LPMP NTB dapat segera terwujud sehingga masyarakat yang dilayani merasa puas atas Pelayanan Prima yang diberikan oleh Pegawai LPMP NTB. Mari kita wujudkan ZI-WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Reformasi Birokrasi yang telah digulirkan oleh Pemerintah sangat diapresiasi oleh seluruh masyarakat sehingga pelayanan yang diberikan tidak berbelit-belit, efisien, efektif, transparan, lebih mudah, dan akuntabel

Salah satu anggota Tim Pembangunan ZI-WBK Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd. yang ditunjuk sebagai Ketua mengucapkan terima kasih kepada semua komponen LPMP NTB yang telah mempercayai untuk mengawal ZI-WBK. Dengan kerendahan hati, beliau menyampaikan kami dan Tim tidak akan bisa bekerja secara optimal tanpa adanya dukungan dari Pimpinan lembaga dan komitmen bersama untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsekuen dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Kami dan seluruh Tim akan bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kita berdoa dan berharap semoga LPMP NTB tahun 2020 mendapat Piagam Penghargaan sebagai Instansi yang berpredikat “ WBK “.

Oleh : IMMA 2020

LPMP NTB OPTIMIS MERAHAI ZI-WBK TAHUN 2020



Reformasi birokrasi adalah gerakan perubahan organisasi yang dimotori para agen perubahan menuju terciptanya tata kelola yang baik. Saat ini tujuan reformasi birokrasi adalah mewujudkan sebanyak mungkin satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Saat ini Instansi di Kementerian Pendidikan telah banyak yang memperoleh Penghargaan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) antara lain Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Otomotif dan Elektronika Malang, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah, dan Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Surabaya. Kedepan arah pengembangan program Reformasi Birokrasi (RB) adalah menambah jumlah satuan-satuan kerja WBK dan mengembangkan satuan kerja WBK yang sudah ada saat ini menjadi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Kegiatan Sosialisasi Strategi Percepatan Implementasi Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) dilaksanakan selama satu hari tanggal 23 Januari 2020 bertempat di Ruang Media LPMP NTB. Peserta Sosialisasi ini diikuti oleh seluruh Tim Pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat tahun 2020, berjumlah 34 (tiga puluh empat) orang. Penunjukan dan Pembentukan Tim Pembangunan ZI-WBK dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dengan mekanisme/prosedur yang telah ditetapkan. Dari kriteria dan mekanisme itu terpilih 34 (tiga puluh empat) orang termasuk Penanggung jawab dan Ketua TIM. Masing masing Area Perubahan dipilih Koordinator yang akan mengawal kegiatan dimasing-masing Area Perubahan.

Adapun Tim Pembangunan Zone Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi LPMP NTB Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab Mohamad Mustari, Ph.D. (Kepala LPMP),
2. Ketua Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd. (Kasi PMS),
3. Koordinator Manajemen Perubahan Dra. Hj. Sri Sukriyani (Kasubbag Umum),
4. Koordinator Penguatan Pengawasan Dra. Hj Sudiati Prihatiningrum (Kasi FPMP),
5. Koordinator Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Drs. Sakban (Kasi SI),
6. Koordinator Penataan Tatalaksana I Ketut Budiardi SKM. (Analisis Ketatalaksanaan),
7. Koordinator Penataan Sistem Manajemen SDM Hj. Lielies Minigrum, SE (Analisis Perencanaan dan Pengembangan Pegawai),
8. Koordinator Penguatan Akuntabilitas Ahmad Sahid, S.Pd., M.Pd. (Widyaiswara Muda),
9. Koordinator Kesekretariatan Ahlun Mariani, S.Si. (Analisis Data Mutu Pendidikan)

Masing-masing ditambah dengan Anggota-anggota.

Kegiatan Sosialisasi Strategi Percepatan Implementasi Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) dibuka oleh Kepala LPMP NTB Bapak Mohamad Mustari, Ph.D., dalam pengarahannya beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada Tim Pembangunan ZI WBK LPMP NTB yang telah mempersiapkan diri bekerja dari tahun 2018 untuk memperoleh WBK. Kami optimis LPMP NTB Tahun 2020 akan memperoleh Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Ada beberapa indikator yang membuat LPMP NTB optimis antara lain telah diterimanya beberapa Piagam Penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu : Piagam Penghargaan atas Kinerja SPI, Piagam Penghargaan atas Pengelolaan Anggaran, Piagam Penghargaan Admin Unit Layanan Terpadu (ULT), dan Yayasan Plan Indonesia terkait kegiatan Tanggap Darurat Pascagempa Lombok-sumbawa. Kunci Perubahan adalah Semangat dan Kebersamaan.

Ketua Tim Pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd. menyampaikan beberapa Materi Sosialisasi terkait Wilayah Bebas dari Korupsi(WBK) antara lain :

1. Pembangunan Zone Integritas (ZI)

Zona Integritas : predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

2. Sosialisasi PIN ZI-WBK

PIN ZI-WBK bermakna : LPMP NTB baik Pimpinan dan staf akan bersungguh-sungguh untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta selalu memberikan Pelayanan Prima sehingga Stakeholder merasa puas atas pelayanan yang telah diberikan. “ Melayani Sepenuh Hati “.

3. Strategi Percepatan Implementasi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Untuk mempercepat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) diperlukan beberapa Strategi-Strategi antara lain:

- a. Perencanaan kinerja yang matang
- b. Penampilan fisik kantor yang prima dengan kebersihan yang optimal
- c. Penampilan fisik pegawai yang sehat dan bugar
- d. Keramahtamahan pegawai
- e. Presentasi yang meyakinkan
- f. Keterampilan interpersonal dan etika pegawai
- g. Penyajian informasi
- h. Kampanye anti korupsi

Salah seorang peserta Sosialisasi Ari Dafid, S.Pd.,MH memberikan beberapa masukan terkait dengan kegiatan antara lain, “ perlu dibuatkan Surat Keputusan sebagai dasar secara hukum dalam penggunaan Pin ZI-WBK, dalam Pin ZI-WBK perlu dimunculkan/diinsertkan ada warna biru, dan untuk Penguatan Pengawasan perlu diperhatikan poin terkait Pengendalian Gratifikasi dan *Conflict Of Interest (COI)*, ada Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), dan khusus untuk Subbag Umum perlu dibuatkan *Design* Kinerja yang berbasis Sistem atau Aplikasi mulai dari administrasi sampai dengan kebijakan”.

Oleh : IMMA 2020

KEMITRAAN DINAS DIKBUD KABUPATEN SUMBAWA DENGAN LPMP NTB



Dengan dikeluarkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Nomor: 1.01.1.01.01.20.14 tentang Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Kelompok Pengawas, Penilik, Tenaga Kependidikan dan Kebudayaan Tahun 2020. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dinas Dikbud) Kabupaten Sumbawa melalui Surat Tugas Nomor : 829/0023/Dikbud/2020 Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa telah menugaskan Lili Rohana, A.Md melakukan Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi (KIS) dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB). KIS yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari mulai pada tanggal 23 sampai dengan 24 Januari 2020.

Menurut Lili Rohana, A.Md. “ Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi (KIS) yang dilakukan bertujuan untuk Menverifikasi dan Memvalidasi Data Diklat Calon Pengawas Sekolah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020, dalam rangka menindaklanjuti MoU yang telah dilakukan antara Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa dengan LPMP NTB ditahun 2019, terkait Seleksi Calon Pengawas Sekolah (Cawas) Jenjang Pendidikan Dasar “. Seleksi Calon Pengawas Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar yang dilaksanakan tahun 2019 telah meloloskan Cawas sebanyak 14 (empat belas) orang dari 15 (lima belas) orang yang mengikuti seleksi Cawas. Semoga Seleksi Cawas tahun 2020 dapat berjalan dengan baik dan lancar “.

Koordinasi Sinkronisasi Integrasi (KIS) Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa dengan LPMP NTB diterima oleh Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd. Kepala Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi sekaligus sebagai Penanggung Jawab Kegiatan Kemitraan terkait dengan Pengawas Sekolah dari jenjang Pendidikan Dasar sampai dengan Jenjang Pendidikan Menengah. Untuk tahun 2018 LPMP NTB telah menjalin Kemitraan dengan Dinas Dikbud Provinsi NTB untuk melaksanakan Seleksi Cawas jenjang Pendidikan Menengah, mulai dari Seleksi Substansi sampai dengan Diklat Cawas. Untuk Jenjang Pendidikan Dasar tahun 2019 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa juga melakukan Kemitraan Seleksi Cawas. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 24907/B.B13/HK/2018 tentang Petunjuk Teknis Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengawas Sekolah dan Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Pengawas Sekolah. Untuk mendapatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai Sekolah yang Profesional harus dilakukan dengan melalui Seleksi, mulai dari Seleksi Administrasi, Seleksi Substansi sampai dengan Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengawas Sekolah.

Terkait dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Cawas dilakukan oleh Pengelola Kegiatan Seleksi Calon Pengawas Sekolah LPMP NTB Lale Srilastatun, S.Sos., MM (Analisis Mutu Pendidikan). Beliau menyampaikan “ Ucapan terima kasih atas kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa dalam kerangka menghasilkan Pengawas yang Profesional. Tugas Pengawas Sekolah kedepan sebagai Supervisor Mutu Pendidikan sangat berat, karena Pengawas Sekolah menjadi Motor Penggerak Kemajuan Dunia Pendidikan “

Oleh : IMMA 2020

SPIP PENENTU WAJAH ZI-WBK LPMP NTB



Proses implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terintegrasi dengan proses Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, merupakan penentu untuk pencapaian Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), tidak terkecuali di Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di daerah seperti Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat. Langkah inovatif yang kini sedang dirancang tersebut, nantinya akan menjadi mesin “pengubah” perwujudan *good governance* secara menyeluruh. SPIP dan SPI dapat dihidupkan dan diaktifkan kembali sehingga dapat mendukung terwujudnya ZI WBK dengan lebih optimal.

SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP mewajibkan menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota untuk melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahannya. Pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah: "Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan."

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Inspektur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan dengan Surat Tugas Nomor 0526/C3/WS/2020 tertanggal 23 Januari 2020 telah menugaskan 2 (dua) orang Tim untuk melaksanakan Fasilitasi/Konsultasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Kegiatan ini dilaksanakan selama 4 (empat) hari mulai tanggal 27 sampai dengan 30 Januari 2020. Kegiatan ini difasilitasi oleh Ibu Suharsi (Auditor Madya) dan Bapak Agus Abdurokhim (Auditor Muda). Menurut salah satu Tim Ibu Suharsi mengatakan bahwa "tujuan dari kegiatan ini sebenarnya adalah memberi penguatan tentang pentingnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan memberi penguatan tentang pentingnya Satuan Pengawasan Intern (SPI), dalam rangka mengawal Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan khususnya di lingkungan LPMP NTB".

Menurut Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat, Bapak Mohamad Mustari, Ph.D pada saat memberikan pengarahan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Tim Itjen Kemendikbud yang melakukan Fasilitasi atau Konsultasi terkait dengan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) serta Kinerja Satuan Pengawasan Intern (SPI) Lembaga

Penjaminan Mutu Pendidikan tahun anggaran 2019. Semoga dengan diberikannya Fasilitas oleh Tim Itjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kinerja SPI LPMP NTB tahun 2020 akan lebih baik lagi dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2019 LPMP NTB telah mendapatkan Piagam Penghargaan sebagai Satuan Pengawasan Intern (SPI) berkinerja terbaik III. Pada tahun 2020 LPMP NTB diharapkan sudah membuat Peta Resiko terkait Program/kegiatan yang akan dilaksanakan. Pertemuan Kepala LPMP NTB dengan Tim Itjen dihadiri pula oleh Ketua SPI Dafid, S.Pd.,MH berserta Timnya

Unit kerja berpredikat WBK/WBBM merupakan *outcome* dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkrit di dalam lingkup Zona Integritas. Pengembangan WBK/WBBM secara bertahap sejalan dengan konsep *Island of Integrity*. Diharapkan, upaya ini akan menjadi bagian dari upaya yang dapat meningkatkan nilai IPK Indonesia. Untuk itu diperlukan upaya dan pendekatan yang proaktif dalam rangka memperlihatkan kepada dunia internasional/global, bahwa upaya pencegahan korupsi di Indonesia dilakukan secara kontinyu dan komprehensif.

Satuan Pengawas Intern (SPI) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat memperoleh Piagam Penghargaan utatan ke-III dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atas Prestasi Kinerja yang diraih selama tahun 2019. Dengan telah berjalannya Program Satuan Pengawasan Intern (SPI) LPMP NTB diharapkan kedepan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dapat berjalan dengan baik sesuai harapan pemerintah untuk melakukan Reformasi Birokrasi secara konsisten dalam rangka memberantas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta dalam peningkatan Pelayanan Prima sehingga Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dapat segera terwujud.

“Apapun alasannya, implementasi SPIP yang utuh memberi manfaat signifikan dalam perwujudan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sesungguhnya”, ungkap Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd Ketua Tim Pembangunan ZI-WBK LPMP NTB tahun 2020 . Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Selain itu SPIP dan SPI sebagai komponen penting dalam tegaknya ZI-WBK harus dioptimalkan peran dan fungsinya. Demi *good governance*, pengawasan intern dilakukan untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian yang semula berorientasi sekadar mematuhi ketentuan yang berlaku (*compliance audit*) akan menuju sebagai tindakan audit yang dapat mengukur akuntabilitas operasional organisasi (*performance audit*) dari kinerja aparat birokrasi. “ Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Penentu Wajah Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi LPMP NTB “, pungkask Made.

Oleh : IMMA 2020

SOSIALISASI MANAJEMEN RESIKO DALAM PEMBANGUNAN ZI-WBK



Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2009 terus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, saat ini pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah memasuki periode kedua dan akan menuju periode ketiga atau periode terakhir masa berlaku *Road Map*. Pada periode pertama hingga periode kedua telah tercapai banyak kondisi yang mendukung sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi; birokrasi yang efektif dan efisien; dan birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas. Untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dibutuhkan peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan zona integritas pada Unit Kerja. Dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) salah satu tugas dari Tim SPI adalah Tim menilai risiko kegiatan dan Tim melakukan pengendalian untuk meminimalisir risiko, yang dikenal dengan “Manajemen Risiko”.

Dalam dunia bisnis, “Manajemen Risiko” didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, memantau dan mengelola risiko potensial untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkannya terhadap suatu organisasi. Setiap bidang dalam bisnis memiliki risikonya tersendiri. Contohnya di bidang sistem informasi, risiko potensialnya adalah seperti terjadinya pelanggaran keamanan data, kehilangan data, serangan dunia maya, kegagalan sistem, dan bencana alam. Sedangkan potensi risiko yang akan terjadi di perusahaan Manufaktur adalah gagal mencapai target produksi yang direncanakan, kerusakan mesin, hilangnya pesanan dari pelanggan, terjadinya masalah kualitas produk dan lain sebagainya.

Tahapan-tahapan dalam Manajemen Risiko adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi Risiko (*Identify the Risk*)

Langkah pertama dalam Tahapan Manajemen Risiko adalah mengidentifikasi Risiko.

2. Menganalisis Risiko (*Analysis the Risk*)

Setelah menemukan dan memahami risikonya, kita perlu menganalisis risikonya. Contohnya, Ada risiko yang dapat membuat seluruh bisnis terhenti, sementara ada risiko yang hanya akan menjadi ketidaknyamanan kecil.

3. Mengevaluasi Risiko atau Peringkat Risiko (*Evaluate the Risk*)

Setelah dianalisis, Risiko-risiko tersebut perlu diberikan peringkat dan prioritas.

4. Menanggapi Risiko (*Response of the Risk*)

Tahapan ini juga disebut dengan *Risk Response Actions* atau Tindakan Respon Risiko.

5. Meninjau dan Memantau Risiko (*Review and Monitor the Risk*)

Secara umum ada 6 (enam) tujuan Manajemen Risiko di Institusi antara lain :

1. Melindungi Institusi
2. Membantu Pembuatan Kerangka Kerja.
3. Mendorong Manajemen Proaktif
4. Sebagai Peringatan untuk Berhati-hati
5. Meningkatkan Kinerja Institusi
6. Sosialisasi Manajemen Risiko

Kegiatan “ Sosialisasi Manajemen Risiko “ difasilitasi oleh 3 (tiga) orang Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan dilaksanakan selama sehari pada tanggal 29 Januari 2020. Adapun Materi yang di berikan dalam “ Sosialisasi Manajemen Risiko” adalah :

1. Manajemen Risiko
2. Evaluasi Peta Resiko Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat tahun 2019
3. Reviu Peta Resiko tahun 2019
4. Brainstorming Peta Resiko LPMP NTB tahun 2019

Kegiatan ini diikuti oleh Pejabat Struktural dan Tim Satuan Pengawasan Intern (SPI) dilingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat, bertempat di Ruang Sidang Widyaiswara.

Salah satu Peserta “ Sosialisasi Manajemen Risiko” Ari Dafid, S.Pd.,MH yang juga sebagai Ketua Satuan Pengawasan Intern (SPI) LPMP NTB menjelaskan bahwa : “ Peta Resiko adalah salah satu bagian dari antisipasi dan pengendalian dalam manajemen tata kelola lembaga kearah yang lebih baik, sehingga apa yang direncanakan dan yang dilaksanakan dapat memenuhi target-target yang sudah ditetapkan “.

Menurut Ketua Pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd., manfaat dari Manajemen Risiko dalam Pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) adalah sebagai berikut:

1. Manajemen risiko bisa mencegah kegagalan sehingga peningkatan kinerja bisa dilakukan atau setidaknya kerugian tidak terlalu besar.
2. Manajemen risiko bisa melindungi Instansi dari risiko murni karena kreditor pelanggan dan pemasok lebih menyukai Instansi yang terlindungi mungkin dengan asuransi tertentu sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan *public image*.
3. Manajemen risiko bisa memberikan informasi dan persektif kepada pihak manajemen Instansi tentang profil risiko serta perubahan yang mendasar tentang produk, pasar, lingkungan bisnis, dan perubahan lainnya yang diperlukan dalam proses manajemen risiko
4. Manajemen risiko bisa membuat cadangan yang memadai untuk mengantisipasi risiko yang terukur sehingga potensi kerugian yang relatif lebih besar bisa dihindari.
5. Manajemen risiko bisa menghitung dan mengukur besarnya *risk exposure* dan menetapkan alokasi sumber-sumber dana sekaligus limit risiko yang lebih tepat.

“ Manajemen Risiko dalam Pembagunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) manfaatnya sangat besar, karena Proses Manajemen Risiko yang efektif akan membantu mengidentifikasi risiko mana yang menjadi ancaman terbesar bagi organisasi dan memberikan panduan untuk menanganinya “, pungkas Made.

Oleh : IMMA 2020

BERSAMA ULT, LPMP NTB MENUJU WBK



Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 tahun 2017 tentang Layanan Informasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33/MPK.D/KS/2018 tentang Penetapan Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan Kemendikbud terkait dengan Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi Publik.

Untuk menjawab tuntutan publik tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupaya meningkatkan pelayanan publik kepada semua pemangku kepentingan bidang pendidikan dan kebudayaan melalui Unit Layanan Terpadu (ULT) di pusat dan daerah. Banyaknya permintaan layanan dari berbagai daerah yang terpusat di Unit Layanan Terpadu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2015 mendorong untuk mendayagunakan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) di daerah dalam pelayanan publik dengan membangun miniature Unit Layanan Terpadu. Tahun 2018 LPMP NTB telah memulai membuat Unit Layanan Terpadu (ULT). Penyediaan Layanan Publik yang berkualitas, mudah diakses, dan tidak diskriminatif merupakan suatu tuntutan Kementerian/Lembaga di era keterbukaan informasi Publik. Ini merupakan salah satu bentuk implementasi kebijakan reformasi birokrasi internal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Tujuan dari penyelenggaraan Unit layanan Terpadu (ULT) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat adalah mengoptimalkan peran Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat dalam pelayanan publik dan memberikan kemudahan pelayanan kepada pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan di daerah. Disamping itu dengan adanya ULT di daerah akan memudahkan pemangku kependidikan dan kebudayaan di daerah dalam menyelesaikan urusan pendidikan dan kebudayaan di daerah khususnya Layanan Dapodik, NUPTK, Layanan Informasi, dan Pengaduan dapat diselesaikan di LPMP NTB. ULT LPMP NTB menyelenggarakan pelayanan publik, baik secara langsung datang ke kantor LPMP NTB maupun secara tidak langsung melalui *WhatsApp*/Media Sosial ULT LPMP NTB.

Menurut salah satu Petugas Unit Layanan Terpadu (ULT) LPMP NTB Dian Rohaidah, S.Sos, M.IP, sepanjang tahun 2019 ULT LPMP NTB telah melayani 1503 (seribu lima ratus tiga) permintaan Informasi dan pengaduan. Pelayanan Publik secara langsung di Unit Layanan Terpadu LPMP NTB tahun 2019 adalah sejumlah 519 (lima ratus Sembilan belas) layanan. Pelayanan Publik secara langsung puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2019 dengan jumlah 150 (seratus lima puluh) layanan baik permintaan informasi maupun pengaduan yaitu sebanyak 29%. Sedangkan Pelayanan

public secara tidak langsung yang dilayani oleh ULT LPMP NTB adalah sebanyak 984 (Sembilan ratus delapan puluh empat) layanan. Sama seperti Pelayanan Publik secara langsung, Pelayanan public secara tidak langsung jumlah Layanan terbanyak terjadi pada bulan Oktober yaitu sebanyak 349 layanan atau sebesar 35%. Jenis Layanan langsung dan tidak langsung tahun 2019 terdiri dari : NUPTK, Dapodik, Sertifikasi/PPG, PMP, Bantuan Pemerintah. Sarana prasarana, dan lainnya. Dari 7 (tujuh) jenis layanan yang ada di ULT LPMP NTB permintaan informasi yang terkait dengan Nomor Unik Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) menduduki posisi tertinggi baik dalam layanan langsung maupun tidak langsung. Dari data permintaan informasi terkait dengan NUPTK pada layanan langsung sebanyak 277 (53%) dan layanan tidak langsung sebanyak 641 (65,32 %) layanan.

Delapan Tata Nilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah : Integritas, Kreatif, Inovatif, Inisiatif, Meritokrasi, Aktif, Pembelajar, dan Tanpa Pamrih. Salah satu Nilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah “Inovatif “. Melalui Unit Layanan Terpadu (ULT) LPMP NTB juga melakukan Internalisasi Tata Nilai Kemdikbud terkait “ Inovasi Layanan”. Disamping pelayanan dilakukan di Kantor LPMP NTB sendiri, Unit Layanan Terpadu (ULT) juga melakukan Inovasi Layanan yaitu Layanan Terpadu Keliling. Layanan Terpadu Keliling yang difasilitasi dengan mempergunakan “Mobil Pintar“, tahun 2019 baru terlaksana di satu kabupaten yaitu Kabupaten Lombok Timur dengan 2 (dua) tempat yaitu di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur dan SDN 10 Montong Betok Kecamatan Montong Gading.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia memberikan Piagam Penghargaan kepada Unit Layanan terpadu (ULT) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) atas Kinerja yang dicapai selama tahun 2019, bersama dengan LPMP yang lain dari seluruh Indonesia. Dalam rangka peningkatan kinerja petugas Unit Layanan Terpadu, LPMP NTB juga memberikan **Reward** kepada Rapiqi, S.Pd., sebagai Petugas Layanan Publik “ Berdedikasi “ pada Unit Layanan Terpadu (ULT) LPMP NTB tahun 2019. Penghargaan atau *award* yang diberikan kepada pelaksana layanan publik atas dasar prestasi kerja, hasil kerja (kinerja), dan usaha yang membawa nama harum lembaga.

Penyelenggaraan Unit Layanan terpadu (ULT) LPMP NTB tahun 2019 telah terlaksana dengan baik dan lancar. Pelayanan Publik yang ada telah sesuai dengan SK Kepala LPMP NTB Nomor 344/D7.17/KP/2018 tentang Penerapan Pelayanan Publik dilingkungan LPMP NTB. Menurut Kepala Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi LPMP NTB Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd. “ Bersama Unit Layanan Terpadu (ULT) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Bbarat, siap menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) “. Pada intinya tujuan Reformasi Birokrasi adalah Pemberian Pelayanan Prima Kepada semua pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. Keberadaan ULT LPMP NTB sangat strategis perannya dalam memberikan layanan. Indikator yang dapat terlihat adalah dari banyaknya Jumlah Pelayanan yang diberikan, baik Pelayanan Langsung maupun Pelayanan Tidak Langsung ataupun Layanan Terpadu Keliling.

Oleh : IMMA 2020

EVALUASI PROGRAM 2019 DAN PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN ZI-WBK 2020



Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi (Permen PAN-RB) Nomor 10 Tahun 2019 perubahan atas Permen PAN RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) bahwa untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dibutuhkan peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan zona integritas pada Unit Kerja, Manajemen Perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zone integritas.

Ada 4 (empat) program yang ditetapkan Kemen-PAN dan RB untuk dijalankan dalam Program Kerja Manajemen Perubahan yang terdiri dari :

1. Menyusun Tim Kerja
Panduan dalam menyusun Tim Kerja adalah :
 - a. Unit membentuk Tim untuk membangun ZI menuju WBK dengan Surat Keputusan pimpinan
 - b. Unit kerja menentukan komposisi tim melalui prosedur yang jelas
2. Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan ZI menuju WBK
Panduan dalam menyusun Dokumen Rencana adalah
 - a. Tim Kerja menyusun Program Kerja
 - b. Program Kerja memuat target-target prioritas
 - c. Tim menyediakan media untuk mensosialisasikan Pembangunan ZI menuju WBK
3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi
Panduan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi adalah :
 - a. Tim kerja memantau keterlaksanaan program sesuai dengan target
 - b. Tim kerja memiliki instrument pemantauan dan evaluasi
 - c. Tim kerja telah menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi
4. Melakukan Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
Panduan dalam melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja:
 - a. Tim kerja mendorong pimpinan untuk berperan sebagai Role Model
 - b. Tim kerja memantau tunas-tunas integritas agar berperan sebagai agen perubahan
 - c. Tim kerja membangun budaya kerja dan pola pikir dilingkungan satuan kerja
 - d. Tim kerja berupaya melibatkan seluruh pegawai satuan kerja dalam membangun ZI menuju WBK

Terkait dengan Program Kerja Manajemen Perubahan, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat melaksanakan “ Evaluasi Progam 2019 dan Penyusunan Program Pembangunan ZI-WBK 2020 “. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari dimulai tanggal 3-4 Pebruari 2020 diikuti oleh Tim Pembangunan ZI-WBK berjumlah 34 (tiga puluh empat) orang.

Adapun materi yang didiskusikan dalam kegiatan ini adalah :

1. Pengendalian Gratifikasi
2. Target dan langkah Pembangunan WBK
3. Evaluasi Program Pembangunan WBK tahun 2019 melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE)
4. Penyusunan Program Pembangunan WBK tahun 2020

Evaluasi Program 2019 dan Penyusunan Program Pembangunan ZI-WBK tahun 2019 bertujuan untuk melihat program yang telah dilaksanakan, yang belum dilaksanakan, kendala/ hambatan/ permasalahan serta solusi tahun 2019 dan Program Pembangunan ZI-WBK yang akan dilaksanakan tahun 2020 sehingga Pembangunan WBK LPMP NTB dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan dalam Reformasi Birokrasi.

Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK.

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK telah disusun;
- 2) Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK telah memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas menuju WBK; dan
- 3) Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK.

Kegiatan ini difasilitasi oleh Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd. yang juga sebagai penanggungjawab kegiatan Evaluasi Progam 2019 dan Penyusunan Program Pembangunan ZI-WBK 2020 mengatakan bahwa dalam membangun Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) “ Komitmen Pimpinan dan Pegawai/staff memegang peranan yang sangat penting dalam program Reformasi Birokrasi. Tanpa adanya Komitmen antara Pimpinan dan Pegawai/staff, Pembangunan ZI-WBK ini akan berjalan tertatih-tatih. Untuk itulah Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi (KIS) sangat strategis perannya dalam kerangka mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi. Marilah kita bersama-sama mereformasi diri sendiri sebelum mereformasi orang lain. Mulai dari yang kecil, dan dimulai dari sekarang. Masing-masing Tim Pengungkit mulai dari Tim Manajemen Perubahan, Tim Penataan Tata Laksana, Tim Penataan Sistem Manajemen SDM, Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Tim Penguatan Pengawasan, dan Tim Peningkatan Mutu Pelayanan Publik semuanya harus berkolaborasi sehingga hasil dari Reformasi Birokrasi akan cepat bisa dirasakan oleh *Stakeholder* atau masyarakat pada umumnya. “ Motto ZI-WBK LPMP NTB adalah : “ Melayani Sepenuh Hati “ , tutup Made.

Oleh : IMMA 2020

JUMAT BERSIH PERCEPAT DERAP LANGKAH LPMP NTB MENUJU WBK



Satuan-satuan kerja yang berminat untuk diusulkan menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) membutuhkan pengetahuan tentang Strategi jitu menuju Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK). Strategi yang baik bukan merupakan jalan pintas atau potong kompas yang mungkin bisa membuat satuan kerja memperoleh predikat Wilayah dari Korupsi (WBK), tetapi hal tersebut menjadi semu (*artificial*). Strategi Menuju WBK sangat penting perannya dalam rangka mempercepat proses pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Salah satu Strategi Percepatan Implementasi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah “ Penampilan Fisik Kantor Prima dengan Kebersihan yang Optimal “. Kesan pertama terbentuk dari melihat penampilan fisik kantor. Apabila Kantor menunjukkan penampilan yang menarik dan bersih, maka kesan pertamanya akan baik, demikian pula sebaliknya. Penampilan fisik kantor yang bersih harus mencakup keseluruhan mulai dari halaman sampai dengan kamar kecil (*toilet*). Penampilan kantor yang bersih mencerminkan perilaku penghuni kantor yang sangat berkomitmen tinggi pada kenyamanan dan keindahan demi menunjang produktifitas kerja tinggi. Hal ini sangat diperlukan dalam pembangunan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga melakukan Pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Sejak tahun 2017 LPMP NTB sudah mulai melakukan Pencanaan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK), dengan demikian Wilayah Bebas dari Korupsi bisa cepat terwujud. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat setiap bulan mempunyai program Jumat Bersih, yang dilakukan oleh seluruh warga LPMP NTB mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), dan Tenaga *Outsourcing*.

Program “ Jumat Bersih “ yang dilaksanakan setiap bulan oleh LPMP NTB dalam rangka menciptakan kebersihan yang optimal, sehingga Sumber Daya Manusia (SDM)/pegawai yang ada berkinerja tinggi. Kebersihan dilakukan baik dalam ruangan maupun diluar ruangan. Gerakan kebersihan selaras dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2019 “ Melarang Penggunaan Kemasan Plastik ”, begitu juga dengan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi NTB dengan gerakan Zero Wastanya. Seiring dengan itu pada hari Jumat tanggal 7 Pebruari 2020 seluruh pegawai LPMP NTB melakukan gerakan “ Peduli Lingkungan”han. Gerakan kebersihan dilaksanakan antara lain :

A. Halaman Kantor dan Parkir.

Dengan menerapkan konsep kantor hijau, maka kebersihan kantor sangat diutamakan. Halaman kantor sangat berpotensi menimbulkan kesan pertama bagi pengunjung tentang kemungkinan citra kantor tersebut. Apabila halaman kantor bersih, maka pengujung mungkin akan mempunyai kesan positif terhadap citra kantor dan perilaku pegawainya, demikian pula sebaliknya.

- B. Area Ruang Tamu Utama (*Lobby*)
Pengunjung yang merasa nyaman di lobby dipastikan akan betah berlama-lama di kantor satuan kerja. Area *Lobby* mencerminkan perilaku tuan rumah. Pengunjung merasakan atmosfer kemurahan hati tuan rumah atau kesempitan hatinya.
- C. Ruang Penerima Tamu
Pada prinsipnya pengelolaan ruang tamu tidak jauh berbeda dengan area *lobby*. Keramah-tamahan dan kebersihan menjadi faktor kunci yang sangat penting bagi pelayanan tamu.
- D. Ruang Kerja Pimpinan
Pimpinan harus memberikan keteladanan/ccontoh kepada pegawai tentang kebersihan. Pegawai tidak mungkin bisa menerapkan perilaku bersih bila pimpinannya tidak mencontohkan bagaimana perilaku yang bersih tersebut.
- E. Ruang Kerja Pegawai
Aparatur Sipil Negara (ASN) citranya sebagai aparatur pemerintah membuat masyarakat berharap memperoleh layanan terbaik. Harapan ini akan berkesan melihat ruang kerja pegawai bersih. Ruang kerja yang bersih akan berpengaruh pada produktifitas pegawai.
- F. Ruang Unit Layanan Terpadu (ULT)
Dengan ketersediaan ruang ULT, maka pegawai dapat fokus dalam bekerja di ruang kerjanya masing-masing, sedangkan pelayanan diberikan di ruang ULT. Kebersihan ULT perlu dijaga sehingga pengunjung merasa nyaman dan akan betah menerima pelayanan.
- G. Ruang Rapat
Kegiatan rapat adalah jantungnya organisasi. Dalam hal ini ruang rapat yang bersih sangat penting mendukung berjalannya rapat yang baik. Kebersihan ruang rapat sangat berpengaruh pada rasa nyaman peserta rapat yang berdampak pada munculnya gagasan-gagasan kreatif dan inovatif sehingga akhirnya akan menghasilkan keputusan yang baik.
- H. Ruang Kantin
Tempat makan pegawai sangat penting dalam fasilitas kantor. Pegawai membutuhkan makanan sehat bergizi demi menunjang produktifitas kerjanya.
- I. Ruang Ibadah
Tempat ibadah yang bersih sangat menunjang terwujudnya kesehatan rohani pegawai. Sumber kekuatan pegawai tidak hanya di kantor fisik, tetapi juga berasal dari kejiwaan yang terbina melalui kegiatan ibadah.
- J. Kamar Kecil
Kebersihan kamar kecil sangat penting. Banyak kalangan masyarakat yang bila berkunjung ke suatu tempat langsung menuju kamar kecil. Masyarakat berkunjung ke kamar kecil bukan saja sekedar membuang hajatnya, tetapi sekedar menilai sejauh mana perilaku kebersihan penghuni satuan kerja. Kamar kecil yang bersih maka besarlah harapan masyarakat memperoleh layanan yang baik

Kepala LPMP NTB Bapak Mohamad Mustari, Ph.D. selaku Pembina Pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) LPMP NTB, memberikan apresiasi, penghargaan, dan ucapan terima kasih kepada seluruh pegawai yang telah peduli akan kebersihan lingkungan. Penampilan kantor yang bersih mencerminkan perilaku penghuni kantor yang sangat berkomitmen tinggi pada kenyamanan dan keindahan demi menunjang produktifitas kerja yang tinggi, dan pada akhirnya akan bermuara dalam pemberian “ Pelayanan Prima “ kepada masyarakat. Hal ini sangat penting dalam menunjang pembangunan ZI-WBK. “Jumat Bersih Percepat Derap Langkah LPMP NTB menuju WBK “, pungkask Mustari.

Oleh : IMMA 2020

MELALUI MCU TINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK BERMUTU



Ujung tombak pelayanan publik tidak hanya terletak pada kelengkapan sarana dan prasarana dan kecanggihan teknologi informasi tetapi yang lebih utama dari itu semua adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dibidangnya, berintegritas, dan berjiwa melayani. Pelayanan publik yang bermutu sangat tergantung pada SDM penyedia layanan. Pegawai satuan kerja (satker) seyogyanya memenuhi aspek kesehatan jiwa dan raga. Begitu juga Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat, harus menyiapkan Sumber Daya Manusia yang sehat jasmani dan rohani. Penampilan fisik yang sehat dan bugar merupakan salah satu Strategi Percepatan Implementasi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Kesehatan pegawai harus diperiksa secara berkala dan berkesimbangan oleh dokter. Pegawai harus bebas dari ancaman penyakit yang bisa datang menyerang secara tiba-tiba seperti serangan jantung, tekanan darah tinggi, dan *stroke*. Oleh karena itu pegawai harus diperiksa profil darahnya sehingga bisa menjaga kadar lemak darah (kolesterol) dan asam urat tetap pada ukuran yang wajar dan tidak berlebihan. Pegawai juga perlu diperiksa irama jantungnya agar dapat diketahui dengan segera bila ada kejanggalan dalam detak jantungnya. Selanjutnya juga perlu dilakukan pemeriksaan kadar gula dalam tubuh agar dapat mendeteksi potensi penyakit kencing manis (diabetes). Selain itu juga dilakukan pemeriksaan terhadap mata, gigi, dan telinga. Apabila semua indikator kesehatan pegawai berada dalam kadar yang aman, maka pegawai diharapkan bisa menunjukkan kinerja yang produktif dan diharapkan dapat memberikan pelayanan prima. Pegawai juga diberikan vitamin yang perlu diminum sebagai suplemen tambahan.

Dalam rangka memelihara dan meningkatkan kesehatan pegawai, dengan Surat Pengumuman dari Kepala LPMP NTB Nomor 217/C7.47/TU/2020 tertanggal 4 Pebruari 2020 telah dilaksanakan pemeriksaan rutin kesehatan *Medical Chek Up (MCU)*. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) setiap tahun telah memprogramkan kegiatan tersebut. Tahun 2020 ini pemeriksaan kesehatan rutin dilaksanakan selama 4 (empat) hari mulai tanggal 5 sampai dengan 8 Pebruari 2020, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram. Pemeriksaan Kesehatan Rutin ini dimulai pukul 08.00 sampai selesai diikuti oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan LPMP NTB berjumlah 78 (tujuh puluh delapan) orang. Pengambilan hasil pemeriksaan

Medical Check Up (MCU) sudah bisa diambil dari tanggal 2-4 Maret 2020 dan bisa langsung dikonsultasikan kepada dokter terkait sehingga penyakit yang diketahui cepat ditangani.

Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) Bapak Mohamad Mustari, Ph.D. mengatakan salah satu Strategi Percepatan Implementasi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah “ Penampilan Fisik Pegawai yang Sehat dan Bugar “. Untuk mewujudkan Penampilan Fisik Pegawai yang Sehat dan Bugar pemeriksaan kesehatan secara rutin setiap tahun sangat penting dilakukan. Kami berharap semoga semua pegawai LPMP NTB yang telah melakukan *Medical Chek Up (MCU)* hasilnya sehat-sehat dan kesehatan pegawai berada dalam kadar yang aman sehingga pegawai diharapkan mempunyai kinerja yang produktif dan prima. Dengan Kinerja yang produktif dan prima, pegawai LPMP NTB akan bisa memberikan Pelayanan Prima kepada semua *Stakeholder* baik internal maupun eksternal sesuai dengan Motto ZI-WBK “ Melayani Sepenuh Hati “, tutup Mustari.

Menurut salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) LPMP NTB yang sedang mengikuti *Medical Chek Up (MCU)* ini, Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd. memberikan apresiasi, attensi, penghargaan, dan mengucapkan terima kasih kepada Kepala LPMP NTB yang telah menyelenggarakan program seperti ini. Program ini sangat penting karena Pegawai yang sehat dan bugar diharapkan dapat menunjukkan kinerja yang produktif dan prima. Ujung tombak pelayanan publik yang bermutu ditentukan oleh Sumber Daya Manusianya. Apalagi saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya melaksanakan Reformasi Birokrasi Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK), dimana masyarakat mengharapkan diberikan Pelayanan Prima oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). “ Melalui *Medical Chek Up (MCU)* Kita Tingkatkan Pelayanan Publik Bermutu “, pungkas Made.

Oleh : IMMA 2020

PERENCANAAN BERMUTU PERCEPAT MENUJU WBK



Perencanaan merupakan fungsi manajemen paling utama dalam Pembangunan Zone Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK). Perencanaan dan Pengendalian merupakan fungsi kembar yang tidak dapat dipisahkan. Dalam hal ini reformasi birokrasi focus pada upaya perubahan perilaku aparatur terutama penerapan Budaya Kinerja. Oleh karena itu strategi yang sangat penting adalah bagaimana satuan kerja menerapkan perencanaan yang matang. Salah satu indikator yang dapat dilihat secara jelas adalah seberapa banyak Organisasi/lembaga melakukan Revisi anggaran terkait dengan Program atau Kegiatan. Revisi dilakukan dengan cara revisi DIPA atau Revisi RKAKL. Semakin banyak atau sering suatu organisasi/lembaga melakukan revisi, menunjukkan bahwa Perencanaannya tidak matang. Dampak dari terlalu seringnya dilakukan revisi adalah keterlambatan kegiatan yang akan dilaksanakan.

A. Perencanaan Strategis yang Sinkron

Dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) satuan kerja harus melibatkan seluruh pegawai, sehingga pegawai menjadikan Renstra sebagai rujukan pertama. Seluruh kegiatan diorientasikan untuk mencapai Visi, Misi, dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra satuan kerja. Renstra tidak boleh hanya sekedar menjadi dokumen tetapi harus benar-benar dipedomani oleh seluruh pegawai. Penyusunan Renstra satuan kerja harus merujuk pada Renstra Unit Utama yang mengampunya dan Renstra Kemendikbud. Bagian yang paling penting dalam Renstra adalah Indikator target dan tujuannya. Dalam hal ini target dan tujuan Renstra harus sinkron dan selaras antara Renstra Kemendikbud, Renstra Unit Utama, dan Renstra Satuan Kerja. Benang Merah dari ketiga Renstra tersebut harus dapat ditelusuri. Sasaran Renstra satuan kerja yang tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan sasaran Renstra utama pengampunya menunjukkan kondisi yang memprihatinkan.

B. Proses Bisnis

Proses Bisnis adalah tahapan pekerjaan sesuai tugas dan fungsi organisasi yang dirancang secara logis dan realistis. Urutan pekerjaan harus tersusun secara rasional dan keterkaitan antara satu pekerjaan dengan pekerjaan lain terhubung dengan jelas. Proses bisnis akan menentukan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dan membutuhkan dukungan anggaran. Kegiatan dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu Kegiatan Utama (*Core*) dan Kegiatan Pendukung (*Support*). Proses bisnis juga harus mempertimbangkan sumber daya organisasi secara efisien. Sumber daya organisasi adalah manusia, keuangan, peralatan, teknologi dan informasi. Kelima sumber daya itu harus dioptimalkan. SDM merupakan sumber daya terpenting yang mampu menggerakkan organisasi kearah pencapaian sasaran dan target. SDM harus dibekali budaya kinerja yang kuat agar memiliki etos kerja tinggi demi mencapai target kinerja yang telah ditentukan.

C. Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan

Anggaran harus digunakan oleh satuan kerja dengan baik. Anggaran merupakan sumber daya keuangan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Sistematis anggaran terdiri dari Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan. Satuan kerja harus cermat menentukan susunan anggaran tersebut karena semestinya selaras dengan bisnis proses. Anggaran yang bertentangan dengan proses bisnis membuat akuntabilitas satuan kerja menjadi berkurang. Target kinerja anggaran tidak diukur hanya sebatas daya serapnya tetapi sejauh mana produk kerja (*output*) yang dihasilkan. Selanjutnya harus juga diketahui sejauhmana dampak pelaksanaan kegiatan terhadap kemaslahatan publik. Target kinerja sebaiknya dapat pula mengukur sejauh mana manfaat program bagi public (*outcome*). Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan harus akuntabel.

D. Pemantauan Kinerja yang Berkelanjutan

Satuan kerja (Satker) harus memantau sejauhmana campaign kinerjanya secara berkala. Budaya kinerja diterapkan melalui keselarasan antara capaian kinerja organisasi dengan capaian kinerja individu pegawai. Capaian kinerja organisasi dan individu harus dipantau setiap bulan, sehingga pengendalian dapat berjalan dengan efektif. Pemimpin harus menggerakkan pegawai untuk menerapkan budaya kinerja. Pemimpin juga harus menjadi teladan dan mencontohkan secara langsung kepada pegawai dalam penerapan budaya kinerja. Pemimpin harus memperlihatkan sejauhmana capaian kinerjanya selaku pemimpin dan menunjukkan kontribusinya terhadap capaian kinerja organisasi. Penarapan budaya kinerja pada awalnya memang tidak mudah karena sebagian pegawai sudah terbiasa dengan gaya lama. Pegawai yang selalu bekerja dengan cara lama dan tidak mau berubah (*business as usual*) merupakan suatu kondisi yang tidak ideal dalam reformasi birokrasi, karena konsep reformasi birokrasi pada esensinya adalah perubahan. Oleh karena itu pegawai harus dibiasakan menerapkan budaya kinerja dalam melaksanakan tugas jabatannya sehari-hari.

Menurut Kepala Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd., Perencanaan Bermutu akan berpengaruh terhadap Kinerja organisasi. Begitu juga dalam Pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK). Perencanaan yang bermutu/matang adalah perencanaan yang memperlihatkan benang merah antara Renstra Kemendikbud, Renstra Unit Utama, dan Renstra Satuan Kerja. Dalam hal ini target dan tujuan Renstra harus sinkron dan selaras antara Renstra Kemendikbud, Renstra Unit Utama, dan Renstra Satuan Kerja. Disamping itu Renstra yang bermutu adalah Renstra yang dalam penyusunannya melibatkan seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di organisasi. Pelibatan publik internal dalam penyusunan Renstra sangat penting, sehingga Renstra yang disusun lembaga sesuai kebutuhan dan bukan keinginan serta sebagai rujukan pertama dan menjadi pedoman. “ Perencanaan Bermutu Percepat Menuju WBK “, pungkas Made.

Oleh : IMMA 2020

LPMP NTB MENGAWAL 4746 SEKOLAH DALAM SUPERVISI



Supervisi Mutu Pendidikan adalah proses mengawal peningkatan mutu pendidikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan bersama dengan Pengawas Sekolah. Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Sekolah antara lain : 1. Evaluasi permasalahan capaian mutu, 2. Pendampingan penyusunan rencana peningkatan mutu, 3. Pendampingan peningkatan mutu, dan 4. Monitoring dan evaluasi. Keberhasilan seorang pengawas sekolah dalam melaksanakan Supervisi Mutu pendidikan disekolah terutama sekolah binaannya, ada beberapa indikator yang dapat dipergunakan sebagai acuan yaitu : sekolah mampu dan berkomitmen untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP), sekolah mempunyai Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS), sekolah mempunyai program peningkatan mutu yang terukur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan sekolah memiliki budaya mutu. Hasil Analisis Supervisi Mutu Pendidikan ini akan didesiminasikan kepada *Stakeholder* atau pemangku kepentingan lainnya. Dengan rekomendasi yang dihasilkan dari Analisis Supervisi Mutu Pendidikan ini setiap kabupaten/kota akan mengetahui kekuatan dan kelemahan dari masing-masing sekolah sehingga akan lebih mudah dicarikan solusi pemecahannya termasuk program dan kegiatan serta penyiapan penganggarannya.

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Pencapaian tujuan pendidikan nasional tersebut diperlukan sumberdaya pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana. Pengawas Sekolah sebagai salah satu sumberdaya pendidikan mempunyai tugas melaksanakan supervisi manajerial, supervisi akademik dan evaluasi pendidikan pada satuan pendidikan. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016, Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.

Tugas pokok Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan meliputi : penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas pengawasan di daerah khusus. Supervisi Mutu Pendidikan adalah proses mengawal peningkatan

mutu pendidikan oleh LPMP bersama dengan Pengawas Sekolah. Hasil Supervisi Mutu Pendidikan yang dilakukan oleh Pengawas Sekolah perlu ditindaklanjuti agar dapat memberikan dampak yang signifikan bagi profesionalisme guru untuk manajemen kelas dan Kepala Sekolah untuk manajemen sekolah. Dampak nyata ini dapat dirasakan oleh Kepala Sekolah, Guru, dan Peserta didik, serta sekolah pada umumnya. Hasil dari Supervisi Mutu Pendidikan yang dilaksanakan oleh Pengawas sekolah perlu diketahui oleh Guru, Kepala Sekolah, Pemerintah Daerah dan seluruh **stakeholder** (pemangku kepentingan) yang peduli dengan pendidikan.

Satuan pendidikan yang akan disupervisi dalam pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) tahun 2020 sebanyak 4746 (empat ribu tujuh ratus empat puluh enam) satuan pendidikan/sekolah. Sekolah yang akan dilakukan Supervisi Mutu Pendidikan mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK yang tersebar di 10 (sepuluh) kabupaten/kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun rincian kegiatan yang akan dilakukan terkait dengan Supervisi Penjaminan Mutu Pendidikan adalah :

1. Penyusunan Bahan Supervisi Penjaminan Mutu Pendidikan
2. Bimbingan Teknis Supervisi untuk Pengawas Sekolah
3. Supervisi Satuan Pendidikan
4. Analisis Supervisi Mutu Pendidikan
5. Diseminasi dan Evaluasi Hasil Supervisi

Menurut salah satu Penanggungjawab Kegiatan, Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd mengatakan melalui Supervisi Penjaminan Mutu Pendidikan diharapkan pencapaian 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) di Nusa Tenggara Barat akan cepat terwujud dalam rangka Membangun NTB Gemilang. Pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) sejatinya bertujuan untuk Penjaminan Mutu Pendidikan dan Peningkatan Mutu Pendidikan. Pengawasan yang dilakukan oleh LPMP NTB bersama dengan Pengawas Sekolah dalam Supervisi Penjaminan Mutu Pendidikan, kami berharap tahun 2024 seluruh satuan pendidikan mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK di Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sinergitas antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat perlu terus ditingkatkan. Penjaminan Mutu Pendidikan dan Peningkatan Mutu Pendidikan adalah tanggung jawab bersama. “ Bersama Menjamin Mutu Mewujudkan NTB Gemilang “, pungkas Made.

Oleh : IMMA 2020

MELAYANI SEPENUH HATI DALAM WBK SUATU KEHARUSAN



Perilaku pegawai menjadi fokus utama dalam penilaian Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Secara umum terdapat perbedaan yang jelas antara pegawai yang telah tertanam budaya kerja (*corporate culture*) dengan yang belum. Pegawai yang berbudaya kerja tinggi pasti akan menunjukkan sikap keramahtamahan luar biasa kepada para pengunjung kantor terutama pada pelanggan yang akan dilayaninya, sekaligus bermaksud memperlihatkan pelayanan prima dari satuan kerjanya. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat sebagai lembaga layanan publik mau tidak mau suka tidak suka juga mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan yang prima, sehingga harus mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai *hospitality* paripurna. Sesuai dengan motto LPMP NTB dalam Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi “Melayani Sepenuh Hati” harus diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari ketika menjalankan tugas melayani masyarakat.

Ada beberapa indikator yang terkait dengan “Melayani Sepenuh Hati” adalah sebagai berikut :

A. Komunikasi yang Efektif

Keramahtamahan pegawai dalam melayani publik diawali dengan komunikasi yang tulus. Keramahtamahan yang dibuat-buat pasti tidak akan sama dengan keramahtamahan yang alamiah, yang didasarkan pada ketulusan hati. Pegawai tidak merasa dibebani tugas tambahan ketika harus melayani masyarakat, karena sudah merasakan bahwa pelayanan publik memang bagian dari tugas seorang aparatur negara. Pegawai harus mengoptimalkan proses komunikasi dengan tamu yang akan dilayani. Pegawai seyogyanya mendengar dengan sungguh-sungguh masalah yang diajukan oleh tamu. Dengan demikian pegawai dapat mengidentifikasi akar permasalahan sekaligus mengkonfirmasi secara langsung kepada tamu.

B. Kecepatan Layanan

Pegawai harus menyediakan layanan dengan cara yang paling cepat dan tepat. Meja pelayanan harus diminimalkan agar publik tidak harus pergi dari satu meja kemeja yang lain untuk mendapatkan layanan. Mata rantai pelayanan yang panjang dan berbelit-belit ala birokrasi zaman dahulu harus dihilangkan. Layanan akan lebih baik bila dipusatkan dalam satu meja dan dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat saat ini telah menyediakan Unit layanan terpadu (ULT). Didalam ULT masyarakat akan diberikan layanan satu pintu, sehingga lebih efektif dan efisien. Pegawai harus bisa mewujudkan mekanisme pelayanan yang memudahkan masyarakat. Semboyan lama kalau bisa dipesulit mengapa dipermudah harus dihilangkan dan sudah sangat ketinggalan zaman. Atas Pelayanan Terbaik yang diberikan Unit Layanan Terpadu (ULT) LPMP NTB tahun 2019 mendapatkan “Piagam Penghargaan” dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

C. Keterbukaan/Transparansi

Keterbukaan menjadi prinsip yang paling utama didalam penyediaan layanan publik berbasis keramah-tamahan. Informasi harus dapat diakses oleh publik secara jelas, cepat, dan mudah. Satuan kerja harus mengoptimalkan seluruh saluran informasi kepada publik terutama yang terkait dengan jenis layanan publiknya. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat saat ini memiliki 5 (lima) jenis layanan yaitu : Layanan Data dan Informasi Mutu Pendidikan, Layanan Supervisi Mutu Pendidikan, Layanan Kerjasama Penjaminan Mutu Pendidikan, Layanan Peminjaman Sarana dan Prasarana, dan Layanan Permohonan Narasumber. Jenis Layanan Data dan Informasi antara lain NUPTK, Dapodik, Sertifikasi, Hasil Ujian Nasional dan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Petugas harus menginformasikan Prosedur Operasional Standar (POS) secara jelas diawal kepada publik. Mekanisme layanan, kelengkapan persyaratan, lama pelayanan dan lain-lain harus disampaikan secara terbuka dan transparan kepada publik.

D. Netralitas/Tidak Diskriminatif

Dalam Pin/Emblem “ZI-WBK” LPMP NTB terdapat gambar Matahari berwarna merah pada lingkaran luarnya. Matahari dalam menyinari alam tidak pernah membedakan, dia akan menyinari semua makhluk atau benda yang ada didunia. Begitu juga dengan kita dalam memberikan pelayanan. Filosofinya dari gambar tersebut adalah dalam memberikan pelayanan kita harus netral/tidak diskriminatif baik untuk layanan internal maupun layanan eksternal. Dalam memberikan Pelayanan kepada masyarakat tidak membedakan agama, suku, ras, warna kulit, jenis kelamin, jabatan, dan kaya/miskin. Pemberian layanan publik harus bebas dari praktek-praktek ketidakadilan. Petugas layanan harus menghindari adanya konflik kepentingan. Petugas layanan harus bebas dan netral dari berbagai kubu. Petugas harus menyadari bahwa sebagai pelayan publik harus memberikan layanan terbaik kepada semua golongan dan elemen masyarakat. Petugas tidak boleh bersifat berat sebelah kepada suatu golongan, misalnya kepada putra daerah dengan kaum pendatang.

Menurut salah seorang Pegawai, juga sebagai pelayan masyarakat yang menangani Jenis “Layanan Supervisi Mutu Pendidikan” di Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd. mengatakan bahwa pada dasarnya semua Aparatur Negara adalah sebagai Pelayan publik. Sebagai seorang pelayan publik, semua Aparatur Negara harus memberikan Pelayanan yang Paripurna. “ Melayani Sepenuh Hati “ dalam Pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi harus selalu diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masyarakat merasa puas atas layanan yang telah diberikan. Dalam memberikan pelayanan kita harus dengan hati yang tulus ikhlas dan tanpa pamrih. “ Melayani Sepenuh Hati Suatu Keharusan dalam WBK “, kata Made.

Oleh : IMMA 2020

PERAN SATGAS PENGENDALIAN GRATIFIKASI DALAM MEMBANGUN ZI-WBK



Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme perlu dilakukan upaya pengendalian gratifikasi sebagai perwujudan integritas pegawai di lingkungan Kementerian dan Kebudayaan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Disamping program Penataan Sumber Daya Manusia (SDM), Program Penguatan Pengawasan memiliki prosentase sangat signifikan dalam komponen pengungkit yaitu 15%. Pengawasan harus diperkuat demi menjamin tercapainya sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Di level Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, sedangkan di level satuan kerja dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI). Pengawasan dilakukan dengan cara audit, konsultasi, dan penjaminan mutu.

Berdasarkan fakta dan data yang ada, kinerja Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kemendikbud dua tahun terakhir mengalami penurunan, Buktinya, Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kemendikbud Tahun 2017 tidak lagi memperoleh penghargaan dari KPK sebagai UPG terbaik dalam melaporkan gratifikasi, dan menurut data bahwa laporan gratifikasi tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2015. Tahun 2015 jumlah laporan gratifikasi sebanyak 51 laporan dengan nilai total Rp27.060.000,00 terdiri dari Rp11.990.000,00 berbentuk barang dan Rp15.070.000,00 berbentuk uang. Tahun 2016 jumlah laporan gratifikasi turun menjadi 37 laporan dengan nilai Rp16.685.000,00 terdiri dari Rp11.675.000,00 berbentuk barang dan Rp5.010.000,00 berbentuk uang. Tahun 2017 jumlah laporan gratifikasi turun lagi menjadi 30 laporan, tetapi dengan nilai uang meningkat yakni Rp249.935.650,00 yang terdiri dari Rp37.058.650,00 berupa barang, dan Rp212.877.000,00 berupa uang (Rp.189.077.000,- merupakan laporan pernikahan).

Berdasarkan latar belakang di atas, serta dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 072/P/2012 tentang Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi tugas pada huruf j yakni melakukan monitoring dan evaluasi mengenai efektivitas sistem pengendalian gratifikasi bersama-sama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),

Inspektorat Jenderal Kemendikbud memandang perlu melakukan monitoring dan evaluasi tentang kinerja Unit Pengendalian Gratifikasi Kemendikbud.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN dan RB) telah menetapkan 5 (lima) langkah untuk penguatan pengawasan berbobot 15% yang terdiri dari :

1. Pengendalian Gratifikasi (3%)
2. Penerapan SPIP (3%)
3. Pengaduan Masyarakat/Dumas (3%)
4. *Wistle Blowing System* (WBS) (3%)
5. Penanganan Benturan Kepentingan (3%)

Target yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara
2. Meningkatnya efektifitas pengelolaan keuangan Negara
3. Meningkatnya status opini BPK
4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang

Menindaklanjuti surat Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10260/F.F1.3/WS/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Program Pengendalian Gratifikasi yang akan diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka perlu dilakukan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan adanya Pemendikbud itu diharapkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di daerah juga membentuk Satgas Pengendalian Gratifikasi, memerintahkan seluruh pegawai untuk menolak gratifikasi, apabila tidak dapat menolak agar melaporkan penerimaan gratifikasi kepada Satgas Pengendalian Gratifikasi di instansi masing-masing, dan selanjutnya melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara langsung atau dapat melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Ketua Tim Pembangunan ZI-WBK Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd. mengatakan bahwa Pengendalian gratifikasi merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan kegiatan pengendalian gratifikasi, terdapat sejumlah prinsip-prinsip utama, yaitu: Transparansi; Akuntabilitas; Kepastian Hukum; Kemanfaatan; Kepentingan Umum; Independensi; dan Perlindungan bagi Pelapor. LPMP NTB perlu membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Gratifikasi. Satgas Pengendalian Gratifikasi ini akan ikut serta mengawal keberhasilan Pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK). Pengawasan diperkuat dengan memperbanyak tunas-tunas integritas yang anti korupsi khususnya gratifikasi agar bisa dikendalikan. Secara sistem pengawasan diperkuat melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan efektif dan efisien. Selain itu juga dibangun budaya agar pegawai dapat menyampaikan informasi tentang adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan antara prosedur dan implementasi. " Peran Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Gratifikasi sangat strategis dalam rangka mempercepat Pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme ", tutup Made.

Oleh : IMMA 2020

MELALUI ULT KELILING LPMP NTB LAKSANAKAN KAMPANYE ANTI KORUPSI



Berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat Nomor 172/C7/47/KP/2020 untuk melaksanakan Kegiatan Unit Layanan Terpadu “Keliling” yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari mulai tanggal 10-11 Pebruari 2020, di Kabupaten Lombok Barat. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) tidak pernah lepas selalu membuat Inovasi. Salah satu Inovasi yang dilakukan adalah melaksanakan 5 (lima) kegiatan pokok yaitu Sertifikasi, NUPTK, Dupak, Rumah Belajar dan Pojok Literasi serta satu kegiatan tambahan yaitu Kampanye Anti Korupsi. Kampanye Anti Korupsi dilakukan kepada anak-anak didik dan terkait dengan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK). Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) bukan saja sebagai bahan Literasi untuk orang dewasa/orang tua, tetapi juga sangat diperlukan oleh anak-anak yang sedang tumbuh kembang, termasuk para remaja yang sedang mencari jati dirinya. WBK adalah tanggungjawab kita bersama, baik orang tua, guru, anak didik, ataupun masyarakat yang peduli dengan Korupsi.

Selain memberikan layanan informasi kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Unit Layanan Terpadu (ULT) LPMP NTB menyediakan “Pojok Literasi” bagi siswa-siswi untuk dapat mengenal dan meningkatkan kecintaan anak-anak pada buku serta gemar membaca. Kampanye Anti Korupsi bukan saja diberikan untuk orang dewasa, tetapi sejak dini peserta didik harus tahu terkait dengan Korupsi. Dengan diberikannya Kampanye Anti Korupsi sejak awal diharapkan kelak setelah dewasa mereka sudah tahu keburukan/dampak kalau melakukan Korupsi. “ Saya Anak Anti Korupsi “, kalimat sederhana tapi penuh dengan makna. Ketua Tim Pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd. mengatakan dengan membaca “ Saya Anak Anti Korupsi “ semoga pola pikir dan pola tindak peserta didik kelak bisa menciptakan Wilayah Bebas dari Korupsi. Kami juga memberikan apresiasi, atensi, penghargaan, dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Tim Unit Layanan Terpadu (ULT) LPMP NTB yang telah ikut melaksanakan Kampanye Anti Korupsi di kabupaten Lombok Barat pada 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Narmada dan Kecamatan Lembar. Satuan Pendidikan/sekolah yang dipergunakan sebagai tempat Kampanye Anti Korupsi sebanyak 4 (empat) sekolah yaitu SDN 1 Dasan Tereng, SDN 1 Lembar Selatan, SDN 1 Kuta Batu, dan SDN 1 Jembatan Kembar. “ Semoga Kampanye Anti Korupsi membuahkan hasil dengan berkurangnya jumlah Korupsi “.

Menurut Kepala Subbagian Umum LPMP NTB Dra. Hj. Sri Sukriyani saat membuka Layanan Informasi menyampaikan bahwa “ kehadiran Unit Layanan Terpadu (ULT) Keliling sebenarnya dilakukan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat dan untuk mempermudah akses informasi yang diperlukan oleh Kepala Sekolah, Guru, dan yang tidak kalah pentingnya adalah peserta didik/siswa serta semua warga sekolah. Melayani Sepenuh Hati, bukan saja diucapkan tetapi sudah diinternalisasikan “.

Oleh : IMMA 2020

LPMP NTB AKHIRNYA MEMILIKI BUKU SAKU ATURAN PERILAKU PEGAWAI



Percepatan Implementasi dalam Pembangunan Zone Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) ada 8 (delapan) Strategi yaitu :

- a. Perencanaan Kinerja yang Matang
- b. Penampilan Fisik Kantor Prima dengan Kebersihan Optimal
- c. Penampilan Fisik Pegawai yang Sehat dan Bugar
- d. Keramah-tamahan Pegawai (*Hospitality*)
- e. Presentai yang Meyakinkan
- f. Keterampilan Interpersonal dan Etika Pegawai
- g. Penyajian Informasi
- h. Kampanye Anti Korupsi

Dari 8 (delapan) Strategi Percepatan Implementasi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) ada satu Strategi yang harus diimplementasikan oleh seluruh Pegawai baik Aparatur Sipil Negara (ASN) ataupun Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) adalah “ Keterampilan Inter Personal dan Etika Pegawai”, untuk itu perlu dibuatkan “Buku Saku Aturan Perilaku” yang akan dipedomani oleh seluruh pegawai LPMP NTB dalam melaksanakan tugas sehari-hari.” Keterampilan Inter Personal dan Etika Pegawai” perlu diinternalisasikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Buku Saku Aturan Perilaku Pegawai ini memuat Nilai-Nilai Dasar (*Core Values*) yaitu : Nilai-nilai dasar PNS sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, yaitu:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Bersemangat nasionalisme;
- d. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. Taat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- f. Menghormati terhadap hak asasi manusia;
- g. Tidak membeda-bedakan (diskriminatif);
- h. Profesional, netral, dan bermoral tinggi; dan
- i. Bersemangat jiwa korps.

Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari, sedangkan Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik. Kode Etik meliputi :

- a. Etika terhadap diri sendiri;
- b. Etika terhadap sesama pegawai;
- c. Etika dalam berorganisasi;

- d. Etika dalam bermasyarakat; dan
- e. Etika dalam bernegara.

Program penataan sistem manajemen SDM memiliki bobot persentase sangat signifikan dalam komponen pengungkit yaitu sebesar 15%. Sistem manajemen SDM ditinjau dari segi perseptif reformasi birokrasi tidak hanya bersifat kelengkapan administratif tetapi juga harus bisa mengantisipasi kebutuhan organisasi untuk berkembang sesuai dengan tuntutan jaman melalui penyediaan SDM yang tangguh dan andal. Birokrasi yang baik didukung SDM yang kompeten, professional, dan berintegritas. Untuk memperoleh SDM berkualitas baik, maka institusi harus menerapkan sistem manajemen SDM yang obyektif berdasarkan prinsip meritokrasi. Sistem tersebut harus komprehensif mulai dari perencanaan, perekrutan, pengembangan, dan pemensiunan.

Kemen PAN dan RB telah menetapkan 6 (enam) langkah untuk penataan sistem manajemen SDM berbobot 15% yang terdiri dari

- a. Perencanaan pegawai sesuai dengan kebutuhan (2%)
- b. Pola Mutasi Internal (2%)
- c. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (3)
- d. Penetapan kinerja individu (4%)
- e. Penegakan disiplin, kode etik/aturan perilaku (3%)
- f. Sistem informasi kepegawaian (1%)

Salah satu langkah untuk Penataan Sistem Manajemen SDM yang ditetapkan oleh MenPAN dan RB yaitu “Penegakan disiplin, kode etik/aturan perilaku” yang mempunyai bobot 3%. Dalam rangka pembinaan SDM dilingkungan LPMP NTB sejalan dengan upaya reformasi birokrasi, perlu ditetapkan aturan perilaku yang dapat membuat pegawai sebagai warga negara maupun masyarakat baik secara individu maupun sebagai anggota organisasi harus melaksanakan etika secara baik. Sebagai pelayan dan anggota masyarakat yang melaksanakan etika bermasyarakat secara baik, dan dengan sesama pegawai harus melaksanakan etika sesama pegawai secara baik, serta sebagai individu yang menjaga etika terhadap diri sendiri secara baik.

Dengan diterbitkannya “Buku Saku Aturan Perilaku Pegawai” LPMP NTB merupakan tindak lanjut dari Permendikbud RI Nomor 16 Tahun 2012 tanggal 16 April 2012 tentang Kode Etik Pegawai dilingkungan Kemendikbud, maka seluruh pegawai LPMP NTB wajib mentaati dan mengimplementasikan hal-hal yang diatur dalam aturan perilaku tersebut. Menurut Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd., Kepala Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi selama ini LPMP NTB belum memiliki Buku Saku Aturan Perilaku Pegawai. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku semuanya harus diimplementasikan oleh seluruh pegawai. Buku Saku Aturan Perilaku Pegawai LPMP NTB sangat dibutuhkan dalam rangka menegakkan disiplin dan sebagai panduan sikap, perilaku, dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi diperlukan aturan perilaku dalam melaksanakan tugas dan pergaulan sehari-hari, sehingga pelayanan yang akan diberikan merupakan Pelayanan Prima sesuai dengan harapan dan keinginan dari masyarakat. Kode Etik Pegawai di Lingkungan LPMP NTB adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan pegawai dilingkungan LPMP NTB dalam melaksanakan tugas dan pergaulan sehari-hari di kantor dan di lingkungan masyarakat.

Oleh : IMMA 2020

LPMP NTB LAKSANAKAN PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZI-WBK



Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) pada tanggal 18 Februari 2020 melaksanakan “Pencanangan Pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK)”. Pencanangan Pembangunan Zone Integritas menuju WBK dilaksanakan di Hotel Jayakarta, Senggigi Kabupaten Lombok Barat, yang dilakukan oleh Kepala LPMP NTB dan disaksikan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Provinsi NTB, Anjak Tipikor Bareskrim Polri Jakarta dan Inspektur II Itjen Kemendikbud RI. Hadir pula Kepala Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BPPAUD Dikmas) NTB, Kepala Kantor Bahasa NTB, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dilingkungan LPMP NTB, Media Massa, serta peserta *In House Training (IHT)* lainnya.

Selain “Pencanangan Pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi” juga dilakukan Penandatanganan “Maklumat Keterbukaan Informasi Publik” oleh Kepala LPMP NTB sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Seluruh Pegawai LPMP NTB baik ASN maupun PPNPN menandatangani “Komitmen Bersama” terkait Pembangunan ZI-WBK. Penandatanganan Komitmen Bersama itu sangat penting, untuk menunjukkan bahwa seluruh pegawai LPMP NTB terlibat dalam Pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK). Diakhir Pencanangan juga dilakukan penandatanganan Pakta Integritas dan Penetapan Kinerja. Semua kegiatan yang dilakukan ini dalam rangka merubah pola pikir (*mind set*) pegawai agar mau melakukan reformasi, minimal mereformasi diri sendiri, sebelum mereformasi orang lain. Perubahan *mind set* itu sangat penting dan paling utama dalam Reformasi Birokrasi. Sehebat apapun sarana prasarana disiapkan, tetapi tanpa didukung oleh perubahan *mind set* SDM yang paripurna, tidak akan mungkin WBK terwujud.

Ada 5 (lima) kata kunci Satuan Kerja (Satker) agar bisa meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yaitu :

1. Kepemimpinan merupakan faktor penentu terpenting dalam strategi menuju WBK. Pemimpin harus memahami 6 (enam) area perubahan WBK, yang dikenal dengan komponen pengungkit. Komponen pengungkit adalah kegiatan-kegiatan konkret yang dapat dilakukan satuan kerja untuk membangun WBK. Ada 6 (enam) kegiatan yang dapat dilakukan yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Mutu Pelayanan Publik. Keenam pengungkit itu masing-masing dipimpin oleh Tim, dan masing-masing Tim harus bisa berkolaborasi. Mustahil Predikat WBK diraih tanpa Kolaborasi. Pemimpin akan menggerakkan seluruh pegawai menuju perubahan yang diperlukan untuk WBK
2. Manajemen dan administrasi yang tertib dan rapi sangat penting bagi satuan kerja untuk membuktikan, bahwa prinsip tatakelola yang baik sebagai potensi WBK sudah diterapkan.
3. Sumber daya organisasi harus dioptimalkan secara efisien. Sumber daya terpenting adalah SDM yang menetapkan Budaya Kinerja. Dengan demikian maka SDM akan memiliki etos kerja tinggi dan produktif menghasilkan *output* yang bermanfaat bagi masyarakat.
4. Budaya kinerja menjadi isu strategis terpenting karena menekankan pentingnya sinkronisasi antara indikator kinerja Renstra Kemendikbud, Renstra Unit Utama, dan Renstra UPT. Budaya Kinerja juga menyatakan pentingnya hubungan yang jelas antara indikator kinerja organisasi dengan indikator kinerja individu pegawai. Hasil kinerja tidak hanya *output* tetapi juga *outcome* demi kemaslahatan publik.
5. Pelayanan publik yang inovatif sangat menjadi penentu bagi satuan kerja untuk disematkan menjadi WBK. Satuan kerja harus menjamin bahwa pelayanan publik harus bermutu dan disajikan secara transparan, cepat, dan adil/tidak diskriminatif.

Sebelum “Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi “, Kepala LPMP NTB Bapak Mohamad Mustari, M.Pd. menyampaikan maksud dan tujuan dari “Pencanangan Pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) “ yaitu Meningkatkan Komitmen Bersama, Sinergitas, Kekompakan, dan Kerjasama seluruh Pegawai baik ASN maupun PPNPN dilingkungan LPMP NTB dalam Pembangunan ZI-WBK. “Pencanangan Pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) “ dilingkungan LPMP NTB disamping disaksikan oleh pihak Internal juga disaksikan oleh Pihak Eksternal, dan baru tahun 2020 “Pencanangan “ ini disaksikan oleh Pihak Eksternal diluar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu dari Kepolisian Republik Indonesia dan dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat. Ini merupakan salah satu langkah maju yang dilakukan oleh LPMP NTB.

Menurut Penanggungjawab *In House Training* (IHT) Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd., “Pencanangan Pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) “ dilingkungan LPMP NTB Tahun 2020 ini merupakan tonggak sejarah baru bagi LPMP NTB, pertama didalam Piagam Pencanangan tersebut disaksikan dan ditandatangani juga oleh pihak eksternal diluar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kedua dilakukan juga Penandatanganan “Maklumat Keterbukaan Informasi Publik “ yang merupakan internalisasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. “Mari kita keluar dari Kepompong Masa lalu menuju kearah perubahan yang lebih baik, berintegritas, dan Ciptakan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) “, tutup Made.

Oleh : IMMA 2020

MENUJU WBK LPMP NTB SELENGGARAKAN IHT



Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor 10 Tahun 2019 perubahan dari PermenPAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembagunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBK dan WBBM) dilingkungan Instansi Pemerintah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga melaksanakan Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi sejatinya merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan professional dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government* menuju aparatur negara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, meningkatnya pelayanan prima serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Guna mewujudkan perilaku tersebut telah dilakukan langkah-langkah strategis melalui Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan penetapan Satuan Kerja untuk diusulkan menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat, sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan didaerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Pembangunan ZI WBK/WBBM. Melalui *In House Training (IHT)* Pengembangan Kapasitas SDM, diharapkan Peningkatan Kinerja LPMP NTB dapat segera diwujudkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Maksud dan tujuan dari kegiatan dari *In House Training (IHT)* ini adalah

1. Meningkatkan pemahaman tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK)
2. Meningkatkan kemampuan Pegawai LPMP NTB dalam Implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK)
3. Meningkatkan sinergitas, kekompakan, dan kerjasama seluruh Pegawai LPMP NTB
4. Mengembangkan Kapasitas SDM dalam rangka Peningkatan Kinerja melalui Implementasi ZI-WBK

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemahaman peserta tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK)
2. Meningkatnya kemampuan peserta dalam Implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK)
3. Meningkatnya sinergitas, kekompakan, dan kerjasama seluruh Pegawai LPMP NTB

4. Pencanangan dan Penandatanganan Piagam Pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Penandatanganan Maklumat Keterbukaan Informasi Publik, Penandatanganan Komitmen Bersama, Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Pegawai LPMP NTB, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Kegiatan ini dilaksanakan selama 4 (empat) hari mulai tanggal 17-20 Pebruari 2020 di Hotel Jayakarta dan diikuti oleh 117 (seratus tujuh belas) orang baik sebagai peserta maupun sebagai panitia, yang berasal dari LPMP NTB (seratus sebelas orang), Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BPPAUD Dikmas) NTB (tiga orang), dan Kantor Bahasa NTB (tiga orang). Kegiatan ini sepenuhnya dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) LPMP NTB tahun 2020.

Saat membacakan Laporan Penyelenggaraan *In House Training (IHT)* , Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) Bapak Mohamad Mustari, Ph.D, dalam laporannya beliau menyampaikan bahwa Reformasi Birokrasi yang diprogramkan oleh pemerintah perannya sangat strategis dalam kerangka perbaikan Tatakelola pemerintahan yang lebih baik, sehingga pelayanan yang diberikan oleh aparatur Negara sangat memuaskan cepat, mudah, murah, tepat, transparan, dan akuntabel. Atas Tatakelola Baik yang telah dilakukan, LPMP NTB tahun 2019 telah meraih beberapa Piagam Penghargaan antara lain : Piagam Penghargaan Atas Pengelolaan Keuangan Negara, Piagam Penghargaan atas Kinerja Unit Layanan Terpadu (ULT) dan Piagam Penghargaan Atas Kinerja Satuan Pengawasan Intern (SPI) Terbaik, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta dari Yayasan Plan Internasional Indonesia Atas Partisipasi Akif dalam membantu Penanggulangan Pascagempa Lombok-Sumbawa. Kita berharap Sinergitas dan Komitmen Bersama seluruh warga LPMP NTB baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) akan terus kita tingkatkan, dalam rangka menuju WBK “ Bersama Menjamin Mutu, Melayani Sepenuh Hati “, tutup Mustari.

In House Training (IHT) dibuka oleh Dirjen Paud, Dikdas, dan Dikmen Kemendikbud yang diwakili oleh Kabag Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian Bapak Suhartono Harham, dalam pengarahannya beliau menyampaikan *IHT* ini sangat penting dan strategis dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui implementasi Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK). Beliau berharap semoga LPMP NTB tahun 2020 bisa meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan selanjutnya bisa mempertahankannya. Jangan sampai setelah mendapatkan Predikat WBK instansi tersebut melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), sehingga Piagam Penghargaan Predikat WBKnya dicabut. Kata kunci dari Reformasi Birokrasi adalah Integritas.

Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd. selaku Penanggungjawab kegiatan menyampaikan, *In House Training (IHT)* Pengembangan Kapasitas SDM LPMP NTB ini difasilitasi oleh 5 (lima) orang Narasumber yaitu Dirjen Paud, Dikdas, dan Dikmen Kemendikbud (Suhartono Harham Kabag Hukum, Tatalaksana dan Kepegawaian), Irjen Kemendikbud (Subiyantoro Inspektur II dan Maralus Panggabean Auditor Utama), Anjak Tipikor Bareskrim Polri Jakarta (KBP Indarto), Kepala LPMP Lampung (Dr. Zukirman), dan dari Tim *Outbound*. Dalam kegiatan IHT ini juga dilaksanakan “ Pencanangan Pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) “, Penandatanganan “Maklumat Keterbukaan Informasi Publik “, Komitmen Bersama, Pakta Integritas, dan Penetapan Kinerja. Kami berharap semoga dengan IHT ini Kapasitas Sumber Daya Manusia LPMP NTB bisa ditingkatkan terutama terkait *Mind Set*.

Oleh : IMMA 2020

PERAN MANAJEMEN MEDIA DALAM ZI-WBK



“ Studi Kasus Pembangunan Zona Integritas di Polres Metro Bekasi Kota ”, salah satu paparan *Best Practice* yang disampaikan oleh Kombes Pol. Dr. Indarto, SH., S.Sos., S.I.K., M.Si. (Analisis Kebijakan Madya Bidang Pidkor Bareskrim Polri). Beliau merupakan salah satu Narasumber dalam kegiatan *In House Training (IHT)* yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat, selama 4 (empat) hari dari tanggal 17-20 Pebruari 2020 bertempat di Hotel Jayakarta, Senggigi Lombok Barat. Kegiatan diikuti oleh 117 (seratus tujuh belas) orang peserta baik dari LPMP NTB, Kantor Bahasa NTB, dan Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BPPAUD Dikmas) NTB, mengambil tema “ Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Implementasi ZI-WBK.”

Best Practice yang disampaikan terkait dengan Upaya-Upaya yang dilakukan untuk bisa meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Ada 4 (empat) upaya yang dilakukan oleh Polres Metro Bekasi Kota dalam meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Republik Indonesia, yaitu :

1. Meningkatkan Perubahan Kultur
Pemantapan nilai-nilai anti korupsi dan pelayanan prima kepada masyarakat
2. Meningkatkan Pelayanan Publik
Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu SDM, Sarana dan Prasarana, dan Metoda
3. Mempererat Hubungan dengan Masyarakat
Menciptakan kepercayaan dan kerjasama dengan masyarakat terkait layanan yang diberikan
4. Melakukan Manajemen Media
Titik tekannya adalah Publikasi, Masukan/Keluhan, Transparansi, dan Akuntabilitas

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Polres Metro Bekasi Kota adalah “ Melakukan Manajemen Media”. Manajemen Media yang dilakukan antara lain :

1. Media Sosial Polres
2. Perbaikan Fitur *Website*
3. *Chat Online Via Whatsapp*
4. *E-Survey*

Aplikasi Sosial Media yang dipergunakan adalah *Facebook, Twitter, dan Instagram*. Ketiga-tiganya sebagai sarana media untuk penyebaran mengenai Kegiatan Polres Metro Bekasi Kota dan Pelayanan Polres Metro Bekasi Kota, dan menampung keluhan serta aspirasi publik. Perbaikan Fitur *Website* yang telah dilakukan antara lain : Panggilan Darurat, Antrian online, Pelayanan SKCK, SKCK online, E-Promoter, FAQ, Konsultasi Hukum, Tips Pencegahan Kejahatan, Testimoni Kepolisian, Daftar Temuan Kendaraan, Keluhan Pelayanan, Konsultasi Bahaya Narkoba, Pelayanan SPKT (Pengaduan Pidana/Kehilangan), Lapor Tindak Pidana Korupsi, E-Survey, Pelayanan SIM, SIM Online Polri, dan Simulasi Ujian SIM. Disamping itu juga dilakukan *Chat Whatsapp* dan *E-Survey* terkait Penilaian Pelayanan di Polres Metro Bekasi Kota. Dengan banyaknya Fitur-fitur pilihan layanan dalam *website* dimungkinkan masyarakat akan merasa terlayani dengan baik, cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan kredibel.

Menurut Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd. selaku Ketua Tim Pembangunan ZI-WBK, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) perlu melakukan ATM (Amati, Tiru, dan Modifikasi) apa yang telah dilakukan oleh Polres Metro Bekasi Kota sehingga bisa meraih Predikat WBK. Apa yang sudah dilakukan oleh Polres Metro Bekasi Kota, sebenarnya LPMP NTB juga sudah sebgain besar melakukannya. Saat ini LPMP NTB juga sudah memiliki *Facebook, Twitter, Whatsapp, dan Youtube*, termasuk juga *Website*. Semua media sosial itu harus diaktifkan dan selalu di update setiap saat. Terkait dengan *Website*, LPMP NTB harus banyak belajar *Best Practice* dari Polres Metro Bekasi Kota. “ Perbaikan Fitur *Website* “ perlu segera dilakukan, sehingga masyarakat bisa memilih alternatif-alternatif layanan sesuai dengan kebutuhannya. Melalui Media kita akan cepat mengetahui keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan layanan yang telah diberikan dan mencari solusi pemecahannya sehingga pelayanan yang akan diberikan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dengan Media Sosial juga masyarakat akan bisa menyampaikan aspirasi dan inspirasi yang diinginkan untuk peningkatan kualitas pelayanan dan pada akhirnya kinerja lembaga akan menjadi lebih baik. LPMP NTB saat ini juga sudah berkerjasama dengan beberapa media cetak dan media elektronik, sebagai Sarana Media untuk penyebaran informasi mengenai Kegiatan, Pelayanan, dan Keluhan/Masukan dari masyarakat terkait dengan Pelayanan dari LPMP NTB. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan seluruh Instansi Pemerintah berkewajiban untuk memberikan Layanan Keterbukaan Informasi Publik secara akurat, transparan, dan akuntabel. “ Peranan Manajemen Media sangat penting dan strategis dalam Pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK)“, ungkap Made.

Oleh : IMMA 2020

KAMPANYE ANTI KORUPSI PERCEPAT PERUBAHAN MIND SET



Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah area dimana aparaturnya memahami dan menghindari 7 (tujuh) Prilaku Korupsi, meliputi perbuatan yang merugikan keuangan negara, menyuap, memeras, menggelapkan, berbuat curang, konflik kepentingan, dan gratifikasi. Sikap anti korupsi harus benar-benar ditanamkan dibenak aparaturnya. Sehubungan dengan sifat manusia yang mudah lupa, maka harus terus-menerus diingatkan. Oleh karena itu satuan kerja (satker) harus melakukan kampanye anti korupsi yang memadai.

A. Poster

Poster bisa dipasang di dinding ruangan atau selasar strategis. Informasi dalam poster cukup singkat secara garis besar dengan ilustrasi menarik, sehingga mudah dibaca oleh pegawai secara cepat. Fungsi poster adalah mengingatkan pegawai tentang isu-isu strategis seperti Zone Integritas, Wilayah Bebas dari Korupsi, 7 Jenis Tindak Pidana Korupsi, Tolak Gratifikasi, dan lain-lain.

B. Banner

Banner adalah media poster berdiri yang bisa diletakkan pada ruang tamu utama (*Lobby*) atau didepan pintu ruangan pertemuan atau ruang rapat strategis. *Banner* memiliki fungsi yang sama seperti poster di dinding yaitu mengingatkan pegawai tentang isu strategis.

C. Info Grafis

Info Grafis merupakan informasi dalam ukuran kertas memuat keterangan yang lebih terperinci daripada poster dan *banner*. Info grafis biasanya memuat informasi dalam bentuk skema atau bagan dengan ilustrasi yang menarik. Fungsi info grafis adalah sebagai penjelasan atas isu-isu strategis yang telah dikemukakan pada poster atau *banner*.

- D. Buletin atau Majalah
Satuan Kerja bisa menerbitkan Buletin/majalah secara berkala. Penerbitan majalah/buletin menyampaikan berita tentang kegiatan satuan kerja termasuk upaya menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) untuk diketahui masyarakat umum dan pegawai secara khusus. LPMP NTB saat ini mempunyai Buletin “ KITA “ yang **Komunikatif, Informatif, Terpercaya, dan Akurat**.
- E. *Website/Laman* Satker
Satuan kerja membuat laman diinternet sebagai media informasi yang bisa diakses masyarakat secara mudah dimana saja dalam berbagai kesempatan. Kunci utama pengelolaan laman adalah melakukan pemuktahiran data (*updating*) secara berkala.
- F. Media Sosial lainnya
Media sosial lainnya yang bisa dipergunakan dalam kampanye anti korupsi melalui *WhattShap, Twitter* atau *Facebook*. Dalam Era Generasi Millineal saat ini media sosial merupakan suatu keharusan, perubahan yang terjadi begitu cepat sehingga dibutuhkan media yang cepat, tepat, dan mudah diakses oleh generasi muda atau masyarakat secara umum.

Selain media diatas Kampanye Anti Korupsi juga bisa dilakukan melalui koran/media cetak, stiker, Emblem/PIN “ZI-WBK”, dan *Footnote* “ Pegawai LPMP NTB tidak menerima Gratifikasi dalam melaksanakan tugas ” pada Surat Tugas Pegawai. Salah satu media yang paling penting dan utama dalam percepatan Perubahan *Mind Set* adalah dengan menggunakan lagu dan musik. Lagu dan Musik adalah sifatnya Universal. Setiap orang suka akan lagu dan musik, tanpa terkecuali mulai dari anak-anak, remaja, maupun orang dewasa/orang tua. Tidak mengenal strata sosial, orang kaya/miskin, penduduk desa/perkotaan semua orang menggemari lagu dan musik. Untuk itulah Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) membuat inovasi dalam Kampanye Anti Korupsi, Pembuatan Lirik Lagu. Makna dari Lirik lagu yang dibuat adalah terkait dengan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan mengajak semua Pegawai LPMP NTB untuk Menciptakan WBK, Membersihkan diri dari Korupsi, dan Memberikan Pelayanan yang Sepenuh Hati kepada *Stakeholder*.

Menurut Ketua Tim Pembangunan ZI-WBK Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd., Ide kreatif yang kami buat dalam kerangka mempercepat perubahan *mind set* pegawai yang ada dilembaga ini, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) ataupun Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). “ Pembuatan Lirik Lagu ini sebagai salah satu **Inovasi dan Motivasi** bagi Pegawai yang ada di LPMP NTB. Lirik lagu ini pertama kali diperdengarkan kepada publik khususnya pegawai LPMP NTB saat dilaksanakannya *In House Training (IHT)* Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dari tanggal 17-20 Pebruari 2020 di Hotel Jayakarta, Senggigi Kabupaten Lombok Barat. Semoga dengan Lirik Lagu “WBK “ Perubahan *Mind Set* dalam kerangka Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) akan segera terwujud “, tutup Made.

“ WBK “

**Lirik : IMMA 2020
(2-2-2020)**

**Marilah Kita Semua Ciptakan
Wilayah Bebas dari Korupsi
Disini WBK, Disana WBK
LPMP NTB Pasti Bisa**

**Wilayah Bebas dari Korupsi
Integritas itu Kunci Utama
Aku Brani, Kita Semua Berani
Bersihkan Diri dari Korupsi**

**Marilah Kita Semua Berikan
Pelayanan Yang Sepenuh Hati
Disini Senang, Disana Senang
Kita Semua Jadi Pemenang**

Reff :

**Marilah Kita Semua Ciptakan
Wilayah Bebas dari Korupsi
Disini WBK, Disana WBK
LPMP NTB Pasti Bisa**

**Wilayah Bebas dari Korupsi
Integritas itu Kunci Utama
Aku Brani, Kita Semua Berani
Bersihkan Diri dari Korupsi**

**Marilah Kita Semua Berikan
Pelayanan Yang Sepenuh Hati
Disini Senang, Disana Senang
Kita Semua Jadi Pemenang
Kita Semua Jadi Pemenang**

Oleh : IMMA 2020

PENUTUPAN *IN HOUSE TRAINING (IHT)* LPMP NTB BERLANGSUNG MERIAH



Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat(LPMP NTB) telah sukses menyelenggarakan kegiatan *In House Training (IHT)* yang berlangsung dari tanggal 17-20 Pebruari 2020 bertempat di Hotel Jayakarta Senggigi, Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan yang diikuti oleh 117 (seratus tujuh belas) orang peserta berlangsung sukses dan meriah. Dihari keempat tanggal 20 Pebruari 2020 sebelum acara Penutupan, telah dilakukan senam bersama, *Clean up Beach* sepanjang 1 KM, Pembacaan Komitmen Bersama, dan Penandatanganan Komitmen Bersama baik dengan tanda tangan maupun dengan cap tangan. LPMP NTB ikut mendukung Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan visinya “ Membangun NTB Gemilang “, maka untuk mewujudkan visi tersebut diturunkan menjadi beberapa misi yaitu : NTB Tangguh dan Mantap, NTB Bersih dan Melayani, NTB Sehat dan Cerdas, NTB Asri dan Lestari, NTB Sejahtera dan Mandiri serta NTB Aman dan Berkah. Salah satu Misi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daeran NTB adalah NTB “Asri dan Lestari”. Untuk mewujudkannya Pemda membuat program/gerakan “Zero Waste”. Pemerintah Daerah NTB juga mempunyai program tahun 2023 bebas sampah.

Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh LPMP NTB berupa *Clean up Beach* (kebersihan pantai) yang bertujuan mensukseskan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah NTB yaitu dengan Gerakan “ Zero Waste “. Semua peserta *IHT* melaksanakan gerakan Kebersihan Pantai, dimana sampah organik dan non organik dipilah/ dipisahkan. Sampah anorganik berupa plastik dan sejenisnya dikumpulkan dalam karung lalu ditimbang untuk dinilai oleh Tim *out bound*. Kelompok yang terbanyak mengumpulkan sampah an organik sebagai pemenang. Peserta juga diharapkan bisa mengajak masyarakat dipesisir pantai untuk peduli terhadap kebersihan lingkungan terutama

pengurangan penggunaan plastik serta memanfaatkan limbah plastik sebagai barang bernilai ekonomis tinggi. Pada saat penutupan dibagikan beberapa hadiah kepada Kelompok peserta Lomba, juga diberikan hadiah kepada peserta yang nilai antara *Pre test* dan *Post test* mengalami kenaikan yang signifikan. *Pre test* dan *post test* dilaksanakan dengan sistem dalam jaringan (daring) menggunakan telepon seluler. Begitu juga untuk melihat keberhasilan pelaksanaan kegiatan dilakukan “Evaluasi Penyelenggaraan” dengan sistem daring. Ini merupakan salah satu inovasi yang dilakukan LPMP NTB untuk pemanfaatan IT dalam penyelenggaraan kegiatan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor 10 Tahun 2019 perubahan dari PermenPAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembagunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBK dan WBBM) dilingkungan Instansi Pemerintah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga melaksanakan Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi sejatinya merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government* menuju aparatur negara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, meningkatnya pelayanan prima serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Untuk itu Tata Nilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus diimplementasikan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, seperti Integritas, Kreatif dan Inovatif, Tanpa Pamrih, Aktif, Meritokrasi, Pembelajar, dan Inisiatif.

Menurut Kepala LPMP NTB Bapak Mohamad Mustari, Ph.D, Kegiatan *In House Training (IHT)* Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) sangat selaras dengan Kebijakan Pemerintah menyangkut Reformasi Birokrasi. Salah satu Tata nilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia adalah “ Inisiatif “ sudah diinternalisasikan oleh seluruh pegawai LPMP NTB melalui kegiatan *Clean up Beach* (Kebersihan pantai) sepanjang 1 KM. LPMP NTB berinisiatif untuk mengajak masyarakat pesisir pantai untuk bersama-sama membersihkan lingkungan pantai dan memberikan edukasi/pembelajaran kepada masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik dan bahaya penggunaan plastik secara berlebihan bagi lingkungan dan bumi kita. Saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Pejabat Struktural dilingkungan LPMP NTB dan seluruh peserta *In House Training (IHT)* yang sama-sama mensukseskan kegiatan ini. “ Kegiatan *In House Training (IHT)* berjalan dengan lancar, sukses dan meriah”, tutup Mustari.

Oleh : IMMA 2020

LPMP NTB LAKUKAN PENDAMPINGAN PADA 200 SEKOLAH MODEL



FOTO BERSAMA : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa H.Syahril, S.Pd (tiga dari kanan), dan Widyaiswara LPMP NTB Rustam Effendi, S.Kom.,MT (dua dari kiri). Kegiatan Pendampingan Pemetaan Mutu oleh LPMP NTB pada Induk Kluster Sekolah Model SPMI

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan semakin eksis membangun Pendidikan di Propinsi Nusa Tenggara Barat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, Tugas LPMP adalah melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dipropinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam melaksanakan tugasnya LPMP menyelenggarakan fungsi:

1. Pemetaan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah
2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah
3. Supervisi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP)
4. Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan terhadap Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Penjaminan Mutu Pendidikan
5. Pelaksanaan Kerjasama Dibidang Penjaminan Mutu Pendidikan
6. Pelaksanaan Urusan Administrasi LPMP

Salah satu fungsi dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) adalah Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan. Pendampingan sekolah yang akan difasilitasi oleh LPMP NTB

Tahun 2020 adalah sebanyak 200 (dua ratus) Sekolah Model mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK diseluruh kabupaten/kota se Nusa Tenggara Barat.

Program/kegiatan yang akan dilakukan oleh LPMP NTB dalam fasilitasi sekolah tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
2. Bimbingan Teknis Sistem Penjaminan Mutu Internal
3. Penyusunan Program dan Bimtek Pendampingan SPMI
4. Pendampingan Sekolah yang Difasilitasi oleh LPMP
5. Asistensi dan MOU Bantuan Pemerintah
6. Penyaluran Bantuan Pemerintah
7. Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPMI di Sekolah yang Difasilitasi oleh LPMP

Pendampingan sekolah yang difasilitasi oleh LPMP NTB adalah terkait dengan Sekolah Model. Sekolah model adalah sekolah yang diusulkan oleh dinas pendidikan propinsi untuk jenjang Pendidikan menengah dan kabupaten/kota untuk jenjang pendidikan dasar dan ditetapkan oleh LPMP NTB untuk menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan disatukan pendidikan dalam pencapaian Standar Nasional Pendidikan atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sekolah yang akan ditetapkan sebagai Sekolah Model harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya : Akreditasi B, belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP), letaknya strategis, dan yang terpenting adalah sekolah mempunyai komitmen yang tinggi dalam penjaminan mutu pendidikan khususnya dalam menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Untuk tahun 2020 Provinsi NTB mempunyai 200 (dua ratus) sekolah model, satu sekolah model mempunyai 5 (lima) sekolah imbas. Jumlah sekolah imbas NTB kurang lebih 1.000 (seribu) sekolah, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Sekolah model yang ada akan dipergunakan sebagai acuan bagi sekolah lain disekitarnya dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), sebagai pusat sumber belajar, sebagai Laboratorium serta sebagai narasumber.

Menurut salah satu Penanggungjawab Kegiatan Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd., Fasilitasi Sekolah yang dilakukan oleh LPMP NTB bertujuan agar Sekolah Model melakukan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Peningkatan Mutu Pendidikan sehingga sekolah berbudaya mutu dan pada akhirnya akan mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP) bahkan melampaui SNP. Sekolah Model yang telah 3 (tiga) tahun mendapatkan bantuan pemerintah (bantah) dari LPMP NTB tidak akan diberikan lagi, dan diharapkan bisa melakukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara mandiri. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Bab XV tentang Penjaminan Mutu, pada Pasal 13 menjelaskan :

- (1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan
- (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP)
- (3) Penjaminan Mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu pendidikan yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

Pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (SPMPDM) Bab VI pasal 13 menyebutkan :

- (1) Satuan Pendidikan yang tidak menjalankan peraturan ini sesuai dengan tugas dan wewenangnya diberikan peringatan dan/atau penghentian bantuan peningkatan mutu
- (2) Pemerintah Daerah yang tidak menjalankan peraturan ini sesuai dengan tugas dan wewenangnya dilakukan pengurangan dan/atau penghentian pemberian bantuan peningkatan mutu oleh Pemerintah.

“Kami berharap sekolah yang tidak mendapat bantuan pemerintah (bantah) lagi masih tetap eksis melakukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam rangka pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP)”, pungkas Made.

Oleh : IMMA 2020

INTERNALISASI “MAKLUMAT KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK”



FOTO BERSAMA : Kepala LPMP NTB, Mohamad Mustari, Ph.D (keempat dari kanan) berfoto bersama selesai Penandatanganan “Pencanangan Pembangunan ZI-WBK” dan “Maklumat Keterbukaan Informasi Publik” disaksikan oleh Pihak Eksternal diluar Kemendikbud Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Prov.NTB (tiga dari kanan) dan Kepolisian RI (empat dari kiri), juga dari Pihak internal Kemendikbud Kepala BPPaud Dikmas NTB, Kepala Kantor Bahasa NTB dan Pejabat Struktural LPMP NTB

Menyadari bahwa informasi merupakan kebutuhan dan hak setiap orang serta modal untuk kemajuan bangsa, dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu komponen utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, maka Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat akan selalu berupaya memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan berkomitmen untuk Memberikan Layanan Keterbukaan Informasi Publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 secara akurat, transparan dan kredibel. Dalam rangka memberikan layanan Keterbukaan Informasi Publik, Program dan Kegiatan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat perlu juga disampaikan atau diketahui oleh masyarakat, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Masyarakat berhak untuk bersama-sama mengawal dan mengawasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Untuk Pembangunan ZI-WBK di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB), maka diperlukan beberapa Strategi Percepatan Implementasi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yaitu:

- Strategi 1 Perencanaan Kinerja yang Matang
- Strategi 2 Penampilan Fisik Kantor Prima dengan Kebersihan Optimal
- Strategi 3 Penampilan Fisik Pegawai yang Sehat dan Bugar
- Strategi 4 Keramah-tamannya Pegawai (*Hospitality*)

Strategi 5 Presentasi yang Meyakinkan
 Strategi 6 Keterampilan Inter Personal dan Etika Pegawai
 Strategi 7 Penyajian Informasi
 Strategi 8 Kampanye Anti Korupsi

Salah satu strategi Percepatan Implementasi Wilayah Bebas dari Korupsi yang diperlukan adalah terkait dengan “ Penyajian Informasi “, sehingga WBK di LPMP NTB bisa segera terwujud. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Program dan Kegiatan yang dikelola oleh LPMP NTB perlu juga diketahui oleh Publik, dengan harapan publik akan mengetahui Program yang akan dilaksanakan ditahun 2020. Peran serta publik dalam pengawasan/pengawalan pembangunan sangat penting dan strategis .

PROGRAM DAN KEGIATAN LPMP NTB TAHUN 2020

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME
023.03.06	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	
5630.001	Satuan Pendidikan yang telah dipetakan mutu pendidikannya	4.746 Sekolah
5630.001.002	Sekolah yang Terpetakkan Mutu Pendidikan	
051	Penyusunan Peta Mutu dan Pengolahan Data Mutu	
052	Analisis Data Mutu	
053	Penyusunan Rekomendasi Peningkatan Mutu	
054	Diseminasi Pemetaan Mutu	
5630.002	Sekolah yang telah disupervisi dalam pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP)	4746 Sekolah
5630.002.001	Sekolah yang telah disupervisi dalam pencapaian SNP	
051	Penyusunan Program Supervisi Penjaminan Mutu Pendidikan	
052	Bimbingan Teknis Supervisi	
053	Supervisi Satuan Pendidikan	
054	Analisis Supervisi Mutu Pendidikan	
055	Diseminasi dan Evaluasi Hasil Supervisi	
5630.003	Satuan Pendidikan yang telah Difasilitasi berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan	400 Sekolah
5630.003.001	Sekolah yang difasilitasi oleh LPMP	
051	Sosialisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	
052	Bimbingan Teknis Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	
053	Pendampingan Sekolah yang Difasilitasi oleh LPMP	
054	Pendampingan Sekolah yang Difasilitasi oleh Direktorat	
5630.003.001	Sekolah yang Difasilitasi Melalui Kemitraan	
052	Bimbingan Teknis SPME	
053	Diseminasi Hasil	
5630.004	Satuan Pendidikan yang Terverifikasi Mutu Pendidikannya	4746 Sekolah
5630.004.001	Sekolah yang telah Terverifikasi Mutu Pendidikannya	
051	Bimbingan Teknis Pengawas	
052	Bimtek Fasilitator Daerah Pengumpulan Data	
053	Pelaksanaan Pengumpulan Data	
054	Verifikasi dan Validasi	
5630.951	Layanan Sarana Prasarana Internal	1 Layanan
5630.951.001	Layanan Internal	
995	Pengadaan Kendaraan Bermotor	

997	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	
998	Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan	
5630.970.001	Layanan Dukungan Manajemen Satker	
051	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	
052	Penyusunan Laporan Daya Serap	
053	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	
054	Pengelolaan Kepegawaian	
055	Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan	
5630.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan
5630.994.001	Layanan Perkantoran	
001	Gaji dan tunjangan	
002	Operasional dan Perkantoran	1 Tahun

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menggarisbawahi dengan tebal bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik. Dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) Bapak Mohamad Mustari, Ph.D., mengatakan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) baru-baru ini telah menandatangani “Maklumat Keterbukaan Informasi Publik” yang dilaksanakan pada saat “Pencanangan Pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK)” tanggal 18 Pebruari 2020 di Hotel Jayakarta Senggigi, Kabupaten Lombok Barat disaksikan pula oleh Pihak Eksternal diluar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pihak eksternal yang hadir adalah Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Provinsi NTB dan Anjak Tipidkor Bareskrim Polri serta beberapa awak media, sedangkan dari Pihak Internal Pejabat Struktural dilingkungan LPMP NTB, Kepala Kantor Bahasa NTB, Kepala BPPAUD Dikmas NTB, dan Peserta *IHT*. Sejak berdiri Lembaga ini belum pernah menyampaikan Program dan Kegiatan ke Publik melalui *website*. Ini merupakan salah satu bentuk Internalisasi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) Nomor 14 Tahun 2008 Tentang “Keterbukaan Informasi Publik”. Layanan informasi harus diberikan secara akurat, transparan dan kredibel. “Penyampaian Program dan kegiatan kepada publik melalui *website* juga merupakan salah satu Inovasi yang dilakukan oleh LPMP NTB”, tutup Mustari.

Oleh : IMMA 2020

“ INDAHNYA BERBAGI UNTUK SESAMA “



Pembinaan Kerohanian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) disuatu Institusi sangat penting dan strategis. Salah satu Strategi Percepatan Implementasi dalam Pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) “ Penampilan Fisik Pegawai yang Sehat dan Bugar”. Pembinaan rohani tidak kalah penting daripada pembinaan jasmani. Tingkat stress pegawai harus diperhatikan agar pegawai tidak berada dalam tekanan hingga menjadi depresi. Pegawai harus dibina mental spiritualnya sehingga bisa menjadi wajar dan realistis. Pegawai harus memiliki keseimbangan antara berdoa dan berusaha. Pegawai harus memberikan yang terbaik untuk melaksanakan pekerjaannya tetapi pada akhirnya ia harus pasrah menerima ketentuan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan Pembinaan Rohani ini kita diharapkan akan bisa menerima suatu perbedaan. Perbedaan itu akan indah bila kita selalu berpikir positif dan memandang sesuatu dengan kebajikan bukan sebaliknya. Mari kita pupuk persatuan dan kesatuan dalam Kebhinekaan sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) semakin kokoh tanpa dikoyak oleh pemikiran-pemikiran yang radikal yang akan memecah belah bangsa Indonesia.

Pembinaan rohani bisa dilakukan dalam berbagai bentuk tergantung kepada minat pegawai. Pembinaan rohani antara lain bisa dalam bentuk pertemuan mengundang penceramah, diskusi kitab suci, dan mengkaji masalah berdasarkan persepektif agama. Namun demikian harus dijaga agar pertemuan keagamaan tidak disusup oleh pemikiran radikal yang tidak bertanggung jawab. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) setiap bulan pada Minggu keempat sudah menjadwalkan kegiatan Imtaq atau Pembinaan Rohani kepada seluruh pegawai, tanpa kecuali bagi Pegawai yang berAgama Hindu yang telah membentuk Ikatan Keluarga Hindu (IKH) LPMP NTB. Jumlah pegawai yang beragama Hindu 8 (delapan) orang baik Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), dan Tenaga *Outsourcing*. Tema yang diambil Pembinaan Rohani Umat Hindu pada tanggal 28 Pebruari 2020 bertempat di Ruang Rapat Pimpinan adalah “ Melalui Hari Raya Galungan dan Kuningan Kita Sambut Kemenangan Dharma (Kebajikan) melawan Adharma (Kebatilan) “. Pembinaan Rohani bagi Umat yang beragama Hindu sering disebut dengan Dharma Wacana. Pengertian **dharma wacana** adalah metode penerangan agama Hindu yang **artinya** berbicara mengenai ajaran agama atau **dharma** atau **kebaikan**. Pembinaan Rohani adalah menyebarkan ajaran Kebaikan yang terdapat dalam kitab suci dalam Agama Hindu sehingga menjadi Pribadi yang Paripurna.

Pembinaan Rohani atau Dharma Wacana bagi Umat Hindu diberikan oleh Pemuka Agama Hindu Bapak Drs. I Ketut Lestera. Dalam Dharma Wacana tersebut beliau memberikan pencerahan kepada IKH LPMP NTB terkait dengan makna hari Raya Galungan dan Hari Raya Kuningan. Sebelum hari raya Galungan umat hindu biasanya melakukan beberapa upacara mulai dari : pembersihan alam semesta/jagat, pembersihan diri sendiri (pembersihan rohani), pengekangan hawa nafsu yang buruk yang ada pada diri manusia (kroda/kemarahan, kama/nafsu kesenangan duniawi, loba/serakah).

Penyembelihan hewan yang dilakukan sehari sebelum Hari Raya Galungan mempunyai makna simbolis membunuh semua hawa nafsu kebinatangan yang ada dalam diri manusia. Di dalam ajaran agama hindu kita mengenal dengan adanya tiga jenis tindakan yang menimbulkan akibat. Tiga hal tersebut adalah Tri Kaya Parisuda yang memiliki arti tiga jenis bentuk tindakan yang merupakan landasan ajaran agama hindu untuk menjalankan hidup di dunia ini guna mencapai kesempurnaan hidup dan kesucian. Pemberihan Pikiran, Pembersihan Perkataan, dan Pembersihan pada Perbuatan harus selalu dilakukan.

Memaknai Galungan sebagai kemenangan dharma (kebaikan) melawan adharma (kebatilan), tidak harus melalui situasi peperangan secara fisik. Kemenangan di sini diartikan sebagai kemenangan melawan semua kekacauan pikiran. Jadi yang perlu kita lakukan untuk memaknai Hari Raya Galungan adalah melawan keegoisan dan sifat buruk dalam diri. Pada saat Galungan, menyatukan kekuatan rohani agar bisa mendapat pikiran dan pendirian yang terang, adalah usaha untuk memenangkan diri dari ego. Bersatunya rohani dan pikiran yang terang adalah wujud dharma dalam diri. Sepuluh hari setelah Hari Raya Galungan diperingati Hari Raya Kuningan. Jadi inti dari makna hari raya kuningan adalah memohon keselamatan, kedirgayusan, perlindungan dan tuntunan lahir-bathin kepada para Dewa, Bhatara, dan para Pitara. Pada hari ini umat melakukan pemujaan kepada para Dewa, Pitara untuk memohon keselamatan, kedirgayusan, perlindungan dan tuntunan lahir-bathin.

Salah satu peserta Pembinaan Rohani atau Dharma Wacana Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd., mengatakan dengan Perayaan Hari Raya Galungan diharapkan kita bisa introspeksi diri atas apa yang telah dilakukan selama ini. Kemenangan Dharma (kebajikan) melawan Adharma (kebatilan) yang dirayakan melalui hari Raya Galungan harus diinternalisasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Hari Raya Suci Galungan memiliki makna perayaan kemenangan kebajikan (dharma) melawan kebatilan (adharma) itu sepertinya kita harus mengingat kembali bagaimana filosofi Hari Raya Galungan itu sendiri. Harapannya agar umat bisa memaknai perayaan ini lebih mendalam, sehingga bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Pada hari raya Galungan, umat semakin melihat ke dalam diri, mengintrospeksi diri agar kebaikan selalu bisa dilakukan selama hidup. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat yang saat ini sedang melakukan Pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK). Dengan ini diharapkan kegiatan Pembinaan Rohani kepada semua pegawai baik Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), yang merupakan salah satu “Strategi Percepatan Implementasi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)” mempercepat terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Melalui Pembinaan Rohani ini pada hakekatnya kita saling berbagi untuk menyebarkan virus-virus kebaikan kepada sesama, yang pada akhirnya kita akan menjadi pribadi Paripurna. “ Indahnya Berbagi Untuk Sesama “, tutup Made.

Oleh : IMMA 2020

LPMP NTB GELAR RAPAT KOORDINASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU



Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Penerimaan Peserta Didik Baru (Rakor PPDB) Tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 6-8 Maret 2020 bertempat di LPMP NTB. Rakor PPDB tahun 2020 merupakan salah satu kegiatan yang baru pertama kali dilaksanakan oleh LPMP NTB. Ada beberapa alasan Rapat Koordinasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sangat perlu, penting, dan strategis dilaksanakan karena :

1. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) belum dapat dilaksanakan secara optimal disemua daerah.
2. Tatacara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan belum dapat mengakomodir perkembangan kebutuhan layanan pendidikan di masyarakat.

Adapun Peserta Rapat Koordinasi Penerimaan Peserta Didik Baru (Rakor PPDB) berjumlah 40 (empat puluh) orang berasal dari: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se NTB, dan LPMP NTB. Maksud dan tujuan dari Rakor PPDB ini adalah :'

1. Tersosialisasinya Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Tersosialisasinya Kebijakan Pemerintah Daerah NTB dalam PPDB
3. Tersosialisasinya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan

4. Tersosialisasinya Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun Pelajaran 2020/2021
5. Tersusunnya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Daerah NTB
6. Tersusunnya Dokumen Penetapan Wilayah Zonasi Daerah di setiap Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat.

Narasumber yang terlibat dalam Rakor PPDB ini adalah Dr. Chatarina Muliana, SH.,SE.,MH Staff Ahli Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Dr. H. Aidy Furkan Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan melalui 4 (empat) Jalur sebagai berikut : Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, dan Jalur Prestasi. Jalur Zonasi paling sedikit 50% dari daya tampung Sekolah, Jalur Afirmasi paling sedikit 15% dari daya tampung Sekolah, Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali paling banyak 5% dari daya tampung Sekolah, dan jika masih ada sisa kuota dari pelaksanaan jalur Zonasi/Jalur Afirmasi/Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali Pemerintah Daerah dapat membuka Jalur Prestasi. Calon Peserta Didik Baru hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah Zonasi.

Rapat Koordinasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dibuka oleh Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) Bapak Mohamad Mustari, Ph.D. Pada saat memberikan pengarahannya beliau menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) juga bertujuan untuk meningkatkan Sinergitas dan menguatkan Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi (KIS) antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) dan Peningkatan Mutu Pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini terkait dengan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Untuk mengawal Penjaminan Mutu Pendidikan di setiap kabupaten/kota dan meningkatkan Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi (KIS), LPMP NTB telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pembinaan Mutu Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, masing-masing kabupaten/kota yang akan dikoordinir oleh Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional (Widyaiswara) LPMP NTB. Ada beberapa Pokok-Pokok Kebijakan Merdeka Belajar antara lain : USBN, UN, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasarkan prinsip : nondiskriminatif, obyektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Nondiskriminatif dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu. Melalui Rakor PPDB ini kami berharap “ Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di NTB dapat dilaksanakan secara optimal di semua daerah kabupaten/kota, serta dapat mengakomodir perkembangan kebutuhan layanan pendidikan di masyarakat ”, tutup Mustari.

Penanggungjawab Kegiatan Rapat Koordinasi Penerimaan Peserta Didik Baru Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd., menyatakan Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan Sekolah. Dalam Penetapan wilayah zonasi oleh Pemerintah Daerah pada setiap jenjang wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat termasuk satuan pendidikan keagamaan, yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia Sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, pasal 36 ayat (4) disebutkan bahwa Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://ult.kemdikbud.go.id>. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB)

tahun 2019 pada saat melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan PPDB melakukan Audensi dengan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Provinsi NTB, untuk mendapatkan data dan informasi laporan masyarakat terkait Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Satuan Pendidikan.

Oleh : IMMA 2020

LPMP NTB SELANGKAH LEBIH MAJU DALAM PPDB 2020



FOTO BERSAMA : Kepala Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd., Mewakili Kepala LPMP NTB Menerima Penyerahan Hasil Rakor PPDB dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima Endang Kurniawati, M.KPd., saat Penutupan Rakor PPDB Tahun 2020

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB), telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penerimaan Peserta Didik Baru (Rakor PPDB) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 6-8 Maret 2020 bertempat di Kampus LPMP NTB. Rakor yang dihadiri oleh 40 (empat puluh) orang peserta baik dari Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupaten/Kota, dan dari LPMP NTB, yang sangat membanggakan adalah dengan kehadiran Kadis Dikbud Kabupaten Sumbawa dan Kadis Dikbud Kabupaten Lombok Tengah sebagai Peserta. Rakor PPDB tahun 2020 ini di fasilitasi oleh Narasumber Pusat Ibu Dr. Chatarina Muliana, SH.,SE.,MH Staff Ahli Kemendikbud dengan Materi “Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan” dan “Sosialisasi Permendikbud Nomor: 44 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan PPDB TK, SD, SMP, SMA, dan SMK Tahun Ajaran 2020/2021”. Beliau memberikan apresiasi dan attensi Kepada LPMP NTB yang telah berinisiatif untuk menyelenggarakan Rakor PPDB tahun 2020, “ LPMP NTB selangkah lebih maju dalam PPDB 2020”. Sedangkan untuk Kebijakan Pelaksanaan PPDB Daerah Jenjang Pendidikan Menengah difasilitasi oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB Bapak Dr. H. Aidy Furkon, M.Pd.

Pada saat Penutupan Rakor PPDB tanggal 8 Maret 2020 disampaikan Kesan dan Pesan oleh Kepala Seksi Kurikulum Peserta Didik Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima Ibu Endang Kurniawati, M.KPd. Beliau menyampaikan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi tingginya kepada Manajemen LPMP NTB yang telah menyelenggarakan Rakor PPDB, ini merupakan selangkah lebih maju dalam PPDB tahun 2020. Pelayanan dari Panitia, Narasumber, Komsumsi, dan Akomodasi yang diberikan sangat baik. Harapan kami semoga ditahun-tahun yang akan datang Rakor PPDB tetap dilaksanakan sebagai wujud Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi (KIS) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sinergitas antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat perlu terus ditingkatkan sehingga Peningkatan Mutu Pendidikan di Provinsi NTB cepat tercapai, mewujudkan Nusa Tenggara Barat Gemilang.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 44 tahun 2019 tentang PPDB, Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan melalui 4 (empat) Jalur sebagai berikut : Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, dan Jalur Prestasi. Jalur Zonasi paling sedikit 50% dari daya tampung Sekolah, Jalur Afirmasi paling sedikit 15% dari daya tampung Sekolah, Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali paling banyak 5% dari daya tampung Sekolah, dan jika masih ada sisa kuota dari pelaksanaan jalur Zonasi/Jalur Afirmasi/Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali Pemerintah Daerah dapat membuka Jalur Prestasi. Calon Peserta Didik Baru hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah Zonasi.

Penutupan Rapat Koordinasi Penerimaan Peserta Didik Baru (Rakor PPDB) dilakukan oleh Kepala Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi (Kasi PMS) Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd., mewakili Kepala LPMP NTB, memberikan apresiasi, attensi, dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh peserta Rakor yang telah berpartisipasi aktif sehingga output dari Rakor PPDB dapat diselesaikan antara lain, Draft Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB Daerah tahun 2020, Draft Pemetaan Wilayah Zonasi PPDB Kabupaten/Kota, dan Rencana Tindak Lanjut (RTL). Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah melakukan Sosialisasi Permendikbud Nomor : 44 tahun 2019 tentang PPDB, Juknis PPDB Daerah, dan Peta Wilayah Zonasi PPDB Daerah kepada Kepala Sekolah, Guru, dan Orang Tua . Untuk mengawal Penjaminan Mutu Pendidikan disetiap kabupaten/kota dan meningkatkan Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi (KIS), LPMP NTB telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pembinaan Mutu Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, masing-masing kabupaten/kota yang akan dikoordinir oleh Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional (Widyaiswara) LPMP NTB. Semoga dengan Rakor PPDB ini “ Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di NTB dapat dilaksanakan secara optimal disemua daerah kabupaten/kota, serta dapat mengakomodir perkembangan kebutuhan layanan pendidikan di masyarakat ”, pungkas Made.

Oleh : IMMA 2020

KOORDINASI DAN KONSOLIDASI SUATU KEHARUSAN DALAM PMP



Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Maret 2020 menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah Tingkat Kabupaten Lombok Tengah bertempat di Ruang Pertemuan Kantor Bupati Kabupaten Lombok Tengah. Rapat diikuti oleh 40 (empat puluh) orang peserta berasal dari Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah, Bappeda, MKKS, DPRD Komisi IV, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Guru, dan PGRI, dalam rangka mendekatkan Pelayanan Pemerintah Pusat dalam hal ini LPMP NTB dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Penjaminan Mutu Pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah dibuka oleh Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah. Wakil Bupati Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Bapak H. Lalu Pathul Bahri, SIP., dalam sambutannya beliau menyampaikan ucapan terima kasih dan memberikan apresiasi dan atensi kepada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat yang telah berinisiatif untuk melaksanakan kegiatan ini dalam rangka Penjaminan Mutu Pendidikan dan Peningkatan Mutu Pendidikan di wilayah Lombok Tengah.

Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Bapak Supli, SH., yang hadir dalam kegiatan ini mengucapkan terima kasih kepada LPMP NTB dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh LPMP NTB bermanfaat untuk pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Beliau juga berharap permasalahan-permasalahan Pendidikan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah bisa cepat diselesaikan secara terukur dan bertahap, dan step-step penyelesaian persoalan perlu ada bantuan dari LPMP NTB. Kami menyarankan untuk Pengangkatan Guru-guru yang diutamakan adalah Guru Tidak tetap (GTT). Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang hadir mengatakan “ mutu pendidikan tidak bisa tercapai jika kesejahteraan guru kurang diperhatikan”. Saat ini GTT di Kabupaten Lombok Tengah hanya menerima insentif Rp.100.000 perbulan dan perlu dinaikkan lagi, dan orientasi pembangunan harus dititikberatkan pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan bukan pada pembangunan fisik saja. Peserta dari Bappeda Kabupaten Lombok Tengah menampung masukan-masukan, agar insentif GTT tahun 2021 dinaikkan menjadi Rp 1.000.000/bulan. Begitu juga dengan usulan pengadaan Kendaraan Dinas bagi Pengawas Sekolah yang saat ini rata-rata Kendaraan Dinas usianya lebih dari 5 (lima) tahun.

Adapun Narasumber kegiatan ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah, Kepala LPMP NTB, dan Pejabat Fungsional (Widyaiswara) LPMP NTB. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah H. Sumum, S.Pd.,M.Pd., menyampaikan rasa bangga atas karena kegiatan ini termasuk kegiatan Lintas Sektoral dimana dihadiri oleh berbagai *stakeholder* yang peduli dengan Pendidikan yaitu DPRD Komisi IV, Dewan Pendidikan, Dinas Pendidikan, Bappeda, Kepala Sekolah, Guru termasuk juga dari PGRI Kabupaten Lombok Tengah. Beliau juga menyampaikan beberapa hal

terkait dengan Kebijakan Pendidikan Kabuapten Lombok Tengah antara lain Literasi, Numerasi, dan salah satu Strategi yang dilakukan adalah memberikan layanan semua anak didik bangsa termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yaitu Pengembangan Pendidikan Inklusi. Narasumber dari Pejabat Fungsional (Widyaiswara) LPMP NTB Drs. Ma Min Shen, M.Pd. menyampaikan paparan tentang Profil Pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah.

H. Lalu Dipta Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Lombok Tengah, mengatakan Guru-guru yang ada di Kabupaten Lombok Tengah lebih banyak dari dari Guru Honorer. Kami berharap dalam rekrutmen pengangkatan Guru, agar ada perbedaan perhatian antara guru honorer dengan yang umum. Rekrutmen honorer lebih dikhususkan/diperhatikan karena rata-rata pengabdian guru honorer cukup lama. Pada intinya kesejahteraan guru honorer perlu lebih ditingkatkan. Zaenudin salah satu Kepala Sekolah peserta Rapat Koordinasi dan Konsolidasi memberikan masukan khusus tentang Website LPMP NTB. Beliau berharap konten dan wajah Website LPMP NTB perlu dilakukan penambahan, perbaikan atau pembenahan. Konten-konten yang dimunculkan adalah konten-konten terkini (kekinian) menyangkut Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terbaru, seperti Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) satu lembar, Kebijakan Merdeka Belajar, HOTS, Widyaprada, NUPTK, Kebijakan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), dan lain sebagainya. Data-data dan informasi *diupdate* setiap saat, sehingga data dan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat selalu *terupdate* (kekinian).

Kepala LPMP NTB Bapak Mohamad Mustari, Ph.D., memaparkan Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK tahun ajaran 2020/2021. Kebijakan Merdeka Belajar sesuai dengan Surat Edaran Nomor 1 tahun 2020 yaitu Penentuan Kelulusan Peserta Didik dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020/2021. Ada beberapa poin penting dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik yaitu : kelulusan peserta didik ditentukan oleh ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan, Bahan ujian sekolah dibuat oleh masing-masing satuan Pendidikan (seperti test tertulis, portofolio, penugasan dan/atau bentuk lain), Satuan Pendidikan yang belum siap membuat bahan ujian bisa mengambil dari soal-soal yang dibuat oleh Kelompok Kerja Guru (KKG) maupun Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Disamping memaparkan Program dan Kegiatan LPMP NTB tahun 2020 juga disampaikan Capaian Kinerja LPMP NTB tahun 2019. Ada beberapa kendala atau permasalahan ditahun 2019 antara lain Aplikasi Pengisian PMP, dan Aplikasi Supervisi Mutu Pendidikan. Permasalahan dan kendala yang muncul dalam penjaminan mutu pendidikan dan peningkatan mutu Pendidikan perlu diselesaikan bersama-sama untuk itu “ Koordinasi dan Konsolidasi Suatu Kecharusan dalam Penjaminan Mutu Pendidikan”, ungkapnya.

Oleh : IMMA 2020

KUNJUNGAN LPMP KALIMANTAN UTARA DI LPMP NTB



Benchmarking adalah suatu proses mengidentifikasi “praktek terbaik” terhadap dua produk dan proses produksinya hingga produk tersebut dikirimkan. *Benchmarking* memberikan wawasan yang diperlukan untuk membantu manajemen dalam memahami proses dan produknya baik dengan cara membandingkannya dengan Industri yang serupa maupun dengan Industri yang berbeda. *Benchmarking* dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan Tolok Ukur atau Patokan. Tujuan utama dari *Benchmarking* adalah untuk memahami dan mengevaluasi proses ataupun produk saat ini sehingga menemukan cara atau “Praktek Terbaik” untuk meningkatkan proses maupun kualitas produk. Benchmarking dapat dilakukan untuk proses produksi, produk, jasa maupun sistem dalam suatu organisasi. Benchmarking merupakan sebuah pengukuran dari kualitas kebijakan organisasi, produk, program, strategi, dan lainnya, untuk memberikan wawasan yang diperlukan untuk membantu manajemen dalam memahami proses dan produknya baik dengan cara membandingkannya dengan industri serupa ataupun yang berbeda. Benchmarking bisa juga disebut sebagai perbandingan yang dijadikan tolok ukur atau patokan. *Benchmarking* juga bisa dijelaskan sebagai proses mengukur kinerja produk, layanan, atau proses perusahaan terhadap orang-orang dari bisnis lain yang dianggap sebagai yang terbaik di industri, alias yang terbaik dikelasnya.

Dalam rangka meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Utara serta untuk dapat memahami Pelaksanaan Pola Implementasi Penjaminan Mutu Internal di Satuan Pendidikan maka Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Utara (LPMP Kaltara) melaksanakan kunjungan di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB). *Benchmarking* LPMP Kaltara selama 4 (empat) hari mulai tanggal 10-13 Maret 2020 ini membuktikan LPMP NTB masih layak dijadikan tempat untuk berbagi pengalaman terkait dengan Prektek-praktek Terbaik dalam rangka Penjaminan Mutu Pendidikan. Melalui Surat Tugas dari Kepala LPMP Kalimantan Utara Nomor : 0193/C7.63/TU/2020 tertanggal 3 Maret 2020 telah menugaskan 9 (Sembilan) orang pegawai untuk melakukan *Benchmarking* di LPMP NTB.

Sebagai salah satu indikator Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat layak dijadikan tempat *Benchmarking* adalah dengan diterimanya beberapa “Piagam Penghargaan” dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) tahun 2019 telah menerima “Piagam Penghargaan” dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kinerja Satuan Pengendalian Internal (SPI) LPMP NTB tahun 2019 telah dinilai oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendapat nilai 90, dalam hal ini

LPMP NTB mendapat peringkat III setelah LPMP Jawa Tengah (Jateng) dan LPMP Bangka Belitung (Babel) . Ini merupakan kategori Kinerja Baik. Hal inilah sebagai salah satu Indikator LPMP NTB banyak dikunjungi oleh LPMP Provinsi yang lain. Pada tanggal 7 Pebruari 2019 LPMP NTB juga mendapat Piagam Penghargaan atas “ **Prestasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018** “ dengan nilai 99,00 sebagai Peringkat 2 (Dua) kategori 3, pagu anggaran Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) - Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) . Pada tanggal dan tahun yang sama LPMP NTB juga menerima Piagam Penghargaan sebagai “ **Admin Media Sosial Terbaik pada Unit Layanan Terpadu (ULT) di UPT Daerah di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019** “. Disamping itu berdasarkan dari hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, tingkat penerapan **Akuntabilitas Kinerja LPMP NTB Tahun 2019** masuk dalam kategori : **BB** dengan nilai 75,96 dengan interpretasi : **Sangat Baik, Akuntabel, Berkinerja Baik, dan Memiliki Sistem Manajemen Kinerja Yang Andal**

Dengan rincian nilai sebagai berikut :

- | | |
|--|-----------|
| 1. Perencanaan Kinerja (30%) | : 26,04 % |
| 2. Pengukuran Kinerja (25%) | : 21,77 % |
| 3. Pelaporan Kinerja (15%) | : 10,78 % |
| 4. Evaluasi Kinerja (10%) | : 6,12 % |
| 5. Penetapan Sasaran/Kinerja Organisasi (20%) | : 11,25 % |

Barang Milik Negara (BMN) harus dikelola dengan baik dan benar. Pengelolaan Barang Milik Negara dengan baik dan benar akan berdampak terhadap kinerja suatu Lembaga. Tatakelola Barang Milik Negara yang baik, sebagai salah satu hal diperhatikan dalam Pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK). Pengelolaan BMN mulai dari Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pengelolaan, sampai dengan Penghapusan benar-benar dilakukan secara transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Tatakelola Lembaga yang akuntabel akan mempengaruhi Nilai Sakip Lembaga, sehingga berpengaruh terhadap nilai Sakip Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara umum. Secara umum Tujuan kunjungan yang dilakukan oleh Pegawai Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kaltara adalah :

1. *Sharing* dan Praktik baik terkait Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
2. Strategi Peningkatan Nilai Sakip dalam mewujudkan tatakelola lembaga yang akuntabel.

Selama melaksanakan *Benchmarking* di LPMP NTB, Tim LPMP Kalimantan Utara didampingi oleh Kepala Subbagian Umum, Tim Pengelola Barang Milik Negara (BMN), dan Tim Penyusun LAKIP. Dalam pengarahannya Kepala Sub Bagian Umum LPMP NTB Ibu Dra. Hj. Sri Sukriyani memberikan apresiasi, attensi, dan mengucapkan terima kasih atas ditunjuknya LPMP NTB sebagai tempat *Benchmarking* oleh Pegawai LPMP Kalimantan Utara. “Semoga selama melakukan kegiatan banyak mendapat praktek-praktek terbaik dari LPMP NTB sehingga bisa diimplementasikan di LPMP Kaltara”, ungkapnya.

Oleh : IMMA 2020

MERDEKA BELAJAR DALAM PENENTUAN KELULUSAN PESERTA DIDIK



Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Nomor : 0053/P/BSNP/I/2020 Tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2019/2020, dimana peraturan ini berlaku mulai tanggal 14 Januari 2020. Dalam Prosedur Operasional Standar (POS) UN Bab XI tentang Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan dijelaskan bahwa :

1. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan UN dilakukan oleh Panitia Pusat, Provinsi, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Kabupaten/Kota, Satuan Pendidikan, serta Panitia di Luar Negeri sesuai dengan tugas dan kewenangannya dengan menggunakan instrument yang telah dikembangkan berdasarkan Prosedur Operasional Standar (POS) UN.
2. Hasil Pemantauan dan Evaluasi menjadi bahan pertimbangan perbaikan penyelenggaraan dan pelaksanaan UN pada masa mendatang

Sesuai dengan Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Nomor : 0053/P/BSNP/I/2020 Tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2019/2020, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat selama 2 (dua) hari mulai tanggal 16-17 Maret 2020 melakukan Pemantauan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diseluruh kabupaten/kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pelaksanaan UN untuk Jenjang SMK/MK dilaksanakan selama 4 (empat) hari mulai tanggal 16-19 Maret 2020. Ujian Nasional adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) adalah ujian nasional yang mempergunakan komputer sebagai media untuk menampilkan soal dan proses menjawabnya. Pemantauan UN dilakukan oleh Tim

Pemantau UN dari unsur Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan Staff potensial dilingkungan LPMP NTB berjumlah 20 (dua puluh) orang.

Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa Fahrizal, S.Pd.,M.Pd. mengatakan untuk Kabupaten Sumbawa Peserta Didik Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang terdaftar Ujian Nasional tahun ajaran 2019/2020 sejumlah 1.928 orang, dengan rincian 1.163 jenis kelamin laki-laki dan 765 jenis kelamin perempuan, berasal dari 10 (sepuluh) SMK Negeri dan 6 (enam) SMK Swasta. Kami berharap semoga UNBK tahun pelajaran 2019/2020 berjalan dengan baik, lancar, dan sukses. Hari pertama tanggal 16 Maret 2020 Mata Pelajaran yang diujikan adalah Bahasa Indonesia, hari kedua tanggal 17 Maret 2020 Mata Pelajaran Matematika, hari ke tiga tanggal 18 Maret 2020 Mata Pelajaran Bahasa Inggris, dan hari keempat tanggal 19 Maret 2020 Teori Kejuruan. Sesi pertama UN dimulai pukul 07.30-09.30, Sesi kedua dimulai pukul 10.30-12.30, dan Sesi ketiga dimulai pukul 14.00-16.00 Wita. Tim *Help desk* UNBK dipusatkan di SMKN 1 Sumbawa. Adapun tugas Tim *Help desk* antara lain :

1. Memberikan informasi dan penjelasan terkait pertanyaan dan pengaduan yang diajukan oleh Pengawas, ProKtor, dan Petugas ujian.
2. Menerima, merekap, dan memberikan solusi terhadap permasalahan, pertanyaan, dan/atau pengaduan yang terkait dengan pelaksanaan ujian sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang ditetapkan oleh Pelaksana UNBK Tingkat Pusat
3. Berkoordinasi dengan Tim *help desk* ditingkat kabupaten/kota, propinsi, dan pusat sesuai dengan kewenangannya.

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Merdeka Belajar dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1590). Dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2020 itu dijelaskan beberapa hal terkait Kebijakan Merdeka Belajar dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik yaitu :

1. Kelulusan Peserta Didik ditentukan oleh melalui ujian sekolah yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan berdasarkan penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh guru.
2. Bahan ujian untuk kelulusan peserta didik (seperti test tertulis, portfolio, penugasan, dan/atau kegiatan lain) dibuat oleh guru pada masing-masing Satuan Pendidikan.
3. Satuan Pendidikan yang belum siap membuat bahan ujian sekolah dapat menggunakan bahan penilaian (test tulis, tugas, dan/atau bentuk lain) yang diperoleh dari berbagai sumber termasuk yang dibuat oleh Kelompok Kerja Guru (KKG) atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)
4. Dinas tidak dapat memaksa Satuan Pendidikan untuk menggunakan bahan tertentu dalam pelaksanaan ujian sekolah.

Kebijakan Merdeka Belajar dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik, Kepala SMKN 3 Sumbawa Nasrullah Darwis, S.Pd., M.Pd. sangat setuju dengan kebijakan itu karena sekolah diberikan kebebasan untuk menentukan kelulusan peserta didik dan soal dibuat oleh Satuan Pendidikan/sekolah/guru. Senada dengan Kepala SMK Mercury Sumbawa, Khairiyah, SE kami juga setuju dengan Kebijakan Merdeka Belajar dimana Satuan Pendidikan diberikan keleluasaan untuk menentukan kelulusan peserta didik dan soal dibuat oleh guru atau bisa diambil dari Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Salah satu siswa SMKN 1 Sumbawa Besar sangat setuju UN dihapus karena soal-soal ujian akan dibuat oleh guru sendiri yang mengajar kita sehingga soal-soal yang akan keluar saat ujian bisa diketahui. Berbeda dengan Kepala SMKN 1 Sumbawa Ir Hasiah, S.Pd, "Saya secara pribadi kurang setuju dengan Kebijakan Merdeka Belajar yang akan menghapus Ujian Nasional. (UN), karena dengan UN optimisme belajar siswa menjadi lebih

meningkat, dengan UN *Grade* sekolah bisa meningkat, UN dapat mengukur kemampuan siswa dan kemampuan guru”.

Menurut salah seorang Tim Pemantauan Ujian Nasional, Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd., Kepala Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi mengatakan Ujian Nasional tahun 2020 di Kabupaten Sumbawa berjalan dengan baik dan lancar berkat kerjasama semua pihak, Satuan Pendidikan, Kepala Sekolah, Guru, Cabang Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa, dan semua *stakeholder* yang peduli dengan pendidikan. Dengan dikeluarkannya Kebijakan Merdeka Belajar melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 menunjukkan mulai tahun 2021 Kelulusan Peserta Didik ditentukan oleh Satuan Pendidikan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh guru dan bahan ujian untuk kelulusan peserta didik (seperti test tertulis, portfolio, penugasan, dan/atau kegiatan lain) dibuat oleh guru pada masing-masing Satuan Pendidikan. Ini artinya Satuan Pendidikan diberikan keleluasaan dan kebebasan dalam penentuan kelulusan peserta didiknya. “ Merdeka Belajar dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik “, pungkasnya

Oleh : IMMA 2020

PENGARUH BEKERJA DARI RUMAH TERHADAP KINERJA



Dalam beberapa waktu terakhir mulai dari Google, Microsoft, Twitter, Hitachi, Apple, Amazon, Chevron, maupun Spotify adalah perusahaan global yang, meluncurkan kebijakan kerja dari rumah atau *work from home* (WFH) di tengah penyebaran Covid-19. Di sisi lain, meskipun kita seorang pekerja pemula atau veteran WFH, inilah yang perlu kita lakukan untuk tetap produktif. Memindahkan pekerjaan ke rumah menjadi hal yang realistis dan normal bagi sebagian besar pekerja untuk sementara waktu lantaran Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah resmi menjadikan wabah virus corona sebagai pandemik. Beberapa karyawan akan bekerja dari rumah untuk pertama kalinya, yang berarti mencari tahu bagaimana tetap mengerjakan tugas di lingkungan baru yang mungkin tidak cocok dengan produktivitas. *Work from home* (WFH) adalah konsep di mana karyawan dapat melakukan pekerjaannya dari rumah. Bekerja dari rumah memberikan jam kerja yang fleksibel bagi karyawan dan pekerjaan mereka bisa selesai dengan mudah. Bekerja dari rumah juga sangat membantu untuk memberikan keseimbangan antara dunia kerja dengan kehidupan pribadi kepada karyawan, dan juga membantu perusahaan menyelesaikan pekerjaan dengan efisien dan efektif.

Kebijakan dari Pemerintah tentang bekerja dari rumah akan membawa beberapa dampak positif antara lain :

1. Bekerja dirumah akan banyak memberikan motivasi pegawai, hal ini disebabkan pertemuan dengan keluarga lebih intens dan akan banyak memberikan motivasi kerja bagi pegawai
2. Meningkatkan produktifitas kinerja individu, bekerja dirumah lebih menyenangkan dan lebih menenangkan bagi pegawai yang biasa ke kantor pagi-pagi subuh dan pulang sudah larut malam terutama yang berada dikota-kota besar.
3. Terjadinya penghematan sumber daya dikantor seperti listrik, air, telepon dan lain sebagainya, efisiensi kantor terjaga dan penghematan sumber daya bagi pegawai itu sendiri.
4. Penyelesaian pekerjaan akan cepat bisa diselesaikan, hal ini disebabkan oleh adanya keseimbangan tuntutan pribadi dengan tuntutan dunia kerja
5. Orang tua yang memiliki anak kecil masih bisa bekerja tanpa meninggalkan anak-anak.
6. Suasana yang lebih tenang dan hangat bekerja dirumah membawa dampak positif terhadap kinerja Lembaga
7. Pekerjaan akan lebih efektif dan efisien baik dari segi finansial, waktu, dan tenaga

Ada beberapa tips agar “Bekerja dari Rumah” lebih produktif antara lain :

1. Komunikasi itu sangat penting dalam suatu organisasi.
Tetap menghidupkan komunikasi dengan tim kerja, baik antara atasan dengan bawahan, antara bawahan dengan atasan, ataupun antara teman sejawat. Komunikasi yang efektif dan efisien akan menghasilkan kinerja yang terbaik dalam organisasi.

2. Perlakukan itu seperti pekerjaan nyata.
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan adalah dengan menyiapkan meja kerja, kursi, komputer/laptop ataupun ruang kerja seolah-olah kita bekerja dalam kantor. Dengan membuat ruangan dirumah seperti ruang kantor sebenarnya, akan menciptakan suasana kantor dirumah sendiri tetapi tidak kaku dan harus fleksibel.
3. Hindari merasa terisolasi.
Dengan tidak banyaknya kita bertatap muka secara langsung, janganlah membawa perasaan kita seperti terisolasi, hal ini akan mengurangi produktifitas kinerja individu yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kinerja Lembaga secara menyeluruh.
4. Tetap semangat
Solusi untuk pekerjaan dari rumah adalah sebanyak mungkin interaksi tatap muka online melalui panggilan video, memberi kabar kepada atasan secara reguler, terutama untuk karyawan yang hidup sendirian dan mungkin merasa lebih terisolasi dan pertemuan rutin tanpa agenda. Kita harus tetap bersemangat dalam bekerja sehingga hasil pekerjaan akan menjadi lebih baik.
5. Bekerja dari rumah harus tetap fokus. Dengan bekerja secara focus kinerja individu akan tetap stabil dimanapun kita bekerja, fokus pada hasil yang diharapkan oleh lembaga.
6. Membuat jadwal penyelesaian pekerjaan
Dalam penyelesaian suatu pekerjaan kita harus mempunyai target/realisasi yang harus dicapai. Baik target harian, mingguan, ataupun bulanan. Target-target yang sudah direncanakan diupayakan untuk bias diselesaikan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat

Pemerintah telah mengeluarkan Kebijakan dalam Surat Edaran Menteri PANRB No.19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*Work from Home/WFH*) bagi ASN sebagai upaya pencegahan dan meminimalisasi penyebaran Covid-19. Sedang tujuan dari SE tersebut adalah:

- a. Mencegah dan meminimalisasi penyebaran, serta mengurangi risiko Covid-19 di lingkungan instansi pemerintah pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.
- b. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi pemerintah dapat berjalan efektif untuk mencapai kinerja masing-masing unit organisasi pada instansi pemerintah.
- c. Memastikan pelaksanaan pelayanan publik di instansi pemerintah dapat tetap berjalan efektif.

Menindaklanjuti hal tersebut Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat, mengeluarkan surat dengan Nomor 495/C7.47/KP/2020 tentang Pengumuman Bekerja Dari Rumah (BDR) terkait dengan Pencegahan Penyebaran COVID-19, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) diperkenankan Bekerja dari Rumah (BDR) tanpa mengurangi kinerja. Menurut Kepala Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd. menyambut baik dan memberikan apresiasi, attensi, dan mengucapkan terima kasih terkait dengan Kebijakan Pemerintah yang telah ditindaklanjuti oleh Manajemen LPMP NTB. Ada beberapa hal yang harus diprioritas pemerintah saat ini adalah mencegah penyebaran virus corona semakin meluas. Untuk itu kita mengingatkan masyarakat mengurangi mobilitas dari satu tempat ke tempat lain, *social distancing*, dan mengurangi kerumunan yang berpotensi membawa risiko penyebaran. Sekali lagi ada 3 (tiga) kata kunci penting yang harus dilakukan oleh masyarakat secara umum adalah : mengurangi mobilitas orang, menjaga jarak, dan mengurangi kerumunan yang membawa risiko.

Pemerintah juga sudah menetapkan masa tanggap darurat penanganan virus corona. Sejumlah pemerintah daerah pun telah meliburkan aktivitas belajar dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA/SKM, hingga perguruan tinggi selama dua pekan. Dengan ini diharapkan ASN tetap dapat melakukan pekerjaan masing-masing (Bekerja dari Rumah/BDR) dengan baik tanpa terganggunya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, serta pada saat yang bersamaan dapat mengurangi terjadinya penyebaran virus *corona* di Indonesia. Bekerja dari rumah (BDR) diharapkan kinerja individu tetap baik dan pada akhirnya akan berpengaruh pada kinerja organisasi secara umum yang tetap baik juga.

Oleh : IMMA 2020

KESIAPSIAGAAN HADAPI COVID-19



Seperti kita ketahui pada awal tahun 2020, COVID-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia/*World Health Organization*(WHO) pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)*/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan Coronavirus Disease (COVID-19). Pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia telah melaporkan 2 kasus konfirmasi COVID-19. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dalam rangka pencegahan penyebaran Virus Corona telah mengeluarkan Surat Nomor 3699/C/KP/2020 tertanggal 19 Maret 2020 Tentang Prosedur Pelaksanaan Tugas Pegawai Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dalam rangka Pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19). Salah satu isi surat tersebut pada butir 8 (delapan), " Dalam rangka menjaga kesehatan agar seluruh satuan kerja melakukan pembersihan kantor termasuk mebel dan peralatan kantor dengan disinfektan. Kepada Satuan kerja bertanggung jawab terhadap pelaksanaan protocol pencegahan Covid-19 disatuannya masing-masing termasuk menghimbau untuk menjaga jarak antar satu dengan yang lainnya (*social distancing measures*) ". Hal ini sangat penting dilakukan agar penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) tidak meluas. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi perlu dilakukan sehingga tidak banyak korban jiwa. Belajar dari Negara Jerman hadapi lebih 1.000 (seribu) kasus positif Corona tanpa kematian. Ada beberapa strategi yang dilakukan antara lain : karantina masal terhadap

warganya/penduduknya, membatalkan beberapa perhelatan dunia, menyiapkan jaringan layanan kesehatan, klinik khusus, penerapan aturan yang ketat bagi pendatang dan warga yang baru tiba di Jerman, memiliki sistem peringatan dan pemberitahuan penyakit yang sangat baik, serta memiliki rencana kesiapsiagaan menghadapi pandemi.". Kita harus belajar dari Negara Jerman.

Ada beberapa cara pencegahan penyebaran Virus Corona yang juga bisa dilakukan oleh masyarakat kita secara umum antara lain :

1. Hindari mengonsumsi daging dan telur mentah.
2. Hindari area berasap atau merokok.
3. Minum obat segera setelah gejalanya muncul dan jangan biarkan kondisinya menjadi parah.
4. Rajin mencuci tangan setelah bersin atau batuk.
5. Tutup mulut saat batuk atau bersin dengan tisu atau siku
6. Jika Anda yakin telah terinfeksi, hindari kontak dekat dengan orang-orang.
7. Harus memiliki waktu istirahat yang tepat.
8. Menjauhi area-area keramaian.
9. Bersihkan tangan menggunakan sabun dan air atau *hand rub* yang mengandung alkohol.
10. Jika memasak daging untuk dikonsumsi, perhatikan tingkat kematangan daging dengan baik.
11. Menggunakan perlindungan atau pengaman tubuh ketika akan melakukan kontak dengan binatang

Manajemen Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat mengambil sikap gerak cepat terkait dengan isi surat tersebut. Selama 2 (dua) hari mulai tanggal 19-20 Maret LPMP NTB telah melaksanakan pembersihan kantor termasuk peralatan kantor dengan disinfektan dengan cara melakukan penyemprotan kesetiap ruang kerja mulai dari Ruang Kepala, Ruang Masing-masing Seksi, Ruang Subbag Umum serta ruang lainnya. Penyemprotan disinfektan dilakukan oleh pegawai LPMP NTB baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Menurut Kepala Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd., memberikan apresiasi, attensi dan menyambut baik dengan diadakannya Gerakan Penyemprotan seperti ini. " Kesiapsiagaan Hadapi Covid-19 ", sangat penting. Mencegah jauh lebih penting daripada mengobati. **Kesiapsiagaan** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna (UU RI No.24 Tahun 2007). Rekomendasi standar untuk mencegah penyebaran infeksi adalah melalui cuci tangan secara teratur, menerapkan etika batuk dan bersin, menghindari kontak secara langsung dengan ternak dan hewan liar serta menghindari kontak dekat dengan siapa pun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan seperti batuk dan bersin. Selain itu, menerapkan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) saat berada di fasilitas kesehatan terutama unit gawat darurat.

Oleh : IMMA 2020

LPMP NTB SELenggarakan KOORDINASI DAN KONSOLIDASI PMP DIKDASMEN



Sistem pendidikan nasional didefinisikan sebagai keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia. Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan sebagaimana diamanatkan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 yang disempurnakan untuk kedua kalinya dengan PP No. 13 tahun 2015. Penjaminan mutu pendidikan adalah tanggung jawab dari setiap komponen disatuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Peningkatan mutu disatuan pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada seluruh komponen yang ada.

Hal ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (SPMPDM) Bab VI pasal 13 menyebutkan :

- (1) Satuan Pendidikan yang tidak menjalankan peraturan ini sesuai dengan tugas dan wewenangnya diberikan peringatan dan/atau penghentian bantuan peningkatan mutu
- (2) Pemerintah Daerah yang tidak menjalankan peraturan ini sesuai dengan tugas dan wewenangnya dilakukan pengurangan dan/atau penghentian pemberian bantuan peningkatan mutu oleh Pemerintah.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) menyelenggarakan "Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah Tingkat Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020". Kegiatan ini dilaksanakan selama satu hari pada tanggal 9 Maret 2020 bertempat di Ruang Aula Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara. Kegiatan ini diikuti oleh 40 (empat puluh) orang peserta berasal dari Pemerintah Daerah, Bappeda, Komisi Pendidikan DPRD, Dinas Pendidikan, PGRI Kabupaten Lombok Utara, Dewan Pendidikan, Pengawas, Kepala Sekolah, dan Guru. Adapun Narasumber yang terlibat dalam kegiatan ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara, Kepala LPMP NTB, dan Pejabat Fungsional (Widyaiswara) LPMP NTB.

Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat Bapak Mohamad Mustari, Ph.D dalam sambutannya memberikan apresiasi, atetensi, dan penghargaan serta ucapan terima kasih kepada Pemerintah Daerah yang telah mendukung Program Penjaminan Mutu Pendidikan dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten Lombok Utara untuk mewujudkan Nusa Tenggara Barat Gemilang. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah :

1. Mensosialisasikan Program Penjaminan Mutu Pendidikan LPMP NTB tahun 2020
2. Mensosialisasikan data dan informasi tentang pencapaian mutu pendidikan kepada *Stakeholder* pendidikan pada level Kabupaten Lombok Utara
3. Mensosialisasikan gambaran dan data peta mutu sekolah berbasis Standar nasional Pendidikan (SNP)
4. Mensosialisasikan informasi tentang permasalahan dan upaya peningkatan mutu pendidikan
5. Merumuskan kebijakan-kebijakan dalam menentukan arahan penimngkatan mutu pendidikan yang sistematis, terintegrasi, terkontrol dan berkelanjutan
6. Melakukan kerjasama peningkatan kualitas pembelanjaan anggaran untuk peningkatan mutu di Kabupaten Lombok Utara

Kami berharap " Melalui Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah Mutu Pendidikan di Kabupaten Lombok Utara bisa sejajar dengan Kabupaten yang lain yang ada di NTB ", pungkas Mustari.

Penanggung jawab Kegiatan " Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah Tingkat Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 ", Ibu Dra. Hj. Sudiati Prihatiningrum Kepala Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan (FPMP) berharap Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat makin bersinergi dalam hal Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pemerintah Daerah dapat merencanakan serta merancang program-program yang sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah Tingkat Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Utara Bapak Drs. H. Suhardi, MH., dalam pengarahannya beliau menyampaikan perlu Sinergitas antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat perlu ditingkatkan lagi, karena Penjaminan Mutu Pendidikan adalah tanggung jawab bersama baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Satuan Pendidikan, dan Orang Tua serta semua *Stakeholder* yang peduli dengan pendidikan. " Kita harus "AKUR" antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga Penjaminan Mutu Pendidikan dan Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten Lombok Utara bisa cepat tercapai ", tutup Suhardi.

Oleh : IMMA 2020

LPMP NTB LAKUKAN MITIGASI BENCANA COVID-19



Sesuai dengan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 9, Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana. Mitigasi didefinisikan sebagai upaya ditujukan untuk mengurangi dampak dari bencana. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, pasal 1 ayat 6 dijelaskan Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Tujuan Mitigasi bencana adalah :

1. Mengurangi dampak yang ditimbulkan khususnya bagi penduduk
2. Sebagai landasan (pedoman) untuk perencanaan pembangunan
3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak/risiko bencana, sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman

Kata kunci dari Mitigasi bencana adalah mengurangi dampak dari bencana yang ditimbulkannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Edukasi kepada masyarakat sangat penting terkait dengan penyebaran virus corona ini, sehingga masyarakat tidak terjebak dengan berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Beberapa kegiatan mitigasi bencana diantaranya :

1. Pengenalan dan pemantauan risiko bencana
2. Perencanaan partisipatif penanggulangan bencana

3. Pengembangan budaya sadar bencana
4. Penerapan upaya fisik, non fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana
5. Pemantauan terhadap pengelolaan sumber daya alam
6. Pemantauan terhadap penggunaan teknologi tinggi
7. Pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup

Virus Corona yang secara cepat menyebar keseluruh dunia, tanpa terkecuali di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat dikategorikan sebagai bencana global. Wabah penyakitpun termasuk dalam kategori bencana. Oleh karena itu bencana Virus Corona memerlukan mitigasi atau penanganan matang terkait dengan langkah-langkah dan upaya-upaya pencegahannya. Penyelenggaraan Mitigasi bencana dapat dilakukan dengan beberapa langkah teknis yang perlu disampaikan ke masyarakat agar fenomena ini teratasi secara cepat, tepat dan tidak menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat. Dalam rangka itu Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengerahkan lembaga-lembaga sukarelawan untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat yang mengalami keresahan akibat wabah Virus Corona. Pendampingan kepada masyarakat tersebut bisa berupa langkah-langkah preventif yang harus dilakukan dalam pencegahan Virus Corona, maupun pencegahan medis seperti pemberian masker, *hand sanitizer*, dan penyemprotan disinfektan. Penyemprotan disinfektan bisa dilakukan di ruang kantor, tempat ibadah, perumahan ataupun tempat-tempat umum lainnya. Hal ini dilakukan dalam kerangka pencegahan penyebaran virus corona yang sudah menelan beberapa korban.

Dalam rangka mengurangi dampak yang ditimbulkan khususnya bagi penduduk oleh Virus corona, Manajemen Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat mengambil sikap gerak cepat terkait dengan hal tersebut. Selama 2 (dua) hari mulai tanggal 19-20 Maret LPMP NTB telah melaksanakan pembersihan kantor termasuk peralatan kantor dengan disinfektan dengan cara melakukan penyemprotan kesetiap ruang kerja mulai dari Ruang Kepala, Ruang Masing-masing Seksi , Ruang Subbag Umum serta ruang lainnya. Disamping itu Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) juga melakukan Mitigasi Bencana Covid-19 selama 2 (dua) pekan mulai tanggal 21 Maret sampai dengan 5 April 2020 berupa penyemprotan disinfektan kerumah-rumah pegawai yang bisa dijangkau.

Anggraeni Naskawati,S.Pd.,M.Pd., salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) LPMP NTB yang rumahnya telah dilakukan penyemprotan disinfektan menyampaikan ucapan terima kasih “ Penyemprotan disinfektan dirumah kami sudah dilaksanakan. Terima kasih semuanya pada teman-teman, para pimpinan lembaga dan tenaga *outsourcing* malam-malam begini masih **Melayani Sepenuh Hati** “. Menurut Kepala Subbagian Umum Dra. Hj. Sri Sukriyani, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) juga melakukan Mitigasi Bencana Covid-19 selama 2 (dua) pekan mulai tanggal 21 Maret sampai dengan 5 April 2020, berupa penyemprotan disinfektan kerumah-rumah pegawai yang bisa dijangkau sekitar Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat (Kecamatan Labuapi dan Kecamatan Gunung Sari). Penyemprotan disinfektan kerumah-rumah Pegawai dilakukan selama 15 (lima belas) menit. Tim Penyemprotan dari Tenaga *Outsourcing* LPMP NTB berjumlah 10 (sepuluh) orang. “ Kegiatan penyemprotan disinfektan ini dilakukan semata-mata untuk melindungi pegawai dari penyebaran virus corona. Dengan penyemprotan disinfektan ini semoga pegawai LPMP NTB terhindar dari virus corona dan selalu dalam keadaan sehat-sehat “, tutup Sri.

Ditempat terpisah Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd. mengatakan Kepala LPMP NTB telah mengeluarkan Kebijakan melalui Surat Nomor : 502/C7.47/KP/2020 tertanggal 30 Maret 2020 perihal Perpanjangan Pelaksanaan Bekerja Dari Rumah (BDR) terkait dengan Pencegahan Penyebaran COVID-19 memberikan apresiasi, attensi, dan mengucapkan terima kasih kepada Manajemen LPMP NTB yang terus melakukan upaya-upaya pencegahan penyebaran COVID-19, salah

satu satu upaya tersebut dengan melakukan Mitigasi Bencana COVID-19. Hal ini sangat penting dan strategis dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 yang lebih luas lagi. Dengan Bekerja Dari Rumah (BDR) diharapkan kegiatan pertemuan tatap muka secara langsung bisa dikurangi bahkan dihindari. Kami merasa bangga atas kerja keras dan ikhlas teman-teman *outsourcing* LPMP NTB yang mengerahkan sekuat tenaga untuk melakukan penyemprotan disinfektan baik dikantor maupun dirumah-rumah pegawai. “ Manajemen LPMP NTB sangat responsif dan sangat peduli terhadap kesehatan dan keselamatan pegawainya. Semoga Tuhan selalu memberikan kemudahan dan kesehatan buat kita semua “, pungkas Made.

Oleh : IMMA 2020

LPMP NTB LAKSANAKAN MONITORING PELAKSANAAN KEBIJAKAN PUSAT DI DAERAH



Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan/regulasi bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah perlu dilakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah propinsi/kabupaten/kota dan para pemangku kepentingan lainnya, maka dikeluarkan Surat Keputusan dari Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen) Nomor : 3696/C1/KP/2020 tertanggal 18 Maret 2020 Tentang Penetapan Tim Perwalian Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen).

Tim Perwalian mempunyai tugas mensosialisasikan kebijakan/regulasi bidang Paud, Dikdas, dan Dikmen yang meliputi :

- a. Pengelolaan dan pencegahan Covid-19 terkait :
 1. Sosialisasi dan antisipasi
 2. Pembelajaran di rumah
 3. Pemanfaatan asrama milik Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- b. Kebijakan Merdeka Belajar terkait Ujian Nasional (UN)
- c. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan, terkait :
 1. Infut dan validasi data sasaran untuk beberapa daerah
 2. Sasaran ditetapkan oleh Dinas Pendidikan setempat
- d. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terkait Dokumen Kebijakan dan jadwal
- e. Laporan Pemantauan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia didaerah harus juga responsif dan terlibat aktif dalam mensosialisasikan seluruh kebijakan/regulasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar (Dikdas) dan Pendidikan Menengah (Dikmen). Terkait dengan itu Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) melakukan Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Monitoring ini dilakukan kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Barat.

Sejalan dengan Kebijakan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen tentang Pembentukan Tim Perwalian, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pembinaan Mutu Pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala LPMP NTB Nomor : 377/C7.47/KP/2020 tertanggal 25 Pebruari 2020 Tentang Satuan Tugas (Satgas) Pembinaan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah LPMP NTB Tahun 2020. Tugas Satgas Pembinaan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah melaksanakan Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi (KIS) antara LPMP NTB dengan Pemerintah Daerah dan mengawal Penjaminan Mutu Pendidikan didaerah antara lain :

1. Pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah
2. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah
3. Supervisi pendidikan dasar dan menengah dalam pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP)
4. Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan
5. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah

Kepala Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd., mengatakan LPMP NTB mulai bulan Maret sampai dengan April 2020 akan memulai melakukan Monitoring terkait dengan Pelaksanaan Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sehubungan dengan adanya bencana Virus Korona yang sedang melanda negara kita, maka monitoring dilakukan melalui *E-Office* (Daring) antara lain :

1. *Social Distance* COVID-19 : Kebijakan Belajar Siswa dari Rumah, dan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Bekerja dari Rumah, dan kendala yang dihadapi
2. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi : Kebijakan PPDB Zonasi Daerah, Sosialisasi kepada GTK, Orang tua wali murid kelas 6, dan kendala yang dihadapi
3. Ujian Nasional (UN) : Kepala Daerah menerima SE Mendikbud Nomor 44 Tahun 2020, Sekolah telah menerima SE, dan Kendala yang dihadapi
4. Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahap I : Data peserta didik sudah divalidasi, Laporan penyaluran BOS, BOS sudah tersalurkan, dan kendala yang dihadapi

Monitoring ini akan dikawal oleh Satgas Pembinaan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah yang telah dibentuk oleh LPMP NTB. Kami berharap semoga Kebijakan-kebijakan Pusat dapat diimplementasikan di setiap kabupaten/kota, kendala-kendala yang ada bisa cepat dicarikan solusinya, sehingga semua daerah mempunyai pemahaman yang sama, dan hasilnya bisa dirasakan bersama-sama.

Manajemen Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) pada tanggal 2 April 2020 juga melakukan monitoring terhadap Pelaksanaan Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait dengan Kebijakan “Bekerja dari Rumah” (BDR). Monitoring dilakukan oleh Kepala LPMP NTB melalui *Video Confrence* dalam jaringan (daring) dengan “*ZOOM Cloud Meetings*”. Pada kesempatan tersebut Bapak Mohamad Mustari, Ph.D. menanyakan tentang keadaan kesehatan masing-masing pegawai dan keluarga. Semoga keadaan bapak/ibu sekeluarga berada dalam keadaan sehat walafiat. Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020, Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 09/SE/III/2020 tanggal 30 Maret 2020, dan Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38722/A/KP/2020 tertanggal 1 April 2020 tentang Pengisian Data Riwayat *Corona Virus Disease* (COVID-19) dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, agar melakukan pendataan pegawai yang terpapar dan/atau terkonfirmasi positif Covid-19 dengan mengisi tautan https://s.id/PNS_Kemendikbud. Beliau juga berpesan agar pegawai LPMP NTB untuk tetap Bekerja dari Rumah, jaga kesehatan dan selalu *happy*. “ Mohon tugas-tugas kantor bisa diselesaikan dirumah seperti pengisian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)/Log harian, E-Office, dan termasuk juga tugas-tugas yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seperti Monitoring *Social Distance* COVID-19, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Ujian Nasional (UN), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Pendataan pegawai yang terpapar dan/atau terkonfirmasi positif Covid-19, “semoga kita semua selalu dalam lindungannya”, pungkasnya.

Oleh : IMMA 2020

PENTINGNYA PELAPORAN GRATIFIKASI

Oleh : IMMA 2020



Menurut Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seperti dikutip dari situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Definisi ini menunjukkan bahwa gratifikasi sebenarnya bermakna pemberian yang bersifat netral. Suatu pemberian menjadi gratifikasi yang dianggap suap jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima.

Ketentuan tentang gratifikasi yang dianggap suap seperti diatur pada Pasal 12B dan 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut berbeda dengan suap. Hal ini perlu ditegaskan mengingat selama ini masih terdapat kerancuan berpikir seolah-olah delik gratifikasi merupakan bentuk lain dari suap atau menyamakan delik gratifikasi dengan suap. Dalam Pasal 12B dan 12C Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, diatur mengenai delik gratifikasi mengatur ancaman pidana bagi setiap pegawai negeri/penyelenggara negara yang menerima segala bentuk pemberian yang tidak sah dalam pelaksanaan tugasnya, atau yang diistilahkan sebagai gratifikasi yang dianggap suap dan tidak melaporkannya pada KPK dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja.

Terkait hadiah, dilihat dari sisi aspek sosiologis, memang praktik penerimaan hadiah merupakan sesuatu yang wajar dari sudut pandang relasi pribadi, sosial dan adat-istiadat. Akan tetapi, ketika hal tersebut dijangkiti kepentingan lain dalam relasi kuasa maka cara pandang gratifikasi adalah netral tidak bisa dipertahankan. Hal itulah yang disebut dalam Pasal 12B sebagai gratifikasi yang dianggap suap, yaitu gratifikasi yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima. Dalam konteks Pasal 12B ini, tujuan dari gratifikasi yang dianggap suap dari sudut pandang pemberi adalah untuk mengharapkan keuntungan di masa yang akan datang dengan

mengharapkan pegawai negeri/penyelenggara negara akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewenangannya demi kepentingan si pemberi tersebut.

1. Prinsip-prinsip dalam Pengendalian Gratifikasi

Pengendalian gratifikasi merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan kegiatan pengendalian gratifikasi, terdapat sejumlah prinsip-prinsip utama, yaitu: Transparansi; Akuntabilitas; Kepastian Hukum; Kemanfaatan; Kepentingan Umum; Independensi; dan Perlindungan bagi Pelapor.

2. Pelaporan Gratifikasi

Pegawai negeri atau penyelenggara negara wajib untuk melaporkan gratifikasi yang diterimanya serta menyampaikan laporan tersebut kepada KPK.

A. Penolakan Gratifikasi yang Dianggap Suap pada Kesempatan Pertama

Gratifikasi yang dianggap suap, yaitu gratifikasi yang diberikan dari pihak yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan pegawai negeri/penyelenggara negara, dan pemberian tersebut dilarang oleh aturan yang berlaku, merupakan jenis gratifikasi yang harus ditolak oleh setiap pegawai negeri/penyelenggara negara. Penolakan atas penerimaan gratifikasi tersebut, perlu dilaporkan oleh pegawai negeri/penyelenggara negara ke instansinya atau KPK. Pencatatan atau pelaporan atas penolakan dapat berguna sebagai alat pemutus keterkaitan antara pegawai negeri/penyelenggara negara dengan pihak pemberi.

B. Prinsip Penolakan Gratifikasi

Gratifikasi yang ditolak dalam konteks ini adalah gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban pegawai negeri atau penyelenggara negara yang diserahkan secara langsung. Penolakan atas penerimaan gratifikasi tersebut perlu dilaporkan oleh pegawai negeri/penyelenggara negara ke UPG di instansi masing-masing. Pencatatan atau pelaporan atas penolakan dapat berguna sebagai alat pemutus konflik kepentingan antara pegawai negeri/penyelenggara negara dengan pihak pemberi. Simulasi menarik yang dapat dikemukakan adalah ketika Pejabat A yang memiliki integritas menolak pemberian dari seorang kurir pengusaha X, namun ternyata uang yang ditolak oleh Pejabat A ternyata tidak pernah dikembalikan oleh kurir pada pengusaha X, sehingga Pengusaha X mencatat dan berasumsi Pejabat A telah menerima uangnya.

Hal ini menjadi masalah ketika di suatu hari Pengusaha X dijerat aturan pidana dan kemudian ditemukan catatan aliran dana terhadap Pejabat A, maka jika Pejabat A sejak awal melaporkan penolakan gratifikasi yang dilakukannya secara internal, dan kemudian hal tersebut dicatat oleh UPG, tentu saja pencatatan tersebut dapat menjadi bukti yang melindungi Pejabat A, karena ia telah menolak gratifikasi tersebut sejak awal. Akan berbeda halnya jika Pejabat A tidak pernah melapor dan tidak memiliki bukti apapun untuk menyangkal bahwa ia telah menerima sejumlah uang dari Pengusaha X melalui kurir.

Prinsip penolakan ini berada pada ranah aturan disiplin sehingga jika ketentuan ini dilanggar perlu diatur bentuk sanksi administratif yang dapat dijatuhkan pada pihak yang melanggar. Hal ini merupakan penegasan dari larangan menerima gratifikasi yang dianggap suap.

Akan tetapi, terdapat kondisi-kondisi tertentu ketika gratifikasi tidak dapat ditolak. Hal inilah yang perlu diatur sebagai pengecualian dari kewajiban menolak atau larangan menerima gratifikasi. Berikut adalah beberapa kondisi pengecualian, maka gratifikasi tidak wajib ditolak, yaitu: Gratifikasi tidak diterima secara langsung; Tidak diketahuinya pemberi gratifikasi; Penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi yang diterima. Adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, seperti: dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan diri sendiri/karier penerima/ada ancaman lain, Gratifikasi diberikan dalam kegiatan adat istiadat, kegiatan yang sesuai

dengan tradisi yang luhur dan upacara keagamaan. Dalam hal gratifikasi yang memenuhi empat kondisi pengecualian di atas, maka gratifikasi tersebut dapat diterima dan kemudian wajib dilaporkan pada KPK atau kepada KPK melalui masing-masing Unit Pengendali Gratifikasi.

C. Kewajiban Hukum Melaporkan Gratifikasi yang Dianggap Suap

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK mengatur kewajiban pegawai negeri/penyelenggara negara untuk melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Pada Penjelasan Pasal 16 tersebut gratifikasi yang wajib dilaporkan di sini adalah gratifikasi yang terdapat pada Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

D. Mekanisme Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi

Pegawai negeri/penyelenggara negara melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK dengan mengisi formulir secara lengkap sebelum 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima oleh penerima gratifikasi, atau kepada KPK melalui UPG sebelum 7 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam kelengkapan data perlu dicantumkan kontak pelapor berupa nomor telepon, nomor telepon kantor, alamat email dan nomor komunikasi lain yang bisa dihubungi mengingat adanya proses klarifikasi dan keterbatasan waktu pemrosesan laporan yang ditentukan oleh undang-undang. Penyampaian formulir dapat disampaikan secara langsung kepada KPK atau melalui UPG melalui pos, e-mail, atau website KPK/pelaporan online.

UPG atau Tim/Satuan Tugas yang ditunjuk wajib meneruskan laporan gratifikasi kepada KPK dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima oleh UPG atau Tim/Satuan Tugas. KPK menetapkan status penerimaan gratifikasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak laporan gratifikasi diterima oleh KPK secara lengkap. KPK melakukan penanganan laporan gratifikasi yang meliputi: (1) verifikasi atas kelengkapan laporan gratifikasi; (2) permintaan data dan keterangan kepada pihak terkait; (3) analisis atas penerimaan gratifikasi; dan (4) penetapan status kepemilikan gratifikasi. Dalam hal KPK menetapkan gratifikasi menjadi milik penerima gratifikasi, KPK menyampaikan Surat Keputusan kepada penerima gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan, yang dapat disampaikan melalui sarana elektronik dan non-elektronik.

Dalam hal KPK menetapkan gratifikasi menjadi milik negara, penerima gratifikasi menyerahkan gratifikasi yang diterimanya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Penyerahan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. apabila gratifikasi dalam bentuk uang maka penerima gratifikasi menyetorkan ke rekening KPK dan selanjutnya menyampaikan bukti penyetoran kepada KPK;
- b. apabila gratifikasi dalam bentuk barang maka penerima gratifikasi menyerahkan kepada:
 - i. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau Kantor Wilayah/Perwakilan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di tempat barang berada menyampaikan bukti penyerahan barang kepada KPK; atau
 - ii. KPK yang untuk selanjutnya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan menyampaikan bukti penyerahan barang kepada Penerima gratifikasi.

Dalam hal gratifikasi berbentuk barang, KPK dapat meminta penerima Gratifikasi untuk menyerahkan uang sebagai kompensasi atas barang yang diterimanya sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Keputusan Pimpinan dengan tata cara penyerahan sebagaimana diatur pada ayat (5) huruf a.

E. Perlindungan terhadap Pelapor Gratifikasi

Pelapor gratifikasi mempunyai hak untuk diberikan perlindungan secara hukum. Menurut Pasal 15 UU KPK, KPK wajib memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang telah menyampaikan laporan atau memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) mempunyai tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Dalam konteks ini, pelapor gratifikasi dapat akan dibutuhkan keterangannya sebagai saksi tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi.

Pelapor gratifikasi yang menghadapi potensi ancaman, baik yang bersifat fisik ataupun psikis, termasuk ancaman terhadap karir pelapor dapat mengajukan permintaan perlindungan kepada KPK atau LPSK. Instansi/Lembaga Pemerintah disarankan untuk menyediakan mekanisme perlindungan khususnya ancaman terhadap karir atau aspek administrasi kepegawaian lainnya. Bentuk perlindungan tersebut dapat diatur dalam peraturan internal.

Pelaporan Gratifikasi dengan Aplikasi Gratifikasi Online (GOL)

KPK meluncurkan e-Gratifikasi dalam rangka peningkatan pemahaman gratifikasi dan pelaporan gratifikasi yang lebih inovatif, masif, terstruktur dan mengikuti perkembangan teknologi. e-Gratifikasi terdiri dari salah satunya Aplikasi Gratifikasi Online (GOL). GOL adalah aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memudahkan Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara dalam melaporkan penerimaan Gratifikasi. Aplikasi GOL ini tersedia dalam beberapa media, yaitu web (gol.kpk.go.id) dan mobile (dapat di unduh melalui Android dan iOS). Aplikasi GOL terbaru ini juga menyediakan fitur untuk membantu Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di masing-masing K/L/O/P dalam mengelola laporan gratifikasi yang diterima oleh pegawai dalam instansinya. Dengan adanya aplikasi GOL, diharapkan petugas UPG dapat melaporkan penerimaan gratifikasi secara kolektif dengan lebih mudah dan cepat.



NYEPI, SOCIAL DISTANCING, DAN COVID-19

Oleh : IMMA 2020



Perayaan Hari Raya Nyepi tahun 2020 bagi Umat Hindu di Indonesia pada umumnya, dan Pulau Bali pada khususnya merupakan hari raya yang penuh dengan makna. Mengapa? Nyepi tahun 2020 sepertinya jadi milik semua orang, saat ini semua orang dianjurkan untuk berdiam diri dirumah masing-masing. Tepatnya pada tanggal 25 Maret 2020 Umat Hindu di seluruh Indonesia merayakan Hari Raya Nyepi, Tahun Baru Caka 1942. Sesuai protokol COVID-19, *Sosial Distancing* merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah penyebaran dan penularan COVID-19. Hari Raya Nyepi merupakan hal yang selaras dengan *Sosial Distancing*. Saat Hari Raya Nyepi ini, interaksi satu orang dengan orang lain secara langsung di luar rumah menjadi tidak ada (nol). Hampir tidak ada kontak antara orang yang kemungkinan sakit terinfeksi Covid-19 dengan orang lain yang sehat tidak terinfeksi di areal publik/umum. Kenapa bisa tidak ada kontak sama sekali?. Hal ini disebabkan karena saat Nyepi, masyarakat Bali sedang melaksanakan Tapa Brata Penyepian yang disebut dengan “ Catur Brata Penyepian “. Empat hal yang tidak boleh dilakukan oleh Umat Hindu saat Nyepi dilaksanakan.

Saat Hari Raya Nyepi Umat Hindu melakukan “ Catur Brata Penyepian “. Catur Brata Penyepian merupakan sebuah ritual tahunan yang memiliki spirit kultural, yaitu, Amati Karya (tidak bekerja), Amati Geni (tidak menyalakan api), Amati Lelungan (tidak bepergian), dan Amati Lelungan (tidak bersenang-senang). Ritual ini dilakukan dalam 24 (dua puluh empat) jam atau satu hari penuh. Tanggal 25 Maret 2020 mulai pukul 06.00 pagi sampai dengan pukul 06.00 pagi keesokan harinya (26 Maret 2020). Di mana, tidak ada aktivitas apapun atau Pulau Bali beristirahat total. Semua akses menuju Pulau Bali ditutup baik melalui darat, laut, dan udara. Bali betul-betul

sepi. Bencana atau wabah Covid-19 yang terjadi saat masyarakat Hindu melaksanakan Nyepi, kita diajarkan kembali untuk mengamalkan budaya dan ritual dengan penuh hikmat. Tak lagi hanya menjadi rutinitas tahunan tetapi layak direnungkan kembali untuk bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kebaikan ini di mulai dari rumah tangga, masyarakat, hingga bernegara. Aktivitas Catur Tapa Brata Penyepian ini selaras dengan protokol Covid-19 dan imbauan Presiden Jokowi untuk mencegah meluasnya penularan dan penyebaran virus corona, khususnya Amati Lelungaan (tidak bepergian), tidak keluar rumah atau harus berdiam diri dirumah.

Tiongkok merupakan wilayah yang berhasil menanggapi Covid-19 telah menjadi bukti nyata, khususnya Kota Wuhan. Sejak virus ini merebak awal Januari 2020, Wuhan diisolasi dari dunia luar. Penduduknya tidak diijinkan beraktivitas keluar rumah. Dari kebijakan yang diberlakukan itu hasilnya, berdasar data pada 21 Maret 2020, laju penyebaran Covid-19 mengalami perlambatan. Bahkan, dalam 3 (tiga) hari terakhir, otoritas Cina kembali melaporkan tidak ada kasus baru virus Corona di kota Wuhan yang menjadi lokasi awal terdeteksinya virus ini. Terkait dengan ini Masyarakat Umat Hindu di Pulau Bali memiliki momentum untuk melakukan isolasi secara mandiri layaknya Kota Wuhan. Bali memiliki pengalaman bertahun-tahun mengisolasi dirinya dari dunia luar. Bali memiliki potensi budaya, ritual, dan spiritual untuk menjalani isolasi. Momentum dan potensi itu adalah **Nyepi**. Hari ini diyakini sebagai cikal bakal bumi Bali kembali suci dari unsur-unsur negatif. Nyepi juga mengajarkan manusia untuk bertransformasi dari keangkuhan menuju kedamaian, instropeksi diri sehingga menjadi manusia sejati.

Hasil pemantauan Pusat Penelitian dan Pengembangan BMKG tahun 2013 menunjukkan bahwa pengaruh *anthropogenic* pada kenaikan konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai 33%. Artinya pada Hari Raya Nyepi terjadi penurunan emisi Gerakan Rumah Kaca (GRK) rata-rata 33 persen. Melalui perayaan Hari Raya Nyepi masyarakat Bali sebenarnya telah turut serta dan berperan aktif dalam upaya mengurangi dampak *global warming*. Bagaimana tidak, sebuah kota internasional telah melakukan 24 jam tanpa listrik melalui ritual *amati geni* dan *amati lelungan*; sehari tanpa asap kendaraan melalui ritual *amati karya* dan *amati lelungan*. Pusat Penelitian dan Pengembangan BMKG beberapa kali melakukan pengamatan lapangan terkait kualitas udara ambien pada saat seminggu menjelang hingga perayaan hari raya Nyepi di Pulau Bali. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi pola perubahan kualitas udara ambien yang ditandai dari adanya konsentrasi gas rumah kaca dan partikulat dengan menganalisis tingkat penurunan relatif emisi gas rumah kaca dan partikulat dibandingkan dengan seminggu sebelum perayaan hari raya Nyepi. Sebagai bukti pengukuran langsung dan indikator untuk mengklarifikasi kontribusi aktifitas manusia (penduduk lokal) sebagai pemicu meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca dan partikulat di wilayah Pulau Bali.

Menurut Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd., perayaan Hari Raya Nyepi sangat selaras dan relevan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah terkait dengan “ *Social Distancing* “. Dengan Nyepi masyarakat dianjurkan untuk berdiam diri dirumah, tanpa ada interaksi antara masyarakat satu dengan yang lainnya secara langsung. Dengan berdiam diri dirumah diharapkan penyebaran dan penularan COVID-19 bisa ditekan bahkan diputus mata rantai penyebarannya. “ Amati Lelungaan “ atau tidak bepergian merupakan salah satu dari “ Catur Brata Penyepian “ dalam ritual perayaan Nyepi. Melalui Nyepi banyak hal yang dapat diinterlisasikan dalam kehidupan sehari-hari. “ Nyepi, dan *Social Distancing* “, saling berkolerasi positif dan selaras satu dengan lainnya dalam mencegah penyebaran dan penularan COVID-19. Semoga dengan Nyepi, *Social Distancing* penyebaran dan penularan COVID-19 dapat dicegah.

PENGARUH COVID-19 TERHADAP PEMBANGUNAN MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI



Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia yang berlaku selama 91 hari terhitung sejak tanggal 29 Februari s.d 29 Mei 2020 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka diperlukan penyesuaian kebijakan tata kelola pemerintahan yang antisipatif dan flexibel, namun tetap memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Salah satu aspek dalam tata kelola pemerintah adalah tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) bagi instansi pemerintah dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Meningkatnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menetapkan COVID-19 sebagai pandemik global, pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional (non-alam), dan arahan Presiden Republik Indonesia tentang penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memungkinkan sebagian ASN untuk bekerja dari rumah *Workfrom Home* (WFH).

Melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tertanggal 2 April 2020 Tentang Perpanjangan Waktu Penyampaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pengajuan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) tahun 2020. Bahwa waktu pengusulan unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM yang semula ditetapkan tanggal 31 Mei 2020, berdasarkan Surat Edaran ini waktu pengusulan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) untuk tahun 2020 diperpanjang menjadi tanggal 30 Juni 2020.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB), sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sejak tahun 2017 telah mencanangkan pembangunan sebagai instansi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Tahun 2020 dengan Pimpinan/Kepala yang baru Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) pada tanggal 18 Pebruari 2020 kembali melaksanakan "Pencanangan Pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK)". Pencanangan Pembangunan Zone Integritas menuju WBK dilaksanakan di Hotel Jayakarta, Senggigi Kabupaten Lombok Barat, yang dilakukan oleh Kepala LPMP NTB dan disaksikan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Provinsi NTB, Anjak Tipikor Bareskrim Polri Jakarta dan Inspektur II Itjen Kemendikbud RI. Hadir pula Kepala Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BPPAUD Dikmas) NTB, Kepala Kantor Bahasa NTB, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN),

dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dilingkungan LPMP NTB, Media Massa, serta peserta *In House Training (IHT)* lainnya.

Beberapa hal yang telah dipersiapkan oleh Tim Pembangunan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) antara lain :

1. Seluruh Pegawai yang wajib LHKPN semuanya telah membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan telah dilaporkan online ke KPK.
2. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) telah membuat Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), semuanya telah dilaporkan.
3. Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dan Itjen Kemendikbud seluruhnya telah ditidakanjuti.
4. Dokumen Program Kerja (Proker) Pembangunan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) LPMP NTB Tahun 2020.
5. Pembentukan Tim Kerja Pembangunan menuju WBK.
Tim Kerja Pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) dilingkungan LPMP NTB tahun 2020 berjumlah 34 (tiga puluh empat) orang, masing-masing anggota Tim terdiri dari Penanggung Jawab (Kepala LPMP NTB), Ketua (Kasi PMS), Koordinator Manajemen Perubahan (Kasubbag Umum), Koordinator Penataan Tatalaksana, Koordinator Penataan Sistem Manajemen SDM, Koordinator Penguatan Akuntabilitas, Koordinator Penguatan Pengawasan (Kasi FPMP), Koordinator Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Kasi SI), dan Koordinator Kesekretariatan dan masing-masing dilengkapi dengan anggota-anggota.
6. Pencanangan dan Penandatanganan Komitmen Bersama oleh semua Pegawai dalam Pembangunan menuju WBK dilakukan di Hotel Jayakarta Senggigi, Nusa Tenggara Barat.
7. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan LPMP NTB tahun 2020 berjumlah 10 (sepuluh) orang.
8. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan ZI-WBK dalam bentuk Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan Tindak Lanjut Hasil Pemantauan.
9. Melakukan perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja, Pimpinan sebagai *Role Model*, dan Pembentukan Tunas-Tunas Integritas.
10. Dokumen pokok dan dokumen pendukung dari masing-masing pengungkit dalam Pembangunan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Menanggapi Surat Edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 menurut Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd., selaku Ketua Pembangunan ZI-WBK, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat harus tetap bersemangat dan mempersiapkan segala bentuk dokumen Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), walaupun ada bencana COVID-19. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tidak menerima penyampaian PMPRB dan usulan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) secara langsung ataupun dalam bentuk *hardcopy*, sehingga tidak dianjurkan bagi instansi pemerintah untuk melakukan perjalanan dinas untuk menyampaikan PMPRB dan usulan unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. LPMP NTB sudah siap untuk dilakukan pendampingan dan penilaian oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian PAN dan RB, untuk diusulkan dan dinilai sebagai Instansi menuju WBK. Secara umum COVID-19 berpengaruh terhadap Pembangunan ZI-WBK. “ Kami berharap tahun 2020 LPMP NTB bisa meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) ”, pungkasnya.
Oleh : IMMA 2020

LPMP NTB PEDULI #LAWAN COVID-19



Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi (Permen PAN-RB) Nomor 10 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Permen PAN RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) bahwa untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Dalam melaksanakan Pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) berpegang pada Tata Nilai Budaya Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terdapat 7 (tujuh) Tata Nilai Budaya Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Integritas, Kreatif dan Inovatif, Tanpa Pamrih, Aktif, Meritokrasi, Pembelajar, dan Inisiatif. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Pegawai LPMP NTB baik Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) harus berpedoman pada Tata Nilai Budaya Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diinternalisasikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga merasa dilayani dengan baik atau diberikan Pelayanan Prima.

Salah satu Tata Nilai Budaya Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah “Tanpa Pamrih”. Tanpa pamrih diartikan bekerja penuh ikhlas dan penuh dedikasi. Dalam pembangunan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tata Nilai Budaya Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia harus diimplementasikan atau diinternalisasikan oleh semua Pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini telah ditunjukkan atau diinternalisasikan oleh Pegawai LPMP NTB dimana Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB), selama satu hari pada tanggal 15 April 2020 telah menyelenggarakan Kegiatan sosial atau Gerakan “LPMP NTB PEDULI # LAWAN COVID-19”. Kegiatan sosial atau Gerakan ini dilakukan dengan memberikan paket sembako kepada masyarakat yang tidak berpenghasilan tetap atau buruh harian, yang terdampak bencana non alam COVID-19. Pembagian paket sembako ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang kurang mampu disekitar lingkungan Pegawai LPMP NTB.

Menurut Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) Mohamad Mustari, Ph.D., Paket sembako yang dibagikan ini sebanyak 100 (seratus) paket. Dalam 1 (satu) paket berisi Beras 5 (lima) kg, Gula pasir 1 (satu) kg, Tepung terigu 1 (satu) kg, Minyak goreng 1 (satu) liter, Mie instan 2 (dua) bungkus, Sabun mandi 2 (dua) bungkus, Masker 1 (satu) buah, dan Brosur tentang COVID-19 satu lembar. Bantuan paket sembako didistribusikan kepada masyarakat berpenghasilan tidak tetap yang terdampak COVID-19 seperti Buruh bangunan, Tukang parkir, Penjual keliling (pisang, kerupuk, sayur dan lain-lain), dan Tukang sampah. Paket sembako yang dibagikan ini berasal dari Donasi Pegawai LPMP NTB, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN). Kami atas nama Manajemen LPMP NTB memberikan apresiasi, attensi, dan mengucapkan terima kasih kepada semua Pegawai yang telah peduli dengan sesama khususnya masyarakat yang kurang mampu dan yang terkena dampak bencana COVID-19. Kami berharap dan berdoa semoga bencana COVID-19 akan cepat berakhir sehingga masyarakat bisa bekerja kembali secara normal seperti sebelum adanya bencana ini. “Kegiatan sosial atau Gerakan “LPMP NTB PEDULI #LAWAN-COVID-19” ini sangat mulia, semoga Tuhan Yang Maha Pengasih akan membalas kebaikan bapak/ibu Pegawai LPMP NTB yang telah mempunyai ide kreatif dan inovatif peduli dengan lingkungan sekitar”, pungkasnya.

Testimoni dari beberapa warga yang telah menerima bantuan dari Kegiatan sosial atau Gerakan “LPMP NTB PEDULI # LAWAN COVID-19”. Inaq Tasiah yang sedang sakit berprofesi sebagai pemulung mengucapkan terima kasih kepada LPMP NTB semoga LPMP tetap jaya. Inaq Cah dan Inaq Hadijjah menghaturkan ucapan terima kasih kepada Kepala dan seluruh karyawan dan karyawan LPMP NTB yang telah memagikan sembako. Inaq Inun dan Inaq Makayah, Moncok Kelurahan Pejarakan Karya mengucapkan terima kasih dan semoga diberi kelancaran rejeki dan kesehatan serta kita semua diajuhkan dari segala macam penyakit. Terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Karyawan LPMP NTB disampaikan juga oleh Warga RT 07 Dusun Ireng Lauk, Desa Jati Sela, Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, kedua keluarga ini berprofesi sebagai Buruh Tani dan Buruh Serabutan. Salah satu warga RT 03 Pejerk Abian yang kepala keluarga berprofesi sebagai petugas parkir dan buruh toko bangunan mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga LPMP NTB atas kepedulian ini, semoga menjadi amal ibadah.

Salah seorang pegawai LPMP NTB Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd. yang ikut ambil bagian dalam pembagian paket sembako sangat terharu melihat masyarakat disekitar lingkungan rumah yang begitu bersyukur dan bahagia menerima paket sembako dari LPMP NTB. Salah satu warga lingkungan Mambe, Kelurahan Monjok Timur, Kota Mataram yang tidak mau disebutkan namanya sampai menangis terharu saat menerima paket sembako tersebut. “Kami tidak menyangka akan mendapatkan paket sembako ini, yang berisi Beras 5 (lima) kg, Gula pasir 1 (satu) kg, Tepung terigu 1 (satu) kg, Minyak goreng 1 (satu) liter, Mie instan 2 (dua) bungkus, Sabun mandi 2 (dua) bungkus, Masker 1 (satu) buah, dan Brosur tentang COVID-19 satu lembar. Kami buruh bangunan berpenghasilan tidak tetap dengan menghidupi 3 (tiga) orang anak kandung, istri, ibu kandung serta 2 (dua) orang ponakan yang tinggal bersama satu atap. Belum selesai dampak bencana gempa bumi yang masih menyisakan trauma, kini bencana virus korona lagi muncul. Terima kasih kepada Bapak Kepala LPMP NTB yang telah peduli dengan keluarga kami, semoga Tuhan Yang Maha Pemurah membalas kebaikan warga LPMP NTB”. Saat pembagian paket sembako Pegawai LPMP NTB juga memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan penyebaran COVID-19. “Saat ini masyarakat masih bingung terkait dengan ODP, PDP, dan OTG. Orang Dalam Pemantauan (ODP) adalah mereka yang memiliki gejala panas badan atau gangguan saluran pernapasan ringan, dan pernah mengunjungi atau tinggal didaerah yang diketahui merupakan daerah penularan virus tersebut. Salain itu juga bisa juga orang sehat yang pernah kontak erat dengan kasus terkontaminasi COVID-19. Riwayat kontak erat dengan positif COVID-19 terjadi dalam 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) adalah mereka memiliki gejala panas badan dan gangguan saluran pernapasan. Gangguan pernapasan itu bisa ringan atau berat, serta pernah

berkunjung ke atau tinggal di daerah yang diketahui merupakan daerah penularan COVID-19. PDP juga memiliki indikasi berkontak dengan kasus langsung terkonfirmasi dengan COVID-19. Sedangkan Orang Tanpa Gejala (OTG) adalah mereka yang tidak bergejala tetapi memiliki resiko tertular dari orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Kategori OTG juga memiliki riwayat kontak erat baik kontak fisik atau berada dalam ruangan dengan radius satu meter dari COVID-19. Untuk itu diperlukan beberapa hal yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19 antara lain : Cuci tangan dengan sabun minimal 20 detik dan dibilas dengan air yang mengalir, jaga jarak minimal 2 (dua) meter, tinggal dirumah, makan makanan yang bergizi, jaga kesehatan, olah raga, apabila batuk tutup mulut, dan memakai masker apabila terpaksa untuk keluar rumah. Jangan lupa untuk berkata jujur apabila kita pernah berkunjung ke area Pasien Dalam Pengawasan (PDP)/Pasien Positif Corona (jarak maksimal 500 meter) atau pernah kontak langsung dengan Pasien Dalam Pengawasan (PDP)/Pasien Positif Corona (jarak maksimal 5 meter), dengan kejujuran ini diharapkan mata rantai penyebaran COVID-19 dapat diputus sehingga tidak banyak membawa korban. Dengan berkata jujur akan menyelamatkan banyak orang”, tutup Made.

Oleh : IMMA 2020

MENGEJAR ZI-WBK DENGAN INOVASI



Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19. Salah satu isi Surat Edaran tersebut adalah : Proses Belajar dari Rumah. Proses Belajar dari Rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Belajar dari Rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan;
- Belajar dari Rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi Covid-19;
- Aktivitas dan tugas pembelajaran Belajar dari Rumah dapat bervariasi antar siswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/ fasilitas belajar di rumah;
- Bukti atau produk aktivitas Belajar dari Rumah diberi umpan baik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor atau nilai kuantitatif. Dengan ada Surat Edaran ini mau tidak mau suka tidak suka Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) harus meningkatkan kompetensinya khusus dalam Pengelolaan Pembelajaran dalam jaringan (daring) disamping luar jaringan (luring).

Dalam melakukan Proses Pembelajaran dari Rumah melalui daring/jarak jauh, seorang Pendidik/Guru dituntut harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaannya. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) melakukan Inovasi Kegiatan dengan merancang Bimbingan Teknis Pengelolaan Pembelajaran yang akan dilakukan Secara Virtual. Bimtek angkatan pertama ini akan dilaksanakan selama 8 (delapan) hari mulai tanggal 27 April sampai dengan 6 Mei 2020. Semua calon Peserta telah dan akan diwajibkan untuk mendaftar melalui *website* LPMP NTB, <http://lpmpntb.kemdikbud.go.id/kegiatan>. Pendaftaran peserta dibuka mulai hari Jumat tanggal 24 April sampai dengan Minggu tanggal 26 April 2020. Pendaftaran baru dibuka beberapa jam saja, jumlahnya sudah mencapai 1.125 (seribu seratus dua puluh lima) orang. Sedangkan jumlah Visitor *Website* LPMP NTB sudah mencapai kurang lebih 2000 (dua ribu) Hal ini bisa dilihat melalui *Website* LPMP NTB jumlah pengunjung pada hari Jumat sampai pukul 22.30 visitornya sudah mencapai 2.228 (dua ribu dua ratus dua puluh delapan) orang. Di era Revolusi Industri 4.0 peran teknologi dan informasi sangat penting dan strategis dalam proses pembelajaran. Apalagi saat Pandemi COVID-19 ini yang sedang melanda dunia, tidak terkecuali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pengelolaan Pembelajaran dalam jaringan/jarak jauh sangat dibutuhkan oleh Pendidik/Guru dan Tenaga Kependidikan lainnya, agar aktifitas pembelajaran yang dilakukan dapat bervariasi sesuai dengan minat dan kondisi masing-masing peserta didik termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar dirumah.

Dari pendaftar yang masuk, dilakukan verifikasi dan validasi (verval) untuk melihat data calon peserta agar tidak *double counting*, sehingga dari hasil Verval ini didapatkan 958 (sembilan ratus lima puluh delapan) orang calon peserta. Calon Peserta dari Guru, untuk jenjang SD berjumlah 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) orang, Jenjang SMP berjumlah 221 (dua ratus dua puluh satu) orang, Jenjang SMA berjumlah 262 (dua ratus enam puluh dua) orang, Jenjang SMK berjumlah 120 (seratus dua puluh) orang, SLB berjumlah 12 (dua belas) orang, Pengawas Dikdas 42 (empat puluh dua) orang, dan Pengawas Dikmen berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang. Sesuai dengan kuota, Bimbingan Teknis Pengelolaan Pembelajaran Pada Masa Belajar dari Rumah (BDR), akan dibagi kedalam 10 (sepuluh) kelas masing-masing kelas 60 (enam puluh) orang peserta sehingga secara keseluruhan Peserta Bimtek berjumlah 600 (enam ratus) orang. Bimtek ini mempergunakan pola alokasi waktu 32 (tiga puluh dua) Jam Pelajaran dengan mempergunakan 13 Jam Pelajaran dengan via “*ZOOM Cloud Meetings*” dan 19 Jam Pelajaran via Whatsaap. Materi Bimtek terdiri dari : Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Program LPMP dalam Penanganan Dampak COVID-19, Panduan Pembelajaran jarak Jauh, Penilaian Pada Masa BDR, Pemanfaatan *ZOOM Meeting*, Pemanfaatan *Google Classroom*, dan Penyusunan Modul pada masa BDR.

Penanggungjawab kegiatan Bimtek Kelas A (SD) Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd., mengatakan setiap kelas Bimbingan Teknis Pengelolaan Pembelajaran Pada Masa Belajar dari Rumah (BDR) akan dikawal/difasilitasi oleh 3 (tiga) orang Narasumber dan 3 (tiga) orang Host/Moderator berasal dari Pejabat Fungsional (Widyaiswara) LPMP NTB. Bimbingan Teknis secara virtual dilakukan dalam rangka mengimplementasikan kebijakan pemerintah terkait dengan *Social distancing*. Pendaftaran calon peserta kegiatan atau bimbingan teknis melalui *website* ini, pertama kali dilakukan oleh LPMP NTB yang merupakan salah satu Inovasi yang dilakukan oleh lembaga. Dikaitkan dengan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK), pendaftaran melalui *website* dilakukan agar lebih cepat, mudah, efektif, dan efisien sehingga masyarakat merasa puas dengan pelayanan LPMP NTB. Kami berharap mudahan-mudahan Inovasi yang dilakukan lembaga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan atau masyarakat terutama *stakeholder* pendidikan dalam rangka meraih predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK).” Mengejar ZI-WBK dengan Inovasi” harap Made.

Ada beberapa pendapat atau Testimoni dari Peserta Bimtek Pengelolaan Pembelajaran pada masa Belajar dari Rumah (BDR) yang melakukan pendaftaran melalui *website*. Pengawas SMP Dinas Dikbudpora, Kabupaten Bima mengatakan “**Pendaftaran Bimtek melalui Website yang dilakukan oleh LPMP NTB adalah sebagai pelayanan dengan cepat dan tepat**”. Hal senada juga disampaikan oleh Kepala SDN 2 Senggigi Kabupaten Lombok Barat Suyitman, S.Pd.SD, “**Pendaftaran Peserta Bimtek di LPMP NTB lewat Website ternyata Lebih Mudah, Lebih Cepat, dan Lebih Murah**”. I Gusti Ngurah Prayoga Cendana Putra, S.Pd Guru SDN 2 Gili Indah Kabupaten Lombok Utara menyampaikan “**Pendaftaran Bimtek melalui Website selain cepat dan tepat juga sebagai bentuk percepatan pelayanan LPMP NTB terhadap tantangan pendidikan kedepan**”. Pendapat Kepala SDN 2 Sengkol Kabupaten Lombok Tengah “**Setelah saya mendapatkan informasi pendaftaran Bimtek BDR melalui webnya LPMP NTB, langsung saya mencobanya dan dalam hitungan detik pelaksanaan pendaftaran langsung bisa. Terima kasih LPMP NTB semoga jaya selalu sebagai wadah dalam memajukan pendidikan di NTB yang menjadi Mitra kami sebagai pendidik**”

Oleh : IMMA 2020

TUNAS INTEGRITAS SEBAGAI KATALISATOR PEMBANGUNAN ZI- WBK



Reformasi birokrasi suatu keharusan dilakukan oleh Pemerintah baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat, sehingga instansi pemerintah bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi (Permen PAN-RB) Nomor 10 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Permen PAN RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) bahwa untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) dibutuhkan peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan zona integritas pada Unit Kerja, Manajemen Perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsistensi mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK). Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagai garda terdepan dalam melaksanakan implementasi dan internalisasi didalam menjalankan tugas sehari-hari dalam pemberian pelayanan kepada *stakeholder*, baik internal maupun eksternal. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 1 tahun 2019 tentang Pembentukan Agen Perubahan dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat perlu juga membentuk Agen Perubahan.

Agen Perubahan/Tunas Integritas mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana aksi yang akan ditetapkan dalam agenda agen perubahan
2. Menginternalisasikan nilai-nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah diumumkan dengan cara mengkomunikasikan secara aktif dan langsung disatuan kerja masing-masing agar menjadi budaya kerja dilingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
3. Melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program rencana aksi agen perubahan secara berkala diunit kerjanya masing-masing.

Peran Agen Perubahan/Tunas Integritas adalah sebagai berikut :

1. Sebagai katalis yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai dilingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju kearah unit kerja yang lebih baik.
2. Sebagai penggerak perubahan yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju kearah unit kerja yang lebih baik.
3. Sebagai pemberi solusi yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada pegawai dan pimpinan di unit kerjanya yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya unit kerja kearah yang lebih baik.

4. Sebagai mediator yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada didalam dan pihak yang ada diluar unit kerja terkait dengan proses perubahan
5. Sebagai penghubung yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antar pegawai dilingkungan unit kerjanya masing-masing dengan para pengambil kebijakan/keputusan.
6. Sebagai teladan (*role models*) yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam prestasi, bertingkah laku, berpikir dalam pola yang lebih maju.

Tugas dan Peran Tim Agen Perubahan/Tunas Integritas instansi sangat strategis dalam pembangunan Zone Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK). Agen Perubahan/Tunas Integritas dibentuk dalam rangka percepatan dalam Pembangunan ZI-WBK dilingkungan LPMP NTB. Sebenarnya dukungan dan peran serta komitmen seluruh pegawai baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) paling utama dalam pembangunan ZI-WBK sehingga LPMP bebas dan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan pada akhirnya akan bisa memberikan pelayanan bermutu secara optimal (Pelayanan Prima) serta bisa meraih predikat sebagai instansi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Menurut Ketua Tim Pembangunan ZI-WBK Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd., Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat melalui Tim Manajemen Perubahan telah menetapkan kriteria, prosedur, dan mekanisme pemilihan Tunas Integritas melalui beberapa tahapan. Tahap kesatu, dari 83 (delapan puluh tiga) orang pemilih, baik dipilih oleh Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan Tenaga Struktural lainnya telah dipilih 18 (delapan belas) orang Calon Tunas Integritas. Pemilihan dilakukan secara dalam jaringan (daring) dengan instrumen berdasarkan 7 (tujuh) indikator Tata Nilai dan Budaya Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Integritas, Kreatif dan Inovatif, Tanpa Pamrih, Aktif, Meritokrasi, Pembelajar, dan Inisiatif. Tahap kedua, dari 18 (delapan belas) orang pegawai yang terpilih pada tahap kesatu dipilih lagi untuk menetapkan Calon Tunas Integritas sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dan pada akhirnya akan dilakukan Penetapan Tunas Integritas dalam bentuk Surat Keputusan Kepala LPMP NTB. Penskoran dalam instrumen menggunakan Skala Likert 1-5, dengan kriteria 1 = sangat kurang; 2 = kurang; 3 = cukup; 4 = baik; dan 5 = sangat baik. Melalui beberapa tahapan dalam Pemilihan Calon Tunas Integritas akhirnya terpilih 5 (lima) orang pegawai, wakil dari masing-masing seksi/subbag /widyaiswara yaitu : **Musmuliadi (Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi)**, **Yuyun Sambodo (Seksi Fasilitas Peningkatan Mutu Pendidikan)**, **Dian Rohaidah (Seksi Sistem Informasi)**, **Partoyo (Subbag Umum)**, dan **Nur Hidayati (Widyaiswara)**. Untuk itu kelima Calon Tunas Integritas itu akan ditetapkan sebagai Tunas integritas LPMP NTB tahun 2020, dimana Peran dari Tunas Integritas adalah sebagai katalis, penggerak perubahan, pemberi solusi, mediator, penghubung, dan sebagai teladan (*role model*).

Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) Bapak Mohamad Mustari, Ph.D. mengatakan dengan ditetapkannya Tunas Integritas/Agen Perubahan berdasarkan SK Kepala LPMP NTB Nomor 592/C7.47/KP/2020 Tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara (ASN) Sebagai Tunas Integritas di Lingkungan LPMP NTB, salah satu peran Agen Perubahan/Tunas Integritas yang sangat penting dan strategis adalah sebagai Katalisator yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai dilingkungan LPMP NTB tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju kearah unit kerja yang lebih baik. Tunas Integritas diharapkan akan menjadi *role model*/teladan sehingga mempercepat Pembangunan ZI-WBK. Perubahan yang terjadi biasanya perubahan *mind set* dalam hal Tatakelola. Terutama dalam tatakelola Sumber Daya Manusianya. Tatakelola yang baik akan berimbas pada pelayanan yang akan diberikan akan semakin baik pula. Semakin baik tatakelola suatu lembaga akan mengakibatkan masyarakat akan merasakan suatu kepuasan atas pelayanan yang telah diberikan. Pelayanan akan menjadi semakin cepat, tepat,

murah, efektif dan efisien sesuai dengan harapan pelanggan. Agen Perubahan akan mempercepat Pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), sehingga apa yang menjadi *goal* atau tujuan dari Reformasi Birokrasi akan bisa cepat terwujud, yaitu instansi yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Instansi yang dapat memberikan pelayanan bermutu (pelayanan prima) kepada seluruh *stakeholder* internal maupun eksternal. “Agen Perubahan/Tunas Integritas sebagai Katalisator, akan mempercepat Pembangunan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)”, harapnya.

Oleh : IMMA 2020

BELAJAR DARI COVID-19



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menyelenggarakan Upacara Bendera Peringatan Hardiknas Tahun 2020 pada tanggal 2 Mei 2020 pukul 08.00 WIB secara terpusat, terbatas, dan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 yang telah ditetapkan Pemerintah. Hal ini dilakukan tanpa mengurangi makna, semangat, dan kekhidmatan acara. Pedoman Penyelenggaraan Hardiknas Tahun 2020 disampaikan melalui surat Nomor 42518/MPK.A/TU/2020, ter tanggal 29 April 2020 dan ditandatangani oleh Mendikbud Nadiem Anwar Makarim. Dalam pedoman tersebut, Kemendikbud juga meniadakan penyelenggaraan upacara bendera yang biasanya dilakukan satuan pendidikan, kantor Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, serta perwakilan pemerintah Republik Indonesia di luar negeri sebagai bentuk pencegahan penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional. Adapun tema dari Peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2020 adalah “Belajar dari Covid-19”. Pahlawan Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara menegaskan “ Setiap orang adalah Guru dan Setiap Rumah adalah Sekolah”. Kita bisa belajar dengan siapa saja, belajar dimana saja, dan kapan saja (belajar sepanjang hayat). Saat ini kita sedang melalui krisis COVID-19. Krisis yang memakan begitu banyak nyawa. Krisis yang menjadi tantangan luar biasa bagi negara kita dan seluruh dunia. Tetapi, dari krisis ini kita mendapatkan banyak sekali hikmah dan pembelajaran yang bisa kita terapkan saat ini dan setelahnya.

Tema Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2020 adalah “Belajar dari Covid-19” sangat relevan dengan keadaan yang dialami oleh Bangsa Indonesia terkait dengan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19. “Belajar dari Covid-19” mengandung makna yang sangat luas bagi tatanan berbangsa, bernegara, bermasyarakat secara umum maupun sebagai manusia secara individu. Semua tatanan itu berubah sangat cepat. Perubahan-perubahan yang terjadi dialami oleh semua lini dan sendi. Covid-19 membawa dampak yang besar dan signifikan terhadap kehidupan manusia. Covid-19 membuat kita banyak belajar banyak hal. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan pembelajaran buat berbangsa, bernegara, bermasyarakat secara umum maupun sebagai manusia secara individu antara lain :

1. Peduli dengan lingkungan. Dengan adanya Covid-19 kita semakin peduli dengan lingkungan sekitar terutama dari segi kebersihan lingkungan. Penyemprotan disinfektan yang dilakukan terhadap sarana dan prasarana ataupun fasilitas umum lainnya. Perkantoran, tempat ibadah, Bandar udara, jalan umum maupun rumah pribadi juga dilakukan

penyemprotan disinfektan. Masyarakat semakin sadar dan peduli akan kebersihan lingkungan.

2. Sikap gotong royong semakin tumbuh dan berkembang, secara bersama-sama melawan Covid-19 sehingga penyebarannya dapat ditekan. Melawan Covid-19 tidak bisa dilakukan sendiri tetapi dibutuhkan peran serta seluruh masyarakat. Bantuan dari Dokter, Perawat dan Paramedis lainnya secara bersama-sama sebagai garda terdepan untuk membantu dan merawat masyarakat yang terkena Covid-19. Begitu pula uluran tangan yang diberikan oleh masyarakat yang mampu kepada masyarakat yang kurang mampu sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada kondisi kesulitan untuk mencari penghidupan. Pembagian sembako, pembagian masker dan yang lainnya telah dilakukan oleh sebagian masyarakat. Bangsa Indonesia besar dilahirkan dari rasa kegotong-royongan yang tinggi.
3. Penguasaan terhadap Teknologi Informasi semakin dibutuhkan oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Untuk pertama kalinya, guru-guru melakukan pembelajaran secara daring atau *online*, menggunakan *tools* atau perangkat baru, dan menyadari bahwa sebenarnya pembelajaran bisa terjadi di manapun. Dengan adanya kebijakan Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dibarengi dengan pandemik Covid-19, Belajar dari Rumah suatu keharusan. Pembelajaran dalam jaringan (daring) antara Guru dan siswa dilakukan secara virtual. Pendidik dan Tenaga Kependidikan harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan Pengelolaan Pembelajaran pada masa Belajar dari Rumah. Strategi yang dipergunakan tentu akan berbeda dengan strategi pembelajaran melalui tatap muka.
4. Peserta didik (siswa) mau tidak mau penguasaan teknologi informasi harus dikuasai. Peserta didik mulai mau belajar menggunakan teknologi. Pembelajaran yang dilakukan oleh Guru dari rumah, semua tugas-tugas harus disampaikan melalui daring juga. Pembelajaran melalui daring banyak membawa dampak positif bagi dunia pendidikan anak. Segala bentuk informasi yang disampaikan oleh Guru melalui daring akan cepat diterima oleh peserta didik.
5. Orang tua saat pandemik Covid-19 secara tidak langsung menggantikan posisi Guru dalam mengawal anaknya untuk belajar. Ternyata untuk menjadi seorang pendidik tidak semudah yang dibayangkan. Banyak keluhan yang dirasakan oleh Orang Tua maupun oleh peserta didik yang diajarkan oleh orang tua mereka. Orang tua semakin sadar betapa sangat mulianya tugas sebagai seorang Guru. Siswapun merasakan tugas guru yang mulia itu sangat berat, karena Guru harus bisa mengajar dan mendidik.
6. Guru, siswa, dan orang tua sekarang menyadari bahwa pendidikan itu bukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan di sekolah saja. Tetapi, pendidikan yang efektif itu membutuhkan kolaborasi yang efektif dari tiga hal ini, guru, siswa, dan orang tua. Tanpa kolaborasi itu, pendidikan yang efektif tidak mungkin terjadi.
7. *Social Distancing* yang dilakukan oleh masyarakat sangat besar pengaruhnya terhadap lingkungan alam. Dari hasil penelitian polusi udara semakin berkurang, karena kendaraan bermotor di jalan raya tidak begitu banyak,
8. Masyarakat secara umum sekarang semakin peduli dengan kebersihan diri sendiri, mulai dari cuci tangan minimal selama 20 (dua puluh) detik dengan mempergunakan sabun, memakai masker apabila berpergian keluar rumah, berjemur, istirahat dan yang tidak kalah pentingnya adalah selalu memakan makanan yang bergizi.
9. Sebagai manusia secara individu, kita semakin sadar/eling akan Kemahakuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Secara individu kita semua merasakan pandemik Covid-19 membawa perubahan terhadap tatanan beragama. Persembahyangan bersama bagi umat Hindu di Pura, Sholat di Masjid, Kerohanian di Gereja begitu juga untuk kegiatan keagamaan yang lainnya untuk sementara waktu dilaksanakan dirumah saja. berkumpulnya masa yang banyak saat ini dihindari, untuk memutus mata rantai Covid-19. Etika saat kita batuk dan

- bersih. Timbulnya empati, timbulnya solidaritas di tengah masyarakat kita pada saat pandemi COVID-19 ini merupakan suatu pembelajaran yang harus kita kembangkan
10. Kreatif dan inovatif. Masyarakat semakin kreatif dan inovatif untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Masker untuk pelindung diri saat ini sudah bisa dibuat dari kain, bisa dicuci dan lebih murah harganya. Pembuatan disinfektan bisa dilakukan oleh masyarakat tanpa harus membeli dengan harga mahal. Menggalang dana untuk disumbangkan ke Lembaga Sosial dilakukan di rumah saja. Banyak kreatifitas dan inovasi yang muncul dari lapisan masyarakat.
 11. Pembelajar. Masyarakat menjadi semakin pembelajar. Belajar dari media social, TV, Koran ataupun yang lainnya. Belajar tidak terbatas waktu. Belajar tentang Covid-19, apa itu Covid-19, ciri-ciri terkena Covid-19, cara menghindari, dampak terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, dampak terhadap bumi/alam, dan mitigasi terhadap bencana Covid-19.
 12. Inisiatif. Pemerintah dan masyarakat mempunyai inisiatif untuk melakukan beberapa langkah untuk pencegahan dan penyebaran Covid-19. Pemerintah Pusat mempunyai inisiatif dengan mengeluarkan Kebijakan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemerintah Daerah juga berinisiatif untuk menjaga daerahnya dengan mengimplementasikan Kebijakan Pemerintah Pusat. Masyarakat mempunyai inisiatif untuk menjaga lingkungannya dengan memberlakukan jam malam serta memasang portal untuk mengurangi kunjungan masyarakat luar lingkungan.

Oleh : IMMA 2020

LPMP NTB SEMARAKAN HARDIKNAS MELALUI PENINGKATAN LAYANAN



Berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional, maka dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2020 di tengah masa pandemi COVID-19 ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) selaku panitia penyelenggara peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2020 meniadakan Penyelenggaraan Upacara Bendera yang umumnya wajib diselenggarakan di setiap kantor instansi pusat dan daerah, setiap satuan pendidikan, serta kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Ragam aktivitas/kegiatan alternatif untuk memperingati dan memeriahkan Hari Pendidikan Nasional 2020 dapat dilakukan secara kreatif, menjaga dan membangkitkan semangat belajar di masa darurat COVID-19, mendorong pelibatan dan partisipasi publik, serta mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Adapun Tema Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2020 adalah "Belajar dari COVID-19".

Dalam rangka menyemarakkan Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2020, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) melaksanakan aktifitas atau kegiatan alternatif Peningkatan Layanan untuk mendorong pelibatan dan partisipasi publik, serta mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Hal ini sesuai dengan Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42518/MPK.A/TU/2020 tertanggal 29 April 2020 Tentang Pedoman Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2020, menghimbau insan pendidikan untuk melakukan ragam kegiatan/aktifitas alternatif. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan seluruh elemen masyarakat. Untuk itu perlu mendorong pelibatan dan partisipasi publik serta menjaga dan membangkitkan semangat belajar dan mengajar di masa darurat COVID-19.

Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) Bapak Mohamad Mustari, Ph.D. mengatakan dalam rangka menyemarakkan Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2020 kami melakukan berbagai ragam kegiatan atau aktifitas Peningkatan Layanan. Bentuk Peningkatan Layanan yang diberikan antara lain Layanan Bimbingan Teknis Pengelolaan Pembelajaran Pada Masa Belajar dari Rumah, Layanan Bimbingan Teknis *Google Classroom*, Layanan Bincang Pendidikan, Layanan Seminar Pendidikan, Layanan Fasilitas Sarana dan Prasarana dan Kegiatan Sosial. Ragam kegiatan atau aktifitas Peningkatan Layanan itu diantaranya dilaksanakan dalam jaringan (daring) dengan cara Virtual melalui “*ZOOM Cloud Meetings*” dan melalui WhatsAap. Bimtek ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk mengelola pembelajaran dalam jaringan serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran. Sedangkan Bincang Pendidikan dilakukan disamping dalam rangka melakukan Sosialisasi Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga untuk mendapatkan masukan, saran, dan solusi terkait dengan permasalahan pendidikan yang ada di daerah. LPMP NTB juga memberikan Layanan Fasilitas Sarana dan Prasarana Penginapan untuk Isolasi Pasien Covid-19. Pada tanggal 15 April 2020 telah menyelenggarakan Kegiatan Sosial atau Gerakan “LPMP NTB PEDULI # LAWAN COVID-19”. Kegiatan Sosial atau Gerakan ini dilakukan dengan membagikan 100 (seratus) paket sembako kepada masyarakat yang tidak berpenghasilan tetap atau buruh harian, yang terdampak bencana Nonalam COVID-19. Pembagian paket sembako ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang kurang mampu disekitar lingkungan Pegawai LPMP NTB. Kami berharap dengan beragam kegiatan dan aktifitas yang dilakukan oleh LPMP NTB akan menyemarakkan Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2020 serta membangkitkan geliat pendidikan menuju NTB Gemilang. “Selamat Memperingati Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2020, mari kita Belajar dari COVID-19”, ujarnya

Kepala Sub Bagian Umum, Dra. H. Sri Sukriyani, menyampaikan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat mulai Senin, tanggal 27 April 2020 ikut berperan serta dan berkontribusi memutus mata rantai penyebaran COVID-19, melakukan Peningkatan Layanan Sarana dan Prasarana dengan cara memberikan fasilitas penginapan untuk Isolasi Pasien COVID-19. Hal ini kami lakukan dalam rangka menindaklanjuti Imbauan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pemanfaatan sarana dan prasarana terutama asrama/penginapan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) untuk ruang Isolasi Pasien COVID-19. Dalam memberikan Layanan ini Karyawan LPMP NTB ditugaskan untuk selalu menjaga kebersihan asrama/penginapan dan memberikan bentuk layanan lainnya. “Semoga Bencana Nonalam COVID-19 cepat berakhir dan kita semua selalu dalam lindungannya”, harap Sri Sukriyani.

Menurut Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd., Kepala Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi salah satu ragam aktifitas/kegiatan yang dilaksanakan oleh LPMP NTB adalah Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. “Bimtek Pengelolaan Pembelajaran Pada Masa Belajar dari Rumah” angkatan pertama dilaksanakan mulai tanggal 27 April sampai dengan 6 Mei 2020, dengan jumlah peserta 120 (seratus dua puluh) orang yang dibagi dalam 2 (dua) kelas. Bimbingan Teknis Pengelolaan Pembelajaran pada masa Belajar dari Rumah dilaksanakan secara virtual dengan mempergunakan “*ZOOM Cloud Meetings*” dan melalui WhatsAap. Bimbingan Teknis ini diikuti oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan mulai dari Pengawas, Kepala Sekolah, dan Guru jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Bimtek Pengelolaan Pembelajaran Pada Masa Belajar dari Rumah secara virtual baru pertama kali dilaksanakan. Begitu pula untuk pertama kalinya, guru-guru melakukan pembelajaran secara dalam jaringan (daring) atau *online*, menggunakan *tools* atau perangkat baru, dan menyadari bahwa sebenarnya pembelajaran bisa terjadi di manapun. Pembelajaran daring atau *online* berbeda dengan pembelajaran yang dilakukan secara konvensional atau tatap muka. Ini dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaannya sehingga Pendidik dan Tenaga Kependidikan membutuhkan Bimbingan Teknis (Bimtek). “Pendaftaran Calon Peserta Bimtek

dilakukan melalui Website LPMP NTB, ini merupakan salah satu kreatifitas dan inovasi yang dilakukan oleh lembaga”, pungkas Made.

Oleh : IMMA 2020



LPMP NTB SELENGGARAKAN EVALUASI PERSIAPAN PMPRB TAHUN 2020 DITENGAH PANDEMI COVID-19



Pencanangan Pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) yang telah dilaksanakan di Hotel Jayakarta, Senggigi Kabupaten Lombok Barat, yang dilakukan oleh Kepala LPMP NTB, harus diinternalisasikan dan dilaksanakan oleh seluruh Pegawai baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Saat dilakukan Pencanangan tersebut juga disaksikan oleh Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Provinsi NTB, Anjak Tipikor Bareskrim Polri Jakarta dan Inspektur II Itjen Kemendikbud RI. Hadir pula Kepala Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BPPAUD Dikmas) NTB, Kepala Kantor Bahasa NTB, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dilingkungan LPMP NTB, Media Massa, serta peserta *In House Training (IHT)* lainnya. Melalui Pencanangan ini diharapkan semua Pegawai LPMP NTB mempunyai “Komitmen Bersama” untuk melaksanakan dan mensukseskan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK), mewujudkan Tatakelola yang baik dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat (Pelayanan Prima).

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) selama sehari pada tanggal 8 Mei 2020 melaksanakan Evaluasi Persiapan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2020. Kegiatan Evaluasi ini dilaksanakan secara Virtual melalui “**Zoom Cloud Meetings**” diikuti oleh Tim Pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang anggota timnya berjumlah 34 (tiga puluh empat) orang. Evaluasi ini dilakukan untuk melihat dan

menilai Pelaksanaan Pembangunan Zone Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) di LPMP NTB. Hasil Evaluasi yang didapatkan akan dijadikan sebagai acuan perbaikan dan akan dilakukan tindak lanjut sehingga akan ada perbaikan nilai/skor dari Lembar Kerja Evaluasi (LKE) bulan sebelumnya. Dengan evaluasi ini diharapkan keterlaksanaan Pembangunan ZI-WBK sesuai dengan Program Reformasi Birokrasi Pemerintah dan harapan masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang prima lebih baik, efektif, efisien, murah, cepat, tepat, dan mempunyai akuntabilitas yang tinggi.

Menurut Dra. Hj. Sudiati Prihatiningrum, Kepala Seksi Fasilitasi dan Peningkatan Mutu Pendidikan (Kasi FPMP) yang juga sebagai Koordinator Tim Penguatan Pengawasan berharap “Rapat Evaluasi Persiapan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2020 dilaksanakan setiap minggu, mengingat batas waktu penyampaian Dokumen Pendukung Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) ini paling lambat tanggal 20 Mei 2020. Evaluasi persiapan ini harus dilakukan dalam rangka memenuhi dokumen inti dan dokumen pendukung yang diperlukan dalam PMPRB tersebut. Melalui Vicon ini juga diharapkan semua permasalahan Pelaksanaan Pembangunan ZI-WBK di LPMP NTB dapat dicarikan solusi pemecahan masalahnya, sehingga berdampak pada Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat”.

Koordinator Tim Penguatan Akuntabilitas Ahmad Sahid, S.Pd., M.Pd menyampaikan “Target yang ingin dicapai dalam Penguatan Akuntabilitas adalah meningkatnya kinerja Kemendikbud dan meningkatnya akuntabilitas Kemendikbud sedangkan Langkah-langkah yang telah dilakukan adalah Meningkatkan Keterlibatan Pimpinan dan Peningkatan Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja. Keterlibatan dan peran aktif dari pimpinan dalam Pembangunan ZI-WBK mulai dari perencanaan, penetapan kinerja, pelaksanaan, maupun dalam pemantauan kinerja individu maupun kinerja lembaga dapat dilihat dari pemantauan yang telah dilaksanakan secara berkala. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) tahun 2019 mendapatkan Piagam Penghargaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Atas Prestasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 dengan nilai sebesar 99,00 sebagai Peringkat Kedua. Sedangkan Akuntabilitas Kinerja LPMP NTB Tahun 2019 masuk dalam kategori : BB dengan nilai 75,96 dengan interpretasi : Sangat Baik, Akuntabel, Berkinerja Baik, Memiliki Sistem Manajemen Kinerja Yang Andal”.

Ketua Tim Pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd. mengatakan Vicon ini bertujuan untuk melakukan Evaluasi terhadap Persiapan LPMP NTB dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2020, yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) tetap dilaksanakan dan tidak akan menyurutkan Pembangunan ZI-WBK walaupun ditengah situasi Pandemi Covid-19. Kami berharap Tim Pembangunagan ZI-WBK LPMP NTB tetap bersemangat untuk menyelesaikan hal-hal yang dibutuhkan dalam PMPRB walaupun saat ini sedang menunaikan Ibadah Puasa 1 Syawal 1441 Hijriah. Dari laporan masing-masing Tim Pengungkit mulai dari Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, telah terjadi peningkatan hasil dari Pelaksanaan Pembangunan ini. Progres yang telah dicapai masing-masing Tim Pengungkit selama ini bila dilihat dari Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pada bulan Pebruari, Maret, dan April 2020 yang terus menunjukkan kenaikan angka yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan Kinerja Tim Pembangunan ZI-WBK LPMP NTB sangat luar biasa. Banyak perubahan yang telah dicapai oleh masing-masing Tim, termasuk juga inovasi-inovasi yang telah dilaksanakan selama ini. “Kami berdoa semoga di tahun 2020 ini LPMP NTB bisa memperoleh Predikat Wilayah Bebas dari Korusi (WBK)”, harap Made

Oleh : IMMA 2020

LPMP NTB BERSAMA MENJAMIN MUTU MEWUJUDKAN NTB GEMILANG



Foto bersama : Kepala LPMP NTB Bapak Mohamad Mustari, Ph.D. (paling kiri) bersama dengan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi NTB Bapak H. Muhammad Yusuf, S.Pd. (nomor 2 dari kiri) Beserta Jajarannya

Amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) di satuan pendidikan dasar dan menengah. Tujuan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia berjalan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbud melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI dilaksanakan oleh satuan pendidikan sedangkan SPME dilaksanakan oleh instansi diluar satuan pendidikan seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), dan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M).

Penjaminan Mutu Pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan. Penjaminan Mutu (*quality assurance*) pendidikan merupakan upaya sistematis untuk memenuhi standar mutu atau melampauinya sehingga segenap *stakeholder* pendidikan mendapat kepuasan. Satuan pendidikan bermutu dapat dimaknai sebagai kapasitas program dan satuan pendidikan dalam memanfaatkan sebaik mungkin berbagai sumber daya yang dimiliki untuk menciptakan proses pembelajaran yang baik, menyenangkan dan optimal berikut menghasilkan *output* dan *outcomes* sesuai atau melampaui standar yang telah ditetapkan.

Dalam kerangka Reformasi Birokrasi “Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat” merupakan suatu keharusan. Sekarang ini Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat sedang gencar-gencarnya melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) setelah dilakukan Pencanangan Pembangunan ZI-WBK oleh Kepala LPMP disaksikan oleh Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Provinsi NTB, Anjak Tipikor Bareskrim Polri Jakarta dan Inspektur II Itjen Kemendikbud RI. Hadir pula Kepala Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BPPAUD Dikmas) NTB, Kepala Kantor Bahasa NTB, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dilingkungan LPMP NTB, Media Massa, serta peserta *In House Training (IHT)* lainnya. Dalam rangka Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik dan Internalisasi dari Pembangunan ZI-WBK, LPMP NTB telah membentuk Unit Layanan Terpadu (ULT). Unit Layanan Terpadu (ULT) bertujuan agar pelayanan menjadi lebih cepat, tepat, murah, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam satu pintu. Semua jenis layanan yang dibutuhkan oleh *Stakeholder* Pendidikan dapat dilakukan dalam satu tempat atau satu pintu. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat H. Muhammad Yusuf, S.Pd. mengatakan bahwa “Unit Layanan Terpadu (ULT) sangat membantu guru, tenaga kependidikan, dan masyarakat untuk mencari informasi terkait banyak hal yang menyangkut nasib para guru dan tenaga kependidikan. Perubahan yang begitu pesat juga sangat dirasakan oleh Warga Nusa Tenggara Barat disebabkan karena LPMP NTB, mencari terobosan baru. LPMP Nusa Tenggara Barat mampu memberikan layanan yang baik kepada para guru dan tenaga kependidikan ditengah wabah penyebaran Covid-19”.

Ditempat terpisah Ketua Ikatan Guru Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat Hermawanti, M.Pd mengungkapkan, “terima kasih sebesar-besarnya kepada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) yang telah bermitra dengan Ikatan Guru Indonesia (IGI) Provinsi NTB, selalu membuka tempat untuk Komunitas Guru NTB. Begitu pula dengan pihak Widyaiswara LPMP NTB yang selalu berbagi ilmu dengan Guru-guru di Provinsi Nusa Tenggara Barat”.



Foto Bersama Kepala LPMP NTB Mohamad Mustari, Ph.D. (berdiri) dan Ketua IGI Provinsi NTB Hermawanti, M.Pd. (uduk paling kiri), Kerjasama LPMP NTB dengan IGI Provinsi NTB, Kegiatan Seminar Nasional Merdeka Belajar di Mataram, NTB

Ketua BAN-S/M Provinsi NTB Drs. H. Suyanto, M.Ed. berpendapat “Dalam rangka Penjaminan Mutu Pendidikan (*Quality Assurance*), LPMP memiliki peran sentral dalam memetakan capaian setiap Satuan Pendidikan terhadap “pemenuhan” Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang merupakan salah satu tolok ukur mutu Pendidikan. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) Provinsi yang berkantor di LPMP merupakan partner yang sangat sinerjis dalam upaya penjaminan mutu melalui “Penilaian Kinerja” terhadap satuan Pendidikan. LPMP mengaudit pemenuhan (*Compliance*), sedangkan BAN-S/M mengaudit kinerja (*Performance*). Dinas Pendidikan punya kewajiban menindak lanjuti “rekomendasi” (*Diagnostic*) yang diberikan oleh LPMP dan BAN-S/M”.

Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat Bapak Mohamad Mustari, Ph.D. menyampaikan ucapan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta jajarannya yang telah menerima kunjungan silaturahmi ini. Menurut Beliau Penyelenggaraan pendidikan yang baik memerlukan dukungan dari masyarakat yang memadai. Sebagai langkah alternatif dalam mengupayakan dukungan masyarakat untuk sektor pendidikan ini adalah dengan menumbuhkan kembangkan

keberpihakan pada mutu, mulai dari pimpinan negara, sampai aparat yang paling rendah. termasuk masyarakat yang bergerak dalam sektor swasta dan industri. Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan sesuai dengan standar mutu dan aturan yang telah ditetapkan. Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) suatu keharusan dan Penjaminan Mutu Pendidikan adalah tanggung jawab bersama baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya, Orang Tua, Masyarakat secara umum, dan Organisasi Profesi termasuk juga Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Kerjasama perdana yang dilakukan adalah Seminar Nasional Pendidikan dengan Tema “Guru Profesional untuk NTB Gemilang”. Disamping itu Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat dalam rangka Memperingati Hari Guru Nasional Tahun 2019 dan HUT NTB Ke-61 juga melaksanakan Seminar Nasional Pendidikan dengan Tema Nadiem Menjawab “Arah Pendidikan Nasional di Era Revolusi Industri 4.0” berkerjasama dengan Ikatan Guru Indonesia (IGI) Provinsi NTB. Mari kita bersama-sama mengawal Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) didaerah dalam rangka penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di Provinsi NTB. “LPMP NTB ingin Bersama Menjamin Mutu dapat diinternalisasikan dan diimplementasikan secara bersama-sama dalam Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Mewujudkan NTB Gemilang”, tutup Mustari.

Oleh : IMMA 2020

SINERGITAS LPMP NTB DENGAN DEWAN PENDIDIKAN PROPINSI NTB



Foto Bersama : Kepala LPMP NTB Bapak Mohamad Mustari, Ph.D. (nomor 6 dari kiri), Ketua Dewan Pendidikan NTB Bapak Drs. H. Rumindah (nomor 5 dari kiri), dan Ketua BAN-S/M NTB Bapak Drs. H. Suyanto (nomor 7 dari kiri)

Penyelenggaraan pendidikan memerlukan dukungan masyarakat yang memadai. Sebagai langkah alternatif dalam mengupayakan dukungan masyarakat untuk sektor pendidikan ini adalah dengan menumbuhkan keberpihakan yang bermutu, mulai dari pimpinan negara, sampai aparat yang paling rendah. termasuk masyarakat yang bergerak dalam sektor swasta dan industri. Keberpihakan konkret itu perlu disalurkan secara politis menjadi suatu gerakan bersama (*collective action*) yang diwadahi Dewan Pendidikan yang berkedudukan di kabupaten/kota dan Komite Sekolah ditingkat satuan pendidikan. Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 22 Tahun 1999 bertujuan untuk memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada Daerah dan masyarakat sehingga memberi peluang kepada Daerah dan masyarakat agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakasa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah.

Dewan Pendidikan adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di kabupaten/kota. Dewan Pendidikan adalah nama yang generik, artinya nama Dewan Pendidikan disesuaikan dengan dan kondisi masing-masing daerah, seperti Dewan Pendidikan, Majelis Pendidikan atau nama lain yang disepakai. Ruang lingkup pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan prasekolah, pendidikan sekolah, dan pendidikan luar sekolah. Dewan Pendidikan berkedudukan di kabupaten/kota. Dalam kondisi dan kebutuhan tertentu misalnya untuk kebutuhan otonomi khusus atau pertimbangan lain dapat dibentuk ditingkat dipropinsi. Pembentukan Dewan Pendidikan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Peran Dewan Pendidikan adalah a. Pemberi pertimbangan (*advisory body*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, b. Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan, c. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan, dan d. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan masyarakat. Sedangkan fungsi Dewan Pendidikan adalah a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, b. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), pemerintah dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan

dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat, d. Memberikan masukan, pertimbangan, rekomendasi kepada pemerintah daerah/ Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan, dan e. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan

Baru-baru ini Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat Bapak Drs. H. Rumindah beserta jajarannya didampingi oleh Ketua BAN-S/M Provinsi NTB Bapak Drs. H. Suyanto, M.Ed. telah melakukan kunjungan silaturahmi dan berdiskusi tentang pendidikan dengan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) di Jalan Panji Tilarnegara No. 8 Mataram, NTB. Ada beberapa hal yang didiskusikan oleh Team Dewan Pendidikan Provinsi NTB dengan Kepala LPMP NTB terkait dengan Peran dan Fungsi Dewan Pendidikan, Capaian Mutu Pendidikan dan Permasalahan pendidikan yang ada di daerah khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan tersebut Ketua Dewan Pendidikan Provinsi NTB Bapak Drs. H. Rumindah mengatakan, kami memberikan apresiasi atas keberhasilan program yang telah berjalan apakah itu kegiatan pengembangan sekolah model, supervisi mutu pendidikan, pemetaan mutu, dan program guru penggerak. Keberadaan LPMP di daerah sangat dibutuhkan karena ide-ide strategis seperti ini kecil kemungkinannya lahir dari daerah. “Salah satu peran Dewan Pendidikan adalah sebagai **Pendukung (*supporting agency*)**, baik yang berwujud *finansial*, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan dan salah satu fungsinya adalah Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), pemerintah dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, ”, ungkap Rumindah.

Menurut Bapak Mohamad Mustari, Ph.D, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan perpanjangan tangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan pasal 13 huruf a dijelaskan “Setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi serta kerjasama yang baik dilingkungan Internal maupun Eksternal LPMP”. Untuk itulah perlu dilakukan dan diterapkannya prinsip-prinsip Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi serta kerjasama yang baik antara LPMP NTB dengan *Stakeholder* pendidikan lainnya termasuk dengan Dewan Pendidikan Provinsi NTB. Hal ini dilakukan dalam rangka bersama-sama mengawal Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) di Provinsi NTB. LPMP NTB akan menjalankan Penjaminan Mutu Pendidikan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dan Dewan Pendidikan Provinsi NTB akan melakukan Penjaminan Mutu Pendidikan sesuai dengan Peran dan Fungsinya. “Sinergitas LPMP NTB dengan Dewan Pendidikan Provinsi NTB perlu terus dijaga, dikembangkan, dan ditingkatkan di masa-masa yang akan datang dalam rangka untuk mewujudkan NTB Gemilang”, harap Mustari.

Oleh : IMMA 2020

Daring Pemanfaatan *Google Classroom*, Bimtek Daring Pemanfaatan *Google Form* dalam Pengumpulan Data Pendidikan, dan Webinar Nasional Pendidikan.

Guru adalah ujung tombak pelaksanaan dunia pendidikan. Peran guru sangat penting dan strategis dalam menentukan sukses dan tidaknya pendidikan. Oleh karena itu melalui “Bincang Pendidikan” ini diharapkan akan muncul ide kreatif dan inovatif untuk menjadi Guru yang profesional, sesuai dengan perkembangan jaman Era Revolusi industri 4.0 dalam hal memajukan dunia pendidikan. Pada pendidikan formal, Guru memegang kendali penuh terhadap anak didiknya. Baik atau tidaknya pembelajaran di dalam kelas bergantung pada kompetensi Guru baik dari pengetahuan maupun keterampilannya. Apalagi saat Pandemi COVID-19 Guru diwajibkan melaksanakan aktifitas Pembelajaran dalam jaringan (daring) atau Pembelajaran Jarak Jauh. Mau tidak mau, suka tidak suka Guru harus memulai untuk mempergunakan Teknologi Informasi (TI) sebagai salah satu media dalam pengelolaan pembelajaran jarak jauh atau daring. Selain itu, guru juga sangat berperan dalam membentuk watak dan karakter generasi bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diharapkan, maka peranan guru sulit digantikan oleh yang lain. Untuk itu, guru harus memiliki sikap dan sifat yang baik sehingga dapat menjadi contoh dan teladan atau *role model* bagi siswa yang diajarkannya. Dengan kata lain guru harus memiliki kompetensi/kualitas yang baik untuk menjadikan pendidikan lebih bermutu.

Bincang Pendidikan dengan tema “Strategi Pembelajaran di Tengah Pandemi Covid-19”, dilaksanakan selama sehari pada tanggal 15 Mei 2020 diikuti oleh Pejabat Struktural dilingkungan Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, Pejabat Struktural dilingkungan LPMP NTB, Perwakilan Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, dan Guru se Kabupaten Bima. Peserta dari Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diundang sebanyak 70 (tujuh puluh) orang. Pada saat Bincang Pendidikan Kepala Dinas Dikbudpora Zunaidin, S.Sos MM. menyampaikan “ Kebijakan dan Implementasi Belajar Dari Rumah (BDR) di Kabupaten Bima “. Beberapa Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan Dinas Dikbudpora terkait dengan Belajar dari Rumah (BDR) antara lain Surat Edaran Bupati Bima, Nomor: 014/012/03.7/2020 Tentang Perpanjangan Kebijakan Pemda terkait dengan Belajar Dari Rumah tertanggal 16 Maret 2020, Surat Edaran Kepala Dinas Nomor: 001/421/01.1/A/2020 Tentang Belajar Dari Rumah Tertanggal 16 Maret 2020, Surat Edaran Kepala Dinas Dikbudpora Nomor: 001/430/01.1/B/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Covid-19 Tertanggal 25 Maret 2020, Surat Keputusan Kadis Dikbudpora Nomor: 094/545/01.1/B/2020 tentang Tim Monev BDR tertanggal 30 April 2020, dan Surat Keputusan Kadis Dikbudpora Nomor: 423/546/01.1/B/2020 tentang BDR di Bulan Ramadhan tertanggal 11 Mei 2020. Lebih lanjut Kadis Dikbudpora Kabupaten Bima mengatakan Ada beberapa kendala Belajar dari Rumah (BDR) di Kabupaten Bima antara lain struktur ekonomi orang tua siswa rata-rata menengah ke bawah (petani & nelayan), letak geografis wilayah yang sulit dijangkau, akses jaringan internet yg terbatas, dan tidak semua siswa memiliki HP android. Dari Hasil monev di 3 (tiga) kecamatan dari 18 (delapan belas) kecamatan, 80% sekolah telah melaksanakan kebijakan BDR, 20% belum, Moda yang digunakan; 60% dalam jaringan (daring), dan 40% luar jaringan (luring). “Kami berpesan Jangan Belajar dari Rumah (BDR) dimaknai dengan Libur Panjang”, katanya.

Kepala Sekurpedik P2K Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima Bapak Dr. Karyadin mengatakan, Bincang Pendidikan terkait BDR menggunakan moda dalam jaringan seperti ini adalah solusi cerdas ditengah wabah Covid-19 yang mengharuskan adanya *physical* dan *social distancing* hingga PSBB. Kegiatan ini penting untuk mendapatkan data dan informasi kinerja sistem dari kebijakan nasional BDR di daerah. Model dan strategi kegiatan seperti ini perlu terus menjadi pilihan efektif dan efisien dimasa datang kendati dalam kondisi normal sekalipun. “Namun demikian kita tetap berharap besar bahwa pandemik Covid-19 ini segera berakhir agar proses pembelajaran berjalan normal tanpa dihantui oleh wabah yang menakutkan”, harapnya.

Ditempat terpisah Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) Mohamad Mustari, Ph.D. memberikan apresiasi, atensi dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu Peserta dan Bapak Kepala Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima dan jajarannya yang telah memfasilitasi kegiatan ini sehingga berlangsung dengan baik, lancar, sukses sesuai dengan tujuan yang kita harapkan bersama. Adapun Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang disampaikan adalah Kebijakan Merdeka Belajar. Kebijakan Merdeka Belajar ada 4 (empat) episode yaitu : Episode pertama UN, US, RPP, PPDB., Episode Kedua Kampus Merdeka, Episode Ketiga Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Episode Keempat adalah Organisasi Penggerak. Terkait dengan Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2020/2021 ini, dilaksanakan melalui 4 (empat) Jalur sebagai berikut : Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, dan Jalur Prestasi. Jalur Zonasi paling sedikit 50% dari daya tampung Sekolah, Jalur Afirmasi paling sedikit 15% dari daya tampung Sekolah, Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali paling banyak 5% dari daya tampung Sekolah, dan jika masih ada sisa kuota dari pelaksanaan jalur Zonasi/Jalur Afirmasi/Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali Pemerintah Daerah dapat membuka Jalur Prestasi. Calon Peserta Didik Baru hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah Zonasi. Pemanfaatan dana BOS saat ini penggunaannya lebih fleksibel bisa dipergunakan untuk Gaji Guru Honor, Pembelian Peralatan kesehatan dan untuk membeli pulsa untuk guru dalam rangka BDR, dan mudahan tanggal 20 Mei 2020 BOS sudah bisa cair. Secara nasional Belajar dari Rumah (BDR) 97,6% dengan daring dan 2,4 dengan luring. Sedangkan untuk NTB Belajar dari Rumah 55% secara daring, 30% semi, dan 15% secara luring.

H. Selamat Riyadi, S.Pd., M.Pd., Widyaiswara Madya LPMP NTB yang merupakan salah satu Narasumber kegiatan ini menyampaikan Materi Pembelajaran dalam jaringan (daring) dan Pembelajaran Jarak Jauh”. Beliau mengungkapkan “Belajar dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Disamping itu pembelajaran dilaksanakan secara fleksibel, peserta didik dapat mengatur waktu belajarnya sendiri, tugas belajar tidak harus sama untuk semua peserta didik, bisa disesuaikan dengan bakat, minat peserta didik, dan sumber belajar yang tersedia. Belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi Covid-19. Aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah dapat bervariasi antar siswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar di rumah. Bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif. Melalui Belajar dari Rumah (BDR) diharapkan pembelajaran akan tetap berlangsung walaupun Pengelolaannya Pembelajaran secara Virtual akan berbeda dengan pembelajaran konvensional (tatap muka). “Pandemi Covid-19 memaksa Pendidikan di Dunia termasuk Indonesia berubah”, ungkapnya.

Penanggungjawab kegiatan Bincang Pendidikan di Kabupaten Bima Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd. mengatakan “Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah pertama untuk Mensosialisasikan Kebijakan Pemerintah khususnya Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kedua Mensosialisasikan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal ini Kebijakan dan Implementasi BDR Kabupaten Bima, dan ketiga adalah Pendidikan di tengah pandemi Covid-19 (Pembelajaran Daring dan Pembelajaran Jarak Jauh). Bincang Pendidikan dikawal oleh 3 (tiga) orang Narasumber yaitu Kepala LPMP NTB, Kadis Dikbudpora Kabupaten Bima, dan Pejabat Fungsional LPMP NTB (Widyaiswara). Kehadiran Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) dalam kegiatan ini diharapkan dapat memahami Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kebijakan dan Implementasi BDR, Pembelajaran Daring, dan menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapi dan memberikan masukan, saran, serta solusi pemecahan masalahnya. Ketiga komponen ini Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, dan Guru sangat berperan penting dalam memajukan pendidikan di daerah. Menurut kami Bincang Pendidikan merupakan salah satu alternatif solusi yang tepat atasi

pendidikan di Kabupaten Bima masa Pandemi Covid-19. “Kami berharap Sinergitas LPMP NTB dengan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Bima tetap dijaga, ditingkatkan, dan bahkan dikembangkan dimasa-masa yang akan datang dalam rangka Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) dan peningkatan mutu pendidikan”, harapnya.

Oleh “ IMMA 2020

PENGELOLAAN PEMBELAJARAN PADA MASA BDR, SMK BISA-HEBAT!

Online Class In :

Bimbingan Teknis Dalam Jaringan
 Pengelolaan Pembelajaran Dalam Jaringan
 Pada Masa Belajar Dari Rumah (BDR)
 Jenjang SMK
 Rabu s.d Selasa, 13 s.d 19 Mei 2020
 (POLA 32 Jam Pelajaran)

Pola Bimtek :

1. Menggunakan fasilitas coor meeting dan Watsihapp
2. Peserta terbatas (40 Orang)
3. Peserta harus ikut keabsuhan kegiatan
4. Peserta akan memperoleh Sertifikat dan Biaya Pulsa
5. Audien Kegiatan :
 - a. Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd
 - b. Sri Nurhayati, SH
 - c. I Made Eudi LE

Narasumber :

Mohamad Mustari, Ph.D.
 Kepala LPMP NTB

Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd.
 Wakil Kepala LPMP NTB

Sri Nurhayati, SH
 Wakil Kepala LPMP NTB

I Made Eudi LE
 Wakil Kepala LPMP NTB

Moderator / HOST :

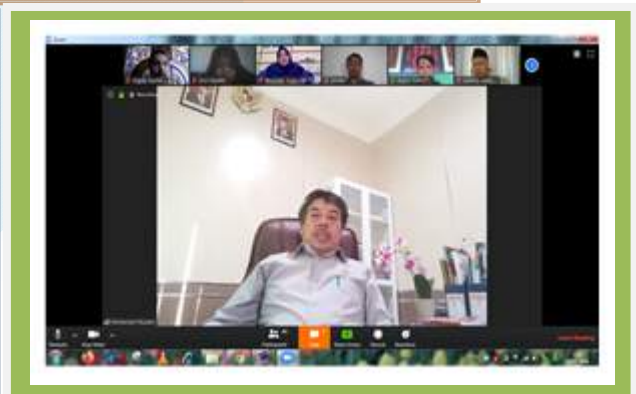
Bapak I Made Murta Astawa, M.Pd.
 LPMP NTB

Sri Nurhayati, SH
 LPMP NTB

I Made Eudi LE
 LPMP NTB

Materi Bimtek :

1. Kebijakan Kementerian dan Kebudayaan
2. Panduan Pembelajaran Jarak Jauh
3. Pelajaran Pada Masa BDR
4. Pemanfaatan Zoom Meeting
5. Pemanfaatan Google Classroom
6. Penyusunan Modul Pada Masa BDR



Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP/MTs. Di SMK terdapat banyak sekali Program Keahlian yang disediakan. Sudah saatnya pembangunan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia harus diorientasikan untuk adaptif terhadap dinamika global dan nasional terlebih terhadap revolusi industri 4.0 sekarang ini, selaras terhadap kebutuhan dunia kerja melalui perbaikan kurikulum dan integratif dengan keterlibatan *multistakeholder*. Pada pandemi Covid-19 saat ini Pembelajaran dalam jaringan (daring) dan Pembelajaran jarak jauh juga harus dikelola dengan baik, karena Pengelolaan Pembelajaran daring dan Pembelajaran Jarak jauh berbeda dengan Pengelolaannya dengan Pembelajaran Konvensional (tatap muka). Dalam rangka itu diperlukan pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai oleh Pendidik atau Guru sehingga Pembelajaran daring dan jarak jauh bisa berjalan dengan baik, lancar dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Bimbingan teknis yang dibuka oleh Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LMP NTB) Bapak Mohamad Mustari, Ph.D akan dilaksanakan selama 6 (enam) hari efektif mulai dari tanggal 13 sampai dengan 19 Mei 2020. Dalam pengarahannya beliau menyampaikan Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan LPMP NTB tentang Pendidikan dalam masa pandemi Covid-19. Beliau menyampaikan beberapa Kebijakan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan terkait dengan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ada 4 (empat) episode yaitu 1. USBN, UN, RPP, dan PPDB, 2. Merdeka Kampus, 3. Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan 4. Sekolah Penggerak. Terkait dengan Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2020/2021 ini, dilaksanakan melalui 4 (empat) Jalur sebagai berikut : Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, dan Jalur Prestasi. Jalur Zonasi paling sedikit 50% dari daya tampung Sekolah, Jalur Afirmasi paling sedikit 15% dari daya tampung Sekolah, Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali paling banyak 5% dari daya tampung Sekolah, dan jika masih ada sisa kuota dari pelaksanaan jalur Zonasi/Jalur Afirmasi/Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali Pemerintah Daerah dapat membuka Jalur Prestasi. Calon Peserta Didik Baru hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah Zonasi. Dalam Sekolah Penggerak ada 4 (empat) komponen yang memegang peranan penting yaitu Kepala Sekolah, Guru, Komunitas, dan Siswa. “Kebijakan Merdeka Belajar ini diharapkan dapat meningkatkan kemerdekaan dalam berpikir sehingga akan muncul kreatifitas dan inovasi sehingga peserta didik bisa bersaing ditengah Era Revolusi Industri 4.0”, harapnya.

Penanggungjawab Bimtek Pengelolaan Pembelajaran Pada Masa Belajar dari Rumah (BDR) Jenjang SMK Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd. menjelaskan adapun Materi kegiatan Bimtek ini antara lain : Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Panduan Pembelajaran Jarak Jauh, Penilaian Pada Masa BDR, Pemanfaatan *ZOOM Meeting*, Pemanfaatan *Google Classroom*, dan Penyusunan Modul Pada Masa BDR. Bimtek ini dikawal oleh 3 (tiga) orang Narasumber dari Widyaaiswara LPMP NTB. Setelah pembukaan kegiatan dilakukan pre test untuk mengetahui kompetensi awal yang dimiliki oleh peserta Bimtek. Pada akhir kegiatan juga akan diadakan post test untuk mengetahui kompetensi pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki setelah mengikuti bimtek. Bimtek diikuti oleh 40 (empat puluh) orang dari Guru-Guru SMK se NTB, mempergunakan pola 32 (tiga puluh dua) Jam Pelajaran dengan mempergunakan 13 Jam Pelajaran dengan via “*ZOOM Cloud Meetings*” dan 19 Jam Pelajaran via WhatsApp. Diakhir Bimtek peserta akan mendapatkan Sertifikat dan penggantian pulsa. Dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK), LPMP NTB juga melaksanakan evaluasi kepuasan peserta/pelanggan terhadap penyelenggaraan kegiatan termasuk pelayanan yang telah diterima. Hal ini bertujuan untuk melakukan perbaikan-perbaikan atas pelayanan yang diberikan baik oleh Narasumber, Panitia, maupun Host/Moderator termasuk juga dalam penyelenggaraan secara Virtual. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik oleh LPMP NTB akan terus dilakukan secara terus menerus sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi dan harapan publik. “Kami berharap Guru-Guru SMK akan mampu Mengelola Pembelajaran pada masa Belajar dari Rumah (BDR) secara daring dan jarak jauh, karena Pengelolaan Pembelajaran daring (Virtual) berbeda dengan pengelolaan Pembelajaran secara Konvensional (tatap muka) pada masa Belajar dari Rumah (BDR)”.

Oleh : IMMA 2020

ULT LPMP NTB MENDUDUKI PERINGKAT PERTAMA DALAM KUALITAS PELAYANAN PUBLIK



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Pasal 20 poin 1 menjelaskan Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Pasal 22 poin 1 Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Pasal 25 Poin 1 Penyelenggara dan pelaksana berkewajiban mengelola sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkesinambungan serta bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan/ atau penggantian sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik. Pasal 29 poin 1 Penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal. Penyelenggara berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala.

Permen PAN RB Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik. Aspek, Indikator dan Bobot Indeks Pelayanan Publik : 1. Kebijakan Pelayanan : Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, dan Survei Kepuasan Masyarakat, 2. Profesionalisme SDM : Kompetensi SDM,

Responsifitas, Kode Etik, Penghargaan dan sanksi, dan Budaya Pelayanan, 3. Sarana Prasarana Pelayanan Publik : Parkir dan ruang tunggu, Sarpras bagi yang berkebutuhan khusus, sarana penunjang lain, dan sarana *front office*, 4. Sistem Informasi Pelayanan Publik : Sistem Informasi Elektronik dan Sistem Informasi Non Elektronik, 5. Konsultasi dan Pengaduan, 6. Inovasi Pelayanan Publik. Sedangkan Indikator yang digunakan dalam menentukan kualitas pelayanan publik adalah :

Indikator Pengungkit ;

1. Standar Pelayanan
2. Budaya Pelayanan Prima
3. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan

Indikator Hasil ;

“Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat. Sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal)”

Penilaian Unit Layanan Terpadu (ULT) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2019. Dari hasil Evaluasi Unit Layanan Terpadu (ULT) yang dilakukan oleh Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019, Unit Layanan Terpadu (ULT) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) Kualitas Pelayanan Publik di 34 (tiga puluh empat) Propinsi LPMP NTB menduduki peringkat pertama dengan Nilai **4,02 kategori A- (Sangat Baik)**. Hasil Kinerja ULT LPMP NTB terhadap mengalami peningkatan pada tahun 2017 dengan Nilai 2,60 dan tahun 2018 dengan nilai 2.80. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan kualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nilai Aspek, Indikator dan Bobot Indeks Pelayanan Publik yang diperoleh oleh ULT LPMP NTB sebagai berikut: 1. Kebijakan Pelayanan : Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, dan Survei Kepuasan Masyarakat dengan Nilai 4,42, 2. Profesionalisme SDM : Kompetensi SDM, Responsifitas, Kode Etik, Penghargaan dan sanksi, dan Budaya Pelayanan dengan Nilai 3.04, 3. Sarana Prasarana Pelayanan Publik : Parkir dan ruang tunggu, Sarpras bagi yang berkebutuhan khusus, sarana penunjang lain, dan sarana *front office* dengan nilai 4.0, 4. Sistem Informasi Pelayanan Publik : Sistem Informasi Elektronik dan Sistem Informasi Non Elektronik dengan nilai 4,35, 5. Konsultasi dan Pengaduan dengan nilai 3,94, dan 6. Inovasi Pelayanan Publik dengan Nilai 4,25. Rerata Indeks Kualitas Pelayanan Publik LPMP NTB tahun 2019 dengan **Nilai 4,02 kategori A- (Sangat Baik)**. Secara nasional Survei Persepsi Pelayanan 2019 sebesar 3,37 dalam skala 4. Hal ini menunjukkan masih terdapat selisih atau gap antara harapan penerima layanan dengan realitas kondisi layanan yang diterima, dan mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan indeks serupa tahun 2018 sebesar 3,48.

Kepala LPMP NTB Bapak Mohamad Mustari, Ph.D. bersama dengan Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd., selama sehari pada tanggal 13 Mei 2020 mengikuti Kegiatan “Sosialisasi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Paud, Dikdas, dan Dikmen” secara Virtual. Pada saat Sosialisasi Narasumber dari Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memaparkan Hasil Evaluasi Layanan Terpadu tahun 2019. Dari Peta Kualitas Pelayanan Publik di 34 (tiga puluh empat) LPMP se Indonesia, LPMP NTB meraih **Peringkat Pertama (Sangat Baik)**. Ini merupakan salah satu prestasi yang diraih oleh LPMP NTB ditahun 2019. Kami mengucapkan “Selamat dan Sukses” Kepada seluruh Warga atau Pegawai baik ASN maupun PNPKN khususnya Tim Unit Layanan Terpadu (ULT) yang telah berkinerja sangat baik sehingga memperoleh Survey Persepsi Pelayanan Terbaik atau tertinggi dari 34 (tiga puluh empat) LPMP seluruh Indonesia. Pelayanan Prima yang telah diberikan kepada masyarakat menunjukkan “Melayani Sepenuh Hati” benar-benar diimplementasikan dan diinternalisasikan dalam tugas dan kehidupan sehari-hari, sehingga terjadi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik merupakan salah satu Indikator Pengungkit dalam Program Reformasi Birokrasi Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-

WBK). *Benchmarking* yang dilakukan oleh LPMP NTB ke Unit Layanan Terpadu (ULT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta tahun 2018 telah berbuah manis. “Kami berdoa dan berharap semoga tahun 2020 LPMP NTB bisa diusulkan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikbud untuk meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)”, harap Made.

Salah seorang Tim dari Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Sigit Purnomo menyampaikan “ Terima kasih atas semangat teman-teman NTB. Salam Sukses Mulia. Kinerja Pelayanan Publik Unit Layanan Terpadu (ULT) LPMP NTB dari tahun-ketahun mengalami peningkatan yang sangat signifikan dalam kualitas pelayanan dan mohon dipertahankan “, harapnya.

Oleh : IMMA 2020



HALAL BILHALAL KEMENANGAN IDUL FITRI DITENGAH COVID-19



Tiongkok merupakan wilayah yang berhasil menanangani Covid-19 telah menjadi bukti nyata, khususnya Kota Wuhan. Sejak virus ini merebak awal Januari 2020, Wuhan diisolasi dari dunia luar. Penduduknya tidak diijinkan beraktivitas keluar rumah. Dari kebijakan yang diberlakukan itu hasilnya, berdasar data pada 21 Maret 2020, laju penyebaran Covid-19 mengalami perlambatan. Bahkan, dalam 3 (tiga) hari terakhir, otoritas Cina kembali melaporkan tidak ada kasus baru virus Corona di kota Wuhan yang menjadi lokasi awal terdeteksinya virus ini. Berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional. Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait dengan hal ini untuk mengurangi korban manusia dan dampak sosial ekonomi yang makin meluas. Masyarakat dunia pada umumnya dan khususnya masyarakat Indonesia telah merasakan dampak dari Covid-19.

Perayaan Hari Raya "Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah" tahun 2020 bagi Umat Muslim di Dunia pada umumnya, dan Indonesia pada khususnya merupakan hari raya yang penuh dengan makna. Mengapa? Hari Raya Idul Fitri tahun 2020 sepertinya jadi milik semua orang, saat ini semua orang dianjurkan untuk berdiam diri dan beribadah dirumah masing-masing. Tepatnya pada tanggal 24 Mei 2020 Umat Muslim di Indonesia merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Sesuai protokol COVID-19, penggunaan masker, berperilaku hidup bersih, dan *Sosial Distancing* merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah penyebaran dan penularan COVID-19. Idul Fitri di tengah pandemi justru menjadi momentum bagi umat untuk menunjukkan karakter takwa yang sesungguhnya. Karakter takwa yang muncul dalam bentuk kesalehan sosial yang merupakan ekspresi

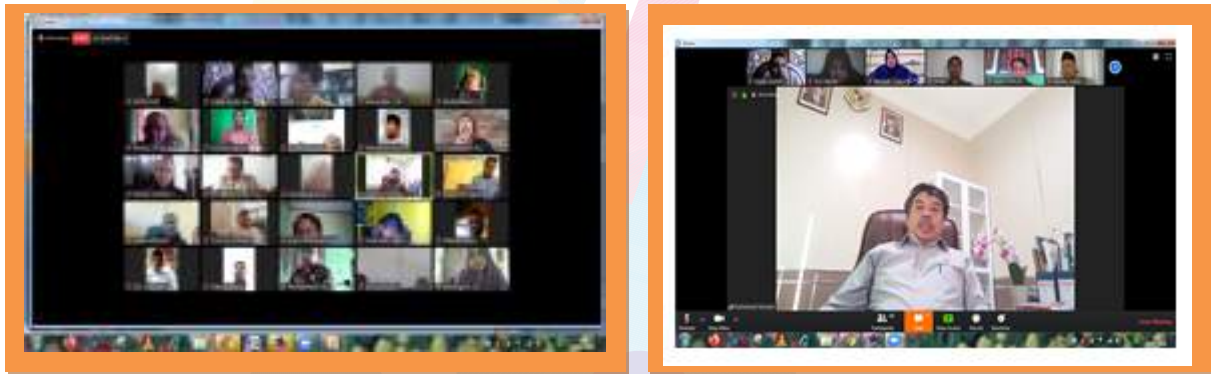
dari kepatuhan menjalankan ajaran Tuhan tentang kasih sayang, empati, dan kepedulian kepada sesama umat manusia sehingga menjadi rahmat bagi semesta alam. Wabahnya ini harus menjadikan pribadi menjalani hidup sesuai nilai dan etika sosial yang diajarkan agama. Saling menolong, gotong royong, silaturahmi dalam arti mengenal lebih dekat kesulitan saudara-saudara kita, serta saling menguatkan dan memberi dukungan. Inilah momentum untuk menghadirkan manfaat dan keberkahan bagi masyarakat, bangsa, dan Negara. Wabahnya ini harus mentransformasi kesadaran kita bahwa di luar takdir (kehendak) untuk menguji hamba-Nya. Melalui wabahnya ini ingin agar kita mengukuhkan kebersamaan serta memperkuat persatuan dan kesatuan untuk menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) pada tanggal 26 Mei 2020 Melaksanakan Halal Bilhalal, Silaturahmi, dan Mengucapkan Maaf Memaafkan secara Virtual melalui "Zoom Cloud Meeting". Bapak Mohamad Mustari, Ph.D selaku Kepala LPMP NTB mengucapkan "Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah" Mohon Maaf Lahir dan Bathin. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Kita Halal Bilhalal, bersilaturahmi saling maaf memaafkan dilakukan secara Virtual tidak akan mengurangi makna dari Hari Raya Idul Fitri itu sendiri. Beliau berpesan setelah Hari Raya Idul Fitri ini aktifitas kantor diharapkan tetap berjalan seperti biasa dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kami akan kembali mengeluarkan Surat Edaran tentang Jadwal Piket bagi Pegawai baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Dengan adanya pegawai yang piket diharapkan Pelayanan Publik tetap berjalan sehingga masyarakat merasa dilayani dengan baik walaupun melalui Unit Layanan Terpadu (ULT). Tempat-tempat prioritas seperti Ruang Kantor dan Kamar Mandi atau tempat-tempat yang lembab agar dibersihkan/disemprot dengan disinfektan dan selalu dalam keadaan kering. Dengan keluarnya hasil revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2020, LPMP NTB diharapkan sudah mulai merancang Program/Kegiatan yang akan dieksekusi untuk dilaksanakan secara dalam jaringan (daring).

Menurut salah seorang Pegawai Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd. "Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah" adalah Kemenangan Bersama Umat Manusia. Selama sebulan penuh Umat Islam menunaikan Ibadah Puasa. Pada hakekatnya Ibadah Puasa adalah menjalankan semua kewajiban yang dianjurkan oleh Agama dan menjauhkan hal-hal yang dilarang oleh Agama. Ibadah Puasa bukan saja menyangkut tidak makan dan minum tetapi yang lebih luas adalah bagaimana kita Berpikir yang baik, Berkata yang baik, dan Berbuat yang baik. Ketiga hal itu harus selaras, apa yang kita pikirkan itulah yang kita katakan, apa yang kita pikirkan dan katakan itulah yang kita lakukan. Pikiran, perkataan, dan perbuatan hendaknya selaras dan sering dikenal dengan Integritas. Kita harus menjadi pribadi yang berintegritas tinggi. Kemenangan Hari Raya Idul Fitri tahun 2020 diharapkan juga Kemenangan melawan Covid-19. Kemenangan untuk melakukan puasa sebulan penuh, Kemenangan menjalankan ajaran Agama. Apabila kita bisa mematuhi dan menjalankan aturan/kebijakan pemerintah saat ini, kita juga akan jadi pemenang yaitu kemenangan melawan Covid-19. Untuk itu marilah kita bersama-sama mengurangi rasa ego masing-masing dan mari kita mematuhi serta mengikuti anjuran pemerintah untuk bersama-sama memutus mata rantai Covid-19. "Kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah, Mohon Maaf Lahir dan Bathin, Semoga di Hari Kemenangan ini kita semua akan jadi pemenang", harap Made.

Oleh : IMMA 2020

LPMP NTB SELenggarakan PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI DARING



Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2017 tentang Organisasi dan tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, Tugas Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) adalah melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dipropinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam melaksanakan tugasnya LPMP menyelenggarakan beberapa fungsi antara lain : a. Pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah, b. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah, c. Supervisi satuan pendidikan dasar dan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan, d. Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan, f. Pelaksanaan kerjasama dibidang penjaminan mutu pendidikan, dan h. Pelaksanaan urusan administrasi LPMP

Penjaminan Mutu Pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan. Penjaminan Mutu (*quality assurance*) pendidikan merupakan upaya sistematis untuk memenuhi standar mutu atau melampauinya sehingga segenap *stakeholder* pendidikan mendapat kepuasan. Satuan pendidikan bermutu dapat dimaknai sebagai kapasitas program dan satuan pendidikan dalam memanfaatkan sebaik mungkin berbagai sumber daya yang dimiliki untuk menciptakan proses pembelajaran yang baik, menyenangkan dan optimal berikut menghasilkan *output* dan *outcomes* sesuai atau melampaui standar yang telah ditetapkan.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) merupakan tanggung jawab satuan pendidikan sedangkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertugas memfasilitasi peningkatan mutu sekolah. Beberapa peraturan pemerintah sebagai turunannya juga mengamanatkan hal yang sama yaitu satuan pendidikan wajib melakukan Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) sesuai dengan kebijakan pendidikan baik tingkat kabupaten/kota, tingkat propinsi maupun pusat. Penerapan Penjaminan Mutu Pendidikan disekolah bertujuan untuk memastikan bahwa sekolah telah melakukan pengelolaan sekolah, proses pembelajaran, dan program yang lain sesuai dengan Standar Nasional

Pendidikan (SNP). Tujuan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia berjalan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbud melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI dilaksanakan oleh satuan pendidikan sedangkan SPME dilaksanakan oleh instansi diluar satuan pendidikan seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), dan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M).

Salah seorang Penanggungjawab Kegiatan Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd. mengatakan Pandemi Covid-19 membawa perubahan yang sangat besar terhadap tatanan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Hal ini terlihat dari beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Salah satu Kebijakan yang dikeluarkan adalah dengan memangkas beberapa Program atau Kegiatan sehingga berdampak pada pengurangan atau pemangkasan anggaran dikementerian atau lembaga termasuk di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pengurangan anggaran ini diperuntukkan bagi masyarakat luas termasuk pengadaan barang dan jasa penunjang “Program Tanggap Darurat Bencana Alam Covid-19”. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga mengalami dampak yang sangat signifikan. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) LPMP NTB hasil revisi pertanggal 26 Mei 2020 mengalami pengurangan anggaran semula Rp. 37.846.323.000,00 (tiga puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) menjadi Rp. 23.319.506.000,00, (dua puluh tiga milyar tiga ratus sembilan belas juta lima ratus enam ribu rupiah) pengurangannya hampir sebesar 38% lebih dari total anggaran. “Dengan adanya Pandemi Covid-19 dan pengurangan anggaran ini mengakibatkan Program atau Kegiatan “Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP)” LPMP NTB dilaksanakan dalam jaringan (daring)”, ujarnya.

Selanjutnya Made mengungkapkan, adapun beberapa Program atau Kegiatan yang dilaksanakan secara dalam jaringan (daring) antara lain : Analisis Data Mutu melalui Daring, Penyusunan Rekomendasi Peningkatan Mutu melalui Daring, Diseminasi Pemetaan Mutu melalui daring, Sosialisasi Penjaminan Mutu Pendidikan melalui Daring, Penyusunan Bahan Supervisi Penjaminan Mutu Pendidikan melalui Daring, Bimbingan Teknis Supervisi untuk Pengawas melalui Daring, Supervisi ke Satuan Pendidikan melalui Daring, Analisis Supervisi Mutu Pendidikan melalui Daring, Diseminasi Supervisi Mutu melalui Daring, Sosialisasi SPMPDM kepada sekolah binaan melalui Daring, Penyusunan Program Kerja sekolah binaan melalui Daring, Pendampingan Sekolah yang difasilitasi LPMP melalui Daring, Penyusunan Program Kerja SPME Pemda melalui Daring, Diseminasi Hasil SPME melalui Daring, Monitoring Kebijakan Kemdikbud melalui Daring, Sosialisasi SPMPDM kepada Pemda melalui Daring, Bimtek Operator Dapodik dan Pengawas Sekolah melalui Daring, Pelaksanaan Pengumpulan Data melalui Daring, dan Verifikasi dan Validasi Data melalui Daring. “Walaupun program Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) dilaksanakan dalam jaringan (daring) dengan waktu 6 (enam) bulan kuantitas dan kualitas tetap menjadi prioritas utama sehingga Kualitas Pelayanan Publik tetap terjamin”, pungkas Made.

Oleh : IMMA 2020

PANCASILA, PENDIDIKAN KARAKTER, DAN TRI KAYA PARISUDHA



Tepat tanggal 1 Juni Bangsa Indonesia memperingati Hari Lahirnya Pancasila. Pancasila dapat menjadi basis pendidikan karakter yang khas di Indonesia, dengan fokus keberagaman, toleransi, dan keadilan sosial. Keragaman nilai dalam Pancasila merupakan modal dasar pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah pemberian pandangan mengenai berbagai jenis nilai hidup, seperti kejujuran, kecerdasan, kepedulian, tanggung jawab, kebenaran, keindahan, kebaikan, dan keimanan. Pengertian **pendidikan karakter** adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Pendidikan karakter (*character education*) sangat erat hubungannya dengan pendidikan moral dimana tujuannya adalah untuk membentuk dan melatih kemampuan individu secara terus-menerus guna penyempurnaan diri kearah hidup yang lebih baik. Pancasila mengajarkan Bangsa Indonesia untuk selalu percaya dan bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, Menjunjung Kemanusiaan, Mengutamakan Persatuan dan Kesatuan, Kekeluargaan menjadi prioritas Utama, dan Penerapan Perilaku yang adil kepada seluruh rakyat Indonesia.

Nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila perlu diamalkan, diinternalisasikan, diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Pada sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai-nilai yang terkandung adalah : Percaya akan adanya Tuhan Yang Maha Esa serta menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya sesuai dengan kepercayaan masing-masing, Saling menghormati pemeluk agama lain, Memiliki toleransi antar umat beragama, Tidak memaksakan kehendak antar umat beragama, dan Tidak mencemooh atau mengejek kepercayaan orang lain.
2. Sila kedua berbunyi Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab memiliki nilai-nilai yang terkandung sebagai berikut : Semua rakyat Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum, agama, masyarakat dan lainnya, Tidak ada perbedaan antara ras satu dengan yang lainnya antar sesama rakyat Indonesia, Sikap tenggang rasa dan saling tolong menolong harus diutamakan, Nilai kemanusiaan antar rakyat Indonesia harus dijunjung tinggi, dan Saling menghargai pendapat masing-masing.
3. Dalam sila persatuan yang berbunyi Persatuan Indonesia terdapat beberapa nilai yang terkandung dalam kehidupan sehari-hari yaitu : Menggunakan bahasa persatuan Indonesia antar daerah, memperjuangkan nama harum bangsa Indonesia, Cinta kepada tanah air Indonesia, Mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi, dan Berjiwa patriotisme dimanapun berada.
4. Sila keempat yang berbunyi Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan memiliki nilai-nilai diantara lain: Pemimpin bangsa Indonesia haruslah bijaksana, Kekeluargaan harus diutamakan, Kedaulatan bangsa ada di tangan rakyat, Kebijakan dalam mengambil solusi, Keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah sampai mencapai kesepakatan bersama, dan Tidak memaksakan kehendak orang lain.
5. Sila terakhir pancasila yang berbunyi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia ini memuat nilai-nilai sebagai berikut: Perilaku yang adil harus diterapkan baik di bidang ekonomi, sosial dan politik, Hak dan kewajiban setiap orang harus dihormati, Perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia, Tujuan rakyat Indonesia yang adil dan makmur, dan Mendukung kemajuan dan pembangunan negara Indonesia.

Pendidikan karakter merupakan bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik diperuntukkan bagi generasi selanjutnya. Tujuan pendidikan karakter adalah untuk membentuk penyempurnaan diri individu secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju kearah hidup yang lebih baik. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menetapkan 6 (enam) Indikator sebagai Profil Pelajar Pancasila. Enam Profil Pelajar Pancasila tersebut adalah:

1. Pertama, bernalar kritis agar bisa memecahkan masalah. Hal ini berhubungan dengan kemampuan kognitif.
2. Kedua, kemandirian, yaitu siswa secara independen termotivasi meningkatkan kemampuannya, bisa mencari pengetahuan serta termotivasi.
3. Ketiga, adalah kreatif, di mana siswa bisa menciptakan hal baru, berinovasi secara mandiri, dan mempunyai rasa cinta terhadap kesenian dan budaya.
4. Keempat, gotong-royong, di mana siswa mempunyai kemampuan berkolaborasi yang merupakan softskill utama yang terpenting di masa depan agar bisa bekerja secara tim.
5. Kelima, kebinekaan global yang merupakan upaya agar siswa mencintai keberagaman budaya, agama dan ras di negaranya serta dunia, sekaligus menegaskan mereka juga warga global.
6. Keenam, berakhlak mulia. Di sinilah moralitas, spiritualitas, dan etika berada. Sudah pasti pendidikan karakter akan menjadi salah satu pilar inti.

Tri Kaya Parisudha merupakan bagian dari ajaran Susila dalam Tri Kerangka Dasar Agama Hindu, yang terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni berfikir yang baik yang disebut dengan Manacika Parisudha, (2) berkata yang baik yang disebut dengan Wacika Parisudha, dan (3) berperilaku yang baik atau yang disebut dengan Kayika Parisudha.

1. Manacika adalah suatu tindakan berpikir seseorang antara baik maupun buruk . Setiap tindakan pasti berawal dari pikiran kita oleh sebab itu maka kita harus berpikir yang baik tidak berpikir yang buruk. Pikiran baik bisa kita latih dengan cara banyak meditasi atau dengan cara menenangkan diri kita supaya tidak adanya pengaruh yang lain .
2. Wacika adalah suatu perkataan yang di ucapkan baik maupun buruk suatu ucapan tergantung kita mengucap dan mengartikannya . Setiap orang pasti menginginkan perkataan yang jujur dan baik walaupun bila kita harus jujur dan menyakitkan perasaan orang lain tetapi perkataan itu cuma menyakitkannya hanya sesaat saja .
3. Kayika adalah suatu tindakan atau perbuatan yang kita jalankan baik maupun buruk tergantung orang menilai . Contohnya kita mengambil kotoran, ada orang yang bilang kalau mengambil kotoran itu adalah hal yang jelek atau tidak baik tergantung sekarang mau di letakan di mana . Misalnya kotoran yang tadi di ambil di taruh di rumah jelas itu kelakuan yang menyimpang dan sangat jelek tetapi bila kita menaruhnya di tanaman pasti tumbuhan tersebut menjadi subur dan bermanfaat untuk kita, jadi itu termasuk perbuatan yang baik dan bagus . Kesimpulannya perbuatan itu dinilai dari dari mana sudut pandang kita melihat. .

Dari ketiga bagian Tri Kaya Parisudha itu sangatlah berhubungan satu sama lain. Untuk mencapai keharmonisan di dalam dunia ini kita harus selaras dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. keselarasan ketiga ini sering disebut dengan Integritas. Dengan harapan apabila kita sudah berpikir yang baik , kita pasti akan berkata yang baik pula dan melakukan perbuatan yang baik juga.

Pancasila, Pendidikan Karakter, dan Tri Kaya Parisudha adalah tiga hal yang selaras dan harus diamalkan, diinternalisasikan, dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam berkehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Nilai-nilai Pancasila bukan untuk dihafal, Pendidikan Karakter tidak sekedar diwacanakan, dan Tri Kaya Parisudha “Pikiran, Perkataan, dan Perbuatan” harus diselaraskan. Tuhan itu Esa, Tuhan itu Satu, Eling dengan Tuhan, Hormat menghormati antar Sesama, dan Menyayangi semua Makhluk CiptaanNya. “Pancasila dalam Tindakan, melalui Gotong Royong menuju Indonesia Maju”.

Oleh : IMMA 2020



ITJEN KEMDIKBUD MELAKSANAKAN AUDIT TUJUAN TERTENTU DALAM JARINGAN



Foto Bersama : Widyaiswara Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat, Koordinator Widyaiswara Bapak H. Selamat Riyadi, S.Pd., M.Pd. (nomor dua dari kanan)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan Reformasi Birokrasi yang meliputi 8 (delapan) area perubahan : 1) Manajemen Perubahan, 2) Penguatan Pengawasan, 3) Penguatan Akuntabilitas Kinerja, 4) Penguatan Kelembagaan, 5) Penguatan Tata Laksana, 6) Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur, 7) Penguatan Peraturan Perundang-undangan, dan 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Salah satu area perubahan dalam Reformasi Birokrasi adalah “Penguatan Pengawasan”. Penguatan Pengawasan bisa dilakukan melalui Audit Internal maupun Audit Eksternal. Audit Internal dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemdikbud sedangkan Audit Eksternal biasa dilakukan oleh BPK ataupun BPKP atau yang lainnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) LPMP NTB Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd. berdasarkan “Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Inspektorat Jenderal melaksanakan Audit Tujuan Tertentu (ATT). Audit Tujuan Tertentu (ATT) Berbasis Resiko dilakukan pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) dan dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari mulai tanggal 3 sampai dengan 12 Juni 2020. Hal ini dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Itjen Kemdikbud Republik Indonesia Nomor 3040/G3/WS/2020 tertanggal 2 Juni 2020”.

“Kegiatan Audit Tujuan Tertentu (ATT) Berbasis Resiko Tentang Pelaksanaan Tugas Widyaiswara (WI) pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) Tahun 2019 dilaksanakan dalam jaringan (daring). Tim Auditor berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari Bapak Subiyantoro (Penanggung Jawab/Inspektur II), Bapak Sedyo Kisworo (Pengendali Mutu), Ibu Armeini (Pengendali Teknis), Bapak Yanto Susanto (Ketua Tim), dan Ibu Meldi Chaniko (Anggota Tim)”, lanjutnya.

“Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan perpanjangan tangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2017 tentang Organisasi dan tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.

Pegawai LPMP NTB terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Aparatur Sipil Negara (ASN) dibagi kedalam jabatan struktural dan jabatan fungsional”, imbuhnya.

“Salah satu Jabatan Fungsional adalah Widyaiswara. Widyaiswara Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat berjumlah 16 (enam belas) orang. Keenam belas Widyaiswara saat ini sebagian besar melaksanakan Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP). Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2017 tentang Organisasi dan tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, Tugas LPMP adalah melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dipropinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam melaksanakan tugasnya LPMP menyelenggarakan fungsi Pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah, Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah, Supervisi satuan pendidikan dasar dan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan, Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan, Pelaksanaan kerjasama dibidang penjaminan mutu pendidikan, dan Pelaksanaan urusan administrasi LPMP”, tutup Made.

Koordinator Widyaiswara (Korwi) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) H. Selamat Riyadi, S.Pd.,M.Pd. mengatakan pada saat Temu Awal, Tim Itjen Kemdikbud ingin mendapatkan informasi mengapa Widyaiswara (WI) LPMP tidak bisa memenuhi kewajiban tatap muka yang 32 JP setiap bulan. “Tadi kami sampaikan hal tersebut disebabkan oleh Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) LPMP adalah melaksanakan Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) yang tidak boleh melakukan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), dan diawal tahun kegiatan yang terkait dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan sejenisnya belum berjalan”, jawabnya.

Selanjutnya H. Selamat Riyadi mengatakan “Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Permen PAN RB) Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya. Jabatan Fungsional Widyaiswara adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, dan melatih PNS yang selanjutnya disebut Dikjartih PNS, Evaluasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat pada Lembaga Diklat Pemerintah”.



Oleh : IMMA 2020

KEMENDIKBUD MENGUSULKAN LPMP NTB SEBAGAI UNIT KERJA BERPREDIKAT ZI-WBK



Reformasi birokrasi adalah perubahan yang terencana dalam proses yang didukung oleh pimpinan organisasi untuk mengubah sistem birokrasi, mengubah relasi-relasi yang ada di dalam birokrasi, maupun antara birokrasi dengan masyarakat. Di dalam reformasi birokrasi selalu terkandung resistensi/penolakan, oleh sebab itu perlu dilakukan manajemen perubahan untuk mengelola resistensi dan memunculkan komitmen setiap orang dalam mendorong perubahan dalam birokrasi. Reformasi birokrasi internal Kemendikbud merupakan upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dasar hukum Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Belayani (ZI-WBK/WBBM) antara lain Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

Reformasi Birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi masalah-masalah antara lain : Inefisiensi, Inefektivitas, tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, rekrutmen ASN tidak transparan, belum ada perubahan *mindset*, KKN yang masih terjadi di berbagai jenjang pekerjaan, abdi masyarakat yang belum sepenuhnya profesional, pemerintahan belum akuntabel, transparan, partisipatif, dan kredibel, pelayanan publik belum berkualitas, dan pelayanan publik prima (mudah, murah, cepat, dan lebih baik) belum sepenuhnya terbangun secara luas.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2020 mengusulkan 62 (enam puluh dua) Unit kerja Berpredikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) dan 9 (Sembilan) Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBBM). Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai salah satu UPT yang saat ini sedang mempersiapkan dokumen inti dan dokumen pendukung sebagai pelengkap dalam penilaian sebagai Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK).

Menurut Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd., Ketua Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK), "Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 akan mengusulkan 71 (tujuh puluh satu) Satuan Kerja Berpredikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas

dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBK/WBBM) untuk dilakukan penilaian oleh Kemen PAN RB. Keenam puluh dua Satker yang akan diusulkan sebagai Berpredikat ZI-WBK adalah Setjen : 1, Ditjen GTK: 9, Ditjen Pauddasmen: 15, Ditjen Diksi: 5, Ditjen Dikti: 14, Ditjen Kebudayaan: 10, Balitbangbuk: 2, dan BPP Bahasa: 6 Satuan Kerja (Satker). Dari 15 (lima belas) Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Ditjen Pauddasmen LPMP NTB termasuk salah satunya yang akan diusulkan. Sedangkan Satuan Kerja yang akan diusulkan ZI-WBBM sebanyak 9 Unit Kerja antara lain Ditjen GTK: 3, Ditjen Pauddasmen: 5, dan Ditjen Kebudayaan: 1 Satuan Kerja. Hal ini kami ketahui setelah mengikuti Kegiatan Internalisasi RBI Kemendikbud pada tanggal 6 Juni 2020 melalui *Vicon Zoom Meeting*”.

“Dalam membangun Zona Integritas baik WBK maupun WBBM ada 5 (lima) Strategi yaitu : 1. Komitmen pimpinan dan semua karyawan dengan melibatkan bawahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan menularkan semangat dan visi yang sama, 2. Menyediakan Fasilitas Lebih Baik dan Semangat *Hospitalitty* untuk kepuasan publik, 3. Membuat program yang membuat unit kerja lebih dekat ke masyarakat sehingga masyarakat merasakan kehadiran unit kerja tersebut, 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa program yang sedang dijalankan tetap di jalurnya, dan 5. Menetapkan manajemen media strategi komunikasi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dan inovasi perubahan yang telah dilakukan diketahui oleh masyarakat”, ungkapnya.

Lebih lanjut Made mengatakan “Mulai tahun 2018 LPMP NTB sudah melakukan Pencanaan dan melaksanakan Pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) dan terakhir tanggal 18 Pebruari 2020 dilakukan Pencanaan kembali oleh Kepala LPMP NTB Bapak Mohamad Mustari, Ph.D. di Hotel Jayakarta Senggigi, Lombok Barat. Ada beberapa prestasi yang diraih oleh LPMP NTB antara lain Kualitas Pelayanan Publik di 34 (tiga puluh empat) Propinsi LPMP NTB menduduki peringkat pertama dengan Nilai **4,02 kategori A- (Sangat Baik)**, Piagam Penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu : Piagam Penghargaan atas Kinerja SPI, Piagam Penghargaan atas Pengelolaan Anggaran, Piagam Penghargaan Admin Unit Layanan Terpadu (ULT), dan Yayasan Plan Indonesia terkait kegiatan Tanggap Darurat Pascagempa Lombok-sembawa. Kunci Utama dalam melakukan perubahan adalah Semangat dan Kebersamaan, termasuk Komitmen Pimpinan dan seluruh Pegawai untuk menjadikan LPMP NTB bebas dari KKN dan selalu memberikan Pelayanan Prima kepada publik”.

Oleh : IMMA 2020

GENDERANG MULAI DITABUH DENGAN KEGIATAN PENYUSUNAN PROGRAM PADA MASA PANDEMI COVID-19



Dalam rangka mendukung produktivitas kerja serta untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai serta masyarakat dalam tatanan normal baru dan merujuk Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Internalisasi dari Kebijakan Tatanan Normal Baru, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan beberapa ketentuan antara lain Penyesuaian Sistem Kerja, Penilaian Kinerja, Pemantauan dan Pengawasan, Disiplin Kerja, dan Dukungan Infrastruktur. Penyesuaian Sistem Kerja dengan ketentuan Melakukan pengaturan sistem kerja yang akuntabel dan selektif bagi pegawai di lingkungan unit kerjanya yang dapat melaksanakan tugas kedinasan dari kantor dan/atau dari rumah/tempat tinggal dengan memperhatikan kondisi penyebaran COVID-19 di daerah masing-masing dan Ketentuan jumlah pegawai pada masing-masing unit kerja yang melaksanakan tugas kedinasan dari kantor per hari paling banyak 50 (lima puluh) persen dari seluruh jumlah pegawai. Pembagian pegawai agar dilakukan secara merata dan tidak menumpuk di satu bagian tertentu. Ketentuan jumlah hari kerja per pegawai 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu dengan ketentuan paling banyak 3 (tiga) hari bekerja dari kantor dan sisanya bekerja dari rumah.

Memperhatikan pembatasan fisik (*physical distancing*), kesehatan, dan keselamatan pegawai yang melakukan pelayanan langsung secara luar jaringan (*luring*) sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Memastikan seluruh penyelenggaraan rapat dan/atau kegiatan tatap muka agar memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau melalui media elektronik lainnya yang tersedia. Apabila berdasarkan tingkat urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat dan/atau kegiatan lainnya di kantor, agar memperhatikan pembatasan fisik antar peserta rapat. Protokol kesehatan harus tetap dijalankan untuk mencegah dan penyebaran dari Covid-19.

Kegiatan Penyusunan Program Pada Masa Pandemi Covid-19 dibuka oleh Kasubbag Umum LPMP NTB sekaligus sebagai Penanggung Jawab kegiatan. Saat Pembukaan Dra. Sri Sukriyani menyampaikan beberapa hal terkait dengan maksud dan tujuan Penyusunan Program dan Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan termasuk *Work from Home (WFH)* maupun *Work from Office (WFO)*. Beliau berharap “Dengan adanya Kegiatan Penyusunan Program pada masa Pandemi Covid-19 nantinya Program/kegiatan akan bisa cepat dieksekusi/dilaksanakan, karena waktu pelaksanaan program masih tersisa 6 (enam) bulan”.

Disela-sela kegiatan Penyusunan Program LPMP tahun 2020 Kepala LPMP NTB Bapak Mohamad Muastari, Ph.D., memberikan apresiasi, attensi, penghargaan, dan menyampaikan ucapan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini. “Walaupun pada masa pandemik Covid-19 sedang berlangsung, kita berharap tidak akan mengganggu keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai serta masyarakat dalam tatanan normal baru. “Kegiatan ini diharapkan akan menghasilkan 3 (tiga) *output* yaitu *Term of Reference (TOR)*, *Jadwal Kegiatan*, dan *Rencana Anggaran Biaya (RAB)*”, harapnya.

Salah seorang peserta Penyusunan Program pada Masa Pandemi Covid-19 Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd., memberikan attensi dan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini karena program/kegiatan LPMP NTB tahun 2020 berbasis dalam jaringan (daring) tentu dibutuhkan strategi yang berbeda dengan program/kegiatan dilakukan luar jaringan (luring) dalam pelaksanaannya. “Kami berharap dengan kegiatan ini akan mempercepat proses revisi anggaran dan pemahaman pegawai terkait kegiatan yang dilakukan secara daring”, harapnya.

Lebih lanjut Made mengatakan dengan memperhatikan Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Tananan Normal Baru, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) melaksanakan kegiatan Penyusunan Program 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari mulai tanggal 10-11 Juni 2020 dan diikuti 26 (dua puluh enam) orang peserta yang merupakan perwakilan dari masing-masing seksi/subbag termasuk juga dari widyaiswara. Adapun tujuan kegiatan ini adalah melakukan penelaahan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) LPMP NTB tahun 2020 dan dalam rangka persiapan Revisi DIPA maupun RKAKL, hal ini disebabkan Program dan Kegiatan LPMP NTB pada masa pandemi Covid-19 sebagian besar akan dilaksanakan dalam jaringan (daring). “Genderang mulai ditabuh dengan Kegiatan Penyusunan Program Pada Masa Pandemi Covid-19” tutup Made.

Oleh : IMMA 2020

SOSIALISASI DAN INTERNALISASI PEMBANGUNAN ZI-WBK DENGAN PIHAK EKTERNAL SECARA VIRTUAL



Reformasi birokrasi adalah perubahan yang terencana dalam proses yang didukung oleh pimpinan organisasi untuk mengubah sistem birokrasi, mengubah relasi-relasi yang ada di dalam birokrasi, maupun antara birokrasi dengan masyarakat. Didalam reformasi birokrasi selalu terkandung resistensi atau penolakan, oleh sebab itu perlu dilakukan manajemen perubahan untuk mengelola resistensi dan memunculkan komitmen setiap orang dalam mendorong perubahan dalam birokrasi.

Reformasi birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi masalah-masalah antara lain : Inefisiensi, Inefektivitas, tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, rekrutmen ASN tidak transparan, belum ada perubahan *mindset*, KKN yang masih terjadi di berbagai jenjang pekerjaan, abdi masyarakat yang belum sepenuhnya professional, pemerintahan belum akuntabel, transparan, partisipatif, dan kredibel, pelayanan publik belum berkualitas, dan pelayanan publik prima (mudah, murah, cepat, dan lebih baik) belum sepenuhnya terbangun secara luas.

Dalam rangka menyebarluaskan informasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) melaksanakan Kegiatan Sosialisasi dan Internalisasi Pembangunan ZI-WBK dengan Pihak Ekternal . Kegiatan Sosialisasi dan Internalisasi dengan Pihak Ekternal dilaksanakan selama sehari tanggal 15 Juni 2020 secara Virtual dengan jumlah peserta 100 (seratus) orang. Peserta terdiri dari Pengawas, Kepala Sekolah, dan Guru. Peserta tersebar dari 10 (sepuluh) kabupaten/kota se Nusa Tenggara Barat. Semua peserta sudah pernah mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh LPMP NTB dan telah merasakan pelayanan yang diberikan.

Kegiatan Sosialisasi dan Internalisasi Pembangunan ZI-WBK dengan Pihak Ekternal dibuka oleh Kepala LPMP NTB Bapak Mohamad Mustari, Ph.D., dalam pengarahannya beliau memberikan apresiasi dan attensi serta menyampaikan ucapan terima kasih telah mengikuti kegiatan ini. “Ada beberapa strategi yang dilakukan oleh LPMP NTB dalam rangka mempercepat Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) antara lain komitmen pimpinan dan seluruh karyawan dengan melibatkan bawahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan menularkan semangat dan visi yang sama, dan kemudahan pelayanan dengan menyediakan fasilitas lebih baik dan *hospitality* untuk kepuasan publik”.

Lebih lanjut beliau menyampaikan “LPMP NTB juga membuat program yang menyentuh masyarakat dengan membuat program yang membuat unit kerja dekat kemasyarakat sehingga masyarakat merasakan kehadiran unit kerja tersebut. Pada saat Pandemi Covid-19 ini LPMP NTB membuat

program/kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat antara lain Bimtek Pengelolaan Pembelajaran dengan daring, Bimtek *Google Form* secara daring, Bincang Pendidikan melalui daring, dan Webinar dalam daring”.

Disamping itu “Strategi lain yang dilakukan adalah pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa program yang dijalankan tetap pada jalurnya, serta strategi manajemen media dengan menetapkan strategi komunikasi untuk memastikan setiap aktifitas dan inovasi perubahan yang telah dilakukan diketahui oleh masyarakat”, pungkasnya.

Menurut Ketua Pembangunan ZI-WBK LPMP NTB Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd. yang sekaligus sebagai Fasilitator “Kegiatan Sosialisasi dan Internalisasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi bertujuan untuk Mensosialisasikan tentang Program Reformasi Birokrasi, Capaian Pembangunan ZI-WBK LPMP NTB, dan Pengisian Instrumen Survey Eksternal berupa Survey Persepsi Korupsi dan Survey Kepuasan Pelayanan. Peserta diharapkan memberikan penilaian secara jujur sehingga apa yang menjadi kekurangan LPMP NTB akan segera dipetakan masalahnya dan dicarikan solusi pemecahannya sehingga diharapkan LPMP NTB memberikan Pelayanan Prima kepada Publik”.

Lebih lanjut Made mengatakan “kegiatan ini nantinya bisa diimplementasikan disekolah masing-masing dengan memberikan pengetahuan kepada peserta didik terkait dengan reformasi birokrasi. Hal ini perlu ditanamkan sejak dini dengan harapan kelak peserta didik kita akan menjadi pribadi yang bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan bisa memberikan pelayanan yang lebih baik”.

“Salah satu Bahan Materi Sosialisasi dan Internalisasi Pembangunan ZI-WBK adalah terkait dengan Gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik yang berhubungan dengan jabatan atau tanpa sarana elektronik yang berhubungan dengan jabatan atau kewenangan. Pada saat ini Satuan Pendidikan sedang melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kami berharap jangan sampai dalam pelaksanaan PPDB ada yang berbau Gratifikasi atau KKN”, harapnya.

“ Untuk itu pengawasan sangat penting dilakukan baik oleh Pengawas Internal dan Pengawas Eksternal termasuk oleh seluruh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing Unit Kerja instansi pemerintah. Sedangkan target yang ingin dicapai dalam pengawasan antara lain meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah, meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah, meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah, dan menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah”, pungkas Made.

Oleh : IMMA 2020

SINOBEL MENDEKATKAN LPMP NTB DENGAN MASYARAKAT



"Alhamdulillah yarab..., tidak menyangka bisa menjadi juara 1. Lolos mengikuti kegiatan ini saja saya sudah sangat bersyukur.... Terimakasih LPMP NTB sudah mawadahi karya2 kami guru2 yg terdampak gempa. Simposium dan lomba ini sungguh2 bermafaat bagi kami..."Demikianlah potongan status di media sosial Facebook dari salah seorang guru yang bertugas di daerah terdampak gempa terparah, yaitu yaitu Reni Setiyowati, S.Pd. Gr, SMPN, Guru Garis Depan (GGD) di SD-SMP Satap 2 Tanjung. Guru dengan nama akun facebook **Reni Bendum Preneur** itu menyampaikan rasa syukur dalam statusnya bahwa keluar sebagai juara 1 jenjang SMP dalam Lomba dan Simposium Inovasi Pembelajaran dalam Kondisi Darurat Pasca Gempa Bumi Lombok dan Sumbawa yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB).

Status itu pun kemudian mendapat ratusan *like* dan berbagai komentar. "*Proficiat, guru-guru hebat yang tak pernah patah semangat, meskipun menghadapi tantangan berat!*". "*Meskipun tidak juara, saya bangga bisa bertemu dengan mereka orang2 hebat... di ajang yang sangat bermartabat ini. Terimakasih LPMP NTB*". "*Selamat untuk semua semua perjuangan dan pengorbanan bapak-ibu guru, ... guru-guru hebat yang rela berkorban demi pendidikan..*" Musibah adalah ujian...,percalalah bahwa segala perjuangan & pengorbanan akan berbuah indah pada waktunya...". Demikianlah antara lain komentar-komentar terhadap status tersebut.



Endang Supiyatun S.Pd.SD, guru SDN Lantan, Kabupaten Lombok Tengah merasa sangat bersyukur dapat mengikuti **SINOBEL** ini, karena dengan kegiatan ini ia dapat bertemu dengan teman-temannya yang

sama-sama terdampak gempa. “Ini moment yang istimewa, bertemu dengan teman-teman, dan juga banyak teman baru yang sungguh-sungguh luar biasa semangat juangnya, kami dapat bersilaturahmi, saling curhat, saling bertukar pengalaman tentang bagaimana mengatasi dan menyiasati pembelajaran dalam kondisi darurat pasca gempa ini”.

SINOBEL ini merupakan puncak dari satu siklus upaya pelaksanaan penjaminan pendidikan pasca gempa yang dilakukan oleh LPMP NTB. Dalam upaya penanganan pendidikan pasca gempa ini selain melakukan tindakan-tindakan awal berupa pertolongan darurat dan pendataan, LPMP NTB juga melakukan kegiatan secara terstruktur sebagai implementasi penjaminan mutu pendidikan, antara lain melalui kegiatan-kegiatan : 1) *Trauma Healing* (Psikososial); 2) Pelatihan Pengelolaan Sekolah dan Pembelajaran dalam Kondisi Darurat bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 3) Pendampingan Pelaksanaan Pembelajaran Darurat; 4) Monitoring dan Evaluasi; 5) Perbaikan dan Pengembangan. Untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran darurat kepada sekolah diberikan bantuan sarana prasarana sementara dan dana *stimulant* untuk membantu pengadaan sarana dan media pembelajaran yang diperlukan.

Antusiasme guru, kepala sekolah dan pengawas dalam mengikuti **SINOBEL** ini sangat tinggi. Peserta yang berkesempatan mengirimkan makalah sebanyak 105 orang, dan setelah dilakukan penilaian awal ditetapkan 60 peserta sebagai finalis, dari empat kelompok jenjang, yaitu SD, SMP, SMA/K dan Pengawas/Kepala Sekolah. Setelah melalui penilaian, presentasi dan wawancara, dari 60 finalis selanjutnya ditetapkan 10 besar. Sepuluh besar terbaik ini selanjutnya melakukan presentasi untuk menentukan terbaik 1 sampai dengan 3 dari masing-masing kelompok. Presentasi 10 besar dikemas dalam kegiatan Simposium yang dihadiri oleh 250 peserta dari unsur guru, tenaga kependidikan dan relawan pendidikan dari berbagai NGO dan mitra pendidikan lainnya. Dalam kegiatan ini peserta juga mendapatkan pengayaan materi Kepala LPMP DIY waktu itu Ibu Dr. Sarjilah, M.Pd dan Kepala LPMP NTB, waktu itu Bapak Minhajul Ngabidin, S.Pd, M.Si.

Kegiatan **SINOBEL** yang digelar selama 3 hari, di salah satu hotel di Kota Mataram berlangsung lancar, sukses dan meriah, karena didukung oleh berbagai pihak, antara lain Kemdikbud, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan BPBD, berbagai NGO dan Organisasi Mitra Pendidikan, sponsor dan juga dihadiri oleh perwakilan dari LPMP dan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah yang juga mengalami musibah, yaitu gempa bumi, tsunami dan likuifaksi. Dalam kegiatan ini juga dilakukan pameran foto yang diikuti oleh berbagai pihak baik unsur *government* maupun *non government*.

Gubernur Nusa Tenggara Barat, yang diwakili oleh salah satu Pejabat di Lingkup Provinsi NTB dalam kesempatan pembukaan Simposium menyampaikan terimakasih yang tak terhingga atas partisipasi semua pihak dalam penanganan pendidikan pascagempa bumi Lombok dan Sumbawa, dan memberikan apresiasi yang tinggi atas inisiatif dibuatnya kegiatan Lomba Kreatifitas dan Inovasi Guru dalam melakukan pembelajaran di sekolah-sekolah terdampak gempa ini. “Bapak Ibu guru yang hadir di sini sungguh orang-orang yang luar biasa, di tengah kesulitan akibat gempa, mampu melakukan berbagai upaya, kreatifitas dan inovasi demi pelayanan pendidikan dan pembelajaran!” ungkap beliau.

Sementara itu Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pustekkom), Dr. Gogot Suharwoto, mewakili Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, sangat mengapresiasi atas semangat, perjuangan dan kerja keras para guru, dan sebagai wujud apresiasi tersebut beliau berjanji akan memberikan bantuan sarana media pembelajaran berbasis TIK untuk menunjang proses pembelajaran di sekolah-sekolah terdampak gempa. (Alhamdulillah, dari 100 perangkat media pembelajaran yang dijanjikan, akhirnya untuk sementara terealisasi sebanyak 50 unit, dikarenakan 50 unit lainnya harus berbagi dengan Provinsi Sulawesi Tengah yang menyusul juga mengalami musibah gempa bumi).

Berikut adalah daftar 10 besar terbaik dari setiap jenjang dan judul makalahnya :

1. Ameng Ardian, S.Pd, SDN 3 Malaka, Kabupaten Lombok Utara, “Penerapan *STAD Snakes and Ladders Game* untuk Meningkatkan Motivasi Belajar di Kelas VI SDN 3 Malaka Pasca Gempa Lombok”

2. Endang Supiyatun S.Pd.SD, SDN Lantan, Kabupaten Lombok Tengah, “Psikososial Belajar dan Bermain di Alam untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Anak Pasca Gempa Bumi di SDN Lantan”
3. Sumidah, S.Si, MM, SD-SMPN Satap Baturintang, Kabupaten Lombok Tengah, “Penerapan Metode ODOA (One Day One Ayat) Untuk Menyembuhkan Trauma Psikologi dan Mental Siswa Pasca Bencana Gempa di SD-SMPN Satap Baturintang Desa Ganti Kecamatan PrayaTimur”
4. Reni Setiyowati, S.Pd. Gr, SMPN Satap 2 Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, “Pemanfaatan Media *Game* Ular Tangga Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Kelas VIII SMPN Satap 2 Tanjung Pasca Gempa Lombok”
5. Ni Made Ayu Sumaningsih, S.Pd, SMP Negeri 1 Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, “Pengembangan *Outdoor Study (Games Mission X)* sebagai Strategi Pembelajaran IPA SMPN 1 Tanjung dalam Kondisi Darurat Pasca Gempa”
6. Siti Nurkhasanah, S. Pd, SMPN 1 Gangga, Kabupaten Lombok Utara, “Pemanfaatan Pipet Plastik pada Materi Pewarisan Sifat untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Kelasl XB pada SMPN 1 Gangga Pasca Gempa Bumi”
7. Ida Ayu Made Rayoni, S.Pd, SMAN 1 Narmada, Kabupaten Lombok Barat, “Penerapan Model Jigsaw Berbantuan Media Poster dengan Pameran untuk di Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Sejarah SMAN 1 Narmada Pasca Gempa Bumi”
8. Dr. Sri Wahyuni, SMA Negeri 2 Selong,Kabupaten Lombok Timur, “*Recovery* Kondisi Siswa Pasca Gempa dengan Pendekatan Psikososial dan Permainan Pembelajaran Mitigas Bencana di SMA Negeri 2 Selong”
9. Baiq Sri Ayuda, S. Pd., M. Pd, SMAN 1 Selong ,Kabupaten Lombok Timur, “Psikososial Pasca Gempa Ala AYUDA (Asyik, Yang Kreatif, Unik dan Apresiatif) Pada Pembelajaran Kimia Unsur di Kelas XII IPA SMAN 1 Selong”
10. Toto Raharjo, S.Pd.,M.Pd.,UPT Layanan Dikmen dan PK-PLK Lombok Timur, Kabupaten Lombok Timur, “Upaya Meningkatkan Layanan Supervisi melalui Pendekatan Kolaboratif Humanistik pada sekolah Binaan Terdampak Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Timur”

Kepala Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi (Kasi PMS) Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd. mengatakan “Program Inovasi ini bagian dari upaya membangkitkan motivasi guru dan sekaligus sebagai wujud apresiasi atas perjuangan para guru dalam mengupayakan terlaksananya kegiatan belajar mengajar dalam kondisi darurat pasca terjadinya gempa bumi yang meluluh lantakkan Lombok dan Sumbawa, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat menggelar kegiatan Simposium dan Lomba Inovasi Pembelajaran yang di-**Branding** dengan sebutan **SINOBEL**”.

“Sebagai bagian dari penanganan pendidikan pascagempa, **SINOBEL** bertujuan untuk menumbuhkan motivasi para guru dan tenaga kependidikan dalam melakukan berbagai upaya bagi terlaksananya layanan pendidikan dan pembelajaran secara maksimal di sekolah pasca terjadinya musibah gempa bumi. Sedangkan secara substansi **SINOBEL** ini sebagai wahana untuk memberikan ruang bagi kreatifitas dan inovasi guru dalam mengembangkan keprofesionalannya di tengah kesulitan dan tantangan yang menghadang pelaksanaan tugas mereka. Program Inovasi melalui **SINOBEL** dapat mendekatkan LPMP NTB dengan Masyarakat atau *Stakeholder*. Karena **SINOBEL** menyentuh langsung dengan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Pasca Gempa Bumi Lombok-Sumbawa. Pada Masa Pandemi Covid-19 tahun 2020 ini dengan Belajar dari Rumah (BDR) secara dalam jaringan (daring) maupun luar jaringan (luring) kami berharap semoga ada **SINOBEL** Jilid II”, harap Made.

Oleh : Minhajul Ngabidin, S.Pd, M.Si
Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd

SISTEM MANAJEMEN KINERJA LPMP NTB ANDAL



Perjalanan Panjang Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan LPMP NTB tahun 2019 ditutup dengan Prestasi Gemilang terkait dengan Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi yang digulirkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan Reformasi Birokrasi yang meliputi 8 (delapan) area perubahan. Untuk Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) meliputi 6 (enam) area perubahan yaitu : 1) Manajemen Perubahan, 2) Penataan Tatalaksana , 3. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, 4) Penguatan Akuntabilitas Kinerja, 5), Penguatan Pengawasan , dan 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Sesuai dengan area perubahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik perlu ada Sinergitas antara Standar Pelayanan dengan Reformasi Birokrasi sehingga Reformasi Birokrasi berhasil dengan baik diinstansi khususnya di LPMP NTB, pada akhirnya kualitas pelayanan menjadi lebih baik (pelayanan prima).

Salah satu dari 8 (delapan) area perubahan dalam Reformasi Birokrasi Instansi adalah Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Akuntabilitas Kinerja Lembaga perlu dilakukan penguatan dalam kerangka instansi pemerintah menuju Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK), dan pada akhirnya akan menjadi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), dilihat dilihat dari 5 (lima) komponen yaitu : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Adapun ruang lingkup yang dievaluasi meliputi komponen :

1. **Perencanaan Kinerja**, meliputi Dokumen Rencana Strategik (RENSTRA) 2015-2019, Rencana Kerja Tahun (RKT) 2019, Penetapan Kinerja (PK) 2019, Rencana Aksi 2019
2. **Pengukuran Kinerja**, meliputi pemanfaatan *e-kinerja.kemdikbud.go.id*
3. **Pelaporan Kinerja**, meliputi dokumen laporan kinerja 2018
4. **Evaluasi Kinerja**, meliputi pelaksanaan evaluasi kinerja internal
5. **Capaian Kinerja**, meliputi capaian kinerja IKK tahun 2018

Metode penilaian evaluasi menggunakan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) terhadap 5 (lima) komponen dengan Kriteria evaluasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan dari hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, tingkat penerapan **Akuntabilitas Kinerja LPMP NTB Tahun 2019** masuk dalam kategori : **BB** dengan nilai 75,96 dengan interpretasi : **Sangat Baik, Akuntabel, Berkinerja Baik, Memiliki Sistem Manajemen Kinerja Yang Andal**

Dengan rincian nilai sebagai berikut :

1. **Perencanaan Kinerja** (30%) : 26,04 %
2. **Pengukuran Kinerja** (25%) : 21,77 %
3. **Pelaporan Kinerja** (15%) : 10,78 %
4. **Evaluasi Kinerja** (10%) : 6,12 %
5. **Penetapan Sasaran/Kinerja Organisasi** (20%) : 11,25 %

Menurut Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd. sebagai salah satu Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) LPMP NTB, “hasil yang diraih oleh LPMP NTB dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, tingkat penerapan Akuntabilitas Kinerja LPMP NTB tahun 2019 masuk dalam **Kategori BB**. Artinya Akuntabilitas Kinerja LPMP NTB **Sangat Baik, Akuntabel, Berkinerja Baik, dan Memiliki Sistem Manajemen Kinerja yang Andal**”.

“ Dengan Sistem Manajemen Kinerja yang Andal, akan memberikan kontribusi bagi keberhasilan Pembangunan ZI-WBK di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan khususnya LPMP NTB. Disamping itu dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas penerapan SAKIP. LPMP NTB diharapkan mampu meningkatkan kinerjanya dengan merealisasikan target-target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK). “Semoga LPMP NTB di tahun 2020 ini, Tingkat Penerapan Akuntabilitas Kinerja masuk dalam **Kategori A** “, harap Made.



Oleh : IMMA 2020

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MELALUI SI “KOBO”




Sejak Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) melaksanakan Program Reformasi Birokrasi Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) tahun 2017, terus melakukan gebrakan perubahan. Salah satunya adalah selalu melakukan inovasi- inovasi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada **Stakeholder** yang membutuhkan peran serta LPMP NTB. Guna mendukung perwujudan reformasi birokrasi dan satuan kerja Zone Integritas (ZI-WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), diperlukan individu untuk menjadi pelopor perubahan dilingkungan kerjanya, dimana dalam pelaksanaan reformasi birokrasi pelopor tersebut dinamakan Agen Perubahan. Agen Perubahan adalah individu atau kelompok terpilih yang menjadi pelopor perubahan dan sekaligus menjadi contoh dan panutan dan berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi dilingkungan Ditjen Paud, Dikdas, dan Dikmen. Individu individu Agen Perubahan dalam suatu unit organisasi dapat membentuk suatu kelompok Agen Perubahan yang tergabung dalam satu forum Agen Perubahan pada tingkat instansi.

Agen perubahan bukan saja menyangkut individu, kelompok juga menyangkut organisasi. *Agent of Change* juga dilakukan Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi (PMS) LPMP NTB melalui Verifikasi Profil Mutu Sekolah Model. Mulai tahun 2019 LPMP NTB melalui Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi melakukan salah satu bentuk Inovasi yaitu mempergunakan **KoBo toolbox** dalam melakukan verifikasi mutu sekolah model.

Menurut Kepala Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd. “dengan menggunakan **KoBo toolbox** dalam Verifikasi Profil Mutu Sekolah Model ini merupakan Implementasi dan internalisasi diri dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK). Setiap Pegawai mau tidak mau, suka tidak suka harus mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari terkait peningkatkan pelayanan publik. Agar mudah diingat Verifikasi Profil Mutu Sekolah Model mempergunakan **KoBo toolbox** disingkat dengan Si “KOBO”.

Lebih lanjut “**KoBo toolbox** ini banyak mempunyai kelebihan antara lain : Dapat merekam koordinat lokasi tempat dilakukannya Verifikasi, Pengentrian data dapat dilakukan baik melalui *online* maupun *offline*, Dapat menggunakan Android dalam verifikasi, Hasil terekam dalam bentuk *Excel* yang dapat diolah lebih jauh/detail sesuai dengan keperluan, dan Bentuk pertanyaan lebih banyak pilihan. Salah satu kelebihan dari **KoBo toolbox** adalah dapat merekam koordinat lokasi tempat dilakukannya Verifikasi, artinya Pelaksana Monev yang akan melaksanakan Verifikasi Profil Mutu Sekolah Model tidak lagi banyak membawa berkas dalam bentuk *hard copy*. Disamping itu dengan **KoBo toolbox** keberadaannya diketahui saat melaksanakan Verifikasi Profil Mutu Sekolah Model. Inovasi melalui “Si KOBO” akan meningkatkan pelayanan publik dalam rangka menuju Wilayah Bebas



dari Korupsi (WBK). Penggunaan Teknologi Informasi akan mempermudah dan mempercepat proses sehingga lebih efektif dan efisien. Disamping itu Integritas Pelaksana Monev akan teruji karena saat penggunaan alat ini Pelaksana Monev diketahui keberadaanya karena dapat merekam koordinat lokasi”, pungkas Made.

“Dengan menggunakan **KoBo toolBox** ini akan mempermudah kita dalam melakukan pengolahan dan analisis data. Hasil dari verifikasi Profil Mutu Sekolah Model akan lebih cepat diketahui. LPMP NTB diharapkan kedepan sebagai *Role Model* bagi instansi yang lain dalam berinovasi khususnya penggunaan Teknologi Informasi sehingga terjadi peningkatan pelayanan”, ucap Musmuliadi, S.Si.,M.Pd Analis Data Mutu Pendidikan salah satu ASN dilingkungan Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi LPMP NTB”.

Oleh : IMMA 2020

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZI WBK LPMP NTB



Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) selama 4 (empat) hari mulai tanggal 22-25 Juni 2020 bertempat di Ruang Aula Anggrek melaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembangunan ZI-WBK. Monev dilaksanakan dengan melihat Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMP ZI). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh anggota Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) yang berjumlah 34 (tiga puluh empat) orang dari 6 (enam) indikator pengungkit mulai dari Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Dalam pengarahannya Kepala LPMP NTB Bapak Mohamad Mustari, Ph.D. memberikan apresiasi dan attensi serta mengucapkan terima kasih kepada seluruh Tim Pembangunan ZI WBK yang akan melaksanakan kegiatan Monev walaupun pada masa Pandemi Covid-19. "Monev ini dilaksanakan dalam rangka persiapan penilaian oleh Kemendikbud (internal) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi (eksternal) terhadap LPMP NTB dalam meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)".

"Selanjutnya dalam Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan ZI-WBK juga diserahkan Surat Keputusan Kepala LPMP NTB Nomor : 592/C7.47/KP/2020 tentang Tim Tunas Integritas berjumlah 5 (lima) orang perwakilan dari masing-masing Seksi/Subbag dan Widyaiswara. Tim Tunas Integritas dilingkungan LPMP NTB tersebut adalah **Musmuliadi (Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi), Yuyun Sambodo (Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan), Dian Rohaidah (Seksi Sistem Informasi), Partoyo (Subbag Umum), dan Nur Hidayati (Widyaiswara)**".

"Sebagai *Role Model* kami juga akan menyerahkan Barang "Gratifikasi" yang diterima saat melakukan kunjungan kedaerah berupa kain baju. Dalam Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), pengendalian gratifikasi telah menjadi bagian dari prosedur. Penyerahan Barang "Gratifikasi" Kepala LPMP NTB diterima oleh Koordinator Penguatan Pengawasan yang juga Kepala Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan (FPMP) Dra. Hj. Sudiati Prihatiningrum. Salah satu inovasi dalam Penguatan Pengawasan adalah Pelaporan Gratifikasi bisa dilakukan secara *on line* melalui *Website* LPMP NTB. Kami berharap semoga ini akan menjadi contoh bagi pegawai LPMP NTB yang lain untuk melaporkan Gratifikasi yang telah diterimanya. Dalam *foot note* Surat Tugas sudah ditulis Pegawai LPMP NTB tidak menerima Gratifikasi dalam melaksanakan tugas.", harapnya

Selaku Ketua Pembangunan ZI WBK Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd. pada kesempatan tersebut menyampaikan beberapa hal terkait dengan Program Kemitraan/Kerjasama yang dilaksanakan oleh

LPMP NTB dengan Dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten maupun Kota. “Program kemitraan/kerjasama yang dilaksanakan adalah Diklat Calon Kepala Sekolah (Cakep) maupun Diklat Calon Pengawas Sekolah (Cawas), serta Program Bimtek Penguatan Kepala Sekolah. Disamping itu juga dipaparkan Program Inovasi atau program unggulan LPMP NTB mulai tahun 2018-2020. LPMP NTB tahun 2018 melakanakan Program Inovasi yaitu Simposiun dan Lomba Inovasi Pembelajaran (SINOBEL), Gerakan Literasi (GELI). Sementara itu di tahun 2019 Verifikasi Profil Mutu Sekolah model melalui “Si KoBo”, Sajian Unit Layanan Terpadu Keliling (SULING). Program Inovasi tahun 2020 antara lain “SULING”, dan Kampanye Anti Korupsi Melalui On line “ KAK MELON”.

Selanjutnya Made meyampaikan “beberapa program inovasi pada masa pandemi Covid-19 antara lain Bimtek Pengelolaan Pembelajaran Daring, Bimtek *Google Form* Daring, Bimtek *Google Classrom*, Bincang Pendidikan daring, dan Webinar Daring. Kegiatan inovasi bersama LPMP NTB dengan Pusat Sanggar Rumah Belajar (PSRB) yaitu Kegiatan Belajar Daring Jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK, Bimtek Pembelajaran Berbasis TIK “PemBaTIK”, dan Cepat Tepat On Line Jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK”.

“Dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK), pemantauan dan evaluasi adalah suatu keharusan. Hal ini dilaksanakan dalam rangka memantau dan mengevaluasi apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Dengan harapan seluruh kegiatan pembangunan ZI-WBK dilaksanakan sesuai dengan rencana. Monitoring dan evaluasi pembagunan zona integritas yang melibatkan pimpinan ini dilakukan secara berkala. Setelah dilaksanakan monitoring diharapkan ada kegiatan tindak lanjut dimana semua catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi dari tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan unit WBK ditindaklanjuti”, pungkasnya.

Pada hari terakhir tanggal 25 Juni 2020 Pemantauan dan Evaluasi dilaksanakan melalui daring didampingi oleh Tim Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Tim berjumlah 4 (empat) orang. Tim dari Itjen Kemendikbud diketuai oleh Ibu Agustina, yang dalam melakukan pendampingan beliau “ memberikan apresiasi kepada LPMP NTB yang telah banyak meraih prestasi ditahun 2019 dan kami berdoa dan berharap semoga ditahun 2020 ini LPMP NTB bisa meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK)”, harapnya.

Oleh : IMMA 2020



AKUNTABILITAS KINERJA LPMP NTB SANGAT BAIK DAN MEMILIKI SISTEM MANAJEMEN KINERJA YANG ANDAL

Perjalanan Panjang Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan LPMP NTB tahun 2019 ditutup dengan Prestasi Gemilang terkait dengan Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi yang digulirkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan Reformasi Birokrasi yang meliputi 8 (delapan) area perubahan : 1) Manajemen Perubahan, 2) Penguatan Pengawasan, 3) Penguatan Akuntabilitas Kinerja, 4) Penguatan Kelembagaan, 5) Penguatan Tata Laksana, 6) Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur, 7) Penguatan Peraturan Perundang-undangan, dan 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Untuk Pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) ada 6 (enam) area perubahan kecuali Penguatan Kelembagaan dan Penguatan Peraturan Perundang-undangan. Sesuai dengan area perubahan Penguatan Akuntabilitas Kinerja perlu ada Sinergitas antara Standar Pelayanan dengan Reformasi Birokrasi sehingga Reformasi Birokrasi berhasil dengan baik di instansi khususnya di LPMP NTB, pada akhirnya kualitas pelayanan menjadi lebih baik (pelayanan prima).

Salah satu dari 6 (enam) area perubahan dalam Reformasi Birokrasi Instansi adalah Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Akuntabilitas Kinerja Lembaga perlu dilakukan penguatan dalam kerangka instansi pemerintah menuju Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK), dan pada akhirnya akan menjadi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), dilihat dari 5 (lima) komponen yaitu : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Adapun ruang lingkup yang dievaluasi meliputi komponen :

1. **Perencanaan Kinerja**, meliputi Dokumen Rencana Strategik (RENSTRA) 2015-2019, Rencana Kerja Tahun (RKT) 2019, Penetapan Kinerja (PK) 2019, Rencana Aksi 2019
2. **Pengukuran Kinerja**, meliputi pemanfaatan *e-kinerja.kemdikbud.go.id*
3. **Pelaporan Kinerja**, meliputi dokumen laporan kinerja 2018
4. **Evaluasi Kinerja**, meliputi pelaksanaan evaluasi kinerja internal
5. **Capaian Kinerja**, meliputi capaian kinerja IKK tahun 2018

Metode penilaian evaluasi menggunakan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) terhadap 5 (lima) komponen dengan Kriteria evaluasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan dari hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, tingkat penerapan **Akuntabilitas Kinerja LPMP NTB Tahun 2019** masuk dalam kategori : **BB dengan nilai 75,96 dengan interpretasi : Sangat Baik, Akuntabel, Berkinerja Baik, Memiliki Sistem Manajemen Kinerja Yang Andal**

Dengan rincian nilai sebagai berikut :

- | | |
|--|-----------|
| 1. Perencanaan Kinerja (30%) | : 26,04 % |
| 2. Pengukuran Kinerja (25%) | : 21,77 % |
| 3. Pelaporan Kinerja (15%) | : 10,78 % |
| 4. Evaluasi Kinerja (10%) | : 6,12 % |
| 5. Penetapan Sasaran/Kinerja Organisasi (20%) | : 11,25 % |

Menurut Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd. sebagai salah satu Tim Pembangunan ZI WBK LPMP NTB, dengan hasil yang diraih oleh LPMP NTB dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, tingkat penerapan Akuntabilitas Kinerja LPMP NTB tahun 2019 masuk dalam **Kategori BB**. Artinya Akuntabilitas Kinerja LPMP NTB **Sangat Baik dan Memiliki Sistem Manajemen Kinerja yang Andal**, diharapkan akan memberi kontribusi bagi keberhasilan Program Raformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan khususnya LPMP NTB, disamping itu dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas penerapan SAKIP. Tahun 2020 diharapkan LPMP NTB meningkatkan kinerjanya dengan merealisasikan target-target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK). “ Semoga Tahun 2020 LPMP NTB, meraih Penghargaan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) “, tutup Made.

Oleh : IMMA 2020

PERAN PETUGAS SUPERVISI DALAM PENJAMINAN MUTU DIKLAT CAWAS



Dalam rangka Supervisi Mutu Pendidikan perlu disiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional. Penyiapan Calon Pengawas Sekolah dilaksanakan melalui beberapa tahap antara lain : proyeksi kebutuhan Pengawas Sekolah selama 5 (lima) tahun kedepan, Seleksi, dan Pendidikan dan Pelatihan serta pengangkatan pengawas sekolah. Proses seleksi Calon Pengawas Sekolah meliputi seleksi administrasi dan seleksi substansi. Seleksi administrasi bertujuan untuk mengetahui kelengkapan persyaratan administrasi Calon Pengawas Sekolah. Sedangkan seleksi substansi bertujuan untuk mengetahui potensi bidang pengawasan yang dimiliki Calon Pengawas Sekolah.

Diklat Calon Pengawas Sekolah diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah (LPPKSPS) dan dapat bekerjasama dengan lembaga/instansi penyelenggara pendidikan dan pelatihan (Lembaga Penyelenggara Diklat/LPD) yang telah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

Diklat yang dilaksanakan oleh Lembaga Penyelenggara Diklat (LPD) perlu dilakukan supervise oleh LPPKSPS sebagai bagian dari penjaminan mutu terhadap keterlaksanaan Diklat Calon Pengawas Sekolah, baik moda daring maupun moda luring. Supervisi dalam konteks ini adalah sebuah proses pemantauan, fasilitasi refleksi pembelajaran bagi pengajar diklat, dan pemberian bantuan akademik/umpan balik terhadap pelaksanaan proses Pembelajaran Diklat Calon Pengawas Sekolah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Untuk itu diperlukan petugas supervise yang terlatih dan siap melaksanakan tugasnya agar hasil supervise benar-benar dapat digunakan sebagai bahan perbaikan pelaksanaan Diklat calon Pengawas Sekolahberikutnya oleh LPD.

Bimbingan Teknis Petugas Supervisi Diklat Calon Pengawas sekolah dilaksanakan selama 5 (lima) hari mulai tanggal 21-25 September 2020 bertempat di Hotel Days Tangareng Banten. Adapun hasil yang diharapkan dari Bimbingan teknis Petugas Supervisi Diklat Calon Pengawas Sekolah adalah : terbangunnya kesamaan persepsi para petugas supervise dalam melakukan penjaminan mutu pembelajaran Diklat Calon Pengawas Sekolah dan terbekalinya petugas supervise Diklat Calon Pengawas Sekolah dengan sikap, pengetahuan, keterampilan yang dibutuhkan dalam melaksanakan

tugas dan perannya. Bimtek ini diikuti oleh Widyaparada, Widyaiswara, Dosen, dan Pengawas Sekolah berjumlah 30 (tiga puluh) orang.



SOSIALISASI HASIL CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN ZI WBK



Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) yang telah dicanangkan mulai tahun 2018, perlu diketahui oleh seluruh warga Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Komitmen Bersama antara Pimpinan dan seluruh Pegawai untuk mewujudkan WBK dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik telah terinformasikan saat Desk Evaluasi ZI yang dilaksanakan oleh KemenPAN RB pada tanggal 23 Oktober 2020. Hasil capaian kinerja pembangunan ZI WBK tahun 2020 harus terinformasikan sehingga bisa dimanfaatkan sebagai salah satu bahan rujukan dalam perencanaan pembangunan ZI WBK ditahun mendatang dan sebagai bahan perbaikan terhadap 6 (enam) area perubahan mulai dari Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pngawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Sosialisasi hasil capaian pembangunan ZI WBK LPMP NTB dilaksanakan selama sehari pada tanggal 4 November 2020 di Aula Anggrek dan diikuti oleh seluruh Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Staff Struktural dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dilingkungan LPMP NTB. Sosialisasi Hasil Capaian Pembangunan ZI WBK dibuka oleh Kepala LPMP NTB. Dalam sambutannya Kepala LPMP NTB Bapak Mohamad Mustari, MM.,MA., Ph.D., “ Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan memberikan apresiasi Pertama kepada Tim Pembangunan ZI WBK yang berjumlah 34 (tiga puluh) orang, dan kedua kepada Seluruh warga LPMP NTB baik ASN dan PPNPN yang telah bersama-sama berkontribusi positif membangun ZI WBK ini. Kerja Keras, Kerja Cerdas, dan Kerja ikhlas yang dilakukan oleh kita semua telah membawa dampak yang sangat luar biasa terhadap Pembangunan ZI WBK. Banyak perubahan yang telah kita lakukan baik *mind set* maupun *culture set*. Pada prinsipnya Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan adalah terkait dengan Perbaikan Tatakelola dan Peningkatan

Kualitas Pelayanan Publik, sehingga Satuan Kerja mejadi daerah Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Kepuasan *Stakeholder* terhadap pelayanan yang telah diberikan semakin meningkat”.

Lebih lanjut “ Capaian Kinerja yang dicapai berupa Piagam Penghargaan dan Prestasi tahun 2019 merupakan wujud nyata yang menunjukkan bahwa LPMP NTB sudah melakukan reformasi birokrasi. Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan bukan semata-mata untuk mengejar Piagam Penghargaan tetapi bagaimana kita terus berbenah menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan melakukan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, sehingga pada akhirnya menjadi Instansi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Setelah dilakukan Desk Evaluasi ZI oleh KemenPAN RB kita berdoa dan berharap semoga tahun 2020 merupakan tahun keemasan bagi Pembangunan ZI WBK LPMP NTB dengan diraihnya Penghargaan WBK”, harap Mustari.



Salah seorang Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) Dra. Hj. Sri Sukriyani Kepala Subbag Tata Usaha dan juga sebagai Koordinator Manajemen Perubahan mengungkapkan “ kata kunci dari Reformasi Birokrasi adalah adanya Komitmen Bersama antara Pimpinan dan seluruh Pegawai. Dengan Komitmen Bersama antara Pimpinan dan seluruh pegawai diharapkan Proses Pembangunan Zona Integritas akan berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan tujuan dari Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan, yaitu Wilayah Bebas dari Korupsi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan. Tanpa adanya Komitmen Bersama Pimpinan dan seluruh Pegawai mustahil Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) akan berhasil dan memberikan dampak positif terhadap perubahan *mind set* dan *culture set* dan pada akhirnya LPMP NTB menjadi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)”.

Sosialisasi Hasil Capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) 2020 dipaparkan oleh Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd. selaku Ketua Pembangunan ZI WBK. “ Menurut kami, apa yang telah diraih oleh LPMP NTB merupakan wujud nyata atas perubahan-

perubahan yang telah dilakukan. Ini merupakan salah satu indikator atas keberhasilan Pembangunan ZI WBK. Kondisi awal LPMP NTB dengan kondisi sekarang jauh berbeda. Komitmen Pimpinan dan seluruh anggota kurang, Kompetensi Pegawai kurang, dan Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan Kurang Memadai, tetapi sekarang Komitmen Pimpinan dan seluruh Pegawai meningkat, Pelayanan Pegawai sangat profesional, serta Sarana prasarana pendukung pelayanan sangat memadai”.

“Adapun tujuan Sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) atas Hasil dan Capaian Kinerja Pembangunan ZI WBK tahun 2020. Sebagai Pelayan Publik kita harus banyak melakukan inovasi-inovasi terkait dengan program-program yang sangat dibutuhkan oleh *Stakeholder*. LPMP NTB telah membuat 8 (delapan) inovasi antara lain Sajian Unit Layanan Terpadu Keliling (**SULING**), Pusat Sanggar Rumah Belajar (**PSRB**), Akselerasi Mutu Pendidikan Berkolaborasi (**AMPIBI**), Sebaran Sekolah Model (**SEKAM**), Verifikasi dan validasi Sekolah Model dengan KobBoToolbox (**SI KOBO**), Kampanye Anti Korupsi Melalui On Line (**KAK MELON**), Pondok Literasi (**POLISI**), dan Quick Respon (**QR**) Program di masa pandemik covid-19. Dampak dari Program inovasi ini adalah : Sasaran/Target tercapai, Seluruh *stakeholder* terlayani dengan kualitas sama tanpa diskriminasi, Efisiensi anggaran, Kepuasan layanan, dan Sekolah meningkat mutu pendidikannya diukur dari ketercapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP)”, ungkap Made.

“ Marilah kita berubah baik *mind set* maupun *culture set* mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang, dan mulai dari hal yang kecil. Keberhasilan atas perubahan besar berasal dari akumulasi perubahan-perubahan yang kecil. Team yang kuat dan tangguh serta Komitmen Bersama Pimpinan dan seluruh pegawai akan mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Mari kita *Making Change Making History*”, tutup Made

Oelh : IMMA 2020

DESK EVALUASI ZONA INTEGRITAS LPMP NTB



Penghargaan dan prestasi yang diperoleh merupakan wujud nyata keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah dilaksanakan oleh LPMP NTB. Penghargaan dan prestasi yang diperoleh antara lain : **Peringkat II** atas Prestasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran (**Akuntabilitas**), **Peringkat III** atas Kinerja dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi Pengawasan Intern (**Pengawasan**), **Peringkat I** atas **Kualitas Pelayanan Publik** dari 34 (tiga puluh empat) LPMP se-Indonesia, dan Admin Medos **Terbaik** ULT pada UPT dilingkungan Kemendikbud. Disamping itu peran LPMP NTB dalam Pengawasan Penjaminan Mutu Pendidikan didaerah sangat berhasil. Hal ini terlihat dari 4.847 Satuan Pendidikan di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2018 tidak ada satupun sekolah yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP), tetapi pada tahun 2019 sudah ada satuan pendidikan yang mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP) sejumlah 312 sekolah baik Jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK.

Pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) yang dicanangkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) mulai tahun 2018 telah membawa dampak yang sangat signifikan mewujudkan WBK dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pencanangan Pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di tahun 2020 telah dihadiri oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Nusa Tenggara Barat, Kapolres Metro Bekasi Kota, Itjen Kemendikbud, Kepala UPT Kemendikbud di NTB, Wartawan, dan seluruh Pegawai baik ASN maupun PPNPN dilingkungan LPMP NTB.

Kepala LPMP NTB Bapak Mohamad Mustari, MM., MA., Ph.D., “ Mengucapkan terima kasih kepada Tim Evaluator Kemen PAN RB yang telah melakukan Desk Evaluasi Zona Integritas pada LPMP NTB. Kondisi awal LPMP NTB sebagai berikut : Kurangnya Komitmen Pegawai, Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) kurang profesional dalam pelayanan publik serta Sarana Prasarana pelayanan kurang memadai. Sedangkan Kondisi awal menurut persepsi masyarakat antara lain Prosedur pelayanan sulit dipahami, Sulitnya persyaratan pelayanan yang ada, Informasi biaya pelayanan kurang jelas, Waktu pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan, Petugas kurang responsif, Tidak memiliki

keahlian yang memadai, masih adanya petugas yang menerima uang/gratifikasi, Petugas mempersulit pelayanan, masih adanya pungutan liar dalam pelayanan, masih adanya petugas yang melayani diluar prosedur, masih adaya praktek percaloan di pelayanan, Diskriminasi dalam pemberian pelayanan, Tidak tersedianya sarana prasarana pendukung pelayanan, dan Pengaduan pelayanan tidak jelas dan sulit diakses “.

Lebih lanjut Musatari mengatakan, “ Semua kondisi awal itu telah berubah menjadi lebih baik. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh LPMP NTB antara lain : 1. Meningkatkan perubahan baik *mind set* maupun *culture set* yaitu pementapan nilai-nilai anti korupsi dan pelayanan prima kepada Masyarakat, 2. Meningkatkan Pelayanan Publik dari sisi SDM, sarpras dan metoda, 3. Mempererat hubungan dengan Masyarakat yaitu Menciptakan kepercayaan dan kerjasama, dan 4. Melakukan Manajemen Media yaitu publikasi, menerima masukan dan saran, transparansi dan akuntabilitas. Upaya-upaya yang dilakukan telah membuahkan hasil, sehingga LPMP NTB banyak mendapatkan Penghargaan dan prestasi dan salah satu yang membanggakan adalah hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Unit Layanan Terpadu (ULT) meningkat menjadi 4,02 kategori **Sangat Baik Peringkat Pertama** dari 34 LPMP se-Indonesia”.

“ *Tag line* LPMP NTB “ **Bersama Menjamina Mutu** “ mengandung makna bahwa Komitmen Pimpinan dan Seluruh Pegawai sangat penting dalam Pembangunan ZI WBK. Perencanaan, Proses, dan hasil juga harus bermutu. “**Melayani Sepenuh Hati** “ yang merupakan *Tag line* untuk ZI WBK kami juga sudah menginternalisasikan di kehidupan sehari-hari dalam pemberian pelayanan kepada publik. LPMP NTB selalu *Customer Oriented*. Kami berharap dengan adanya dukungan dari Pemda Provinsi NTB dan *stakeholder* lainnya serta Penghargaan dan Prestasi yang diperoleh akan dijadikan sebagai salah satu indikator dalam penilaian WBK oleh KemenPAN RB. Penghargaan ZI WBK yang diperoleh merupakan salah satu bentuk Apresiasi atas telah dilaksanakannya Reformasi Birokrasi dengan baik. Kami berdoa dan berharap semoga Komitmen Bersama dan Inovasi yang dilakukan oleh seluruh warga LPMP NTB mendapatkan apresiasi dengan diraihnya Piagam Penghargaan WBK di tahun 2020 ini“, harap Mustari.

Pelaksanaan Desk Evaluasi Zona Integritas tahun 2020 dilingkungan Kemendikbud dilaksanakan oleh KemenPAN RB mulai tanggal 21 s.d 27 Oktober 2020. Untuk LPMP NTB dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2020 melalui *Zoom Cloud Meeting*. Ketua Pembangunan ZI WBK LPMP NTB Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd., disela sela selesainya pelaksanaan Desk Evaluasi ZI “ memanjatkan Puja dan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih telah memberikan kemudahan dan kelancaran atas Pelaksanaan Desk Evaluasi ZI ini. Desk Evaluasi Zona Integritas diikuti oleh Kepala LPMP NTB dan Koordinator masing-masing Pengungkit. Kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikklas yang dilakukan oleh seluruh warga LPMP NTB telah menorehkan beberapa Penghargaan dan Prestasi membuktikan LPMP NTB telah melakukan Reformasi Birokrasi di 6 (enam) area baik Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. *Making change making history*”.

“ Yang menjadi nilai tambah LPMP NTB dibandingkan dengan yang lainnya adalah untuk layanan langsung LPMP NTB kami menyediakan layanan khusus bagi penyandang *disabilitas*, kemudian layanan 24 jam, dan layanan langsung ke lokasi melalui program Sajian Unit Layanan Terpadu Keliling (SULING) terutama terhadap 2 kabupaten/kota yang sudah dilaksanakan mendapat response yang cukup baik, hal ini diperoleh dari tanggapan dan banyaknya masyarakat yang hadir saat program SULING ini berlangsung”, lanjut Made.

“Inovasi yang dilaksanakan LPMP NTB berbeda dengan Satuan Kerja yang lain. Ini yang membuat kami berbeda. Selain SULING inovasi yang dilakukan LPMP NTB adalah 1. Pembentukan Pusat Sanggar Rumah Belajar (PSRB) program Kolaborasi antara LPMP NTB, Dinas Pendidikan Provinsi NTB

dan Duta Rumah Belajar, 2. Akselerasi Mutu Pendidikan Berkolaborasi (AMPIBI) ini merupakan program Non Anggaran dari LPMP NTB untuk percepatan peningkatan mutu pendidikan/merupakan program efisiensi anggaran, 3. Sebaran Sekolah Model (SEKAM) pada website LPMP NTB pertanggal 30 Oktober 2020 telah dilihat sebanyak 38.316 X, 4. Aplikasi SI KOBO untuk verifikasi dan validasi data Sekolah Model berbasis Android, 5. Kampanye Anti Korupsi Melalui On Line (KAK MELON) merupakan Program Penyuluhan Anti Korupsi kepada *Stakeholder* secara daring, 6. Pondok Literasi (POLISI) program menumbuh kembangkan minat baca peserta didik, 7. Quick Respon (QR) Inovasi di masa pandemik covid-19 antara lain Cepat Tepat Online (CTO) diikuti oleh 923 siswa, dan Webinar Berseri I, II, III, dan IV per tanggal 30 Oktober 2020 telah ditonton pada youtube LPMP NTB sebanyak 13.548 X. Semua Program Inovasi ini merupakan program Kolaboratif, Efisien, Efektif, Ekonomis, Mendekatkan Hubungan dengan Masyarakat, dan Tidak diskriminatif “, pungkas Made.



Tim Evaluator Kemen PAN RB saat Pelaksanaan Desk Evaluasi Zona Integritas berjumlah 2 (dua) orang, Bapak Raka Pamungkas dan Bapak Arif Lukman. “ Saya telah mencoba pengaduan *on line* dan responnya cukup baik yaitu 6 (enam) menit”, testimoni yang diberikan oleh Bapak Arif Lukman. Pelaksanaan Desk Evaluasi Zona Integritas yang di Moderatori oleh Laurensia Aryani dari Kemen PAN RB, ada 2 (dua) Hasil Pembahasan yang dituangkan dalam catatan Notulensi yaitu : “ 1. Sebaiknya hasil survei LPMP NTB yang baik dapat dimuat di halaman depan sehingga dapat langsung terinformasikan, dan 2. Sebaiknya hasil dan capaian yang baik terkait Zona Integritas dimuat semua dalam situs sebagai nilai tambah “.

Oleh : IMMA 2020

MELALUI INOVASI TINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN



“ Saya memberikan Apresiasi dan terima kasih kepada LPMP NTB sebagai Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan di Nusa Tenggara Barat yang telah berkisah luar biasa memberikan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di Nusa Tenggara Barat menuju NTB Gemilang. Saya sangat mendukung LPMP NTB menuju daerah Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Selamat dan sukses untuk LPMP NTB”, hal itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat Bapak Drs. H Lalu Gita Aryadi, M.Si. dalam memberikan dukungan terhadap Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) LPMP NTB.

Pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) yang dicanangkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) mulai tahun 2018 telah membawa dampak yang sangat signifikan mewujudkan WBK dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pencanaan Pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di tahun 2020 telah dihadiri oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Nusa Tenggara Barat, Kapolres Metro Bekasi Kota, Itjen Kemendikbud, Kepala UPT Kemendikbud di NTB, Wartawan, dan seluruh Pegawai baik ASN maupun PNP di lingkungan LPMP NTB.

Kepala LPMP NTB Bapak Mohamad Mustari, MM.,MA.,Ph.D. mengatakan “ dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Satuan Kerja harus melakukan Inovasi-inovasi. Inovasi-inovasi yang dilakukan untuk memenuhi keinginan *customer* dalam hal ini Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Guru, Tenaga Kependidikan, siswa serta *stakeholder* lainnya. Dengan adanya inovasi-inovasi ini diharapkan pelayanan lebih mudah, efektif, efisien, ekonomis, akuntabel, transparan, tidak diskriminatif, dan mendekatkan satuan kerja dengan *stakeholder*”.

Lebih lanjut Mustari menjelaskan “ Yang menjadi nilai tambah LPMP NTB dibandingkan dengan yang lainnya adalah untuk layanan langsung di LPMP NTB kami menyediakan layanan khusus bagi penyandang *disabilitas*, kemudian layanan 24 jam, dan layanan langsung ke lokasi melalui program Sajian Unit Layanan Terpadu Keliling (SULING) terutama terhadap 2 kabupaten/kota yang sudah dilaksanakan mendapat response yang cukup baik, hal ini diperoleh dari tanggapan dan banyaknya masyarakat yang hadir saat program SULING ini berlangsung. Melalui Inovasi Tingkatkan Kualitas

Pelayanan. Kami berdoa dan berharap dengan 8 (delapan) inovasi yang telah dilakukan, tahun 2020 LPMP memperoleh Penghargaan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd. selaku Ketua Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari korupsi (ZI WBK) menyampaikan “Inovasi yang dilaksanakan LPMP NTB berbeda dengan Satuan Kerja yang lain. Ini yang membuat kami berbeda. Selain SULING inovasi yang dilakukan LPMP NTB adalah 1. Pembentukan Pusat Sanggar Rumah Belajar (PSRB) program Kolaborasi antara LPMP NTB, Dinas Pendidikan Provinsi NTB dan Duta Rumah Belajar, 2. Akselerasi Mutu Pendidikan Berkolaborasi (AMPIBI) ini merupakan program Non Anggaran dari LPMP NTB untuk percepatan peningkatan mutu pendidikan/merupakan program efisiensi anggaran, 3. Sebaran Sekolah Model (SEKAM) pada website LPMP NTB pertanggal 30 Oktober 2020 telah dilihat sebanyak 38.316 X, 4. Aplikasi SI KOBO untuk verifikasi dan validasi data Sekolah Model berbasis Android, 5. Kampanye Anti Korupsi Melalui On Line (KAK MELON) merupakan Program Penyuluhan Anti Korupsi kepada *Stakeholder* secara daring, 6. Pondok Literasi (POLISI) program menumbuh kembangkan minat baca peserta didik, 7. Quick Respon Inovasi di masa pandemik covid-19 antara lain Cepat Tepat Online (CTO) diikuti oleh 923 siswa, dan Webinar Berseri I, II, III, dan IV per tanggal 30 Oktober 2020 telah ditonton pada youtube LPMP NTB sebanyak 13.548 X. Semua Program Inovasi ini merupakan program Kolaboratif, Efisien, Efektif, Ekonomis, Mendekatkan Hubungan dengan Masyarakat, dan Tidak diskriminatif”.

Salah satu Tim Evaluator Kemen PAN RB saat Pelaksanaan Desk Evaluasi Zona Integritas, Bapak Raka Pamungkas, “ dari paparan yang disampaikan oleh Kepala LPMP NTB banyak inovasi-inovasi yang telah dilaksanakan, ada 8 (delapan) inovasi”.

“ Saya telah mencoba pengaduan *on line* dan responnya cukup baik yaitu 6 (enam) menit”, testimoni yang diberikan oleh Bapak Arif Lukman yang juga sebagai Tim Evaluator Kemen PAN RB. Pelaksanaan Desk Evaluasi Zona Integritas yang di Moderatori oleh Laurensia Aryani dari Kemen PAN RB, ada 2 (dua) Hasil Pembahasan yang dituangkan dalam catatan Notulensi yaitu : “ 1. Sebaiknya hasil survei LPMP NTB yang baik dapat dimuat di halaman depan sehingga dapat langsung terinformasikan, dan 2. Sebaiknya hasil dan capaian yang baik terkait ZI dimuat semua dalam situs sebagai nilai tambah “.

Oleh : IMMA 2020



INTERNALISASI PENATAAN TATALAKSANA DALAM PEMBANGUNAN ZI-WBK

Program Reformasi Birokrasi terdiri Zone Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada intinya adalah bagaimana aparaturnegara memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada *stakeholder* yang dikenal dengan Pelayanan Prima. Guna mendukung perwujudan reformasi birokrasi dan satuan kerja ZI-WBK/WBBM, diperlukan individu untuk menjadi pelopor perubahan dilingkungan kerjanya, yang dimana dalam pelaksanaan reformasi birokrasi pelopor tersebut dinamakan Agen Perubahan. Agen Perubahan adalah individu atau kelompok terpilih yang menjadi pelopor perubahan dan sekaligus menjadi contoh dan panutan dan berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi dilingkungan Ditjen Dikdasmen. Individu-individu Agen Perubahan dalam suatu unit organisasi dapat membentuk suatu kelompok Agen Perubahan yang tergabung dalam satu forum Agen Perubahan pada tingkat instansi. Individu-individu itu harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan dalam Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan, sehingga pelayanan yang diberikan kepada publik sesuai dengan harapan mereka.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak, perlu mengoptimalkan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik. Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 33/MPK.D/KS/2018 tertanggal 18 Januari 2018 tentang Penetapan Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Pelayanan Publik pada unit kerja dilingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah khusus untuk Lembaga Penjaminan Mutu Penjaminan Pendidikan meliputi :

1. Layanan Data dan Informasi Mutu Pendidikan
2. Layanan Supervisi Mutu Pendidikan
3. Layanan Kerjasama Peningkatan Mutu Pendidikan
4. Layanan Permohonan Narasumber
5. Layanan Peminjaman Fasilitas Wisma

Layanan Data dan Informasi Pendidikan merupakan salah satu dari lima layanan yang harus diberikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) kepada semua pemangku kepentingan. Guna mewujudkan pemberian Pelayanan Prima kepada *stakeholder* dalam penyediaan Data dan Informasi Mutu Pendidikan diperlukan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan, sehingga Data dan Informasi Mutu Pendidikan mudah dicari, cepat, tepat, efektif, efisien, akuntabel, dan akurat. Untuk mewujudkan hal itu LPMP NTB telah melaksanakan Asistensi Ketatausahaan dan Kearsipan di lingkungan LPMP NTB yang

berlangsung selama satu hari. Peserta kegiatan ini adalah semua Aparatur Sipil Negara (ASN) pemangku jabatan Pengadministrasi Umum dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dari setiap seksi/subbag. Adapun narasumber kegiatan ini adalah dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Setditjen Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berjumlah 3 (tiga) orang.

Menurut salah seorang peserta Asistensi Ketatausahaan dan Kearsipan Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd. menjelaskan “ LPMP NTB melakukan Reformasi Birokrasi yang meliputi 6 (enam)) area perubahan yaitu : 1) Manajemen Perubahan, 2) Penataan Tatalaksana, 3) Penataan Manajemen SDM, 4), Penguatan Akuntabilitas, 5). Penguatan Pengawasan dan 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik . Area Penataan Tatalaksana, peran Ketatausahaan dan Kearsipan sangat strategis dalam menunjang keberhasilan program Reformasi Birokrasi khususnya Zone Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK). Dengan adanya revolusi industri 4.0 suka tidak suka digitalisasi disegala lini sangat diharapkan, E-Office salah satu contoh harus diimplemtasikan dan dikembangkan oleh seluruh warga LPMP NTB dalam pelaksanaan tugas sehingga program ZI-WBK berhasil”.

Oleh : IMMA 2020

INTERNALISASI REFORMASI BIROKRASI NILAI SAKIP LPMP PROVINSI NTB DARI BB NAIK JADI A



Sehubungan dengan evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) unit kerja di lingkungan Kemendikbud tahun 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Biro Perencanaan melakukan Kegiatan Visitasi dalam rangka Konfirmasi hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP tahun 2020. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai dari tanggal 12-14 November 2020 bertempat di Ruang Sidang Widyaiswara LPMP Provinsi NTB. Tim Visitasi terdiri 5 (lima) orang, terdiri dari Biro Perencanaan Setjen Kemendikbud 3 (tiga) orang dan dari Inspektorat Jenderal Kemendikbud berjumlah 2 (dua) orang.

Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) Bapak Mohamad Mustari, MM.,MA.,Ph.D., secara garis besar beliau mengharapkan agar Capaian Implementasi SAKIP LPMP NTB, sebagai akhir dari perodesasi Renstra 2015-2019 dapat mencapai hasil maksimal sehingga dapat berkontribusi positif mempertahankan nilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kemendikbud. Hal ini sejalan dengan upaya Tatakelola Akuntabilitas menuju penerapan Reformasi Birokrasi yang komprehensif. “ Internalisasi dari Reformasi Birokrasi Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) LPMP Prov. NTB dari BB naik menjadi A, ini prestasi yang sangat luar biasa”.

Lebih lanjut Mustari mengatakan, “ Perjalanan Panjang Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat (LPMP Provinsi NTB) tahun 2020 ditutup dengan Prestasi Gemilang terkait dengan Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi yang digulirkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan Reformasi Birokrasi yang meliputi 8 (delapan) area perubahan : 1) Manajemen Perubahan, 2) Penguatan Pengawasan, 3) Penguatan Akuntabilitas Kinerja, 4) Penguatan Kelembagaan, 5) Penguatan Tata Laksana, 6) Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur, 7)Penguatan Peraturan Perundang-undangan, dan 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Sesuai dengan area perubahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik perlu ada Sinergitas antara Standar Pelayanan dengan Reformasi Birokrasi sehingga Reformasi Birokrasi berhasil dengan baik diinstansi khususnya di LPMP Provinsi NTB, pada akhirnya kualitas pelayanan menjadi lebih baik (pelayanan prima) “.

Salah satu dari 8 (delapan) area perubahan dalam Reformasi Birokrasi Instansi adalah Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Akuntabilitas Kinerja Lembaga perlu dilakukan penguatan dalam kerangka instansi pemerintah menuju Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK), dan pada akhirnya akan menjadi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dilihat dilihat dari 5 (lima) komponen yaitu : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja.

Berdasarkan dari hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, tingkat penerapan **Akuntabilitas Kinerja LPMP Provinsi NTB Tahun 2020** masuk dalam kategori : **A** dengan nilai 86,05 dengan interpretasi : **Memuaskan, Memimpin Perubahan, Berkinerja Tinggi, dan Sangat Akuntabel**

Dengan rincian nilai sebagai berikut :

- | | |
|--|---------------|
| 1. Perencanaan Kinerja (30%) | : 26,979167 % |
| 2. Pengukuran Kinerja (25%) | : 22,19 % |
| 3. Pelaporan Kinerja (15%) | : 11,90 % |
| 4. Evaluasi Kinerja (10%) | : 7,48 % |
| 5. Penetapan Sasaran/Kinerja Organisasi (20%) | : 17,50 % |

Salah satu Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) LPMP Provinsi NTB, Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd. dengan hasil yang diraih oleh LPMP Provinsi NTB dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, tingkat penerapan Akuntabilitas Kinerja LPMP Provinsi NTB tahun 2020 masuk dalam **Kategori A**. Artinya Akuntabilitas Kinerja LPMP Provinsi NTB **Memuaskan, Memimpin Perubahan, Berkinerja Tinggi, dan Sangat Akuntabel**. LPMP Provinsi NTB tahun 2021 diharapkan akan meningkat kinerjanya dengan merealisasikan target-target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK). **Dampak Reformasi Birokrasi Nilai SAKIP LPMP Provinsi NTB dari kategori BB menjadi kategori A**. Semoga Tahun depan LPMP Provinsi NTB, nilai SAKIP masuk berkategori **AA** “, tutup Made.

Oleh : IMMA 2020

TUTUP 2020 LPMP PROVINSI NTB MENERIMA PENGHARGAAN ZI WBK



Sejak berdirinya Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat (LPMP Prov. NTB), mulai dari Balai Penataran Guru (BPG) Mataram, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan NTB (LPMP NTB), lembaga ini belum pernah menerima penghargaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK). Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) telah dicanangkan mulai tahun 2018, 2019, dan terakhir tahun 2020 oleh Mohamad Mustari, Ph.D., selaku Kepala LPMP Provinsi NTB. Penghargaan yang diperoleh dipenghujung tahun 2020 merupakan kado terindah buat seluruh warga LPMP Provinsi NTB yang tahun 2021 akan direorganisasi berubah nama menjadi Balai Besar Peningkatan Mutu Pendidikan (BBPMP). Prestasi yang diraih ini tidak terlepas dari dukungan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), dan tidak kalah pentingnya tenaga *Outsourcing*. Kepala LPMP Provinsi NTB sebagai Pemimpin Perubahan dan sebagai *Role Model* perannya sangat strategis dan penting dalam upaya selalu menegakkan integritas dan pemberian pelayanan prima dilembaga ini.

Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2020 secara luar jaringan (luring) dan dalam jaringan (daring) melalui *zoom cloud meeting*. Satuan kerja (satker) yang diusulkan untuk dinilai memperoleh Penghargaan ZI WBK/WBBM pada tahun 2020 sebanyak 3.691 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh satu) mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibanding tahun 2019 hanya 2.246 (dua ribu dua ratus empat puluh enam) satuan kerja. Fanel akhir yang dilakukan oleh Tim Penilai Nasional (TPN) dari Kementerian PAN RB dihasilkan 763 (tujuh ratus enam puluh tiga) satuan kerja berpredikat WBK/WBBM, terdiri 681 (enam ratus delapan puluh satu) berpredikat WBK dan 82 (delapan puluh dua) berpredikat WBBM.

Dilingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat (LPMP Provinsi NTB) Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2020 bertempat di Ruang Makan Melati, dihadiri oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dilingkungan LPMP Provinsi NTB, dan dari Media cetak. Hadir pula pegawai dari LPMP Provinsi Sumatera Barat yang sedang melaksanakan studi tiru sebanyak 8 (delapan) orang. Apresiasi dan Penganugerahan ZI WBK sekaligus dirangkaikan dengan Acara Syukuran atas diraihnya Predikat WBK oleh LPMP Provinsi NTB dan menyambut Tahun Baru 2021.

Kepala LPMP Provinsi NTB Mohamad Mustari, Ph.D dalam sambutannya menyampaikan beberapa hal terkait dengan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) yang telah dilakukan. “Keberhasilan LPMP Provinsi NTB meraih Predikat WBK tidak terlepas dari Komitmen Bersama antara Pimpinan dan seluruh warga LPMP Provinsi NTB, baik ASN, PPNPN dan Tenaga *Outsourcing*. Begitu juga Doa dan dukungan dari seluruh *stakeholder* baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penghargaan yang telah diterima mohon dijaga dan di pertahankan serta kalau bisa ditingkatkan. Kata kunci Reformasi Birokrasi adalah Integritas dan Tata kelola. Keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan harus tetap dipegang teguh walaupun banyak tekanan, goncangan, gangguan, dan godaan baik dari internal maupun eksternal organisasi. Piagam Penghargaan ZI WBK ini bukan merupakan tujuan utama dan akhir dalam Reformasi Birokrasi, tetapi yang paling utama adalah terjadinya perubahan *mind set* dan *culture set* sehingga terciptanya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta pemberian pelayanan terbaik kepada seluruh *stakeholder*”.

Menurut Mustari, “Kita semua harus mempunyai mimpi. Dari mimpi-mimpi itu kita berharap akan menjadi suatu kenyataan. Mimpi itu harus diraih melalui usaha dan doa. Tanpa usaha dan doa mustahil semua mimpi itu bisa kita wujudkan. Dalam meraih mimpi terkadang banyak rintangan dan halangan, tetapi kita harus tetap berdiri tegak untuk menggapai mimpi-mimpi indah itu. Warga LPMP Provinsi NTB semuanya bermimpi untuk meraih Penghargaan ZI WBK, akhirnya mimpi itu menjadi kenyataan. Selamat dan sukses untuk seluruh warga yang telah mewujudkan mimpi-mimpi indah ini. Ini merupakan kado terindah di penghujung tahun 2020 buat kita semua”.



Ketua Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZIWBK) Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd memberikan Apresiasi dan Penghargaan Pertama kepada Kepala LPMP Provinsi NTB sebagai Pemimpin Perubahan dan Role Model atas dukungan dalam pembangunan ZI WBK ini. Kedua kepada Tim Pembangunan ZI WBK yang telah bersusah payah menyiapkan dokumen pendukung selama proses pembangunan ZI WBK, serta seluruh ASN dan PPNPN yang telah berpartisipasi aktif untuk selalu mereformasi diri baik *mind set* maupun *culture set*.

Menurut Made “ Penghargaan Predikat ZI WBK yang diterima dari MenPAN RB berkat Kerja Keras, Kerja Cerdas, dan Kerja Ikhlas yang telah dilakukan oleh seluruh warga LPMP Provinsi NTB. Prestasi tahun 2019 berupa Penghargaan atas Pengelolaan Anggaran Terbaik II, Kinerja Satuan Pengawasan Intern (SPI) Terbaik III, Kualitas Pelayanan Unit Layanan Terpadu (ULT) UPT Kemendikbud didaerah Terbaik I, dan Admin Medos Terbaik merupakan hasil nyata bahwa LPMP Provinsi NTB telah

melaksanakan Reformasi Birokrasi. Untuk mendapatkan Penghargaan ZI WBK tidak begitu mudah, apalagi dimasa Covid-19 ini. LPMP Provinsi NTB harus berjuang dan bersaing dengan 3.691 (tiga ribu enam ratus Sembilan puluh satu) satuan kerja dari seluruh Indonesia. Penilaian yang dilakukan oleh TPN dilakukan secara berjenjang mulai dari administrasi, suvey eksternal secara on line, presentasi dan wawancara, clearant dengan KPK dan Ombudsman RI dan terakhir melalui Fanel akhir dengan seluruh Tim Penilai Nasional (TPN). Selamat dan Sukses untuk LPMP Provinsi NTB “.

Oleh : IMMA 2020



LPMP PROVINSI NTB MENUJU UNIT KERJA PELAYANAN BERPREDIKAT WBBM



Dipenghujung tahun 2020 Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat (LPMP Provinsi NTB) menorehkan prestasi gemilang sebagai salah satu Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Untuk mendapatkan penghargaan WBK itu LPMP Provinsi NTB harus bersaing dengan 3.691 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh satu) unit kerja dari seluruh Indonesia, 70 (tujuh puluh) unit kerja Kementerian/lembaga, 20 (dua puluh) unit kerja Pemerintah Propinsi dan 161 (seratus enam puluh satu) unit kerja Pemerintah kabupaten/kota. Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (KemenPAN RB) diserahkan pada tanggal 21 Desember 2020 melalui dalam jaringan (daring) *zoom cloud meeting*.

Reformasi birokrasi yang digulirkan oleh pemerintah diharapkan agar unit kerja (LPMP Provinsi NTB) bebas dari korupsi, kolusi, dan neponisme (KKN). Yang tidak kalah pentingnya adalah agar unit kerja bisa memberikan pelayanan prima kepada Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Guru, Pemerintah Daerah dan seluruh *stakeholder* lainnya. Zona Integritas berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dambaan seluruh unit kerja pelayanan. Dengan Visi Indonesia Maju, diharapkan Indonesia semakin maju dan bisa bersaing dengan negara-negara lain diseluruh dunia.



Menurut salah satu Koordinator fungsi Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd. (Koordinator fungsi Pemetaan Mutu dan Supervisi), “LPMP Provinsi NTB setelah mendapatkan penghargaan sebagai salah satu unit kerja pelayanan berpredikat WBK harus bisa mempertahankan predikat tersebut bahkan harus meningkatkan kinerjanya sehingga menjadi unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Unit kerja yang mengiginkan sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) harus terus mempertahankan Integritas dan memberikan pelayanan prima kepada seluruh *stakeholder* baik internal maupun eksternal organisasi. LPMP Provinsi NTB harus tetap *survive*. Ditunjuk ataupun tidak oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam mendapatkan predikat WBBM, LPMP Provinsi NTB harus terus memacu dan memicu diri untuk berbenah dan membuat inovasi-inovasi dalam pemberian pelayanan”.

Lebih jauh Made mengungkapkan “Inovasi-inovasi yang telah dihasilkan pada tahun 2020 oleh Tim Agen Perubahan antara lain Sajian Unit Layanan Terpadu Keliling (Suling), Akselerasi Mutu Pendidikan Berkolaborasi (Ampibi), Sebaran Sekolah Model (Sekam), Verifikasi Sekolah Model (Si KOBO), Pondok Literasi (Polisi), dan Kampanye Anti Korupsi Melalui On Line (Kak Melon). Inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh LPMP Provinsi NTB berbeda dengan inovasi dari unit kerja yang lainnya, itulah sebagai salah satu indikator yang membawanya memperoleh predikat WBK. LPMP Provinsi NTB yang akan bergabung dengan BPPaud Dikmas NTB menjadi Balai Besar Peningkatan Mutu Pendidikan (BBPMP) akan bersama-sama membangun Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pondasi yang kuat dengan telah diterimanya penghargaan WBK oleh LPMP Provinsi NTB dan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal dari BPPaud Dikmas NTB diharapkan BBPMP bisa memperoleh penghargaan sebagai unit kerja pelayanan berpredikat WBBM”.

Kepala LPMP Provinsi NTB Mohamad Mustari, Ph.D menegaskan “Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran untuk mejunjung tinggi integritas dan selalu memberikan pelayanan dengan prima kepada *stakeholder* jangan sampai memudar. Penghargaan yang diterima bukan satu-satunya tujuan akhir dalam reformasi birokrasi tetapi lebih dari itu. Integritas dan pelayanan prima yang diberikan akan terus diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masyarakat merasa puas menerima pelayanan dari LPMP Provinsi NTB. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditahun 2021 diharapkan akan lebih meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dengan nilai 90.332 kategori sangat baik”.

“Kami atas nama Manajemen LPMP Provinsi NTB memberikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pegawai, Tim Pembangunan ZI WBK atas kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas yang dilakukan sehingga memperoleh penghargaan WBK, khusus kepada Dra. Hj. Sri Sukriyani selaku Koordinator Manajemen Perubahan, Dra. Hj. Sudiati Prihatiningrum Koordinator Penguatan Pengawasan, Drs. Sakban Koordinator Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, I Ketut Budiarti, SKM. Koordinator Penataan Tatalaksana, Hj. Lilies Miningrum, SE. Koordinator Penataan Sistem Manajemen SDM, dan Ahmad Sahid, S.Pd.,M.Pd. selaku Koordinator Penguatan Akuntabilitas. Disamping itu apresiasi dan penghargaan juga diberikan kepada Ketua Pembangunan ZI WBK Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd. dan Ahlun Mariani, S.Si. selaku Koordinator Tim Sekretariat. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa memberikan keberkahan kita semua. Nilai SAKIP LPMP Provinsi NTB tahun 2020 mengalami kenaikan dari BB menjadi A nilai 80.21 dengan interpretasi Memuaskan, Memimpin perubahan, Berkinerja tinggi, dan Sangat akuntabel. Kami berdoa nilai SAKIP LPMP Provinsi NTB ditahun 2021 akan mengalami peningkatan, sehingga diharapkan akan menjadi salah satu indikator dalam penilaian unit kerja pelayanan berpredikat WBBM. Pengalaman dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK), LPMP Provinsi NTB Siap menuju unit kerja pelayanan berpredikat WBBM melalui peningkatan kualitas pelayanan”, pungkas Mustari.

Oleh : IMMA 21

BEKERJA ADALAH IBADAH
(Refleksi Spiritual dan Semangat Meraih WBBM)
OLEH: Muhammad Idrus, M.Ag



Setiap aparatur sipil negara (ASN) dalam beraktivitas dan berkarya menjalankan tupoksi lembaga pemerintah wajib memegang teguh ideologi Pancasila dan memelihara serta menjunjung tinggi etika yang luhur seperti yang tercantum pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Perwujudan sikap dan etika ASN itu dibuktikan dengan sumpah jabatan serta komitmennya untuk melaksanakan tugas dan fungsi dari instansi pemerintah atau unit kerja masing-masing. Sebagai salah satu syarat moril agar dapat mencerminkan perilaku ASN yang baik, takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, maka dibutuhkan ilmu pengetahuan yang cukup dan kecakapan bekerja yang handal, baik yang telah diperoleh dari bangku sekolah/akademik, pengalaman diklat-*workshop*, *benchmarking* (studi tiru), magang maupun pembinaan mental rohani keagamaan.

Pada tataran normativitas keagamaan khususnya ajaran Islam, dimensi bekerja tergolong merupakan eksistensi amal sholeh yang dihitung sebagai bentuk ibadah baik secara tertentu maupun umum. Jika bekerja itu dimaksudkan/diniatkan untuk mencapai tujuan memperoleh kebaikan dan kemuliaan bagi seseorang, keluarga dan masyarakat atau lainnya dari Allah SWT maka akan bernilai ibadah dan tentunya mendatangkan pahala dan keberkahan dalam hidupnya. Sebaliknya, jika bekerja hanya ditujukan untuk kebahagiaan dunia semata, maka yang didapatkan seperti apa yang ditunjukkan tersebut. Artinya, tidak memiliki nilai spiritual yang langsung sebagai bukti ketaatan serta kesyukuran kepada Sang Maha Pencipta alam semesta. Itulah sebabnya maka di setiap awal, dalam proses dan akhir aktivitas bekerja seorang hamba, diajarkan untuk selalu berdo'a serta mengingat akan Kuasa Sang Maha Pencipta atas segala sesuatu. Hal tersebut sangat dianjurkan untuk menjaga hubungan seseorang hamba dengan Yang Maha Kuasa serta sekaligus menambah

kesadaran akan bahwa seluruh usaha/ikhtiar yang diupayakan seorang hamba Allah karena disebabkan izin dan kuasanya. Dengan demikian seorang hamba Allah dalam bekerja di berbagai sektor manapun tidak akan pernah putus harapan terhadap Yang Maha Kuasa karena akhir dari upayanya akan dikembalikan kepada takdir/keputusanNYA. Sang Maha Kuasa lah yang akan menilai dan memberi ganjaran dari berbagai kualitas ikhtiar hamba-hambanya baik sejak ia merencanakan maupun saat implementasinya. Apapun hasil akhirnya, baik yang dianggap berhasil maupun sebaliknya oleh hamba harus menambah kesadaran dan kesyukuran tentang keyakinannya kepada Kemahakuasaan Allah SWT. Oleh karena itu, kedalaman pengetahuan akan keyakinan kepadanya adalah aspek sangat penting dalam hal ini.

Di samping itu, dalam pandangan Islam juga sangatlah dianjurkan seseorang mengamalkan budaya bekerja yang unggul dan sungguh-sungguh atau dalam istilah kekinian disebut produktif dan professional. Dalam sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani disampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang lebih kurang artinya : *“sesungguhnya Allah SWT mencintai seseorang yang apabila bekerja, ia mengerjakannya dengan sungguh-sungguh”*. Dengan demikian, bekerja dengan sebaik-baiknya adalah merupakan ciri-ciri yang dapat memudahkan seorang hamba mendapatkan ridha ilahy dan mendatangkan keberkahan yang sangat bermanfaat bagi kebaikan sesama. Dalam kitab suci al-Qur’an surat *al-Bayyinah* Ayat 7 yang lebih kurang artinya: *“sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan pekerjaan yang baik, mereka itu adalah sebaik-baik mahluk”*.

Pada tataran historis dan sosiologis, bekerja bagi seorang ASN di lingkungan LPMP NTB memerlukan sejumlah pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan sesuai bidang tugasnya. Misalnya, seorang analis kepegawaian akan membutuhkan pengetahuan tentang keberlakuan peraturan/ketetapan di bidang kepegawaian, beberapa prosedur standar dalam bidang kepegawaian baik berbasis aplikasi digital atau bukan, memiliki data dan pengalaman komunikasi konstruktif yang cukup tentang bagaimana tata kelola dari *hard skill* dan *soft skill* sejumlah pegawai agar dapat ditempatkan pada posisi yang sesuai sehingga di dalam lembaga itu dapat berperan secara optimal dan efektif. Penguasaan pengetahuan dan pengalaman seorang pegawai LPMP NTB seperti contoh di atas sangat penting dalam menjamin mutu aktivitas bekerja seseorang. Bermutunya aktivitas bekerja seorang pegawai dapat membawa kebaikan bagi banyak orang dan optimalisasi layanan pendidikan secara luas berkesinambungan.

Akhirnya, dari paparan 4 (empat) paragraf di atas dapat disimpulkan bahwa untuk dapat mengindikasikan aktivitas bekerja ASN sebagai bagian daripada ibadah kepada Yang Maha Kuasa, haruslah memiliki 3 (tiga) dimensi penting, yaitu dimensi berbangsa dan bernegara, dimensi keyakinan/spiritual dan dimensi kecakapan intelektual serta komunikasi sosial. Dalam terminologi (istilah) agama Islam dikenal dengan ***hablum minallah*** dan ***hablum minannaas***. Yang pertama adalah aspek keyakinan yang kokoh terhadap Kuasa Ilahiy. Sedangkan yang aspek kedua adalah kekuatan ikhtiar/upaya optimal manusia sesuai kecakapan yang dimiliki dan komunikasi sosialnya baik dalam bekerja dan beradaptasi dengan lingkungannya.

Dalam konteks bekerja di lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Nusa Tenggara Barat, ASN maupun PPNPN memiliki beragam tugas dan fungsi masing-masing. Beragamnya tugas dan fungsinya itu bermuara pada tujuan meningkatnya mutu pendidikan di wilayah Nusa Tenggara Barat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dibutuhkan peran serta aktif dan bermutu dari SDM LPMP NTB, baik secara individu maupun kolektif. Uraian tugas yang dilaksanakan dengan niat ibadah, penuh komitmen dan tanggung jawab akan melahirkan hasil kerja yang produktif dan bermutu sehingga dapat memuaskan kebutuhan *stake holder* LPMP NTB sekaligus mendapatkan pahala yang berlipat ganda.

Kiranya dalam menghadapi masa pandemi Covid-19 di awal tahun 2021 ini, ASN dan PPNPN di lingkungan LPMP NTB telah merasakan betapa dahsyatnya wabah ini memporak-porandakan berbagai dimensi kehidupan manusia, baik dimensi religi, pendidikan, ekonomi, hubungan social-budaya dan pariwisata. Teknologi komunikasi untuk sementara menjadi pilihan perekat terhadap berbagai dimensi kehidupan manusia tersebut demi menjaga kesehatan dan nasib peradaban manusia secara massif berkelanjutan. Melalui raihan predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) di akhir tahun 2020, LPMP NTB bertekad untuk memberikan layanan yang terbaik kepada insan pendidikan dan *stake holder* terkait di Nusa Tenggara Barat. Lewat kegiatan *In House Training* (IHT) ke-2 di akhir tahun 2020, LPMP NTB dengan segala bentuk pengalamannya baik dalam memfasilitasi dan membangun kemitraan, bertekad optimis menjalin sinergitas yang kontinyu untuk meningkatkan mutu pendidikan di wilayah Nusa Tenggara Barat. Amanah dalam ikut berperan aktif dan berkesinambungan dalam meningkatkan mutu pendidikan ini dapat dimaknai sangat niscaya menjadi determinasi karena LPMP NTB ingin memberikan layanan yang bermutu dan terbaik, sekaligus menjadikannya sebagai ibadah kolektif kelembagaan. Selain itu, LPMP NTB yang secara geografis terdapat di Pulau Seribu Masjid ini bertekad dalam mutu layanannya juga untuk mewujudkan raihan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di tahun selanjutnya. Harapannya, mudah-mudahan tekad LPMP NTB ini dapat dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah SWT melalui perantara niat ibadah para ASN dan PPNPN yang kokoh dalam bekerja menjalankan tupoksi lembaga. ***Amiin Yaa Rabbal Alamiin,,,,,!!!***



Suasana Khusyu' Berdoa Peserta Upacara Hari Sumpah Pemuda Di Lapangan Tenis Belakang LPMP NTB



TESTIMONI-TESTIMONI



**“ Bersama Menjamin Mutu “
“ Melayani Sepenuh Hati “**



TESTIMONI KADIS DIKBUD SE-NTB

**Kepala Dinas
Dikbud Prov. NTB (2019)**

H. Rusman, SH.,MH.

“LPMP NTB telah luar biasa melaksanakan Peningkatan Mutu Pendidikan, Spektakuler. Selamat dan Maju terus LPMP NTB untuk dunia pendidikan NTB”.





Sekdis Dikbud Prov. NTB

Drs. H. Muhtadi Hairi, M.Pd.

“ LPMP adalah mitra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB dalam menjaga mutu pendidikan terutama tenaga pendidikny”.



**Kepala Dinas Dikpora
Kabupaten Lombok Utara**

Dr. FAUZAN, M.Pd

Kerjasama dengan LPMP dalam hal peningkatan kompetensi Pengawas, kepala sekolah dan guru, memberi dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan di kabupaten Lombok Utara.

Terima kasih LPMP



Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram

H. Lalu Fatwir Uzali, M.Pd.

**“DIMANA ADA POLUSI
LPMP ADALAH SOLUSI.**

**Kalau ada masalah
pendidikan, Kehadiran
LPMP dapat
memperjelas, memberi
pencerahan dan memberi
solusi terbaik”.**



Kepala Dinas Dikbud Kab.Loteng

H. Sumum, S.Pd., M.Pd.

**“Terima kasih kepada LPMP
yang telah memunculkan
Program SPMI. SPMI sangat
bermanfaat dalam rangka
peningkatan mutu
pendidikan NTB,
khususnya di Kabupaten
Lombok Tengah”.**



**Kepala Dinas
Dikbud Kab. Sumbawa**

H. Sahril, S.Pd., M.Pd.

“Sumbawa Hebat dan Bermartabat berkat Kerja Sama dengan LPMP NTB sebagai Mitra dalam Mengelola Pendidikan”.



**Kepala Dinas
Dikbud Kab. Sumawa Barat**

Drs. H. Mukhlis, M.Si.

“Sejumlah kegiatan kemitraan antara LPMP NTB dan Dinas DIKBUD Kab. Sumbawa Barat yang telah dilaksanakan, seperti Pemetaan Mutu Pendidikan, SPMI, serta Diklat bagi Pengawas, Kepala Sekolah dan guru, merupakan bentuk kesungguhan dalam mewujudkan pendidikan NTB yang berkemajuan. Terima kasih atas kerjasamanya...”



**Kepala Dinas
Dikbudpora Kab. Bima**

ZUNAIDIN, S.Sos., MM.

“Keberadaan LPMP memberi kontribusi besar bagi usaha - usaha mewujudkan pendidikan daerah yang bermutu. Karena itu, lembaga ini harus terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah di masa - masa yang akan datang”.



Ketua BAN-S/M Prov. NTB

Drs. H. Suyanto, M.Ed.

Dalam rangka Penjaminan Mutu Pendidikan (*Quality Assurance*), LPMP memiliki peran sentral dalam memetakan capaian setiap Satuan Pendidikan terhadap “pemenuhan” Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang merupakan salah satu tolok ukur mutu Pendidikan. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) Provinsi yang berkantor di LPMP merupakan partner yang sangat sinerjis dalam upaya penjaminan mutu melalui “Penilaian Kinerja” terhadap satuan Pendidikan. LPMP mengaudit pemenuhan (*Compliance*), sedangkan BAN-S/M mengaudit kinerja (*Performance*). Dinas Pendidikan punya kewajiban menindak lanjuti “rekomendasi” (*Diagnostic*) yang diberikan oleh LPMP dan BAN-S/M.



**Pengawas
Dikbud Kab. Loteng**

Hj. Siti Aisyah, S.Pd.,M.Pd.

**“Terima kasih LPMP NTB
sudah memberi
kesempatan untuk
belajar IT. LPMP MAJU
TERUS.... TETAP JAYA
DENGAN INOVASI YANG
BARU”**



**Guru SDN 2 Karang Bayan
Dikbud Kab. Lobar**

RUSLAN AFANDI, S.Pd

“Dengan adanya pelatihan seperti ini jadi tambah wawasan dan tambah kenalan..semoga kedepan kita bisa terus berdiskusi agar pelayanan pendidikan semakin bermutu..tetap semangat kita pasti bisa..”



**PENGAWAS SMP
DINAS DIKBD
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Masyhudi, S.Pd., M.Pd.

“Bimtek Pengelolaan pembelajaran pada masa BDR secara online yang diselenggarakan oleh LPMP memberikan pengalaman baru yang sangat berharga dan menyenangkan. Walaupun diselenggarakan dalam suasana puasa Ramadhan, kegiatan berlangsung semangat dan penuh keakraban”.



**Guru
SDN 1 Montong Tangi, Kab. Lotim**

Asrol Uyuni, S.Pd.

“Bimtek Pengelolaan Pembelajaran pada masa BDR dengan jalur daring menjadi salah satu solusi inovatif dimasa mewabahnya COVID-19”



**Kepala Sekolah
SDN 2 Sengkol, Kab.Loteng**

Lalu Muhzar, S.Pd.

“Ditengah wabah Covid-19 kami dapat mengikuti Bimtek Pengelolaan Pembelajaran pada masa BDR. Materi Bimteknya sangat luar biasa, Kita Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah mari kita manfaatkan hasil Bimtek ini. Semoga LPMP NTB tetap jaya, BISA TIDAK BISA HARUS BISA”



Kepala SDN 5 Sila, Kab.Bima
H. Abas, S.Pd. M.Pd

" Bimtek online pengelolaan pembelajaran pada masa BDR Tahun 2020 sangat memudahkan guru mengaplikasikan Belajar Dari Rumah (BDR) di masa pandemi covid-19 "



Guru
SDN 5 Pemongkong, Kab. Lotim

Agil Ariwibowo, S.Pd.Gr.

"Bimtek Daring BDR mampu menjawab tantangan pendidikan era 4.0 dan menjadi terobosan inovatif ditengah pandemi yang sedang merajalela. Semoga kedepan LPMP NTB lebih sering mengadakan pelatihan berbasis daring serta menyediakan Portal (*website*) tersendiri khusus pelatihan berbasis daring".



**Kepala
SDN 1 Dasan Tereng, Kab. Lobar**

Nuraini, S.Pd.SD

**“LPMP NTB, SELALU
TERDEPAN, PEKA DAN
TANGGAP TERHADAP
PENINGKATAN
KOMPETENSI GURU.
MELAYANI SEPENUH
HATI”.**



**Guru
SDN 2 Tente, Woha, Kab. Bima**

Nurbaya, S.Pd.

**“Luar Biasa....bisa
mendaftar Bimtek
online melalui
website, semoga
menjadi webinar
sejati”.**

Nama : NURBAYA, S.Pd

Jabatan : Guru Honor

Asal Sekolah : SDN 2 Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima

“Luar Biasa... bisa mendaftar bimtek Online melalui website ipnastb, semoga menjadi webinar sejati”



**Guru PAI-BP
SDN 1 Aikmel, Kab Lombok Timur
Naswan, M.Pd.**

"Bimbingan Teknis (BIMTEK) daring Belajar Dari Rumah (BDR) yang diselenggarakan oleh LPMP NTB merupakan program inovasi didalam memberikan layanan terbaik kepada stkholder pendidikan di NTB terutama stkholder ujung tombak (Guru, kepala sekolah dan pengawas) dan membrikan pengalaman dan pemahaman bahkan jalan keluar terbaik yang luar biasa di tengah-tengah guru mengalami kebingungan untuk mencari formulasi pembelajaran dalam jaringan (Daring) pada masa penanggngan pandemi covid 19, sehingga guru dapat melaksanakan pembelajaran "DIMANA SAJA, KAPAN SAJA DAN DIRUMAH SAJA" terimakasih LPMP NTB atas dedikasi dan inovasinya a untuk memberikan pelayanan yang prima selama Bimtek danSemuanya ini dipersembahkan untuk NTB Gemilang"



**Kepala
SDN 4 Akar-Akar
B. Nurhaenun, S.Pd.**

"Saya sangat merasa bersyukur bisa ikut Bimtek online baru sadar kalo IT sangat penting apa lagi dalam kondisi saat ini. Terima kasih LPMP"



**Guru
SDN 9 Pemongkong, Lotim**

Hairul Amri, S.Pd.Gr.

“Bimtek Pengelolaan Pembelajaran pada masa Belajar dari Rumah Sangat Inovatif, semoga bisa membuat Guru, Pengawas, dan Kepala Sekolah lebih produktif di masa pandemi COVID-19”.



**Guru
SDN 3 Teros, Kab. Lotim**

Baiq Suriatun, S.Pd.

“ Bimtek *online* dapat menjadi modal dalam peningkatan mutu pendidikan ditengah wabah yang sedang melanda”.



**Guru Kelas
SDN 2 Gili Indah, KLU**

I Gst.Ngr.Prayoga Cendana Putra, S.Pd.

**“ Bimtek kali ini sangat
SMART, HIGH TECH dan
HAPPY “**



**Guru
SDN 1 Lenek, Kab. Lotim**

Wasitatus Saimah

“LPMP NTB dalam situasi dan kondisi pandemi ini telah menunjukkan kiprahnya yang nyata dan sangat bermanfaat bagi kami guru NTB dibuktikan dengan aksi melakukan pelatihan yang sangat kami butuhkan dan memberikan Pelayanan Prima baik dalam pendaftaran maupun pelaksanaannya. Semoga tetap responsif dan semakin maju LPMP NTB”



**Pengawas SMP
Dikbudpora Kab. Bima**

Salahuddin, S.PD.,M.Ed.

“Pandemi Covid-19 telah membatasi ruang gerak guru dan siswa untuk melakukan proses pembelajaran.

Bimtek daring yang dilaksanakan oleh LPMP NTB adalah langkah cerdas dalam menjamin mutu pendidikan di NTB ditengah pandemi Covid-19”



**Guru
SDN 5 Aikmel, Kab. Lotim**

Harmain, S.Pd.

“Upaya LPMP NTB dalam menjawab tantangan keadaan dalam dunia pendidikan NTB sangatlah cepat dan tepat, dengan Pelayanan Prima... Angkat Topi untuk LPMP NTB semoga tetap menghadirkan terobosan2 yang berkemajuan sesuai tuntutan jaman”.



**Pengawas SMP
Dinas Dikbudpora, Kab. Bima**

Raisuddin

“Bimtek Pengelolaan Pembelajaran pada masa BDR sangat luar biasa. Sungguh bermanfaat bagi kami. Selamat dan terima kasih kepada LPMP NTB atas kegiatan ini. Sukses dan Jaya selalu LPMP NTB”.



**Guru
SDN 1 Sukadana, KLU**

Baiq Rosita Dewi, S.Pd.M.Pd.

“Terima kasih kepada pihak LPMP untuk semua ilmunya, ini adalah pelatihan kedua yang saya ikuti, semua ilmu yang saya dapat benar2 sangat bermanfaat dan bisa digunakan dalam proses pembelajaran ditengah pandemi Covid-19”



**Guru
SDN 3 Bilok Petung, Lotim**

Muchtarom Desiyanto, S.Pd.Gr.

“Semoga Bimtek *online* seperti ini bisa diadakan walaupun kelak tidak ada Covid-19 ini, karena lebih efektif, efisien, dan menghemat biaya tanpa mengurangi ilmu yang diberikan”



**Guru
SDN 2 Bilok Petung, Lotim**

Kadek Suardijaya, S.Pd.Gr.

“Bimtek Pengelolaan Pembelajaran BDR LPMP NTB adalah solusi jitu untuk meningkatkan kompetensi Guru dalam mengelola kegiatan pembelajaran pada masa pandemi Covid-19. Semoga dengan kegiatan ini kami lebih berinovasi”.



**Guru
SDN 2 Tente Kab. Bima**

Nurbaya, S.Pd.

“Semoga Bimtek ini dapat melahirkan para pendidik handal dalam masa Belajar Dari Rumah di tengah Wabah Covid-19 ini. Yang jelas saya merasa sangat puas dengan Ilmu yang saya dapatkan”.



**Guru
SDN 1 Pemenang Timur, KLU**

Ni Putu Irawanti Novitarini, S.Pd.

“Bimtek BDR secara online yang diselenggarakan oleh LPMP NTB sangat bermanfaat untuk menambah wawasan guru terutama saat wabah Covid-19 ini”



**Guru Kelas
SDN Durian**

Hiltin Alwa Hidayanti

“Bimtek ini sangat bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi. Banyak hal-hal yang baru saya dapat dalam kegiatan ini, seperti pemanfaatan *ZOOM Meeting*, penggunaan *Google Clasroom*, juga bagaimana menyusun modul BDR. Terima kasih. LPMP NTB... Jaya Selalu”.



GURU

SDN 1 OBEL-OBEL

GALIH PAMULA SARI, S.Pd.

“Materi tentang Zoom Meeting, Google Class Room, Modul masa BDR tersampaikan dengan jelas. Saya tak hanya membayangkan dapat melakukan Zoom dan GC seperti teman seprofesi saya yang berdinasi di kota-kota besar dan modern. Saya yang ditempat terpencilpun kini pernah mendapat pengalaman itu. Terimakasih LPMP NTB.”



**Guru
SDN 1 Sukadana**

Jamatisnawan, S.Pd.

“Pelatihan ini OK BANGET. Sangat menarik dan bermanfaat, karena panitia bekerja maksimal. Banyak hal penting dalam Bimtek daring ini yang seharusnya diketahui oleh Guru. Paparan Materi dari Narasumber dapat dipahami oleh peserta dengan SANGAT BAIK”.



LPMP NTB

Jl. Panji Tilarnegara No.8, Taman Sari, Ampenan,
Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83114
Telepon: (0370) 631088



www.lpmpntb.kemdikbud.go.id



LPMP NTB



@lpmpntb



@lpmpnusatenggarabarat

Instagram



lpmp ntb



ULT LPMP NTB
0811 3906 669



SEHAT
TANPA KORUPSI